

R K P D

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Rawas

2022



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWASTAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Menetapkan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.
- (2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja pemerintah Kabupaten.

BAB II

SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

Naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD
RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 30 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 15

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i-iii
DAFTAR TABEL	iv-ix
DAFTAR GRAFIK	x-xii
DAFTAR GAMBAR	xiii-xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.11
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.15
1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I.15
1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2022	I.18
1.3.3 Prinsip dan Pendekatan	I.19
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I.22
1.4.1 Maksud	I.22
1.4.2 Tujuan	I.22
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2022.....	I.23
1.6 Inovasi	I.24
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II.1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	II.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.41
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.76
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2020 Sampai Dengan Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	II.78
2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Musi Rawas	II.78
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020 dan Realisasinya.....	II.80
2.2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan.....	II.83
2.2.4 Analisis Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas.....	II.95
2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas	II.100
2.4. Permasalahan Pembangunan dan Strategi Penanganan Masalah pada Tahun Berjalan	II.118
2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II.120

2.6.	Evaluasi Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020	II.136
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1	Analisis Perekonomian Global	III.2
3.1.2	Analisis Perekonomian Nasional	III.4
3.1.3	Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2022	III.8
3.1.4	Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2022 Akibat Pandemi Covid-19	III.12
3.1.5	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022.....	III.18
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas	III.21
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan daerah	III.22
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III.24
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.31
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022	IV.1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	IV.2
4.2.	Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV.4
4.3.	Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	IV.12
4.3.1	Telaah Terhadap RKP 2022.....	IV.12
4.3.2	Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	IV.14
4.3.3	Telaah Terhadap Pemenuhan Janji Kepala Daerah Pada Saat Kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.17
4.3.4	Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas	IV.24
4.3.5	Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya	IV.27
4.3.6	Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas	IV.29
4.3.7	Telaah Terhadap Isi Strategis	IV.32

4.4	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV.33
4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional tahun 2022	IV.73
4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	IV.101
4.7	Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan	IV.111
4.7.1	Strategi Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.....	IV.111
4.7.2	Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs.....	IV.113
4.7.3	Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)	IV.118
4.7.4	Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM	IV.120
4.8	Arah Pengembangan Kecamatan.....	IV.121
4.8.1	Kecamatan BTS Ulu	IV.121
4.8.2	Kecamatan Muara Kelingi.....	IV.125
4.8.3	Kecamatan Muara Lakitan.....	IV.128
4.8.4	Kecamatan Jayaloka.....	IV.131
4.8.5	Kecamatan Megang Sakti.....	IV.133
4.8.6	Kecamatan Sukakarya.....	IV.137
4.8.7	Kecamatan Tuah Negeri.....	IV.138
4.8.8	Kecamatan Tugumulyo.....	IV.141
4.8.9	Kecamatan Purwodadi.....	IV.144
4.8.10	Kecamatan STL Ulu Terawas.....	IV.145
4.8.11	Kecamatan Sumber Harta.....	IV.147
4.8.12	Kecamatan Muara Beliti.....	IV.148
4.8.13	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.....	IV.151
4.8.14	Kecamatan Selangit.....	IV.152

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ... VI.1

BAB VII PENUTUP VII.1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.....	I.19
Tabel 1.2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Yang Berorientasi Pada Proses	I.20
Tabel 1.3 Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Yang Berorientasi Pada Substansi	I.21
Tabel 2.1 Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas	II.2
Tabel 2.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Per 31 Desember 2020).....	II.9
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Per 31 Desember 2020)	II.10
Tabel 2.4 PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020 (Milyar Rupiah)	II.24
Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	II.25
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020.....	II.26
Tabel 2.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2020 (%)	II.27
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2020 (%).....	II.28
Tabel 2.9 Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Target Daerah	II.32
Tabel 2.10 Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.33
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 - 2020.....	II.45
Tabel 2.12 Daerah irigasi kabupaten Musi Rawas	II.49
Tabel 2.13 Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan	II.53
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016- 2020.....	II.56
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2020..	II.58
Tabel 2.16 Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020	II.59
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.61

Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kab.Musi Rawas Tahun 2016- 2019.....	II.67
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2016- 2020.....	II.68
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016- 2020	II.69
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2020	II.75
Tabel 2.22	Capain Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2019.....	II.76
Tabel 2.23	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	II.77
Tabel 2.24	Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi RawasTahun 2016-2020	II.77
Tabel 2.25	Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2016- 2020.....	II.78
Tabel 2.26	Capaian Indikator Makro Daerah RPJMD Musi Rawas Dari Tahun 2016-2020	II.79
Tabel 2.27	Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD Tahun 2020	II.80
Tabel 2.28	Permasalahan Pembangunan.....	II.100
Tabel 2.29	Permasalahan dan Isu Strategis.....	II.119
Tabel 2.30	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	II.120
Tabel 2.31	Alokasi Anggaran Tahun 2019.....	II.120
Tabel 2.32	Alokasi Anggaran Tahun 2020.....	II.121
Tabel 2.33	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	II.121
Tabel 2.34	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019	II.122
Tabel 2.35	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020	II.123
Tabel 2.36	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	II.124
Tabel 2.37	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	II.125
Tabel 2.38	Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2019.....	II.126
Tabel 2.39	Rincian Anggaran, Program Dan Kegiatan Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020.....	II.127

Tabel 2.40	Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019.....	II.129
Tabel 2.41	Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019	II.130
Tabel 2.42	Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020	II.131
Tabel 2.43	Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2020	II.132
Tabel 2.44	Alokasi Anggaran Tahun 2019.....	II.134
Tabel 2.45	Alokasi Anggaran Tahun 2020.....	II.135
Tabel 2.46	Rekapitulasi Anggaran Perjenis Belanja Dan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.....	II.139
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan 2022 (%)	III.10
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 – 2020 serta proyeksi pada Tahun 2021 dan 2022	III.14
Tabel 3.3	PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2021-2022 (milyar rupiah)	III.15
Tabel 3.4	Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	III.18
Tabel 3.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor-sektor Strategis	III.19
Tabel 3.6	Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi (Sisi pengeluaran)	III.20
Tabel 3.7	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022	III.23
Tabel 3.8	Rencana Struktur Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2021	III.26

Tabel 3.9	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	III.32
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.3
Tabel 4.3	Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.10
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2022 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Tema Pembangunan Musi rawas Tahun 2022	IV.11
Tabel 4.5	Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.21
Tabel 4.6	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.32
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.33
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Musi Rawas Tahun 2022	IV.36
Tabel 4.9	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.57
Tabel 4.10	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.57
Tabel 4.11	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.57
Tabel 4.12	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.58
Tabel 4.13	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.60
Tabel 4.14	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.61
Tabel 4.15	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.61
Tabel 4.16	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.61
Tabel 4.17	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.62
Tabel 4.18	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.62

Tabel 4.19	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.62
Tabel 4.20	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.64
Tabel 4.21	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.64
Tabel 4.22	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.64
Tabel 4.23	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.65
Tabel 4.24	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.65
Tabel 4.25	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.67
Tabel 4.26	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.67
Tabel 4.27	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.68
Tabel 4.28	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.68
Tabel 4.29	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.68
Tabel 4.30	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.69
Tabel 4.31	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.69
Tabel 4.32	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.70
Tabel 4.33	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.70
Tabel 4.34	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.70
Tabel 4.35	Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.72
Tabel 4.36	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional ..	IV.74
Tabel 4.37	Persentase Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Nasional	IV.101
Tabel 4.38	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022	IV.102
Tabel 4.39	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 Dengan RPJMD 2021-2026	IV.105
Tabel 4.40	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Dalam Merespon Program SDGs	IV.115

Tabel 4.41	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarustamaan Gender	IV.119
Tabel 4.42	Rencana Pembangunan di Kecamatan BTS Ulu Tahun Anggaran 2022	IV.121
Tabel 4.43	Rencana Pembangunan di Kecamatan Muara Kelingi Tahun Anggaran 2022	IV.125
Tabel 4.44	Rencana Pembangunan di Kecamatan Muara Lakitan Tahun Anggaran 2022	IV.128
Tabel 4.45	Rencana Pembangunan di Kecamatan Jayaloka Tahun Anggaran 2022	IV.131
Tabel 4.46	Rencana Pembangunan di Kecamatan Megang Sakti Tahun Anggaran 2022	IV.133
Tabel 4.47	Rencana Pembangunan di Kecamatan Sukakarya Tahun Anggaran 2022	IV.137
Tabel 4.48	Rencana Pembangunan di Kecamatan Tuah Negeri Tahun Anggaran 2022	IV.139
Tabel 4.49	Rencana Pembangunan di Kecamatan Tugumulyo Tahun Anggaran 2022	IV.141
Tabel 4.50	Rencana Pembangunan di Kecamatan Purwodadi Tahun Anggaran 2022	IV.144
Tabel 4.51	Rencana Pembangunan di Kecamatan STL Ulu Terawas Tahun Anggaran 2022	IV.145
Tabel 4.52	Rencana Pembangunan di Kecamatan Sumber Harta Tahun Anggaran 2022	IV.147
Tabel 4.53	Rencana Pembangunan di Kecamatan Muara Beliti Tahun Anggaran 2022	IV.148
Tabel 4.54	Rencana Pembangunan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tahun Anggaran 2022	IV.151
Tabel 4.55	Rencana Pembangunan di Kecamatan Selangit Tahun Anggaran 2022	IV.153
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	V.2
Tabel 5.2	Rencana Alokasi Pendanaan untuk penanganan Covid-19 Tahun 2022.....	V.5
Tabel 5.3	Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah Tahun 2022.....	V.27
Tabel 5.4	Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah Tahun 2022.....	V.28
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas	VI.1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas	VI.8

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas	II.3
Grafik 2.2 Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020	II.8
Grafik 2.3 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Per 31 Desember 2020)	II.10
Grafik 2.4 PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan	II.27
Grafik 2.5 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020 Berdasarkan Target pada RKPD	II.30
Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020	II.31
Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020	II.31
Grafik 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	II.32
Grafik 2.9 Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.34
Grafik 2.10 Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2020	II.35
Grafik 2.11 Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020	II.35
Grafik 2.12 Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020	II.36
Grafik 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	II.37
Grafik 2.14 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.37
Grafik 2.15 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2020.....	II.38
Grafik 2.16 Kedalaman Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020	II.39
Grafik 2.17 Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020	II.39
Grafik 2.18 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020	II.40
Grafik 2.19 Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II.42
Grafik 2.20 Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II.43

Grafik 2.21	Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II.44
Grafik 2.22	Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II.44
Grafik 2.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2020	II.46
Grafik 2.24	Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.48
Grafik 2.25	Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020	II.48
Grafik 2.26	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	II.54
Grafik 2.27	Air Minum	II.54
Grafik 2.28	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.55
Grafik 2.29	Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016-2020	II.55
Grafik 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2020	II.56
Grafik 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2020	II.57
Grafik 2.32	Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020	II.59
Grafik 2.33	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2016-2020	II.60
Grafik 2.34	Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II.60
Grafik 2.35	Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2016-2020	II.61
Grafik 2.36	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) % Tahun 2016-2020	II.62
Grafik 2.37	Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020	II.63
Grafik 2.38	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tahun 2016-2020	II.64
Grafik 2.39	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020	II.64
Grafik 2.40	Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2016-2020	II.65
Grafik 2.41	Jumlah nilai Investasi Berkala Nasional (Rp Triliun) Tahun 2016-2020	II.66
Grafik 2.42	Jumlah produksi ikan (ton) Tahun 2016-2020	II.69
Grafik 2.43	Kunjungan Wisata (Orang/Tahun) Tahun 2016-2020	II.70
Grafik 2.44	Produksi Padi Tahun 2016 – 2020	II.71
Grafik 2.45	Produksi Jagung Tahun 2016 – 2020	II.71
Grafik 2.46	Produksi Kedelai Tahun 2016-2020	II.72
Grafik 2.47	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2016-2020	II.73

Grafik 2.48	Prosentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020	II.73
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	III.3
Grafik 3.2	Inflasi Nasional Tahun 2014-2019 Dan Proyeksi Inflasi Tahun 2020-2022.....	III.5
Grafik 3.2	Inflasi Nasional Tahun 2014-2019 Dan Proyeksi Inflasi Tahun 2020-2022.....	III.5
Grafik 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022	III.17
Grafik 3.4	Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 dan Proyeksi Tahun 2021	III.17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021	I.4
Gambar 1.2 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	I.5
Gambar 1.3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	I.6
Gambar 1.4 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2021	I.7
Gambar 1.5 Forum Organisasi Perangkat Daerah	I.8
Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD 2022	I.9
Gambar 1.7 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD 2022	I.9
Gambar 1.8 Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD	I.11
Gambar 1.9 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD	I.15
Gambar 1.10 Kegiatan Sedekah Bumi sebagai salah satu wisata spiritual yang terus dijaga dan dilaksanakan secara rutin di Desa Srimulyo	I.27
Gambar 1.11 Aneka ragam kerajinan tangan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Srimulyo	I.27
Gambar 1.12 Pesona alam Desa Srimulyo	I.28
Gambar 1.13 Festival di Desa Srimulyo	I.28
Gambar 1.14 Salah satu gerai Uma Inovasi Selangit	I.30
Gambar 1.15 Sosialisasi kesehatan ibu hamil dan gizi anak-anak	I.32
Gambar 1.16 Kegiatan <i>door to door</i> Inovasi Getuk PeDe keseluruhan lapisan masyarakat kecamatan Muara Beliti	I.34
Gambar 1.17 Kegiatan Getuk PeDe di Era Pandemi Covid-19	I.34
Gambar 1.18 Inovasi Pelayanan PINDANG PAK TUWA	I.36
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas	II.2
Gambar 2.2 Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas ...	II.6
Gambar 2.3 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat	II.7
Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas	II.23
Gambar 2.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas ..	II.51
Gambar 2.6 Analisis kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota di Sumsel, 2020	II.96

Gambar 2.7	Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020	II.97
Gambar 2.8	Analisis Kuadran Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020	II.98
Gambar 2.9	Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020	II.99
Gambar 4.1	Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas	IV.30
Gambar 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV.73

KATA PENGANTAR

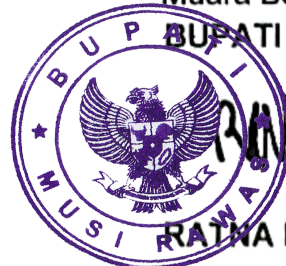
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya, kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2022, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2001-2025 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, serta mengacu pada Rancangan RKP tahun 2022 dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Sesuai fungsinya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran R-APBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022. Untuk selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/ memaduserasikan rencana proram dan kegiatan hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2022.

Muara Beliti, Juni 2021

The official stamp of the Bupati of Musi Rawas is a circular emblem. It features a central Garuda (mythological bird) with spread wings, perched on a banner. The words "BUPATI MUSI RAWAS" are inscribed around the perimeter of the circle. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "RATNA MACHMUD" is printed in bold, black, uppercase letters.

RATNA MACHMUD

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD, RKPD Provinsi Sumatera Selatan, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 telah memasuki tahun kedua periode RPJMD tahun 2021-2026. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020, maka RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 dalam proses penyusunan dan diharapkan akan selesai 6(enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih, oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024, serta Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Setelah diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam

menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus berganti menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan perhatian dan daya upaya optimal secara sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang;

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;

11) Pelaksanaan forum konsultasi publik;

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2021 dengan peserta dari stakeholder pelaku pembangunan yaitu, perwakilan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia akademisi serta dari organisasi perangkat daerah.

Gambar 1.1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021



Gambar 1.2. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022



12) Selanjutnya, melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan;
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Musrenbang di masing-masing Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk

membahas usulan kegiatan di tingkat desa untuk menghasilkan kesepakatan akan yang diusulkan di musrenbang kecamatan.

Gambar 1.3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa



4. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu I sampai dengan minggu III bulan Februari 2021. Musrenbang di masing-masing Kecamatan diawali dengan pelaksanaan pramusrenbang, dimana pada pelaksanaan pramusrenbang dilakukan pembahasan trilateral desk antara perwakilan desa, pihak kecamatan serta OPD. Dalam trilateral desk dilakukan penentuan usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan verifikasi dari OPD. Hasil kesepakatan trilateral desk tersebut yang dibawa pada waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk disepakati oleh para pihak.

Gambar 1.4. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2021



5. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD

6. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah

Forum Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 23-27 Maret 2021. Proses yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas pada musrenbang.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP

Gambar 1.5 Forum Organisasi Perangkat Daerah



7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara OPD, Bappeda Kabupaten Musi Rawas dengan stakeholder pembangunan.

Gambar 1.6 Musrenbang RKPD Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD 2022



Gambar 1.7 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD 2022



8. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

9. Fasilitasi rancangan akhir RKPD

Memenuhi amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 102 yang mengatur dan menerangkan proses dan tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota, maka rancangan akhir RKPD Kabupaten Musi Rawas diserahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijadikan bahan perbaikan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10 Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas setelah dilaksanakan fasilitasi RKPD Kabupaten Musi Rawas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan Kabupaten Musi Rawas dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Pusat.

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

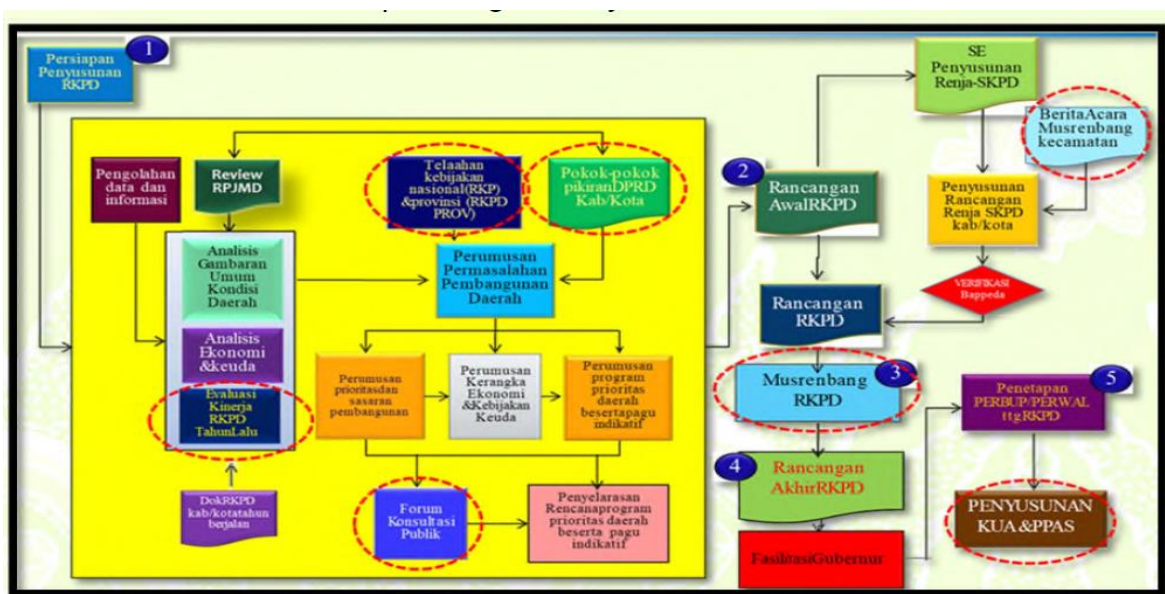
Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional,

RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan ke-2 (dua) RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026. Selanjutnya, akan digunakan sebagai landasan penyusunan rancangan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

. Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.8

Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

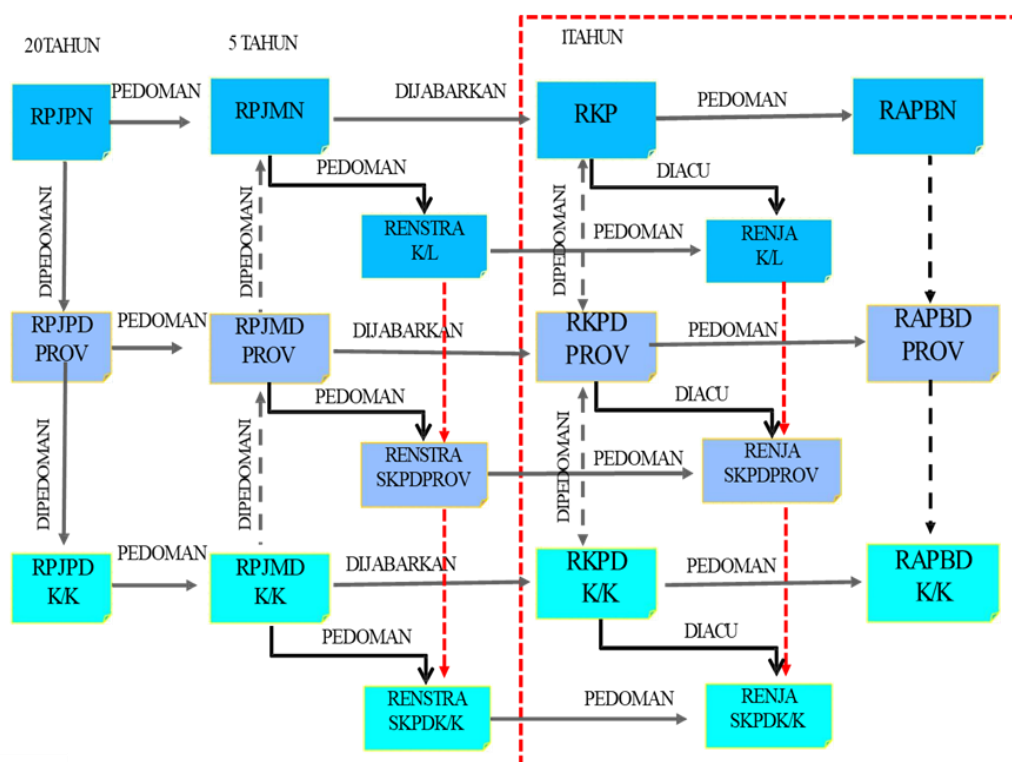
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1.9 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Secara lengkap penjelasan masing-masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diacu untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023

Penyusunan RKPD Tahun 2022 memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas akan mendukung kebijakan pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 mengacu dokumen RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 masuk dalam tahap ke empat (2021-2025) RPJP 2005-2025, pada tahap ke empat ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi, selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan nasional. Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi dapat diwujudkan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan penjabaran Tahun ke dua RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021.

6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Renstra OPD tersebut sebagai pedoman penyusunan Renja OPD Tahun 2022.

8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

RKPD Tahun 2022 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen Renja OPD Tahun 2022 sebagai rencana pembangunan tahunan di tingkat perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata perangkat daerah.

1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Musi Rawas disusun dengan 4 (empat) agenda pembahasan substansi, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada proses penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahapan awal yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi rancangan awal, melalui Arahan Bupati Musi Rawas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Musi Rawas dan Arahan Bupati Musi Rawas kepada OPD. Arahan Bupati Musi Rawas tersebut selanjutnya menjadi bahan rancangan awal (rancangan teknokratis) RKPD yang dikonsultasikan kepada publik melalui Forum Konsultasi Publik.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, serta rancangan program/kegiatan OPD. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2021 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan bagian dari rumusan finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Produk rancangan akhir RKPD disusun mengacu dari hasil pelaksanaan forum-forum yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses Musrenbang Kabupaten Musi Rawas dan sudah memuat hasil kesepakatan pembahasan substansi termasuk didalamnya rumusan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

4. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD 2022 mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Sumatera Selatan, RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

1.3.3 Prinsip dan Pendekatan

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 disusun oleh Pemerintah Daerah secara swakelola dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai perencanaan daerah dan didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkannya.

Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 menggunakan prinsip sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

PRINSIP	INDIKATOR
Keterkaitan	Tersedianya penjelasan mengenai keterkaitan antara Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten RKPD dengan RPJMD, RPJP, RKP, RKPD provinsi serta program prioritas daerah dengan propinsi dan Nasional.
Kolaboratif	Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan.
Kewilayahan	• Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. • Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Detil konfigurasi orientasi pendekatan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
Yang Berorientasi Pada Proses

PENDEKATAN	PARAMETER
Teknokratik	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.
Partisipatif	Dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Politik	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD
	Saran dan pendapat DPRD yang disampaikan melalui Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022
Atas-bawah (<i>topdown</i>)	Sinkronisasi dan sinergitas Prioritas Daerah Dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas Nasional dalam RKP 2022 dan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan
Bawah-atas (<i>bottom-up</i>)	Sinkronisasi usulan dari Musrenbangdes/Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022.
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 melalui forum konsultasi publik.

Selain itu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Tabel1.3.

Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
Yang Berorientasi Pada Substansi

PENDEKATAN	PARAMETER
Holistik-Tematik	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 3 unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Integratif	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Spasial	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Selain itu juga, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Pada penyusunan RKPD Tahun 2022, Kabupaten Musi Rawas sudah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih, oleh karena itu dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026, meskipun belum memiliki RPJMD yang mengintegrasikan Visi, Misi, Kerangka dan Indikator Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022 akan diarahkan pada Visi, Misi, Kerangka dan Indikator Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut. Hal ini dilakukan agar terdapat keselarasan antara dokumen RKPD

dengan RPJMD yang direncanakan baru akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat - lambatnya pada bulan keenam setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tahun 2022 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu **“Mewujudkan Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”**.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas (RKPD) Tahun 2022 adalah :

- a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;

1. 5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD TAHUN 2022

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, secara ringkas yaitu :

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) tahap IV (masa transisi), serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, arah kebijakan nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan, selain itu Bab IV juga memberi

landasan bagi penyiapan formulasi kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahap IV sebagai bagian dari masa transisi sebelum ditetapkan RPJMD yang baru.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program prioritas dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan serta Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun rencana.

Bab VII Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 di Kabupaten Musi Rawas.

1.6 Inovasi

Berikut inovasi Kabupaten Musi Rawas yang telah dilaksanakan dalam pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan pelayanan publik serta inovasi pendukung pencapaian tujuan pembangunan.

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Pemulihan Ekonomi)

1) Inovasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui “DEWITA (Desa Wisata Tematik) Sri Mulyo Edupark

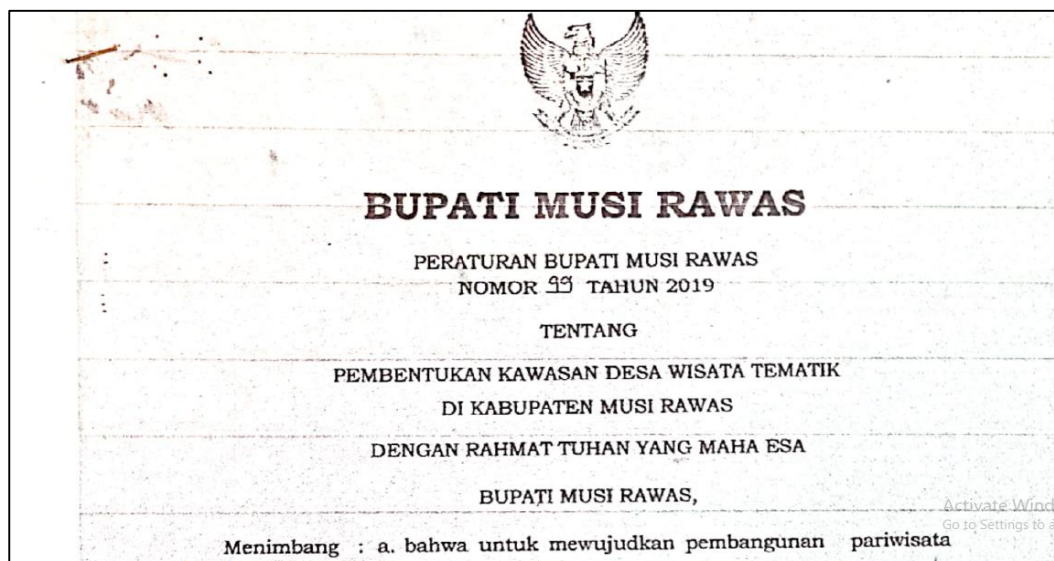
Desa identik dengan keadaan lingkungan yang sangat terbatas, terpencil, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah karena jenis pekerjaan yang homogen yaitu bertani. Namun desa memiliki karakteristik yang unik dan kaya sumber daya alam yang jika dikemas sedemikian rupa sangat cocok untuk

dijadikan sebagai tempat wisata yang mengembangkan produk pariwisata tematik sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dan masyarakatnya, dalam hal ini adalah Desa Wisata Tematik (Dewita).

Desa Wisata Tematik mengembangkan tema tertentu yang mengkaitkan berbagai komponen produk pariwisata di suatu desa wisata:

- Desa wisata memiliki IDENTITAS yang sesuai dengan jati diri dan karakteristik sumber daya alam dan budaya yang dimiliki → meningkatkan DAYA SAING dan APRESIASI terhadap desa.
- Produk pariwisata BERKUALITAS dan BERKELANJUTAN karena tidak hanya memenuhi kebutuhan bersenang-senang, tetapi juga memberikan PEMBELAJARAN DAN PENGALAMAN BERKESAN untuk pengembangan diri masyarakat dan wisatawan.
- Mendorong MASYARAKAT DAN WISATAWAN untuk berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya desa.
- Menumbuhkan KEBANGGAAN dan memperkuat rasa CINTA MASYARAKAT terhadap desanya.
- Mengangkat HARKAT dan MARTABAT masyarakat desa.
- Menetapkan inovasi dengan Peraturan Bupati

Dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Srimulyo Kecamatan Stl Ulu Terawas terhadap penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada serta memberikan dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan Desa Wisata Tematik dan sekitarnya, sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata maka dibentuklah Desa Wisata Tematik (Dewita) Srimulyo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kawasan Desa Wisata Tematik di Kabupaten Musi Rawas.



Pembentukan Desa Wisata Tematik (Dewita) Srimulyo memiliki beberapa tujuan antara lain : :

1. Meningkatkan Pendapatan Desa khususnya dan meningkatkan PAD Kabupaten Musi Rawas
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa yang menjadi tujuan wisata
3. Melestarikan seni, budaya, adat istiadat serta tradisi masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung maupun tidak Langsung.
5. Meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah
6. Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga desa
7. Memberikan inovasi yang baru dalam meningkatkan potensi Pariwisata Daerah
8. Mempercepat pembangunan dan memajukan wilayah pedesaan di Kabupaten Musi Rawas
9. Memudahkan Pemetaan desa-desa wisata yang berpotensi
10. Mempermudah promosi tepat sasaran sekaligus menjadi program peningkatan kapasitas pengembangan
11. Meningkatkan SDM di bidang Pariwisata
12. Sebagai media untuk meningkatkan SDM masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan

Gambar 1.10. Kegiatan Sedekah Bumi sebagai salah satu wisata spiritual yang terus dijaga dan dilaksanakan secara rutin di Desa Srimulyo.



Gambar 1.11. Aneka ragam kerajinan tangan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Srimulyo



Gambar 1.12. Pesona alam Desa Srimulyo



Gambar 1.13. Festival di Desa Srimulyo



2) Inovasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Uma Inovasi Selangit

Uma Inovasi Selangit merupakan kelompok tani Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan. Uma Inovasi Selangit berdiri atas inisiatif pemuda yang berani memajukan kesejahteraan masyarakat melalui wirausaha yang dimulai dari desa dengan pendekatan kelompok ekonomi produktif seperti UKM, Koperasi dan kelompok tani dengan berbasiskan sumberdaya alam lokal. Uma Inovasi Selangit telah membantu mempromosikan potensi yang ada di daerahnya, dengan menggunakan teknologi yang ada sebagai media untuk mempromosikan produk-produk inovasi, sehingga bisa membuka jalan pemasaran dan memperluas hubungan keluar daerah. Uma Inovasi Selangit sebagai wadah pemuda dan masyarakat Selangit berwirausaha merupakan bentuk positif keterlibatan generasi milenial sebagai pelaku UMKM yang melek teknologi sehingga perlu didukung dan menjadi skala prioritas untuk dikembangkan. Uma Inovasi Selangit tidak hanya membeli kopi para petani tapi juga memberikan pengetahuan tentang teknik mengolah biji kopi agar kualitasnya terjaga. Sebelumnya para petani hanya menjemur kopi dengan ala kadarnya sehingga cita rasa kopi tidak optimal. Volume kopi yang dipasok oleh para petani dibawah koordinasi Uma Inovasi Selangit terus meningkat mengikuti permintaan kopi dari para konsumen. Jika dulu paling banyak permintaan hanya 50 kg, kini rata-rata Uma Inovasi Selangit bisa menyerap biji kopi mencapai 500 kg setiap bulan. Selama ini penjualan kopi ke daerah lain hanya dilakukan sebatas transaksi tanpa tahu akan menjadi produk seperti apa, maka dari sini para pemuda turun tangan dan mulai bergerak mengembangkan potensi kopi yang ada di desa.

Uma Inovasi Selangit adalah wadah untuk mengajak para pemuda dan semua pihak untuk ambil bagian memajukan kesejahteraan masyarakat di desa. Cita-citanya adalah keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui wirausaha

kreatif berbasis potensi lokal. Melalui Uma Inovasi Selangit dapat menghadirkan produk lokal dengan potensi sumber daya alam yang ada..

Tujuan Inovasi Uma Selangit :

1. Mengembangkan bentuk baru dari cita rasa harum wangi Kopi Selangit.
2. Mengembangkan kreatifitas masyarakat untuk berinovasi dibawah satu naungan yaitu di uma Inovasi Kecamatan Selangit

Manfaat:

1. Memberikan varian bagi masyarakat untuk mencari alternatif pengharum ruangan khususnya didalam kabin mobil.
2. Menambah produk baru Kopi Selangit sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi bagi pengelola Kopi Selangit

Hasil Inovasi

1. Kopi Robusta Selangit Menggunakan kopi asli yang dihasilkan oleh para petani lokal untuk menghadirkan secangkit kopi yang berkualitas.
2. Pengharum Ruangan Kopi Selangit telah diproduksi berdasarkan order dan telah menyebar pemasarannya, baik online (Facebook) maupun offline.
3. Roast Bean Robusta.
4. Pengharum Ruangan Kopi Selangit jenis terbaru berbentuk cairan yang dibuat dari air sulingan kopi.

Gambar 1.14 Salah satu gerai Uma Inovasi Selangit



b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

1) Inovasi Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui BERAKTING PRIMA” (Bersama Atasi Anak Stunting dan Peduli Resiko Maternal)

Status gizi adalah aspek penting untuk menentukan apakah seorang ibu yang sedang hamil dapat melewati masa kehamilannya dengan baik dan tanpa ada gangguan apapun. Status gizi ibu hamil haruslah normal, karena ketika ibu hamil tersebut mengalami gizi kurang ataupun gizi berlebih akan banyak komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dan berdampak pada kesehatan janin yang dikandungnya. Salah satu permasalahan gizi ibu hamil adalah Kekurangan energy kronik (KEK).

Kekurangan Energy Kronis (KEK) adalah masalah gizi yang disebabkan karena asupan makanan dalam waktu yang cukup lama yaitu dalam hitungan tahun. Seseorang yang mengalami KEK biasanya memiliki status gizi kurang, kekurangan energy kronis (KEK) dapat di ukur dengan mengetahui lingkar lengan atas dan indeks masa tubuh seseorang. Ibu yang mempunyai lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm dapat dikatakan mengalami KEK (kekurangan gizi kronik).

Balita pendek (stunting) merupakan keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek hingga melampaui deficit -2 SD dibawah median panjang atau tinggi badan. Stunting dapat di diagnose melalui indeks antropometri tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linier yang di capai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai. Stunting merupakan pertumbuhan linier yang gagal untuk mencapai potensi genetic sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit infeksi (ACC/SCN, 2000).

Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, di mulai sejak dalam kandungan (Janin), bayi, anak, dewasa dan usia lanjut. Periode dua tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat (Kemenkes RI, 2010). Salah satu masalah gizi yang diderita oleh balita yaitu stunting yang merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek yang terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 tahun

pertama kehidupan seorang anak. Kekurangan gizi terjadi pada 1000 hari pertama tersebut sebanyak 70 % dan 30 % pada usia antara 2 dan 5 tahun (Andrew, 2014).

Di Wilayah kerja Puskesmas Megang Sakti berdasarkan data laporan gizi tahun 2018 dan 2019 diketahui balita stunting berjumlah 345 balita yang didapat dari hasil pengukuran Tinggi badan berdasarkan umur di setiap posyandu. Sedangkan ibu hamil KEK diketahui sejumlah 46 orang ibu hamil yang didapat dari kegiatan kelas ibu hamil dan posyandu. Dari data diatas Puskesmas Megang Sakti membuat alternative untuk mengatasi atau mengurangi jumlah balita stunting dan ibu hamil KEK dengan membuat kegiatan “Sanggar Gizi” sebagai inovasi. Diharapkan dengan kegiatan ini serta adanya dukungan dari lintas program maupun lintas sektor dapat mengurangi angka kejadian Ibu hamil KEK dan balita stunting khususnya di wilayah kerja Puskesmas Megang Sakti.

Gambar 1.15 Sosialisasi kesehatan ibu hamil dan gizi anak-anak



2) Inovasi Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui “GETUK PeDe” (Gerakan Ketuk Pintu Bersama Kader dan Pembina Desa)

Berawal dari pencapaian Indikator Program PIS-PK di Puskesmas kecamatan Muara Beliti yang tidak tercapai , dengan keterbatasan jumlah SDM professional, tupoksi pelayanan UKM maupun UKP banyak, beban kerja dan jam kerja besar, 1 orang petugas tidak dapat berada pada 2 tempat pelayanan

UKM dan UKP dalam satu waktu, sehingga muncul suatu gagasan untuk menciptakan gerakan kolaborasi lintas program dimulai dari PIS-PK, program kerja Puskesmas yang capaiannya tidak terpenuhi, pemenuhan KBK serta penanggulangan covid 19 yang disebut dengan GETUK PEDE (Gerakan Ketuk Pintu Bersama Kader dan Pembina Desa). Tim Getuk PeDe melakukan inovasi dalam meningkatkan capaiannya dengan promosi kesehatan oleh Pembina desa. Peran tim Getuk PeDe dalam membantu meningkatkan capaian adalah dengan membantu melakukan inspeksi lingkungan rumah tangga dan juga berperan aktif dalam memantau kondisi sanitasi lingkungan

Adapun Alur kegiatan tim Getuk Pede yaitu:

1. Sosialisasi Kegiatan Tim tentang prosedur pelaksanaan dan pemetaan wilayah
2. Tim melakukan kunjungan Rumah dengan protokol kesehatan
3. Kunjungan rumah oleh tim
4. Upaya promosi kesehatan tentang PHBS dan Pencegahan Infeksi Covid-19
5. Kegiatan Selesai
6. Kader Memantau Kepatuhan Isoman warga terkonfirmasi
7. Pencatatan dan Pelaporan
8. Inspeksi Rumah Tangga

Tujuan dan manfaat dari adanya Inovasi GETUK PEDE ini yaitu :

- a. Masyarakat lebih mudah untuk mengenali petugas kesehatan
- b. Kemudahan Akses Kontak Petugas oleh masyarakat
- c. Derajat Kesehatan Meningkat
- d. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- e. Hasil data target sasaran kinerja meningkat
- f. Angka kejadian kasus Covid-19 Menurun

Gambar 1.16 Kegiatan *door to door* Inovasi Getuk PeDe keseluruhan lapisan masyarakat kecamatan Muara Beliti



Gambar 1.17. Kegiatan Getuk PeDe di Era Pandemi Covid-19



C. Pelayanan Publik

1) Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik melalui PINDANG PAK TUWA

Kabupaten Musi Rawas yang dikenal dengan sebutan “.Bumi Lan Serasan Sekantenan”., ibu kotanya berada di Muara Beliti. Dengan jumlah penduduk 408.816 jiwa, secara administrasi Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan dan terbagi lagi menjadi wilayah administrasi yang lebih kecil dengan total 199

wilayah yang terdiri dari 186 Desa dan 13 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas 635.717,15 Ha atau 6.357,09 Km atau 6,39% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta menempati urutan ke 5 (lima) wilayah terluas di Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa Desa yang hanya dapat diakses melalui sungai dengan menggunakan motor air atau perahu. Mayoritas penduduk di Kabupaten Musi Rawas bekerja sebagai petani. Dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil konsolidasi nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester 2 tahun 2020 sebesar 406.196 Jiwa.

Jumlah penduduk tersebut masih bisa terus bertambah seiring dengan perpindahan serta kedatangan penduduk. Perlu diketahui, dokumen kependudukan adalah syarat utama yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia agar dapat memiliki akses ke pelayanan publik yang ada seperti kesehatan (BPJS, Rumah Sakit), Perbankan, Finance (Pinjaman dan Kredit), Pelayanan publik terkait diri sendiri (SKCK, SIM) serta pelayanan publik lainnya. Masalah timbul dikarenakan banyak keluhan masyarakat luar daerah yang sudah bertahun-tahun menetap di Kabupaten Musi Rawas tetapi tidak terdata sebagai penduduk Kabupaten Musi Rawas. Akibatnya, masyarakat tersebut tidak dapat memiliki dokumen kependudukan sehingga tidak dapat mengakses pelayanan publik seperti yang disebutkan di atas. Masalah kembali muncul saat masyarakat tersebut akan mengurus dokumen kependudukan mereka, tetapi data yang mereka miliki masih berada di daerah asal. Data tersebut haruslah dilakukan perpindahan melalui aplikasi SIAK serta data tersebut akan ditarik ke dalam data kependudukan Kabupaten Musi Rawas.

Terdapat beberapa kendala bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan mereka di daerah asal, antara lain :

1. Seperti permasalahan waktu yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan mengurus ke Dukcapil daerah asal,
2. Serta masalah biaya saat proses pulang pergi ke daerah asal, dikarenakan banyak masyarakat tersebut berasal dari daerah luar provinsi, untuk dapat mengakses pelayanan dukcapil daerah asal dirasa sangat memberatkan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tergerak untuk ikut serta membantu

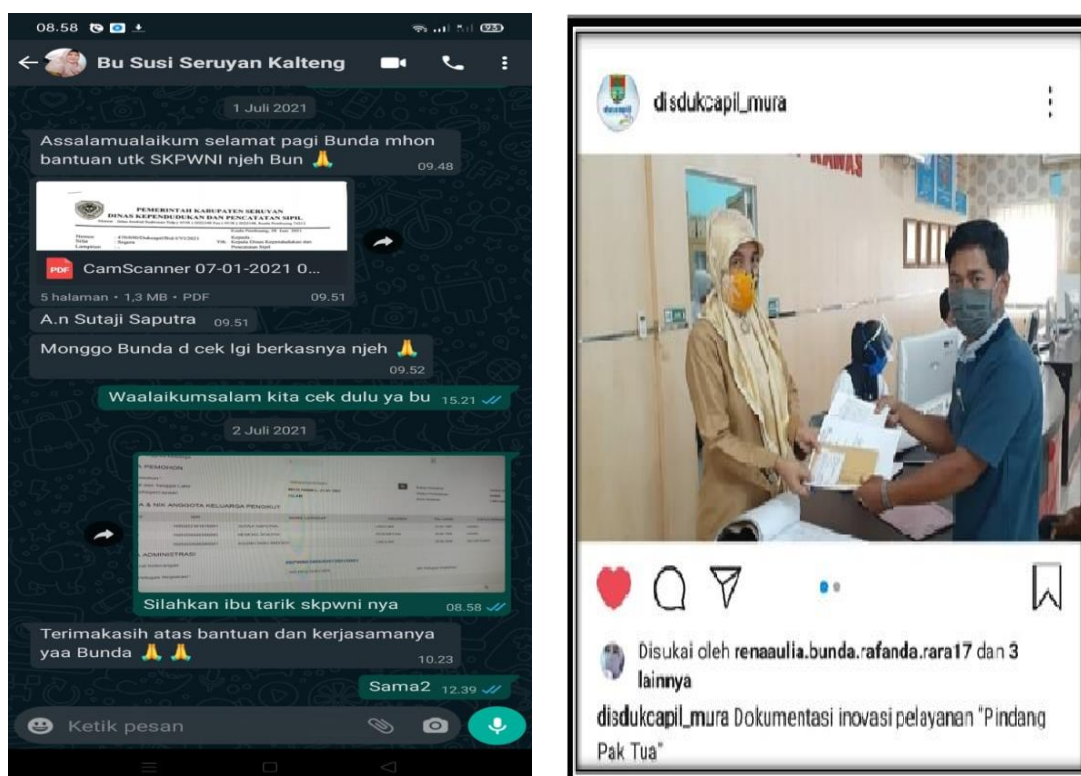
meringankan beban masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan dengan membuat suatu program layanan yang bersifat empati guna membantu masyarakat melakukan perpindahan dan kedatangan yaitu dengan Inovasi Pindang Pak Tuwa (Pindah Datang Pakai Aplikasi Wa).

inovasi pelayanan "PINDANG PAK TUWA" memiliki tujuan antara lain :

Membantu warga Kabupaten Musi Rawas supaya tidak ada lagi warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

- Menciptakan Layanan yang bersifat empati kepada masyarakat yang memiliki
- keterbatasan (Biaya dan waktu) untuk kembali ke daerah asal guna mengambil surat pindah.
- Dengan adanya inovasi Pindang Pak Tuwa maka Data Kependudukan lebih akurat sehingga bisa di manfaatkan oleh lembaga pengguna/OPD guna pelayanan publik.
- Membuat layanan yang dapat membahagiakan masyarakat.

Gambar 1.18 Inovasi Pelayanan PINDANG PAK TUWA



Inovasi ini merupakan inisiatif original yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas guna mempermudah pelayanan pindah datang bagi warga yang akan mengurus dokumen kependudukannya, sehingga tidak terjadi lagi masyarakat yang pindah ke daerah lain tidak membawa surat keterangan pindah (SKPWNl)

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Musi Rawas terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Ibukota Kabupaten Musi Rawas terletak di Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tentang persetujuan usulan nama ibukota dan lokasi pusat pemerintahan.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2019 berjumlah 403.819 jiwa dan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² dengan kepadatan penduduknya mencapai 63,52 jiwa/km². Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transportasi darat dan udara. Melalui darat menggunakan angkutan umum (Kereta Api, Bus, Travel) dan Udara dengan Pesawat langsung dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ke Bandara Silampari.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

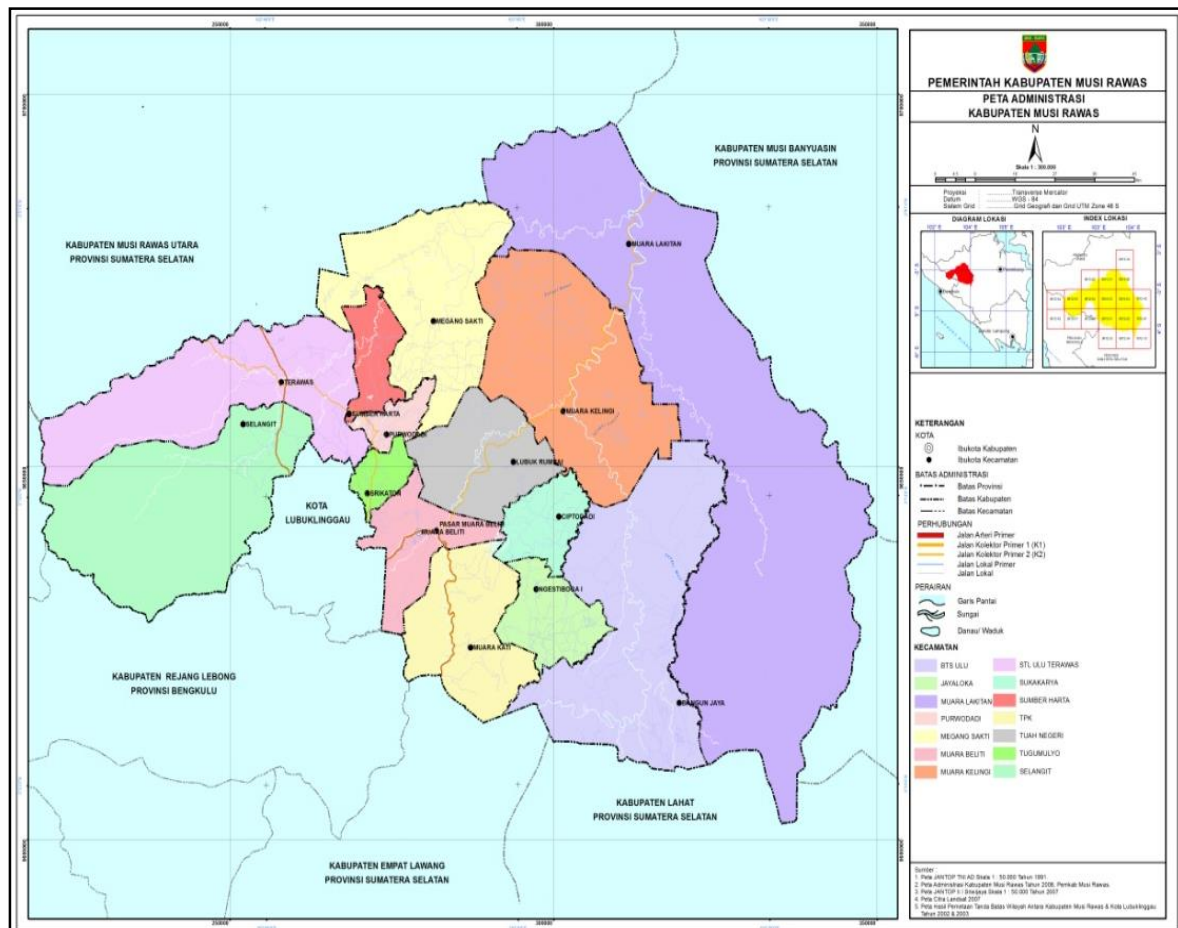
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi 102°30' 00" – 103° 40' 10" Bujur Timur dan 03° 05' 00" – 03° 38' 40" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 635.717,15 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 2.1 Peta Admistrasi Kabupaten Musi Rawas



Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

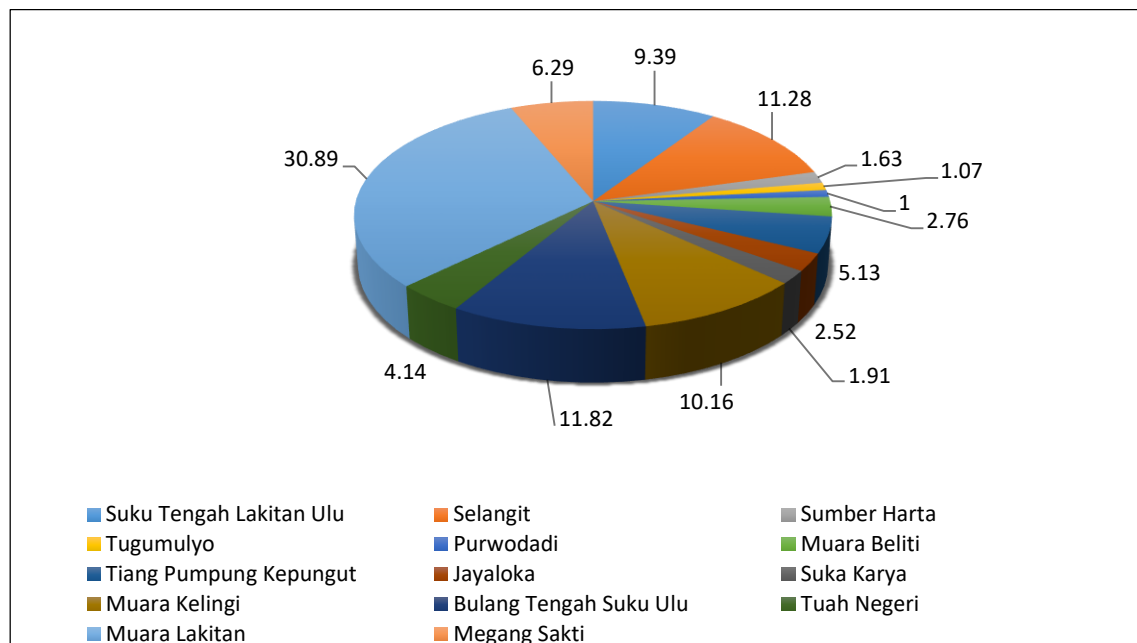
Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas	1	12	596,92
2	Selangit	1	11	717,34
3	Sumber Harta	1	9	103,78
4	Tugumulyo	1	17	67,71
5	Purwodadi	2	9	63,26
6	Muara Beliti	1	11	175,63

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
7	Tiang Pumpung Kepungut	0	10	326,42
8	Jayaloka	1	12	160,46
9	Sukakarya	0	8	121,53
10	Muara Kelingi	1	20	645,82
11	Bulang Tengah Suku Ulu	1	18	751,54
12	Tuah Negeri	0	11	263,45
13	Muara Lakitan	1	19	1.963,54
14	Megang Sakti	2	19	399,78
J U M L A H		13	186	6.357,17

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Grafik 2.1
Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas



Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 25-1000 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari utara sampai selatan, khususnya di bagian barat daerah ini yang termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang

membentang luas dalam 4 (empat) provinsi. Keadaan alam Kabupaten Musi Rawas terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi, sedangkan di sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan.

Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan, khususnya perkebunan karet dan sawit. Hal ini sangat mendukung perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terbagi atas beberapa jenis, antara lain jenis aluvial, litosol, asosiasi latisol, regosol, podsolik, dan asosiasi podsolik. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. *Aluvial* dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas $\pm 8,05\%$ dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija.
2. *Litosol* seluas $\pm 7,17\%$ dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak.
3. *Asosiasi Latisol* hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas.
4. *Regosol* luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana $\pm 55,89\%$ berada di Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.
5. *Podsolik* merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet.
6. *Asosiasi Podsolik* hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan.

Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh empat sungai utama yang utamanya dapat dilayari, yaitu Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Semangus. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungai-sungai utama tersebut seperti Sungai Keruh, Sungai Lintang dan Sungai Kungku yang merupakan anak dari Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau yaitu Danau Aur di Kecamatan

Sumber Harta dan Danau Gegas di Kecamatan Suka Karya. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.

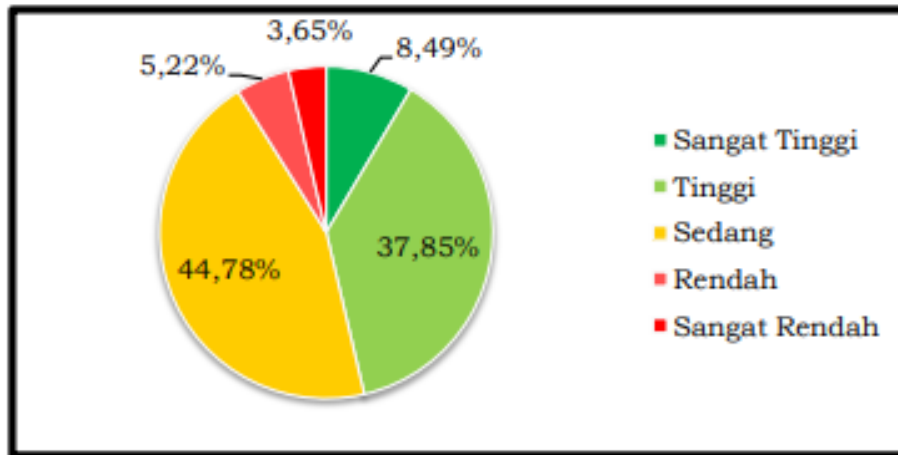
Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman kayu merawan, sungkai, merbau, kolim, rotan dan jenis tumbuhan kayu lainnya.

Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur semakin luas.

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral seperti logam dan carbon. Sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai klasifikasi sedang untuk penyediaan serat. Luasnya mencapai 282.209,62 hektar atau 44,78% dari luas total wilayah. Klasifikasi tinggi mempunyai luas 238.531,31 hektar atau 37,85% yang berada di Kecamatan Muara Lakitan. Klasifikasi sangat tinggi di Musi Rawas mencapai 53.499,33 hektar atau 8,49% yang juga berada di Kecamatan Muara Lakitan seluas 29.545,56 hektar. Luasan untuk klasifikasi penyediaan serat rendah seluas 32.908,4 hektar atau 5,22% sedangkan yang sangat rendah seluas 23.020,31 hektar atau 3,65% dan berada di Kecamatan Tugumulyo dengan luas 4.526,24 hektar.

Gambar 2.2

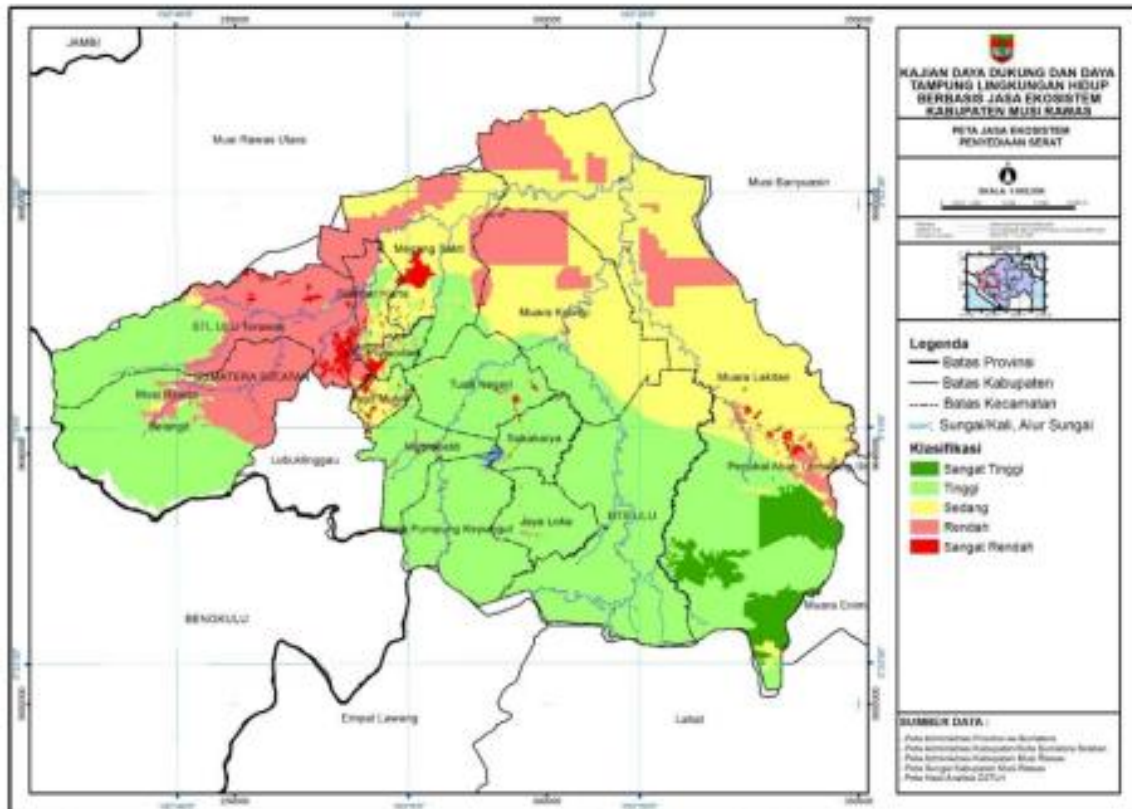
Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas



Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Penyediaan serat mempunyai potensi tinggi di penggunaan lahan dengan komoditas yang menghasilkan serat. Penggunaan lahan sawah, semak belukar dan hutan termasuk dalam klasifikasi tinggi. Padi di sawah merupakan bagian dari tanaman yang menghasilkan serat pangan, baik dari tumbuhannya maupun biji padi. Beberapa jenis pohon di hutan yang dimanfaatkan seratnya untuk bahan baku industri. Contoh kayu jarum (softwood) dan kayu daun (hardwood) untuk dimanfaatkan seratnya untuk pulp dan kertas. Fauna yang ada di hutan juga menjadi sumber serat hewan. Kawasan hutan perlu dijaga kelestariannya selain untuk menjaga fungsi lindung juga melindungi sumber serat. Pemanfaatan hutan untuk bahan baku industri harus dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung. Penggunaan lahan lainnya memiliki potensi rendah untuk penyediaan serat seperti permukiman atau tegalan /ladang.

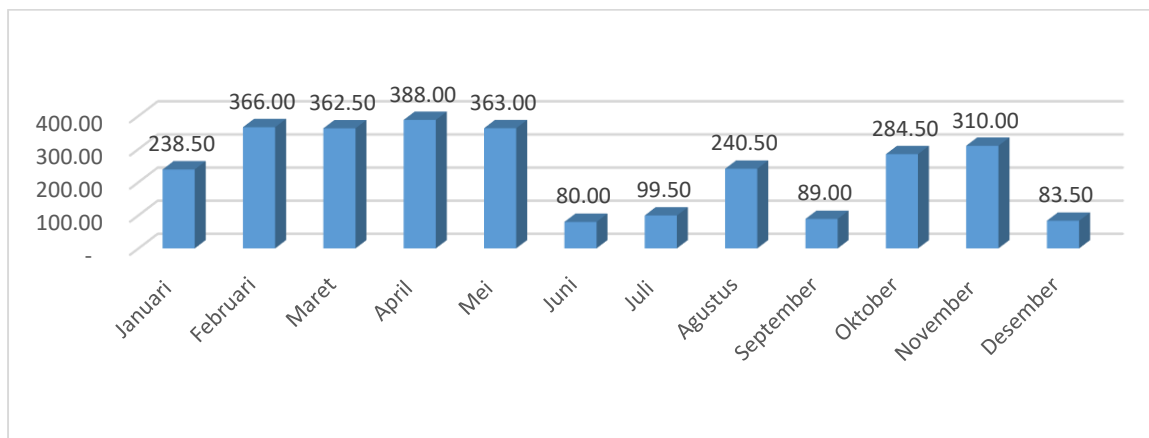
Gambar 2.3



Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata per bulan pada tahun 2020 sebesar 242,08 mm dengan rata-rata hari hujan 18 hari per bulannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari dan April.

Grafik 2.2
Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2020



Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2021

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun nonpemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, Dengan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 406.196 jiwa maka *density* penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 63,89 jiwa/Km². Wilayah administrasi dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Tugumulyo dengan kepadatan penduduk 709,10 jiwa/Km², sedangkan Kecamatan Muara Lakitan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu 21,21 jiwa / Km², tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada table tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
(Data Per 31 Desember 2020)

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	STL Ulu Terawas	596,92	32.987	55.26
2	Selangit	717,34	19.553	27.26
3	Sumber Harta	103,78	18.795	181.10
4	Tugumulyo	67,70	48.013	709.10
5	Purwodadi	63,26	16.009	253.07
6	Muara Beliti	175,63	27.070	154.13
7	TP. Kepungut	326,42	12.616	38.65
8	Jayaloka	160,46	16.624	103.61
9	Sukakarya	121,53	15.452	127.15
10	Muara Kelingi	645,82	43.336	67.10
11	BTS Ulu	751,54	30.453	40.52
12	Tuah Negeri	263,45	27.521	104.46
13	Muara Lakitan	1.963,54	41.647	21.21
14	Megang Sakti	399,78	56.120	140.38
Jumlah		6.357,17	406.196	63,89

sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pusat Kemendagri Tahun 2020, Data diolah

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 berjumlah 406.196 jiwa terdiri dari laki-laki 208.151 jiwa, perempuan 198.045 jiwa dengan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² . Gambaran umum jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3

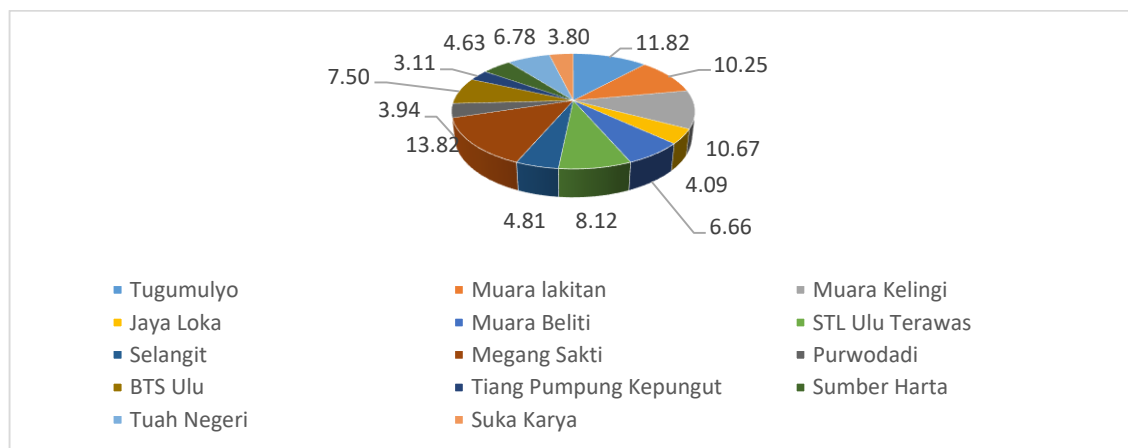
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
(Data Per 31 Desember 2020)

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas	16.942	16.045	32.987
2	Selangit	9.979	9.574	19.553
3	Sumber Harta	9.615	9.180	18.795
4	Tugumulyo	24.307	23.706	48.013
5	Purwodadi	8.118	7.891	16.009
6	Muara Beliti	13.739	13.331	27.070
7	Tiang Pumpung Kepungut	6.427	6.189	12.616
8	Jayaloka	8.498	8.126	16.624
9	Sukakarya	7.919	7.533	15.452
10	Muara Kelingi	22.342	20.994	43.336
11	Bulang Tengah Suku Ulu	15.666	14.787	30.453
12	Tuah Negeri	14.156	13.365	27.521
13	Muara Lakitan	21.530	20.117	41.647
14	Megang Sakti	28.913	27.207	56.120
Jumlah		208.151	198.045	406.196

sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pusat Kemendagri Tahun 2020

Persentase jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Paling tinggi adalah Kecamatan Megang Sakti dan persentase paling rendah pada Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, untuk melihat persentase jumlah penduduk dapat dilihat pada grafik 2.3

Grafik 2.3
Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
(Data Per 31 Desember 2020)



sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pusat Kemendagri Tahun 2020, Data diolah

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk tertinggi di wilayah Kabupaten Musi Rawas terdapat pada tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Muara Kelingi.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik wilayah Kabupaten Musi Rawas maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, kawasan budidaya di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Produksi

Di Kabupaten Musi Rawas kawasan hutan produksi yang ada berupa: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 pengelolaan kawasan hutan produksi diarahkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), sedang kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) akan dialihgunakan untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit dan karet) melalui program agropolitan.

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Luas Kawasan HPT sebesar 7.385,84 Ha, sebagian besar berada di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dan menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah seperti *podsolik haplik* dan *kambisol eutrik*. Batuan permukaan sedang dan bahaya erosi sedang-tinggi. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan.

Pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk

itu pada kawasan hutan produksi terbatas yang telah dirambah oleh masyarakat sekitar hutan perlu dikembangkan kebijakan pola pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yakni model pengelolaan hutan partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek pembangunan perhutan. Dengan demikian diharapkan kawasan hutan ini akan menjadi basis ekonomi rakyat sekitar hutan. Untuk itu penanaman tanaman sela yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, seperti karet dan tanaman buah-buahan (rambutan, durian, nangka, cempedak, dll) dapat dikembangkan. Selain itu di kawasan ini juga cocok untuk pengembangan APIARI (Perlebahan) untuk menghasilkan madu.

Untuk meningkatkan pengayaan vegetasi dan tutupan lahan, maka pada areal-areal yang masih gundul atau bervegetasi jarang dapat dilakukan program reboisasi sebagai pemulihan dan pengkayaan keaneka-ragaman jenis dengan melakukan penanaman jenis-jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti: Merbau (*Intsia biyuga*), Bintangur (*Calophyllum inophyllum*), Mersawa (*Anoisoptera polyandra*), Nyatoh (*Palaquium gutta*), Terentang (*Camptosperma auriculata*), Medang (*Litsea firma*), Terap (*Artocarpus spp*), dan lain-lain. Diharapkan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat ini, maka kegiatan perambahan hutan dapat dikendalikan.

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Luas kawasan ini sebesar 177.976,26 Ha, sebagian besar menyebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, antara lain: Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti. Sebagian besar kawasan ini menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah berupa jenis tanah *podsolik haplik*, *kambisol eutrik*, dan *gleisol histik*. Batuan permukaan rendah-sedang dan bahaya erosi rendah-

sedang. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta melalui program pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu kawasan hutan produksi tetap juga dapat dikelola bersama masyarakat (baik perorangan maupun kelompok/koperasi) melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Petani hutan dapat mengelola hutan produksi dengan luasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan penanaman sampai pemasaran, melalui HTR secara legal. Diharapkan pengelolaan hutan melalui partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan melalui peran aktif masyarakat di sekitar hutan.

c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Hutan konversi ialah hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain. Luas kawasan ini sebesar 7.385,84 Ha berada di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perkebunan.

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan dan direncanakan pada lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah baik yang beririgasi maupun tidak. Kawasan budidaya tanaman pangan sebagian besar menyebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti dan Muara Lakitan.

- *Kawasan Pertanian Lahan Basah Beririgasi*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara irigasi, baik yang secara teknis bisa ditanami padi satu kali atau pun dua kali per tahun. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dengan pengairan secara irigasi teknis. Kawasan ini berupa dataran datar dengan jenis tanah aluvial yang memiliki status kesuburan tinggi dan dilengkapi infrastruktur irigasi teknis yang dibangun sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Arahan pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai lumbung padi dan tidak terjadi alih fungsi lahan, serta meningkatkan produktivitasnya melalui rehabilitasi sarana/jaringan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam: Padi-Padi-Palawija/Hortikultura atau Padi-Padi-Padi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai lahan sawah abadi untuk mempertahankan fungsi sawah irigasi, maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah irigasi melalui instrumen insentif dan disinsentif. Petani yang tetap mempertahankan sawahnya untuk budidaya padi mendapat insentif berupa keringan pajak dan subsidi sarana produksi pertanian. Sedangkan bagi yang melanggar/melakukan alih fungsi sawah menjadi non sawah wajib dikenakan pajak 10 kali lipat dan dikenakan denda penggantian biaya pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

- *Kawasan Pertanian Lahan Basah Tadah Hujan*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya sepenuhnya tergantung pada hujan. Kawasan ini menempati areal dengan topografi datar, jenis tanah aluvial dan gleisol, dan status kesuburan tinggi. Kawasan ini menyebar secara spot-spot diberbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas direncanakan pada Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dengan luas total 723 ha.

Arahan pengembangan kawasan ditujukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Untuk itu perlu pengendalian ketat terhadap perijinan untuk peruntukan lain. Selain pengendalian terhadap alih fungsi lahan, pengembangan kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan input teknologi irigasi pompanisasi baik air permukaan maupun tanah dangkal, guna meningkatkan indeks pertanaman IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam padi-palawija-beras menjadi padi-padi-palawija/ hortikultura.

b. *Kawasan Pertanian Hortikultura*

Kawasan budidaya hortikultur diarahkan dan direncanakan pada lahan kering. Kawasan diperuntukan bagi tanaman semusim di dataran rendah. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar (0-8%), jenis tanah aluvial dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting: ladang (singkong, jagung, dan padi ladang).

c. *Kawasan Perkebunan*

Kawasan Perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan terdapat hampir di setiap kecamatan menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Selangit dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.

Berikut perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas :

- *Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian tanaman tahunan diperuntukkan bagi kawasan pertanian tanaman tahunan kebun karet dan kelapa sawit. Kawasan ini menempati areal dengan lereng datar hingga agak berbukit (0-25%), jenis tanah organosol, gleisol, kambisol, dan podsolik, bahaya banjir sedang, erosi sedang, dan pola penggunaan lahan eksisting: tegalan dan semak belukar. Kawasan ini menyebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Arah pemanfaatan kawasan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian lahan dapat dipertahankan dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan melalui pola pemanfaatan Kebun Karet dan Kelapa Sawit.

- *Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN)*

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet. Status penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kawasan ini menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sekitar kawasan melalui konsep pola PIR (pola Inti-Plasma) dimana perusahaan besar swasta nasional sebagai inti dan masyarakat petani sekitar sebagai plasma, dengan distribusi penguasaan lahan sampai 40:60.

- *Perkebunan Rakyat*

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet, dengan status penguasaan lahan berupa hak milik petani. Kawasan pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi karet diarahkan di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan

Jayaloka, dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Sedangkan untuk pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa sawit diarahkan untuk dibagian tengah dan utara wilayah kabupaten ini, yakni di Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan perkebunan rakyat diarahkan melalui konsep pengembangan agropolitan, secara pola ruang kawasan agropolitan mencakup kawasan produksi dan kawasan pelayanan. Sedangkan secara struktur kawasan akan dikembangkan pusat pelayanan (kota tani), pusat pengumpul, dan desa-desa sebagai basis produksi. Untuk memudahkan pengumpulan komoditi petani dari kawasan produksi ke pusat kota tani, maka perlu dilengkapi infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, terminal agribisnis, dan lain-lain. Di Kota Tani akan dibangun fasilitas pemasaran, jasa keuangan, dan pusat promosi. Kota Tani sebagai agrocenter akan dibangun di Muara Beliti. Guna mempertahankan status kesuburan tanah baik di kawasan perkebunan besar swasta nasional maupun di kawasan perkebunan rakyat (agropolitan), maka secara teknis pengolahan lahan perlu dilakukan penanaman tanaman penutup (*cover crop*) dari jenis kacang-kacangan, antara lain *Calopogonium centrocema* (Cc), *Calopogonium pubesciens* (Cp), dan *Calopogonium muconoides* (Cm).

- *Kawasan Kebun Campuran*

Di kawasan non hutan, dengan bentuk wilayah agak berbukit hingga agak bergunung (16-40%), diarahkan untuk pengembangan kebun campuran (talun kebun), yaitu suatu sistem pertanian hutan tradisional dimana dalam sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman yang diatur secara spasial dan temporal. Tanaman buah-buahan seperti: durian, rambutan, langsung, dan alpukat dibudidayakan bersama berbagai tanaman kayu-kayuan dan tanaman pangan lainnya. Kawasan ini terutama berada di Kecamatan Selangit.

Jenis tanaman kayu-kayuan yang dikembangkan merupakan kelompok kayu tidak keras dan cepat besar seperti sengon, kaliandra, turi, dan lain-lain. Jenis kayu ini memiliki nilai ekonomis sebagai sumber kayu bakar,

papan cor, dan bahan peti kemas. Di bawah tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan dapat dikembangkan jenis tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan sayur-sayuran. Setelah umur 8-10 tahun jenis tanaman kayu-kayuan ditebang, sehingga tingkat naungan berkurang. Dengan demikian tanaman buah-buahan dan tanaman semusim (tanaman pangan) memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan penyinaran matahari secara cukup. Selama 5 (lima) tahun lahan dibersihkan dari jenis tanaman bawah dan tidak ditanami jenis kayu-kayuan, sehingga lapisan tanah atas (*top soil*) memperoleh penyinaran matahari dan diharapkan terjadi proses pematangan tanah. Namun selama lima tahun itu pula dapat dikembangkan tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan lain-lain. Setelah lima tahun lahan dapat kembali jenis kayu-kayuan yang tidak keras sebagai sumber kayu bakar, papan cor, peti kemas, dan lain-lain. Demikian rotasi pertanian ini terus dilakukan, sehingga sifat fisik dan kimia tanah tetap dapat dilestarikan.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar serta konservasi perikanan air tawar. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, kolam, dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan Nila, Mas, Patin, dan Lele.

Alokasi ruang untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Musi Rawas disesuaikan sesuai potensi dari masing-masing kecamatan yang ada, diantaranya:

- a. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan di Sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Kelingi.
- b. Pengembangan kegiatan budidaya air deras di Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.

- c. Pengembangan kegiatan budidaya ikan air tenang di Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Sukakarya.
- d. Kegiatan pengembangan budidaya perairan umum di Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Merung dan Danau Aur.
- e. Kawasan peruntukan konservasi perikanan air tawar terdapat di daerah reservat Bendungan Air Gegas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup tambang mineral, Migas dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan mineral tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Selangit, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Pertambangan Minyak dan Gas tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Selangit, Tugumulyo, Purwodadi, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Jayaloka, Sukakarya, Bulang Tengah Suku Ulu, Tuah Negeri, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Sedangkan Pertambangan Batubara tersebar di Kecamatan Jayaloka, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas meliputi kawasan pertambangan bijih besi, timah hitam, seng, emas, batuan, batubara, minyak bumi dan gas. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis tanah podsolik, dan pola penggunaan lahan eksisting perkebunan rakyat dan hutan. Arah pemanfaatan ruang untuk pertambangan dibatasi pada areal yang telah memperoleh ijin eksploitasi dan kontrak karya. Sedangkan untuk pengembangan pada areal lainnya sangat

dibatasi guna menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan yang sudah ada wajib memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Musi Rawas, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Sebaran pengembangan kawasan industri pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada kawasan sekitar pusat-pusat kegiatan utama Kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas rencana kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas direncanakan di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dengan luas 50 hektar. Kawasan Industri ini akan dilengkapi dengan sarana transportasi yaitu pembangunan jalur rel kereta api dengan ruas Durian Remuk-Kota Padang, yang nantinya akan terhubung dengan jalur kereta api Lubuklinggau-Palembang.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Musi Rawas berupa Kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan pariwisata alam ini meliputi pemanfaatan didalam kawasan hutan dan perairan, pengembangan pariwisata buatan diarahkan pada kawasan Agropolitan Center dan pusat pemerintahan. Kawasan wisata alam, wisata budaya dan buatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas diarahkan di:

a. Kawasan Wisata Alam

- pariwisata Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta.
- pariwisata Bukit Cogong di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Gua Napal licin di Kawasan konservasi TNKS.
- pariwisata Danau Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- pariwisata Danau Sukahati di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Bukit Botak Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Air Terjun Telun Sukaraya di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Air Terjun Satan di Kecamatan Muara Beliti.
- pariwisata Air Terjun Sungai Dingin.
- pariwisata Air Mancur SP II.
- pariwisata Kawasan Konservasi TNKS.
- pariwisata Danau Tingkip di Kecamatan Purwodadi.
- pariwisata Hutan Bulian di Kecamatan Muara Kelingi.
- pariwisata Arung Jeram Sungai Rawas di kawasan konservasi TNKS.

b. Kawasan Wisata Buatan

- Pariwisata Air di kawasan Agropolitan Center; dan
- pariwisata Hutan Kota kawasan Pusat Pemerintahan.
- Sri Mulyo Edupark (SEP)
- Taman Beliti Anggon

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

a. Kawasan Permukiman Perkotaan

Menunjukkan areal kawasan permukiman perkotaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis tanah aluvial, dan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar secara spot-spot, terutama di pusat-

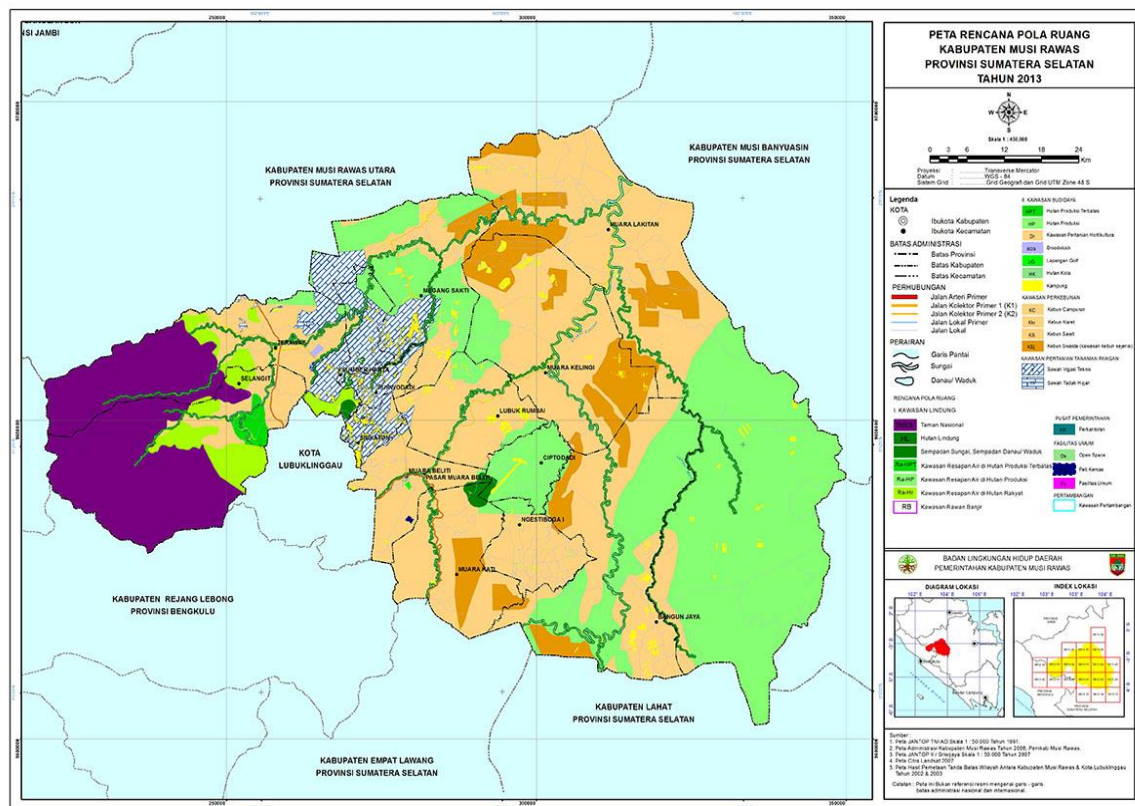
pusat ibukota kecamatan dan desa/kelurahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.

Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan dan mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan keberadaan fungsi resapan melalui ruang terbuka hijau (RTH). Untuk itu perlu pengaturan aktivitas pembangunan melalui penerapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangun (KLB). Guna mengoptimalkan fungsi layanan bagi penduduk kota serta pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya, maka perlu penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, serta dukungan prasarana jalan dan terminal antar kota baik berupa terminal penumpang maupun terminal barang yang menunjang pembangunan agropolitan.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

Menunjukkan areal kawasan permukiman perdesaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–bergelombang (0-15%), jenis tanah podsolik, kambisol, aluvial, dan koluvial, dengan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi layanan bagi masyarakat perdesaan dengan pengaturan tata ruang permukiman dan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perdesaan yang mendukung kegiatan pertanian/agropolitan.

Gambar 2.4
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendapatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

1. PDRB

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi riil ekonomi suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan pembangunan diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan memperhatikan realisasi PDRB dan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku selama Tahun 2018-2020, seperti dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2020 (Milyar Rupiah)

SEKTOR PDRB	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.284,64	5.587,38	5.821,98
Pertambangan dan Penggalian	5.520,96	6.206,84	5.944,77
Industri Pengolahan	2.414,21	2.603,34	2.705,27
Pengadaan Listrik dan Gas	4,81	4,97	5,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,37	1,47	1,58
Konstruksi	1.042,68	1.120,88	1.109,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.525,12	1.699,41	1.793,01
Transportasi dan Pergudangan	82,10	91,07	88,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,84	65,88	66,71
Informasi dan Komunikasi	56,26	62,06	72,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	116,72	122,56	123,80
Real Estate	240,44	268,38	279,17
Jasa Perusahaan	3,14	3,58	3,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382,06	391,04	407,30
Jasa Pendidikan	465,10	509,33	527,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,33	131,61	146,80
Jasa lainnya	177,23	195,23	205,45
JUMLAH	17.495,01	19.065,04	19.303,45

(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 2.4, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Musi Rawas meningkat dari Rp.17,49 Trilyun pada tahun 2018 meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp.19,30 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 1,81%.

Tabel 2.5
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.717.873,50	4.982.203,0	5.289.729,30	5.585.975,00	5.821,98
Pertambangan dan Penggalian	4.576.041,30	4.826.240,90	5.520.962,40	6.206.843,90	5.944,77
Industri Pengolahan	1.874.154	2.120.011,70	2.365.012,80	2.571.341,80	2.705,27
Pengadaan Listrik dan Gas	4.319,30	4.549,40	4.810,60	4.968,00	5,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.092,20	1.241,20	1.367,80	1.491,30	1,58
Konstruksi	898,330	965.589,10	1.061.482,60	1.138.880,10	1.109,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.155.904,90	1.365.057,10	1.528.122,30	1.700.907,90	1.793,01
Transportasi dan Pergudangan	70.261,90	74.552	82.104,70	91.072,70	88,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.520,90	51.560	57.840,70	65.884,50	66,71
Informasi dan Komunikasi	44.413,60	50.056,90	56.262,20	62.061,60	72,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	101.477,60	108.354,20	119.299,00	126.073,90	123,80
Real Estate	202.913,50	217.075,70	240.438,80	268.382,50	279,17
Jasa Perusahaan	2.394,20	2.768,50	3.135,00	3.578,70	3,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370.556,50	381.053,70	382.058,70	391.040,50	407,30
Jasa Pendidikan	443.332,70	449.178,80	487.352,70	531.587,20	527,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.269,10	115.131,00	122.726,20	131.608,30	146,80
Jasa lainnya	145.512,40	162.688,50	177.230,00	195.234,00	205,45
PDRB	14.758.367,50	15.877.312,30	17.499.935,80	19.076.932,10	19.303,45

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

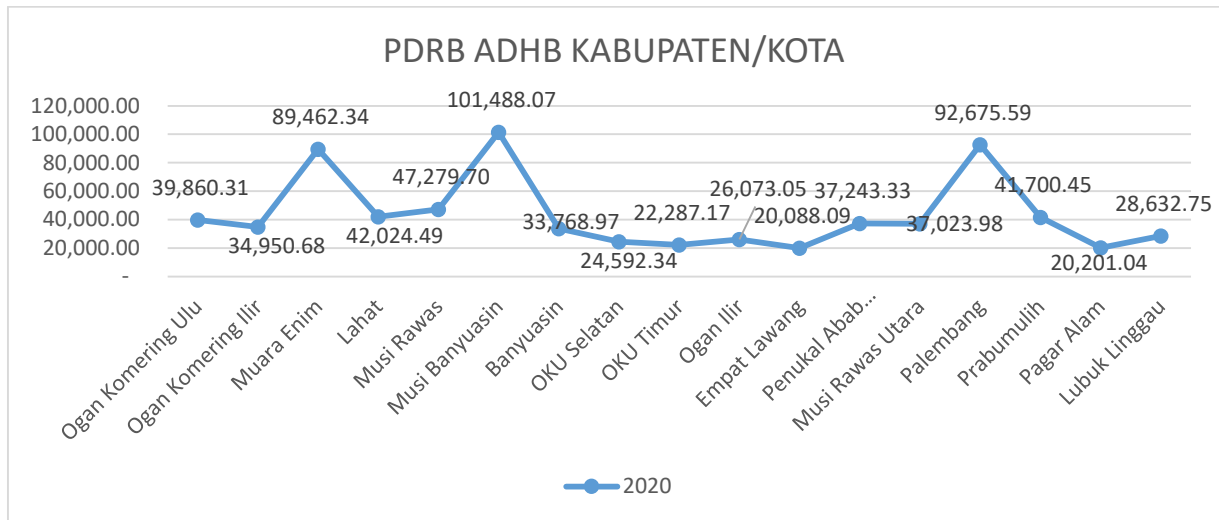
Berdasarkan data pada tabel 2.5 Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar Rp.14,75 triliun meningkat menjadi Rp.19,30 triliun pada tahun 2020. Peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB atas

dasar harga berlaku mencapai 5,58 triliun rupiah dan memiliki peranan dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020

Sektor PDRB	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,284,639.30	5,587,375.00	5,821,982.10
B Pertambangan dan Penggalian	5,520,962.40	6,206,843.90	5,944,766.20
C Industri Pengolahan	2,414,212.80	2,603,341.80	2,705,274.90
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,810.60	4,968.00	5,738.90
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,367.80	1,473.50	1,579.00
F Konstruksi	1,042,682.60	1,120,880.10	1,109,628.90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,525,122.30	1,699,407.90	1,793,014.10
H Transportasi dan Pergudangan	82,104.70	91,072.70	88,133.90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,840.70	65,884.50	66,708.10
J Informasi dan Komunikasi	56,262.20	62,061.60	72,692.30
K Jasa Keuangan dan Asuransi	116,715.70	122,559.70	123,801.80
L Real Estate	240,438.80	268,382.50	279,167.20
M.N Jasa Perusahaan	3,135.00	3,578.70	3,951.60
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382,058.70	391,040.50	407,300.20
P Jasa Pendidikan	465,096.90	509,331.40	527,467.90
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,326.20	131,608.30	146,796.70
R.S.T.U Jasa lainnya	177,230.00	195,234.00	205,447.50
Produk Domestik Regional Bruto	17,495,006.70	19,065,044.30	19,303,451.40

Grafik 2.4
PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2020

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019-2020 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.28	30.16
Pertambangan dan Penggalian	32.54	30.80
Industri Pengolahan	13.48	14.01
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01
Konstruksi	5.97	5.75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.92	9.29
Transportasi dan Pergudangan	0.48	0.46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.35	0.35
Informasi dan Komunikasi	0.33	0.38
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.66	0.64
Real Estate	1.41	1.45

Lapangan Usaha	2019	2020
Jasa Perusahaan	0.02	0.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.05	2.11
Jasa Pendidikan	2.79	2.73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.69	0.76
Jasa lainnya	1.02	1.06
Produk Domestik Regional Bruto	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2020

Tahun 2019-2020 merupakan tahun berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dengan *leading sector* yang menjadi unggulan selama ini sebagai penyumbang PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga sektor pertambangan dan penggalian. Di tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan 29,28 persen, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020, yaitu sebesar 30,16 persen. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan sebesar 32,54 persen pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 30,80 persen pada tahun 2020.

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Musi Rawas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2020 (%)

SEKTOR PDRB	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.72	0.99
Pertambangan dan Penggalian	7.87	-0.92
Industri Pengolahan	6.06	0.75
Pengadaan Listrik dan Gas	6.51	13.10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.05	5.46
Konstruksi	6.41	-1.44

SEKTOR PDRB	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.94	-0.02
Transportasi dan Pergudangan	8.75	-4.57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.74	-0.56
Informasi dan Komunikasi	8.09	15.10
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.85	1.46
Real Estate	7.47	1.05
Jasa Perusahaan	7.63	7.91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.22	2.99
Jasa Pendidikan	7.95	0.35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.09	6.48
Jasa lainnya	4.81	1.37
Produk Domestik Regional Bruto	5.88	0.24

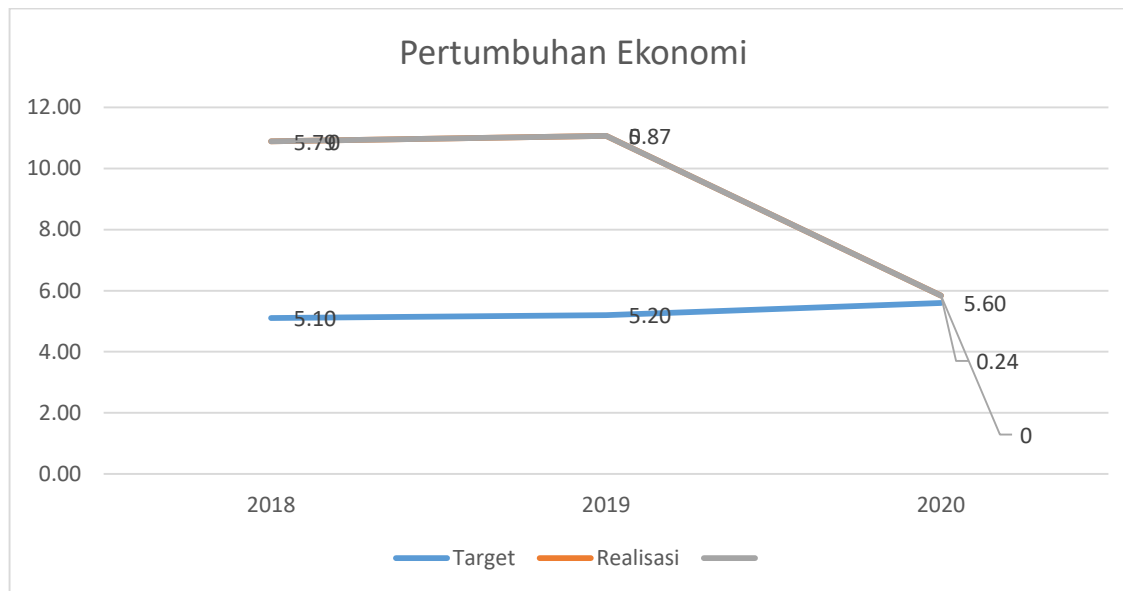
Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2020

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2020 sebesar 0,24 persen atau mengalami penurunan sebesar 5,63 persen dibandingkan tahun 2019. Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan terjadinya penurunan disetiap sektor PDRB. Hanya beberapa sektor mengalami peningkatan yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar, sektor Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 sebesar 5,79 dengan capaian sebesar 113,52 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,87 dengan capaian sebesar 112,88 persen. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,24 dengan capaian sebesar 4,28 persen. Untuk melihat realisasi dan capaian pertumbuhan ekonomi berdasarkan target yang ditetapkan pada RKPD dapat dilihat pada berikut.

Grafik 2.5

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020
Berdasarkan Target pada RKPD

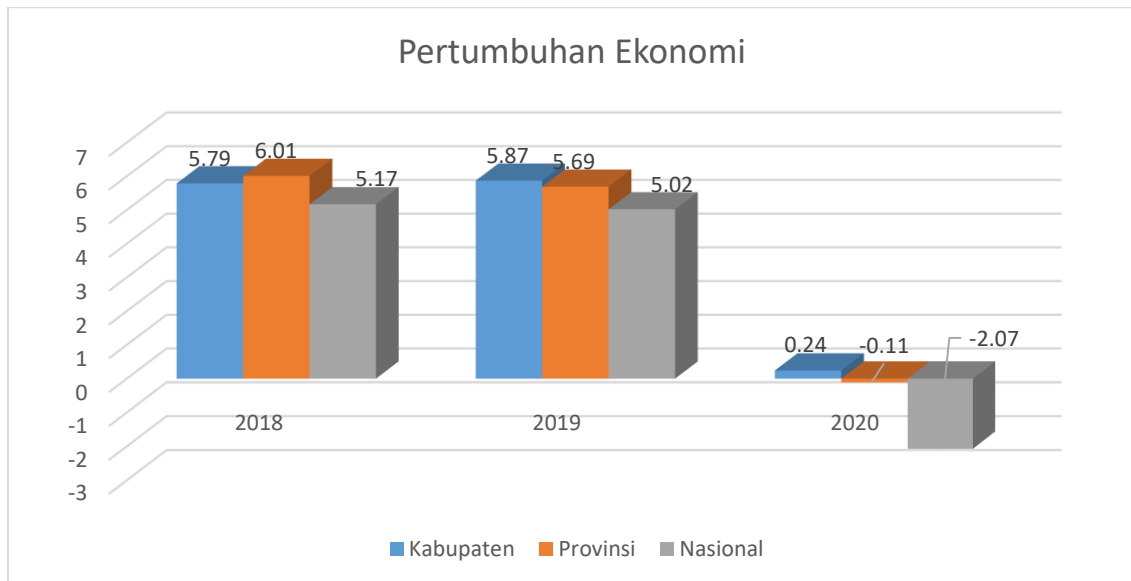


Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Pada tahun 2018 sebesar 5,79 lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,17 namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi sebesar 6,01. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan sebesar 5,87 dan berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2020, adanya pandemi covid yang terjadi diseluruh wilayah di Indonesia menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten mengalami penurunan mencapai sebesar 0,24 lebih besar jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi sebesar -0,11 dan Nasional sebesar -2,07.

Perbandingan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6

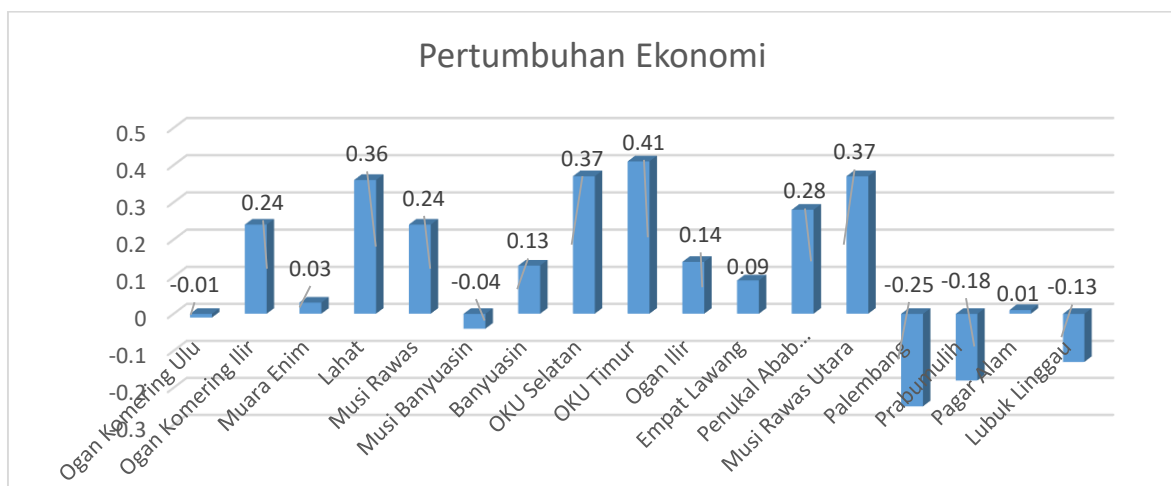
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,24 dan berada pada peringkat ketujuh tingkat Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

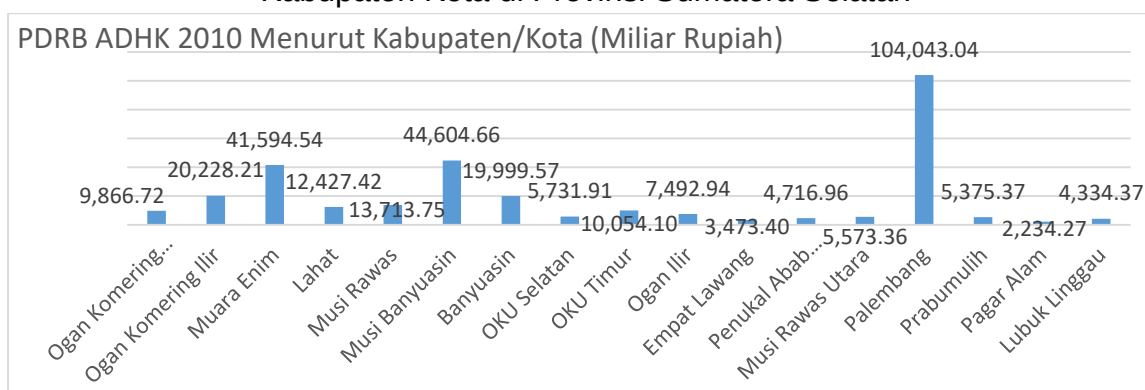
Grafik 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020



PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 mencapai sebesar 13.713,75. Apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan PDRB ADHK cukup baik dengan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera selatan. Dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dilihat dari nilai PDRB. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada Pengeluaran Makanan dan Non Makanan. Target Nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 33.746.948 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 47.279.700 atau mencapai 140,10%.

Tabel 2.9

Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Target Daerah

Indikator	Tahun 2020		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PDRB perkapita ADHB	33.746.948	47.279.700	140,10

Sumber: Angka Proyeksi**

2. Inflasi

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi adalah inflasi. Inflasi sektoral yang dilihat dalam publikasi ini digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen.

Tabel 2.10
Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) %
Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Musi Rawas	2,74	3,94	2,42	2,10	1,97
Provinsi Sumsel	3,68	2,96	2,74	2,96	1,55
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Sumsel

Dari tabel diatas angka inflasi berfluktuatif dan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 3,94%, tingginya angka inflasi didominasi oleh kelompok Perumahan sebesar 0,19. Angka Inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. Angka optimal yang harus dijaga pada kisaran 0-5%. Tahun 2020 Inflasi paling besar terjadi pada kelompok makanan, inflasi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan year on year mencapai 1,97 % atau lebih besar dari inflasi Provinsi dan Nasional.

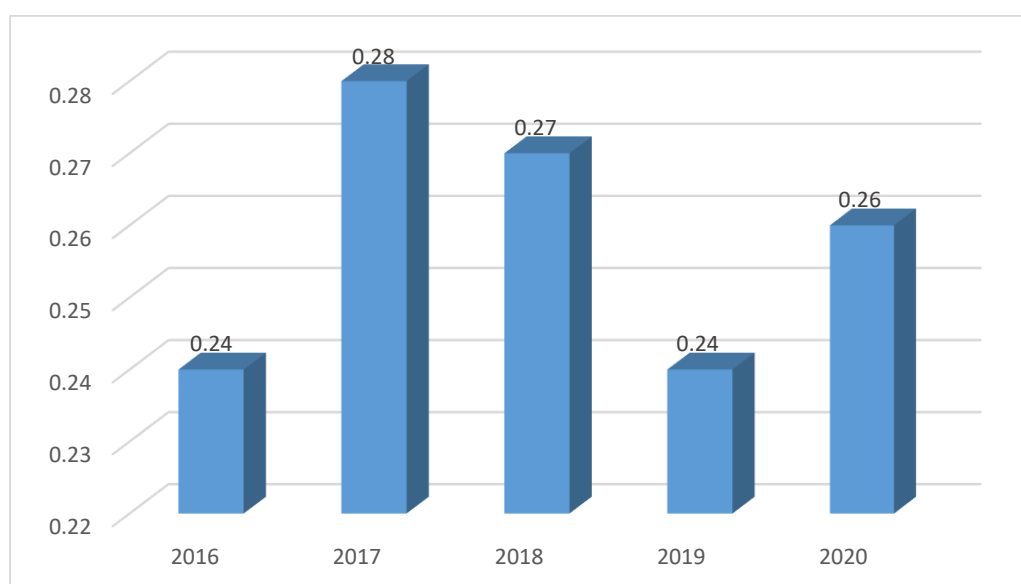
3. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Trend selama 5 (lima) tahun rata-rata Gini Rasio Musi Rawas menunjukkan kesenjangan semakin berkurang. Salah satu penyebab angka ketimpangan relatif lebih rendah tidak lepas dari perekonomian Kabupaten Musi Rawas masih bertumpu pada sektor Primer Pertanian yang mempunyai metode produksi yang padat karya, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai

buruh tani/perkebunan, buruh bangunan sehingga pembagian pendapatan relatif lebih merata atau disparitas pendapatan antar penduduk relatif kecil, bila dibandingkan sektor modern yang padat modal dalam produksi. Adanya Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 menyebabkan Gini Ratio mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Rawas saja, tetapi terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik 2.9.

Grafik 2.9

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

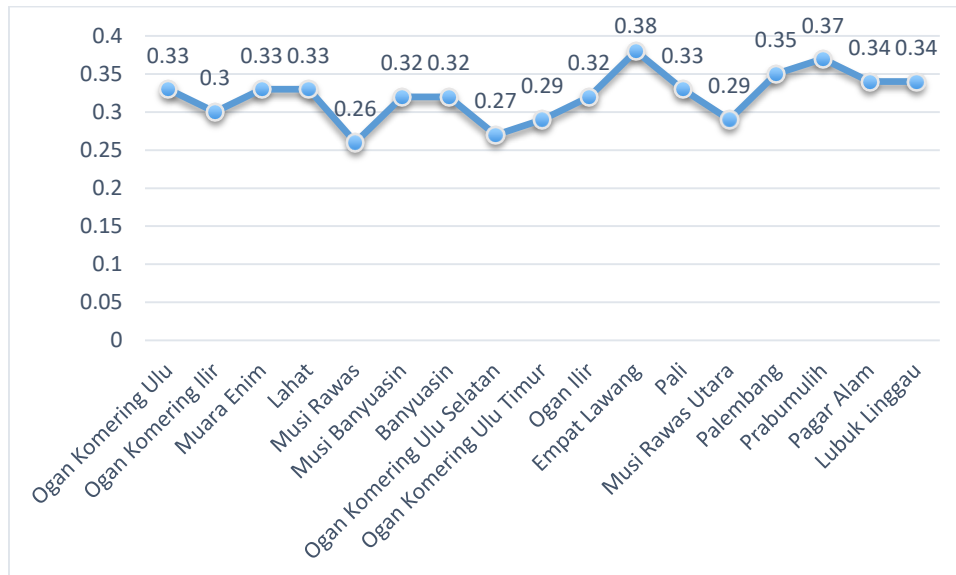


Sumber : BPS Sumsel Tahun 2020

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten yang memiliki Gini Ratio rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Musi Rawas lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. Gini Ratio Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Grafik. 2.10.

Grafik 2.10

Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2020

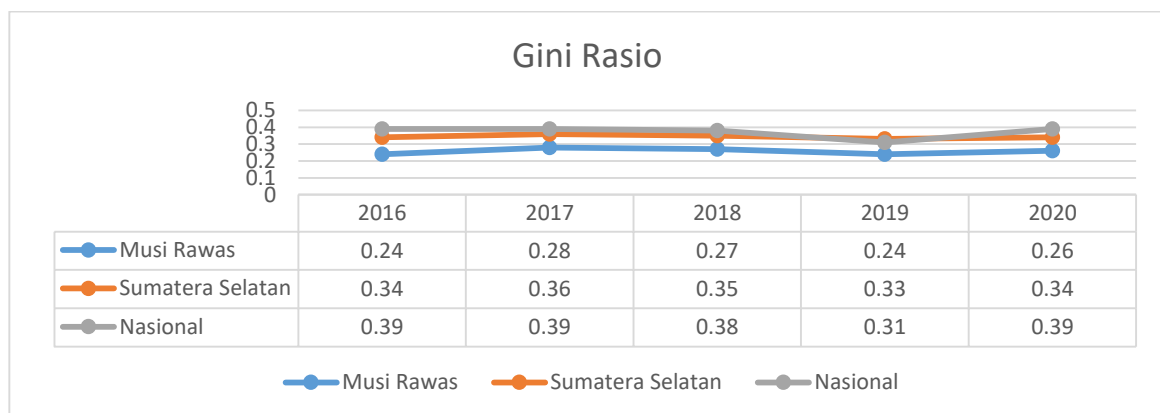


Sumber : BPS Sumsel Tahun 2020

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Provinsi dan Nasional maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas berada di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional. Dapat dilihat pada grafik 2.11

Grafik 2.11

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



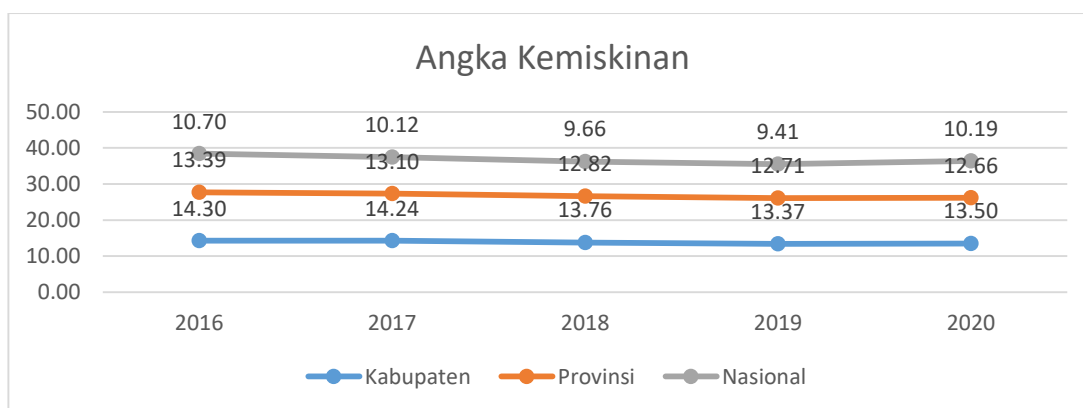
Sumber : BPS Sumsel Tahun 2020

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pada grafik gini ratio di Kabupaten Musi Rawas berfluktuatif, jika dilihat dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Kabupaten Musi Rawas terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi hingga mencapai 0,240 persen di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan peningkatan gini rasio menjadi 0,26. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional, maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020 masih berada di bawah Provinsi Sumsel yang mencapai 0,34 dan Nasional yang mencapai 0,39.

4. Kemiskinan

Grafik 2.12

Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020



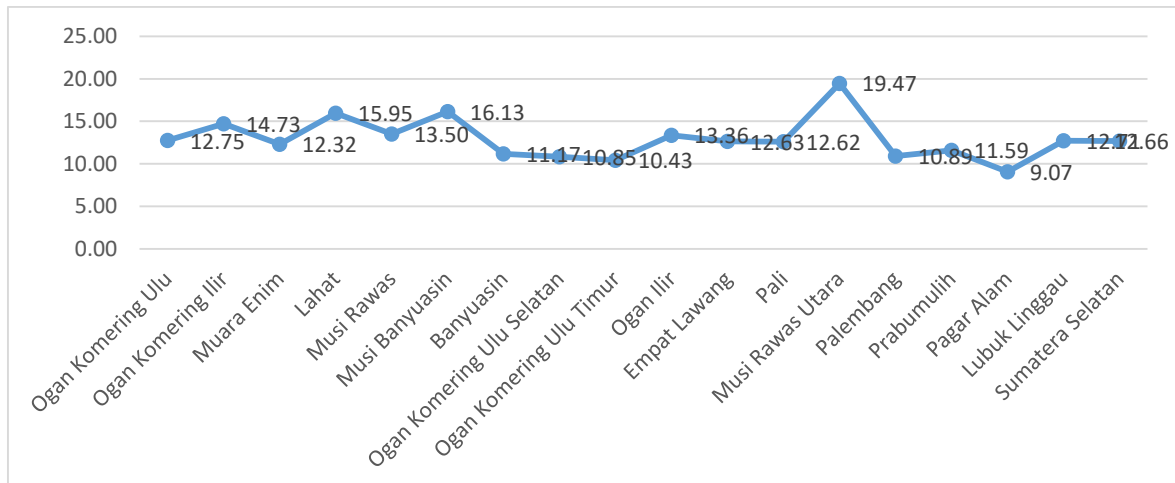
Sumber : BPS Tahun 2020.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan data pada grafik 2.6 diatas, Tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas sebesar 14,30% sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 13,37%. Pada tahun 2020, angka kemiskinan mencapai 13,50% atau mengalami kenaikan sebesar 0.13%. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas. Meningkatnya angka kemiskinan juga terjadi di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Untuk itu Kabupaten Musi Rawas

telah berusaha melakukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi dan melaksanakan program yang terintegrasi di berbagai sektor pembangunan.

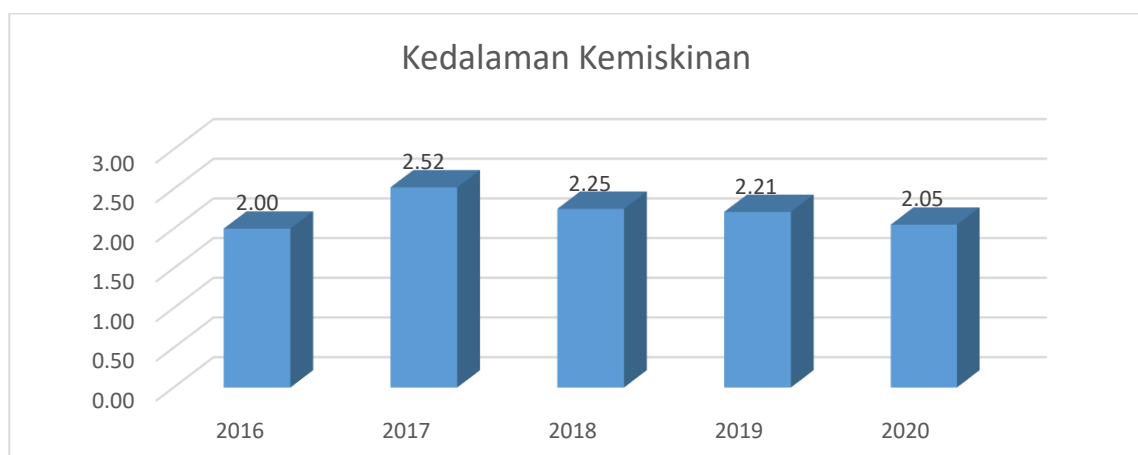
Grafik 2.13
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Tahun 2021.

Pada grafik, Untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan ke lima di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Grafik 2.14
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016-2020

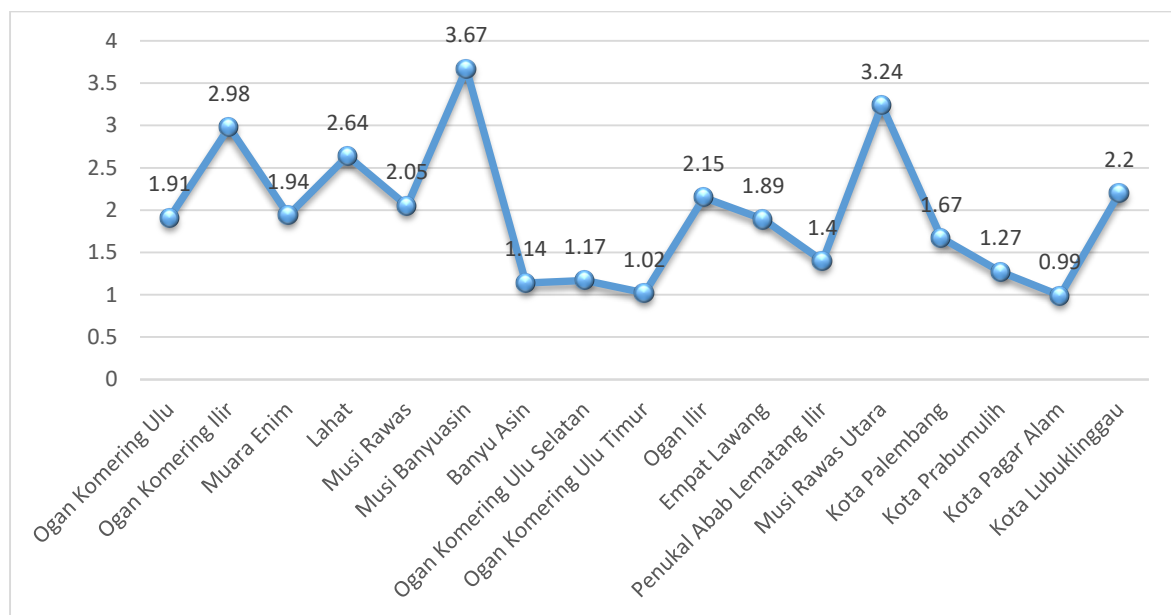


Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi

Dari grafik diatas dapat dilihat kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 sebesar 2,00 meningkat pada tahun 2017 menjadi 2,52. Pada tahun 2018 kedalaman kemiskinan sebesar 2,25 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 2,05.

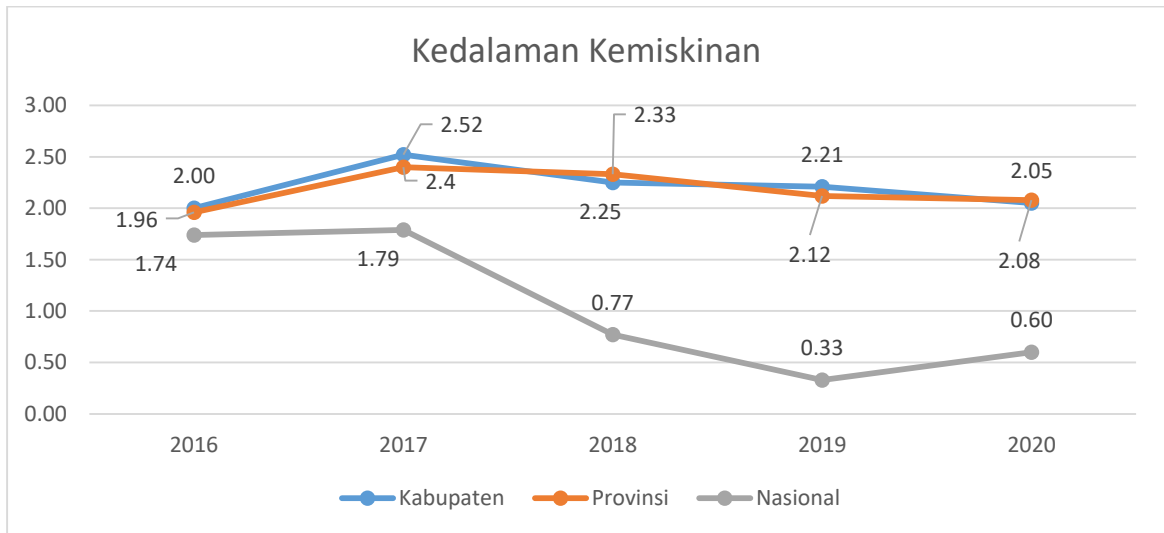
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020, jika dibandingkan Kabupaten/Kota di sekitar Sumatera Selatan berada di posisi tengah atau kedalaman kemiskinan tidak terlalu tinggi dan rendah. Untuk melihat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.15
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
Tahun 2020



Bila disandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih lebih tinggi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16
Kedalaman Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 - 2020

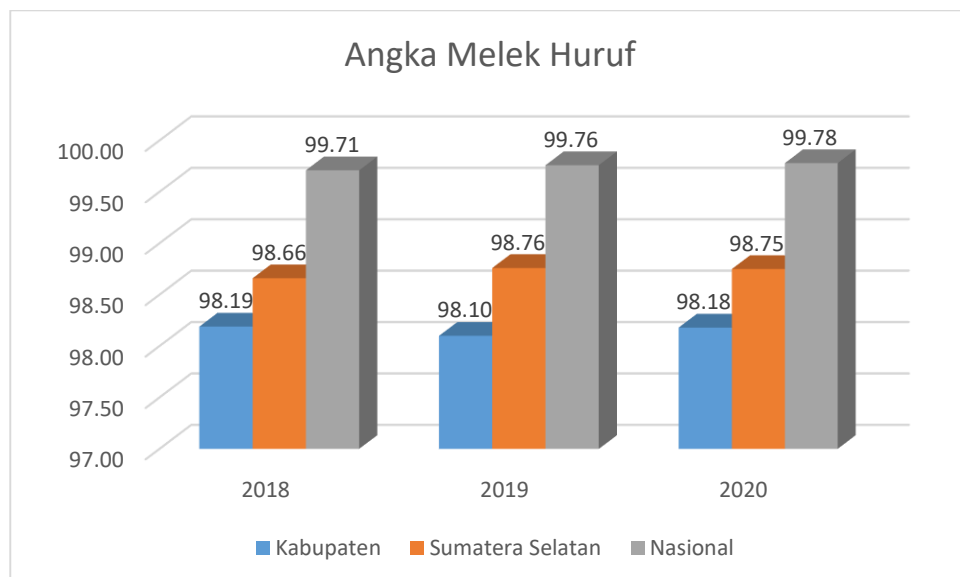


Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi, BPS Musi Rawas

B. Fokus Kesejahteraan Sosial.

1. Angka Melek Huruf

Grafik 2.17
Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Tahun 2020; BPS Provinsi Sumsel Tahun 2020

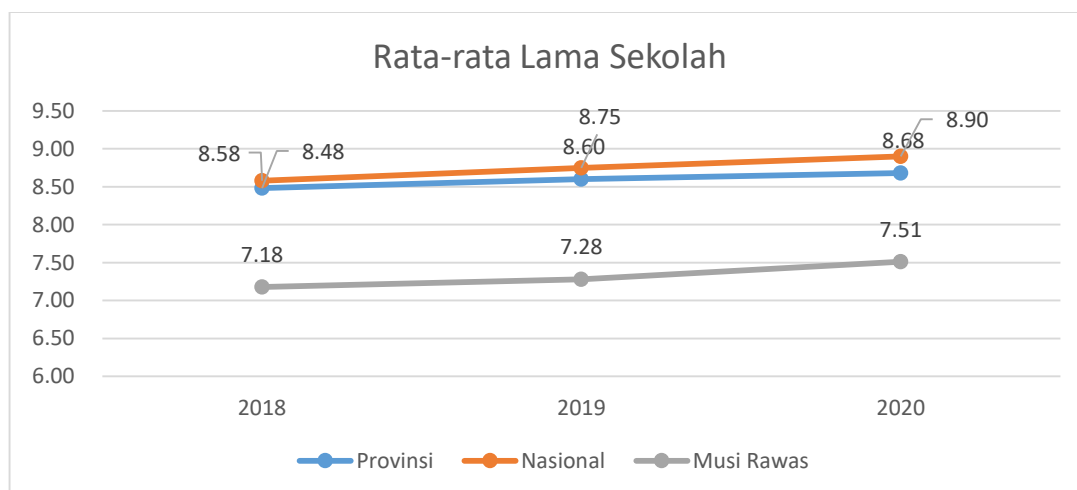
Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif. Pada tahun 2018, Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas sebesar 98,19 mengalami peningkatan ditahun 2019 mencapai 98,10 dan pada tahun 2020 dengan adanya wabah Covid 19 menyebabkan Angka Melek Huruf mengalami penurunan menjadi 98,18. Angka Melek Huruf Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 sebesar 98,18 masih berada dibawah capaian Provinsi sebesar 98,75 dan capaian Nasional 99,78.

2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan tahun belajar penduduk usia 15 Tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang).

Grafik 2.18

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020



Sumber : BPS 2020 , BPS Provinsi dan BPS Kab. Mura

Dari data grafik diatas maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebesar 0,33. Pada tahun 2020 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas 7,51 dan masih berada dibawah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi sebesar 8,68 dan Nasional sebesar 8,90.

C. Fokus Seni Budaya

1. Budaya

Ragam budaya di Musi Rawas, secara umum terbagi menjadi dua yaitu benda cagar budaya dan benda cagar budaya tak benda. Selain itu terdapat juga cerita rakyat, kuliner dan bahasa lokal. Sebagaimana daerah lain di provinsi Sumatera Selatan, kebudayaan Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi juga oleh budaya melayu, agama islam, agama hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan eksistensi Kerajaan Sriwijaya.

2. Seni

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki moto darah yang disebut *“Lan Serasan Sekantenan”* secara harfiah diartikan Lan berasal dari bahasa sindang dan musi yang berarti kerja atau usaha sedangkan Serasan berarti mufakat. Sekantenan berasal dari bahasa rawas yang berarti berteman akrab atau kelompok. Kesimpulan dari *“Lan Serasan Sekantenan”* adalah karya mufakat yang kompak yang menunjukkan adanya kerja sama dalam mensukseskan setiap kegiatan pembangunan di daerah. Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai jenis tarian dan lagu daerah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

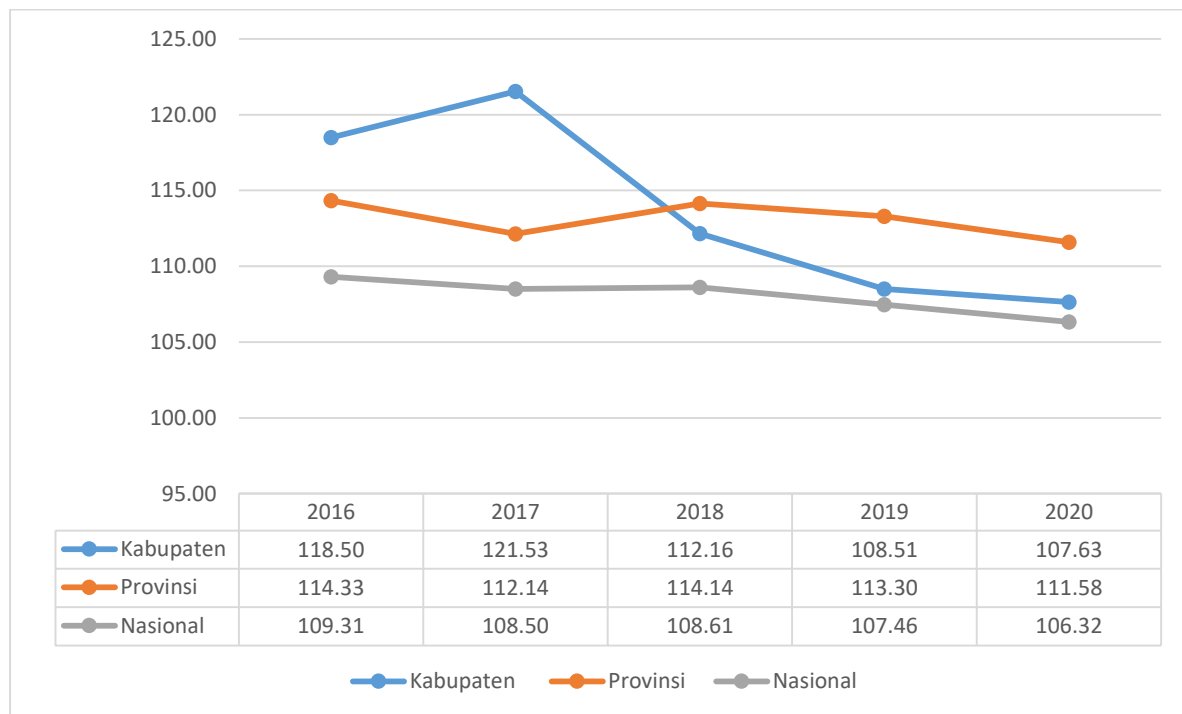
1. Pendidikan

Dengan adanya penerapan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 maka pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Grafik 2.19
Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020

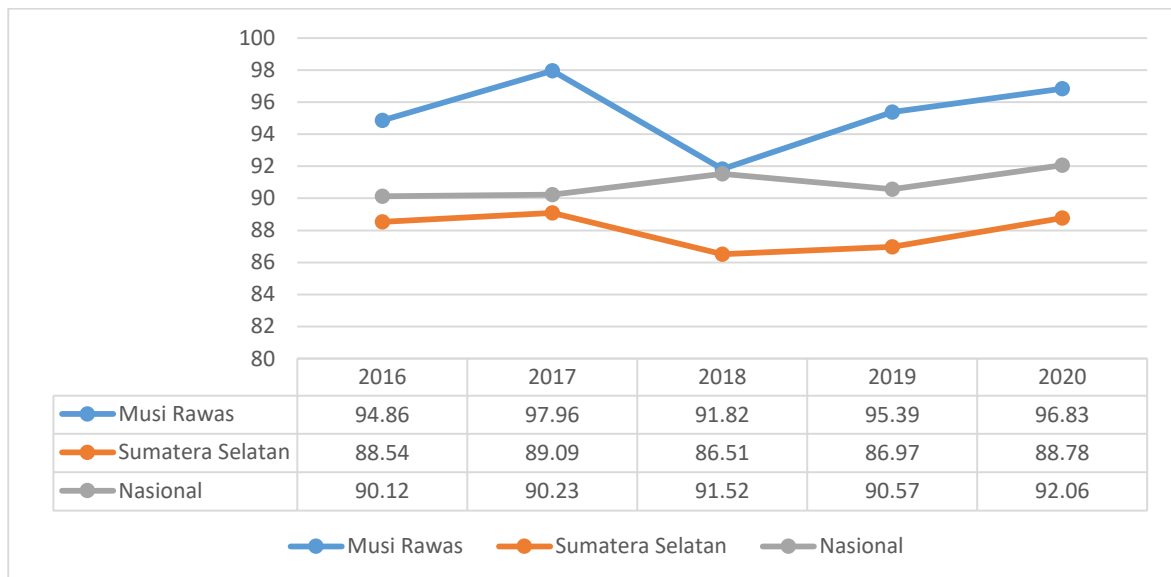


Sumber : BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan APK Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 APK Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan dan secara umum lebih besar dari APK Nasional, namun APK Kabupaten Musi Rawas lebih kecil jika dibandingkan dengan APK Provinsi.

Grafik 2.20

Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Musi Rawas 2020, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

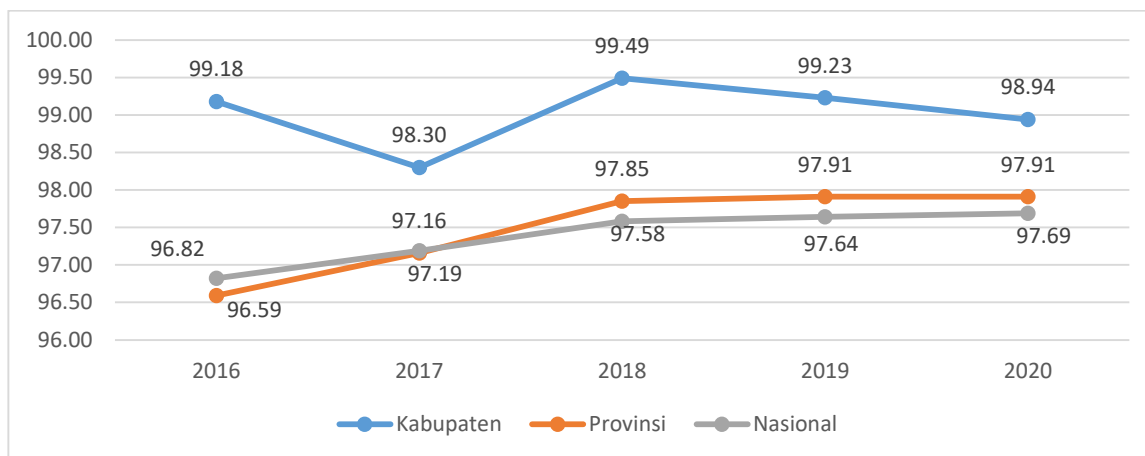
Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif. Secara umum nilai APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas berada diatas APK SMP/MTS Provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas mampu menampung usia sekolah lebih dari target yang telah ditetapkan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase pada jumlah anak pada usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Grafik 2.21

Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020

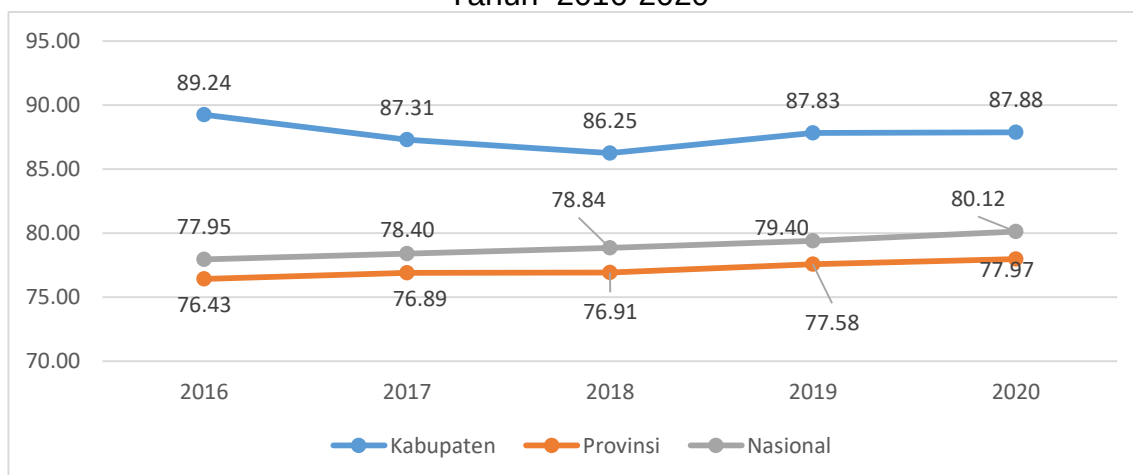


Sumber : BPS Musi Rawas 2020, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas mencapai 98,94 persen atau lebih besar jika dibandingkan APM SD/MI Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.22

Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Musi Rawas 2020, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun

2020 APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mencapai 87,88 persen atau lebih besar jika dibandingkan APM SMP/MTS Provinsi dan Nasional.

. APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mendekati nilai 100 dan termasuk dalam katagori baik.

2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IK: Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Persentase Kabupaten Musi Rawas Gizi Buruk dan Angka Kematian Ibu /100.000 KH. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam berikut.

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kematian bayi/1000 KH	10,60	8,87	13,47	6,46	3,98	3,1
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,18	67,26	67,34	67,59	67,86	68,14
3.	Persentase Balita gizi Buruk	0,15	0,15	0,090	0,070	0,75	0,45
4.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000/pddk)	169,85	171,84	102,96	164,86	96,01	94,01
5.	Penurunan Stunting	NA*	NA*	NA*	1.499	856	1.857

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Pada tabel dapat dilihat bahwa adanya trend penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2015 sebesar 10,60 sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,1 sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) juga mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 169,85 menjadi 94,01 pada tahun 2020.

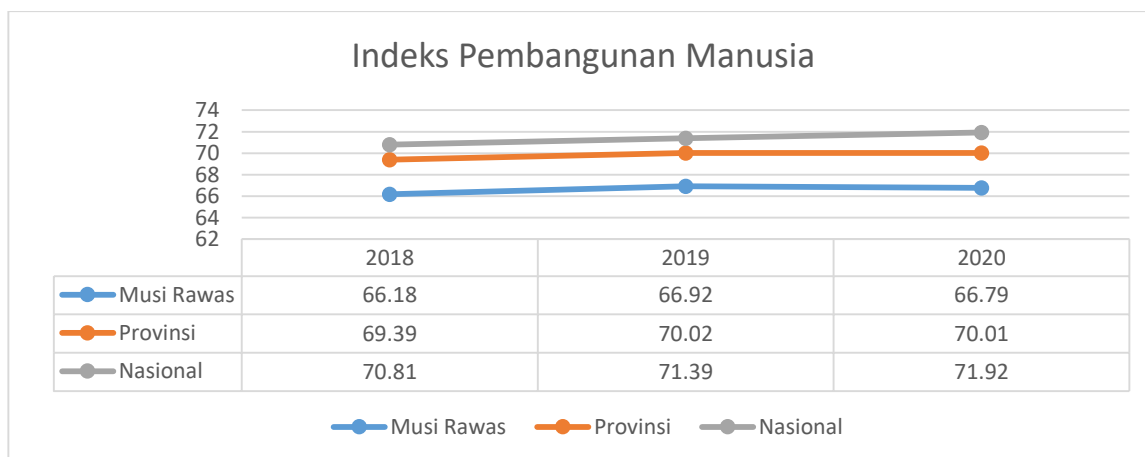
Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 67,18 sampai dengan tahun 2020 sebesar 68,14. Peningkatan tersebut didukung dengan peningkatan akses Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Primer (UKP) serta peningkatan preventif dan promotif. Sedangkan Gizi Buruk pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif.

Pertumbuhan anak-anak dengan tinggi badan kurang (pendek) dan sangat kurang (sangat pendek) yang dapat dikategorikan stunting. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 berfluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah anak stunting sebesar 1.499 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 856 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah anak yang stunting meningkat kembali menjadi 1.857 jiwa. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan melalui dinas Kesehatan dan crosscutting dengan beberapa Perangkat Daerah dan stakeholders terkait, upaya penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu dengan program perbaikan gizi masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 sebesar 66,18 meningkat pada tahun 2019 menjadi 66,92 dan pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid 19 IPM mengalami penurunan menjadi 66,79 atau menurun sebesar 0,13 berada dibawah IPM Provinsi sebesar 70,01 dan IPM Nasional sebesar 71,92.

Grafik 2. 23
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Provinsi Sumsel 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan yang sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan di wilayah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.

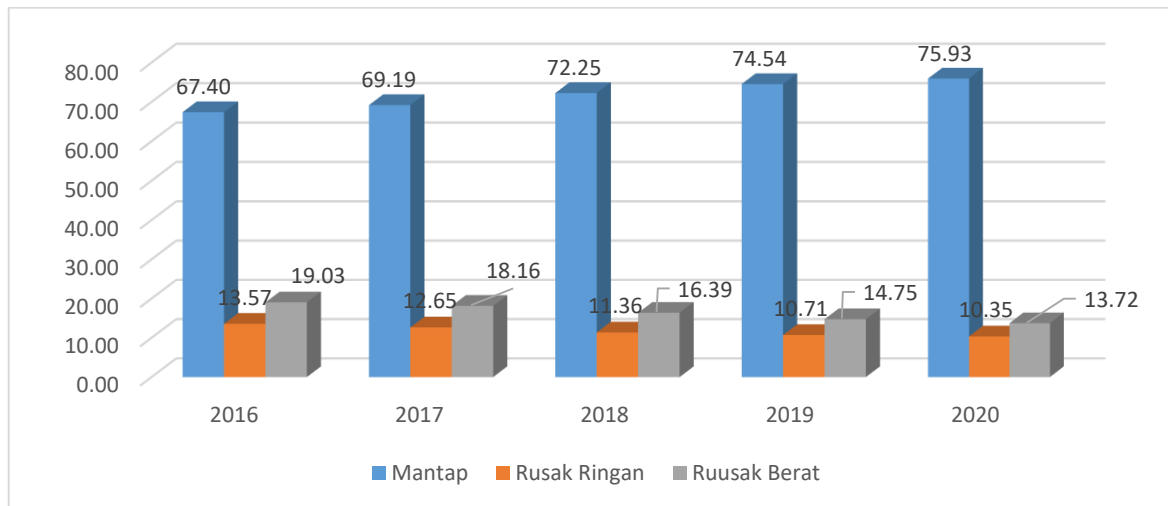
Berdasarkan Keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruang Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) bahwa ruas Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Rawas yaitu N12 (ruas Maur-Terawas 36,20 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kab. Muratara-Terawas 9,3 Km), N13 (ruas Terawas-Batas Kota Lubuklinggau 24 Km), N15 (ruas Simpang Periuk-Muara Beliti 13,5 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kota Lubuklinggau-Muara Beliti 9,88 Km), N16 (ruas Muara Beliti-Batas Kab. Musi Rawas 27,2 Km), dan N35 (ruas Batas Kab. Muba-Muara Beliti 78,26 Km). Jadi panjang Jalan Nasional yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 151,96 Km. Sedangkan ruas Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ada 2 ruas yaitu P82 (ruas Simpang Periuk-Tugumulyo-Terawas 38 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas 33,28 Km) dan P83 (ruas Terawas-Taba Tinggi-Maur 56,25 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : Terawas-Batas Kab. Muratara 17 Km). Maka panjang Jalan Provinsi yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 50,28 Km. Kemudian Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km.

Jalan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 151,96 Km, Jalan Provinsi 94,25 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km. Dengan rincian Jalan Aspal sepanjang 262,733 Km, Koral sepanjang 208,358 Km, Jalan Rigid Beton sepanjang 54,664 Km, Pembukaan Jalan 29,29 Km, Jalan desa 1.753,49 Km dan Jalan Non Status sepanjang 63 Km. Rasio panjang jalan terhadap

luas wilayah Kabupaten Musi Rawas 0,0022 Km/Ha. Sedangkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.24

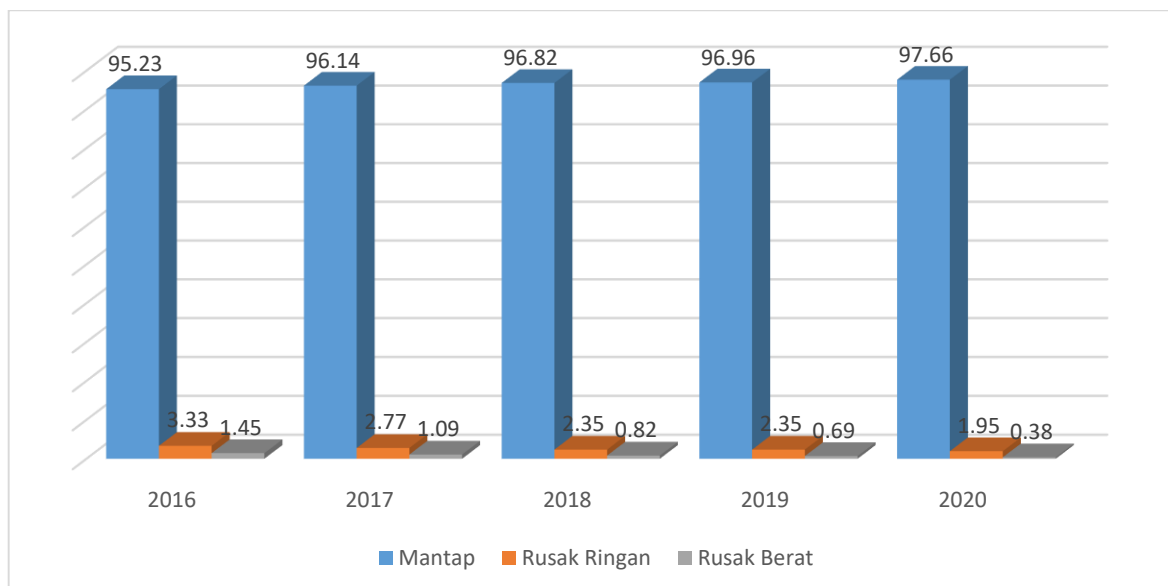
Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020



Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Grafik 2.25

Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020



Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, ada 2 (dua) DI Pusat (DI Kelingi-Tugumulyo 8.841 Ha dan DI Air Lakitan 9.500 Ha), 4 (empat) DI Provinsi (DI Air Deras I 1.461 Ha, DI Gegas 2.300 Ha, DI Air Saten 1.175 Ha dan DI Megang Tikip 1.077 Ha) dan 43 (empat puluh tiga) DI Kabupaten Musi Rawas (31 DI di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan 12 DI di wilayah Kab. Muratara).

Tabel 2.12
Daerah irigasi kabupten Musi Rawas

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKSI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Air Deras II	Sumber Harta		928
	DI Air Deras II (Aur)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	542
	DI Air Deras II (Moyan)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	386
2.	DI Megang Tikip	Purwodadi (Sumber Sari dan Wonosari)	Irigasi Teknis	912
3.	DI Air Tupak	Tugumulyo dan Purwodadi	irigasi Semi Teknis	778
4.	DI Ketuan Kecil/Bumi Agung	Muara Beliti (Bumi Agung)	irigasi Semi Teknis	593
5.	DI Pelita Jaya	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	400
6.	DI Air Kelingi SP II	Muara Kelingi	irigasi Semi Teknis	400
7.	DI Jajaran Baru	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	360
8.	DI Sri Kemuning	STL Ulu Terawas (Srimulyo)	irigasi Semi Teknis	360
9.	DI Air Nangka	Muara Lakitan (Semeteh)	irigasi Semi Teknis	360
10.	DI Sukamana	STL Ulu Terawas (Sukamana dan Kosgoro)	irigasi Semi Teknis	314
11.	DI Air Cekar SP III	BTS Ulu (Cekar SP III)	irigasi Semi Teknis	300
12.	DI Sukakarya	STL Ulu Terawas (Sukakarya)	irigasi Semi Teknis	250
13.	DI Sawah Pangeran	Mura Lakitan (sawah Pangeran)	irigasi Semi Teknis	250
14.	DI Sukaraya	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	246
15.	DI Sukarame	Sumber Harta (Sukarame)	irigasi Semi Teknis	200
16.	DI Dangku	Megang Sakti (dangku dan Sendang Sari)	irigasi Semi Teknis	200
17.	DI Air Kambil	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
18.	DI Pelita Jaya I	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
19.	DI Setia Marga	Mura Lakitan	irigasi Semi Teknis	200

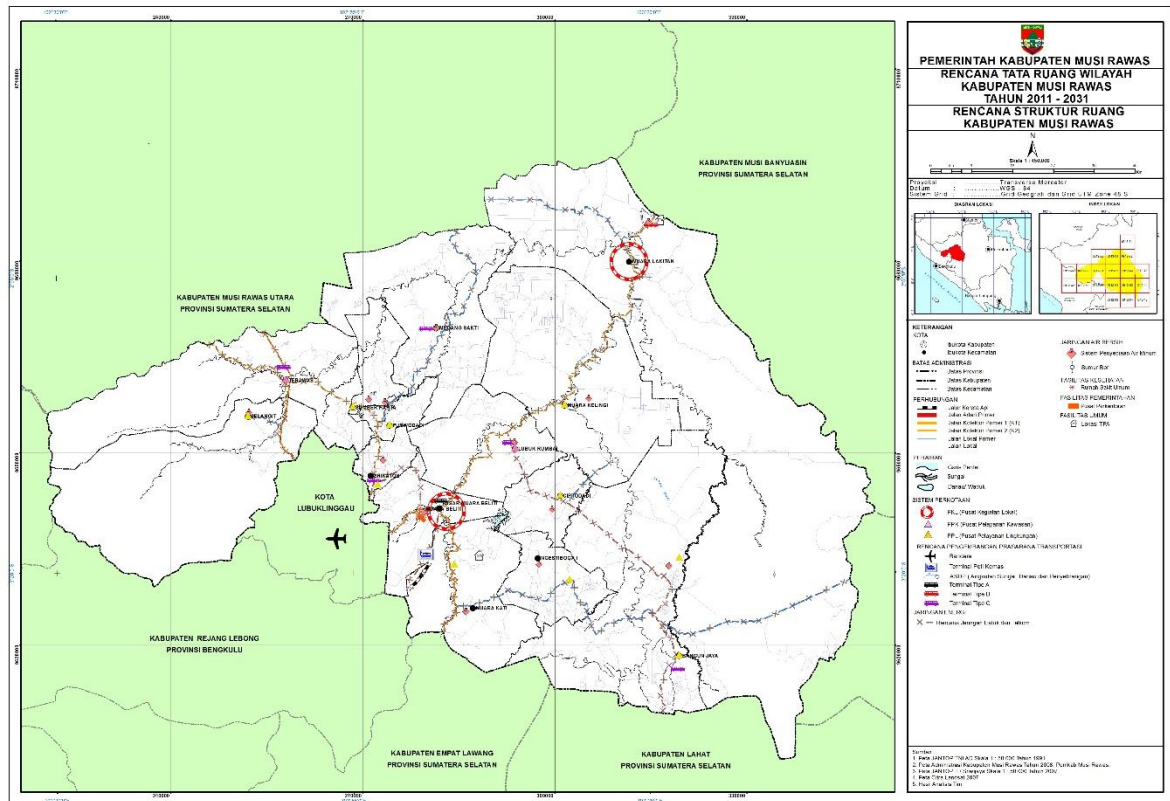
NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKASI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
20.	DI Kosgoro	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	160
21.	DI Paduraksa	STL Ulu Terawas (Paduraksa)	irigasi Semi Teknis	150
22.	DI Sidomulyo	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	100
23.	DI Marga Baru	Muara Lakitan (Marga Baru)	irigasi Semi Teknis	100
24.	DI BPD Pendo	Purwodadi	Irigasi Teknis	361
25.	DI Kasang Tinggi	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	300
26.	DI Pelita Jaya II	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
27.	DI Sungai Pinang	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
28.	DI Paduraksa II	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	110
29.	DI Megang Sakti V	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
30.	DI Wonosari	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	50
31.	DI Q2 Wonorejo	Tugumulyo	irigasi Semi Teknis	30
TOTAL				9412

Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

b. Penataan Ruang

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Maka struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kecamatan Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional. Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Peta struktur ruang Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 2.5
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas



Pada gambar di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, maka arahan struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

- a. Kota Muara Beliti;
- b. Muara Lakitan.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah :

- a. Simpang Terawas (Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas); adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung dengan Lubuklinggau dan juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:

- 1) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
 - 2) Kecamatan Selangit, dan
 - 3) Kecamatan Sumber Harta
 - b. Mengang Sakti; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :
 - 1) Kecamatan Purwodadi dan
 - 2) Kecamatan Tugumulyo
 - c. Simpang Semambang (Tuah Negeri); adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau - Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;
 - 1) Kecamatan Tuah Negeri
 - 2) Kecamatan Muara Kelingi
 - 3) Kecamatan Jayaloka
 - 4) Kecamatan Sukakarya
 - 5) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
 - 6) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut :
- a. Tugu Mulyo (Kecamatan Tugumulyo)
 - b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
 - c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
 - d. Selangit (Kecamatan Selangit)
 - e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
 - f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
 - g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
 - h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
 - i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan

NO	KECAMATAN	HIRARKI	FUNGSI YANG DIEMBAN PUSAT KEGIATAN/PELAYANAN															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
4	Megang Sakti	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
5	Simpang Semambang/ Tuah Negeri	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
6	Selangit	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
9	Purwodadi	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	X
10	T.P. Kepungut	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
11	Jayaloka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
12	BTS. Ulu	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
13	Sukakarya	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
14	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas 2011-2031

Keterangan :

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan, | 11. Kesehatan | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal | 7. Jasa Koperasi Unit Desa | 12. Listrik | |
| 3. Ditribusi dan Koleksi | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi | 13. Telekomunikasi | |
| 4. Industri | 9. Pariwisata dan Jasa penginapan | 14. Irigasi | |
| 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar | 10. Pendidikan | 15. Air Minum Bersih | |

PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PPK: Pusat Pelayanan Kawasan; PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

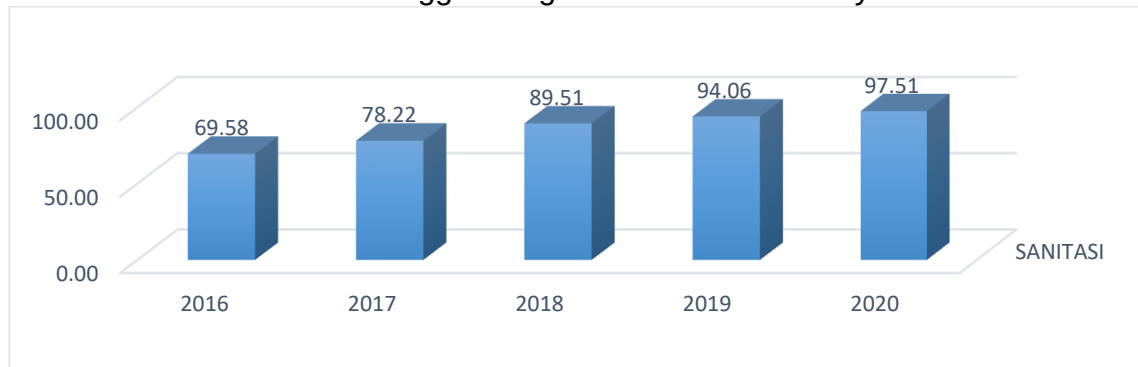
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2016 sebesar 69,58% meningkat 12,42 % pada tahun 2017 menjadi 78,22% dan 89,51% di tahun 2018 atau meningkat sebesar 14,43% berikutnya pada tahun 2019 meningkat sebesar 5,08% atau 94,06% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,45% atau

sebesar 97,51. Data akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.26
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

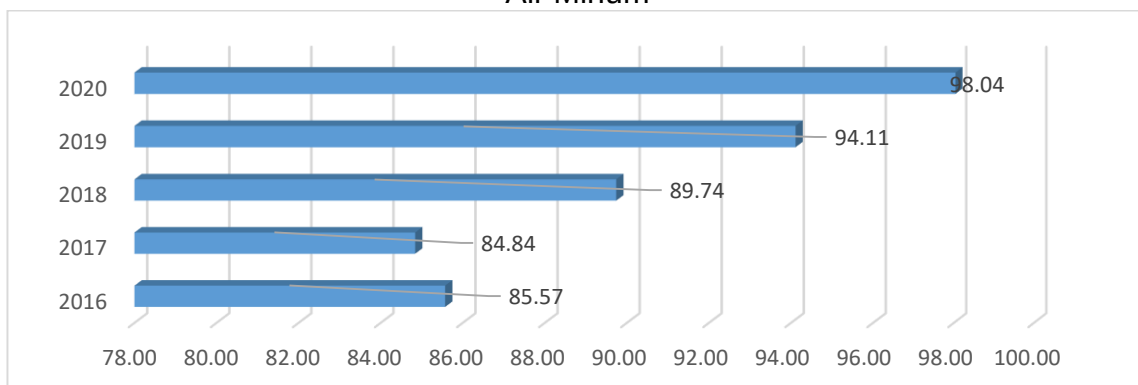


Sumber : Dinas Pu Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan 2021

b. Air Minum

Akses air minum yang layak Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 98,04%. Nilai akses air bersih yang layak Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016-2020 dapat lihat pada grafik berikut.

Grafik 2.27
Air Minum



Sumber : : Dinas Pu Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan, 2021

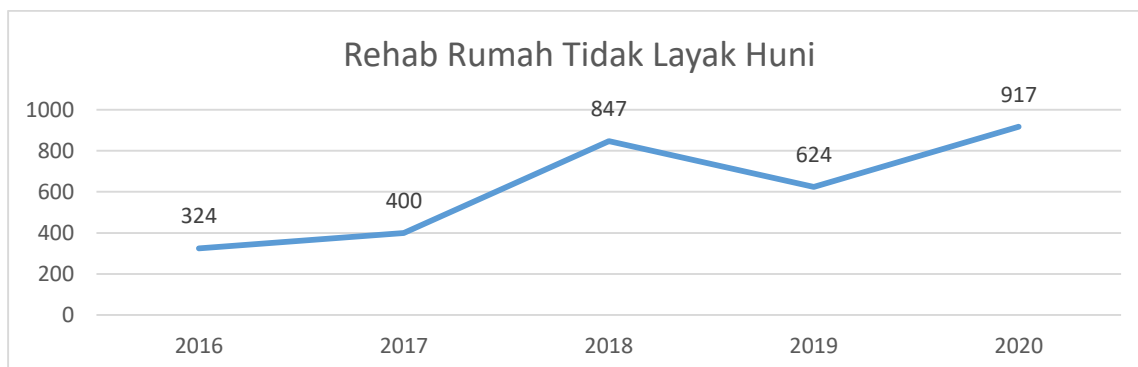
c. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah dengan kondisi bangunan tidak layak dan tidak memiliki akses prasarana yang layak. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2020 sebesar 28,19%. Angka ini terus menurun dengan dilakukannya rehap rumah tidak

layak huni, hingga tahun 2020 sebanyak 3.112 unit, sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:

Grafik 2.28

Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020



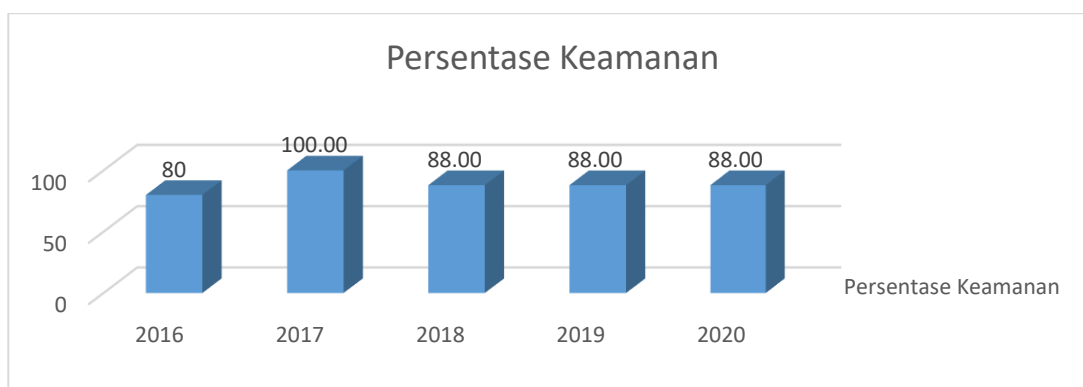
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019, Angka Kriminalitas mencapai 7/10.000 penduduk.

Grafik 2.29

Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016-2020



Sumber : Data SatPolPP Kabupaten Musi Rawas 2021

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang di Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2017 sebanyak 4 buah, sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani mencapai 50,47 % pada tahun 2020. Data urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)	5,04	5,17	16,06	30,45	50,47
2	Angka kemiskinan (%)	14,3	14,24	13,76	13,37	13,50

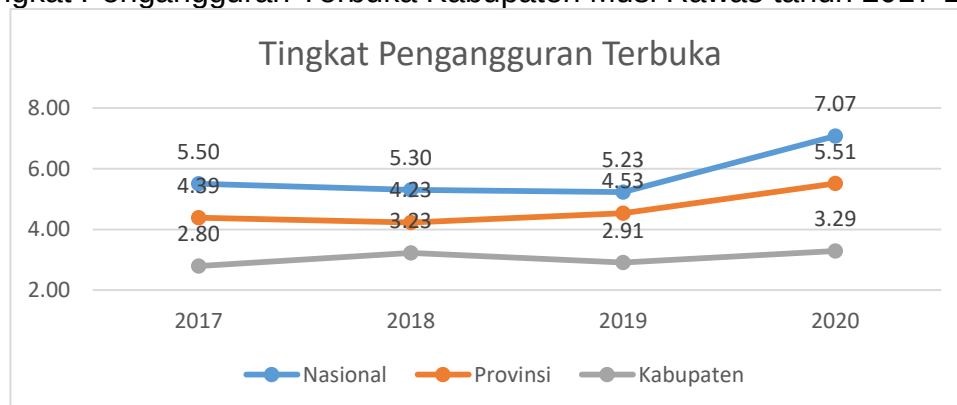
Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2021

7. Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.30

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2020



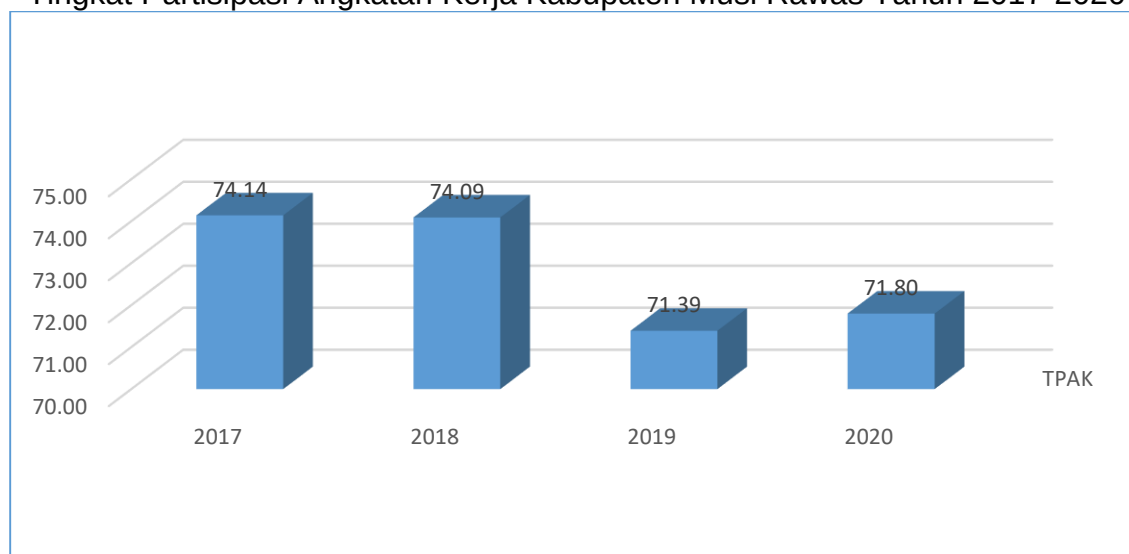
Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi dan BPS Musi Rawas 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas dari tahun pada tahun 2020 mencapai 3,29 atau mengalami kenaikan sebesar 0,38. TPT Kabupaten Musi Rawas lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi sebesar 5,51 dan TPT Nasional sebesar 7,07. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 sebesar 74,14 mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 74,35 dan pada tahun 2019 mencapai 74,59, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,45 untuk lebih lanjut dapat dilihat pada diagram berikut.

Grafik 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2020



Sumber : Musi Rawas Dalam Angka, 2021

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diukur dengan indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintahan setiap tahun semakin meningkat mencapai 70,00 persen di Tahun 2019 dan tahun 2020. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 setiap tahun mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 85,59 pada tahun 2019 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2019 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 mencapai sebesar 58,46. Secara umum indikator mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 indikator mengalami penurunan akibat dampak dari Covid 19 yaitu pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan yang mendukung capaian indikator. Data capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perlindungan Anak lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengaplikasikan PPRG	30	20	45	70	56
2)	Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Keluarga (%)	41	41	42	43	40
3)	Rasio KDRT (%)	0,0009	0,0015	0,003	0,0005	0,00055
4)	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,013	0,0329	0,0353	0,01	0,012
5)	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (Nilai)	-	-	Pratama	Madya	Pratama
6)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	85,12	85,17	85,59	85,45
7)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	56,94	58,46

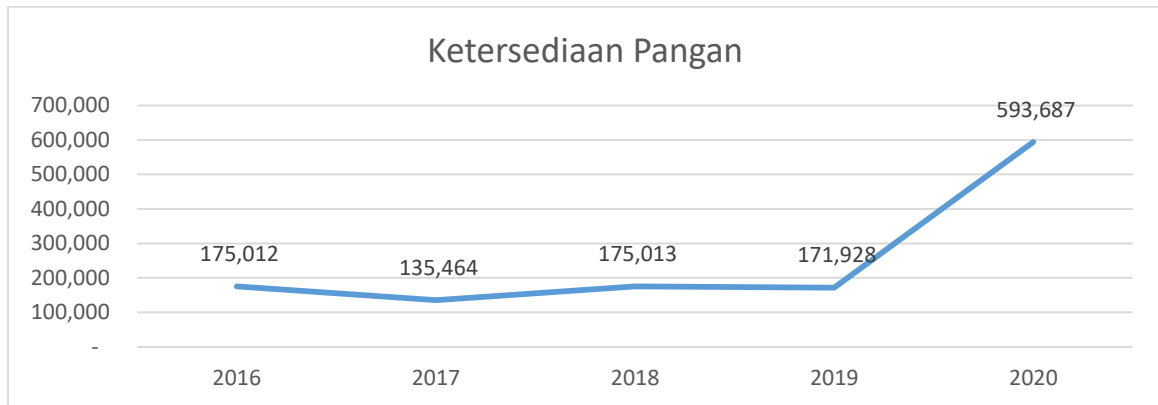
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas 2021

9. Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Grafik 2.32

Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Dari grafik di atas diketahui bahwa Kabupaten Musi Rawas di tahun 2016 ketersediaan pangan mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 135.464 ton meningkat pada tahun 2020 menjadi 593.687 ton.

10. Pertanian

Secara umum Kinerja Pertanian yang diukur dengan Luas Lahan yang Bersertifikat di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami kenaikan sebagaimana data tabel di bawah ini.

Tabel 2.16

Kinerja Pertanian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Yang Bersertifikat	221.765,90	227.473,43	234.297,19	290.475,61	497.838,83	53.539.923

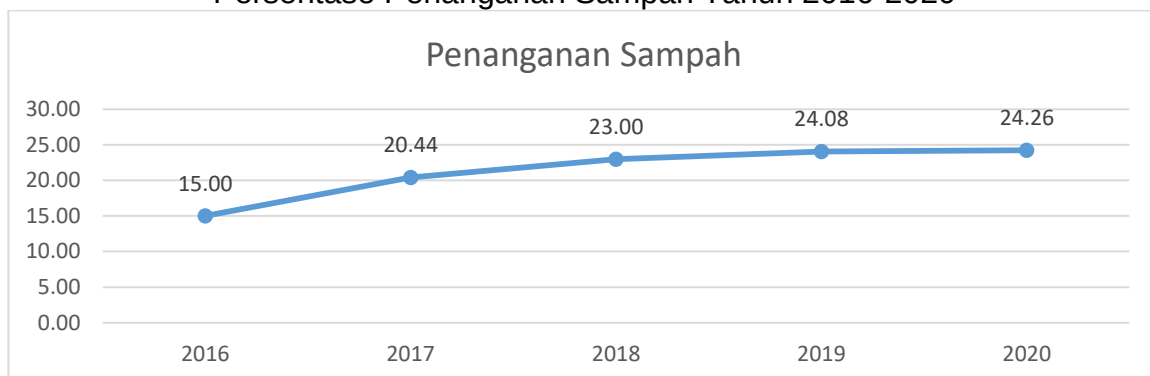
Sumber: BPN dan Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Diolah)

11. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas untuk urusan penanganan sampah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27,00 persen, dalam realisasinya mencapai 24,26 persen atau sebesar 89,95 persen dengan capaian 101 persen.

Grafik 2.33
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2016-2020

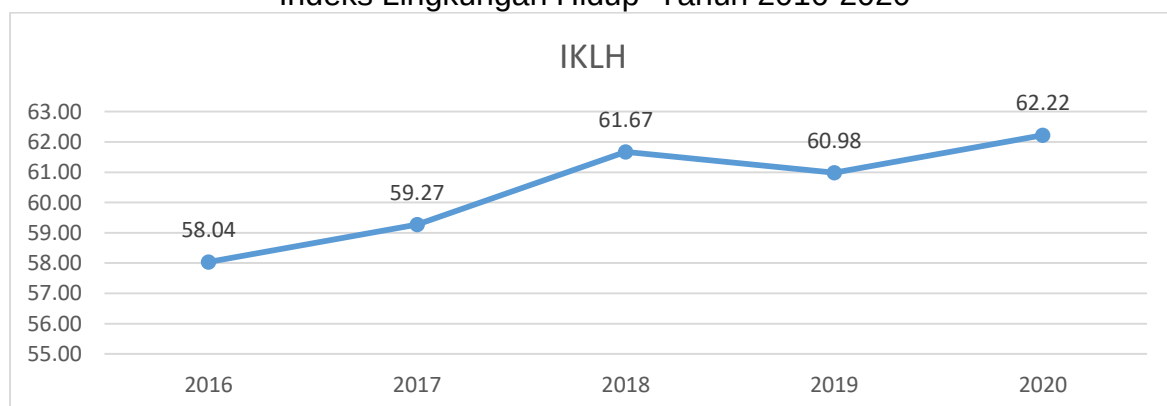


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

b. Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Rawas setiap tahun terus mengalami kemajuan dari tahun 2016-2018, untuk tahun 2020 yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 63,86% dengan realisasi sebesar 62,22% atau sebesar 97,43%, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.34
Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

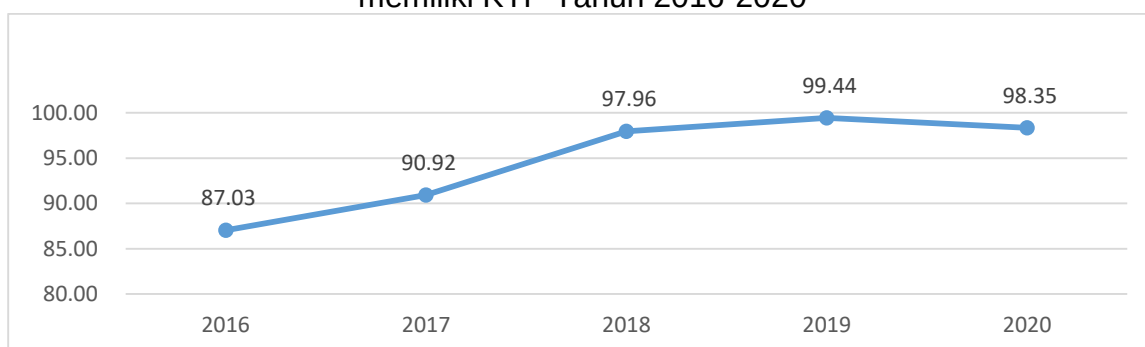


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP sebesar 98,35 %, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.35
Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif, Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG dan Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai aturan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%)	52	38	97	98,92	98,92
2	Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG (%)	60	64	64,00	71,42	21,43
3	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Sesuai Aturan	0	0	65,00	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

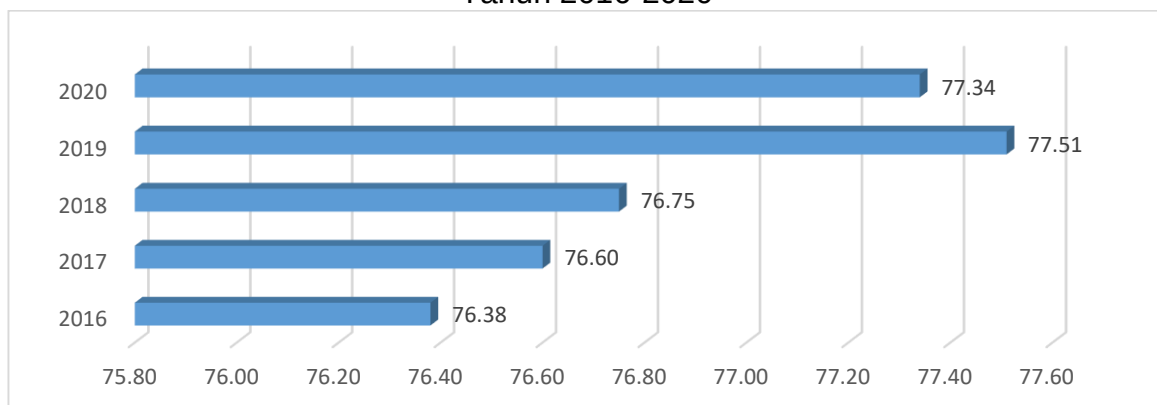
14. Penanggulangan Bencana

Kabupaten Musi Rawas termasuk daerah yang mempunyai potensi rawan bencana banjir, longsor, angin putting beliung dan kebakaran hutan. Sebagai daerah yang mempunyai potensi bencana alam Kabupaten Musi Rawas melakukan langkah-langkah monitoring untuk menekan terjadinya bencana alam. Pada tahun 2020 respon time kejadian bencana di Kabupaten Musi Rawas mencapai 78,00%.

15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

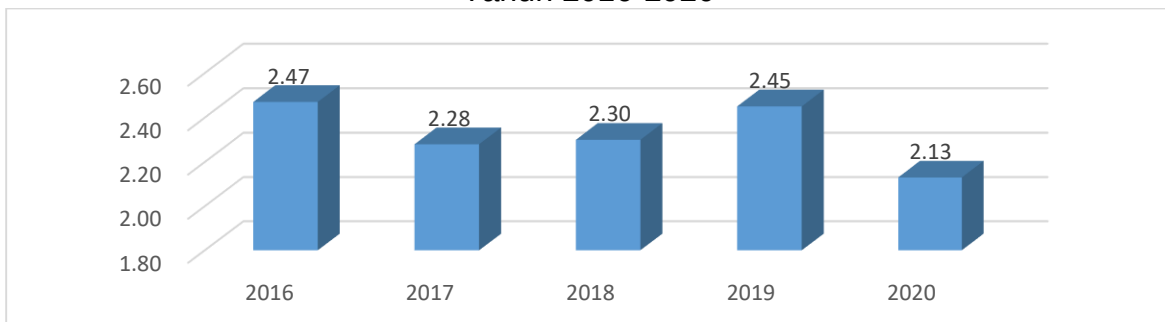
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musi Rawas pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terbaik, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Capaian ini menunjukkan keberhasilan cukup baik, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.36
Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) %
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Grafik 2.37
Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR)
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Capaian angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dari grafik di atas pada tahun 2020 sebesar 2,13 bila di bandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 2,15 telah memenuhi target.

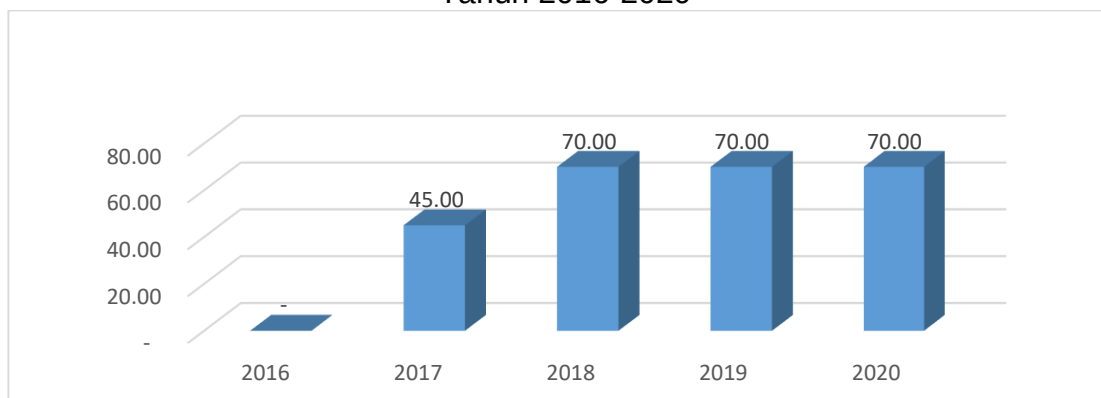
16. Perhubungan

Pada urusan perhubungan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 memiliki 5 terminal yang masing – masing berkapasitas 450 kendaraan dan daya tampung kendaraan sebesar 50 kendaraan, selain terminal Kabupaten Musi Rawas juga memiliki 3 pelabuhan sungai yaitu : Dermaga Muara Kelingi, Tambatan Perahu di Desa Pasenan dan Tambatan Perahun di Desa Sri Pengantin.

17. Komunikasi dan Informatika

Untuk menjadikan kabupaten musu rawas yang lebih maju dan bersaing maka bidang komunikasi dan informatika adalah hal yang paling berpengaruh untuk mejudkan keberhasilan tersebut diantara dengan keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Langka ini didukung dengan adanya peningkatan jaringan komunikasi, untuk lebih lanjut dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 2 .38
Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tahun 2016-2020



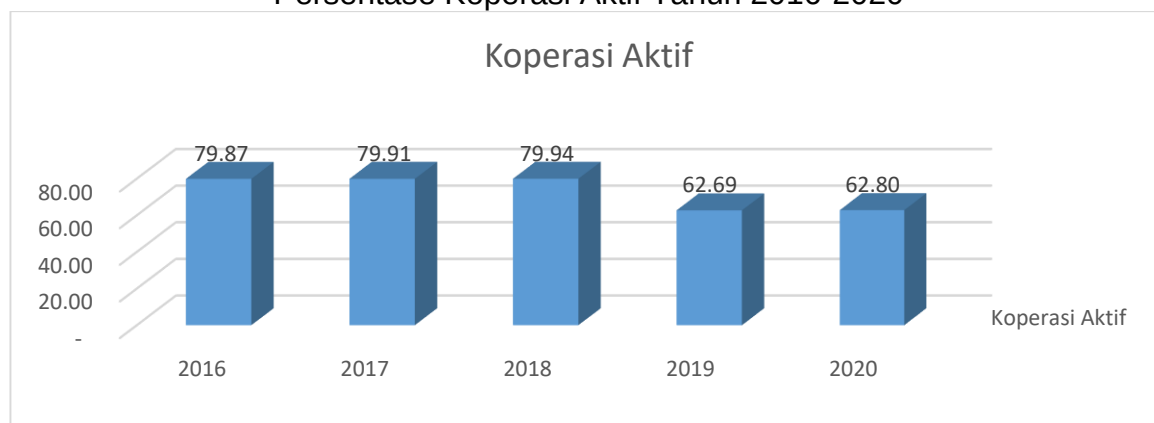
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif. Koperasi Aktif mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2016 sebesar 79,87% sampai dengan tahun 2019 persentase koperasi aktif mencapai 79,94%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 62.69%. Pada Tahun 2020, koperasi aktif mengalami peningkatan kembali sebesar 62,80% dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.39
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

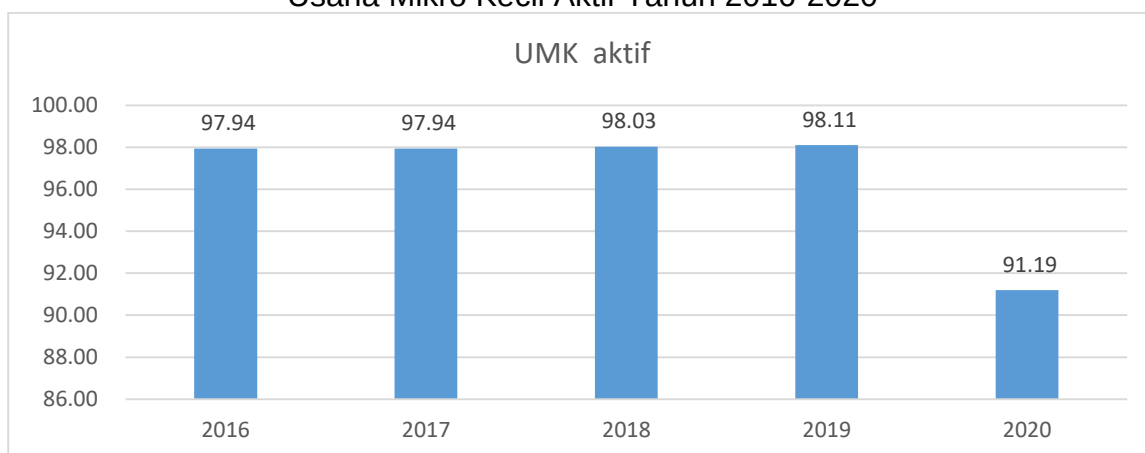


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2020

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat ini merupakan ujung tombak stabilitator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Untuk itu Kabupaten Musi Rawas terus berusaha meningkatkan pertumbuhan UKM. Adanya Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi pertumbuhan UKM tidak hanya di tingkat nasional namun juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan UKM di Kabupaten Musi Rawas. Pertumbuhan UKM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 mencapai 91,19 atau mengalami penurunan sebesar 6,92 dibandingkan pada tahun 2019. UKM aktif dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.40
Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2020

19. Penanaman Modal

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya pada nilai investasi berskala nasional, seperti tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2.41
Jumlah nilai Investasi Berkala Nasional (Rp Triliun)
Tahun 2016-2020



Sumber : DPM-PTSP Kab. Musi Rawas Tahun 2020

20. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu prioritas utama. Untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas dan trampil banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diantaranya dengan mendirikan organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga. Di tahun 2020 organisasi kepemudaan mencapai 18 organisasi.

21. Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan yang sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik mengevaluasi dan menyajikan informasi guna untuk mendukung kebijakan nasional dan provinsi. Penyediaan data yang terintegrasi dan selalu di update merupakan modal utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas menyiapkan data indikator makro maupun indikator sektoral yang dapat diakses langsung melalui website <https://musirawaskab.bps.go.id/> atau publikasinya Musi Rawas Dalam Angka.

22. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu upaya Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Kabupaten Musi Rawas telah memanfaatkan teknologi

informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan Warena data (Network Operational Center), jaringan LAN, jaringan WAN dan perangkat komputer beserta kelengkapannya.

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Urusan Persandian Kab.Musi Rawas Tahun 2016- 2019

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	-	-	40	50

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

22. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan Kabupaten Musi Rawas melaksanakan beberapa festival seni budaya yang didalamnya mengangkat kesenian lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali kesenian budaya lokal yang mulai disaingi dengan kebudayaan asing. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 Kabupaten telah melaksanakan 28 kali festival seni budaya. Adanya Pandemi tahun 2020 menyebabkan beberapa festival kebudayaan sempat terhenti dan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas masyarakat dihentikan kecuali aktivitas yang bergerak dibidang distribusi pangan dan komunikasi.

23. Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Musi pada tahun 2020 terdiri dari Perpustakaan Daerah sebanyak 1 unit dengan pengelola sebanyak 12 orang, Perpustakaan Sekolah sebanyak 431 unit dengan pengelola sebanyak 792 orang, Perpustakaan Desa/Kelurahan sebanyak 396 unit dengan pengelola sebanyak 102 orang, Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 2 unit dengan pengelola sebanyak 10 orang dan Perpustakaan Khusus sebanyak 1 unit dengan pengelola sebanyak 4 orang. Jumlah pojok baca/ taman baca terdiri dari Pojok Baca Perpustakaan Daerah sebanyak 2 unit, Pojok Baca Desa sebanyak 58 unit. Sedangkan jumlah koleksi bahan pustaka berdasarkan jumlah judul sebanyak 229.991 dan

berdasarkan jumlah eksemplar sebanyak 464.391 eksemplar. Jumlah Pemustaka di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 50.065 orang.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: jumlah perpustakaan, persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, rasio jumlah pengunjung perpustakaan dan persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik. Adanya Pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja layanan urusan perpustakaan pada tahun 2020. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan, dapat dilihat dari data series pada tabel capaian kinerja urusan perpustakaan.

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	115	169	465	465	-
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	40,50	41,00	45	42,57	49,52
3.	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	11,50	12,00	15	15,58	9,50
4.	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

24. Kearsipan

Kearsipan secara umum merupakan proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Kabupaten Musi Rawas dalam urusan kearsipan mengalami perbaikan dan peningkatan di setiap tahun. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: pengelolaan arsip secara baku, jumlah pengelola kearsipan, persentase OPD yang menerapkan kearsipan secara baku dan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase OPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku	54,00	52,00	60,00	60,00	60,00
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	1	0

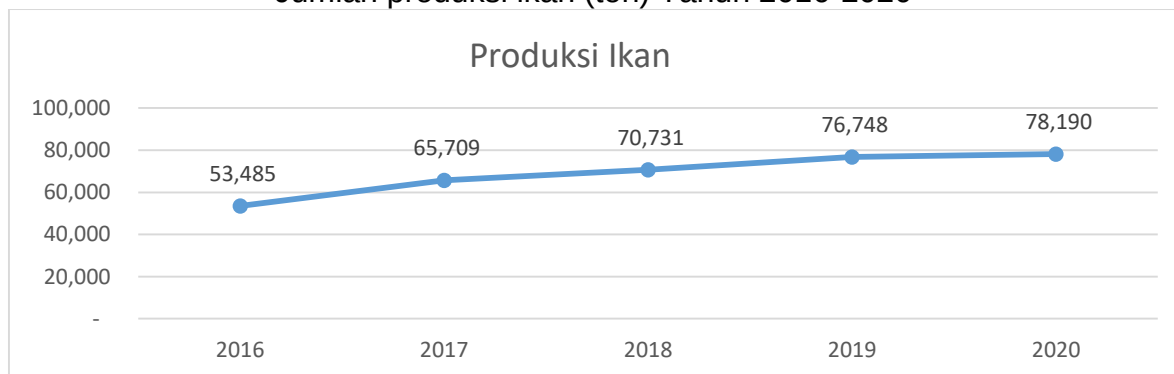
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Musi Rawas terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 produksi ikan Kabupaten Musi Rawas sebesar 53.485 ton meningkat 0,23% di tahun 2017 menjadi 65.709 ton dan pada tahun 2018 sebesar 70.731 ton atau meningkat 7,64%, di tahun 2019 meningkat sebesar 8,51% atau 76.748 ton dan tahun 2020 sebesar 78.190 ton atau meningkat sebesar 1,87%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh banyaknya bantuan, pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini adalah Dinas Perikanan.

Grafik 2.42
Jumlah produksi ikan (ton) Tahun 2016-2020

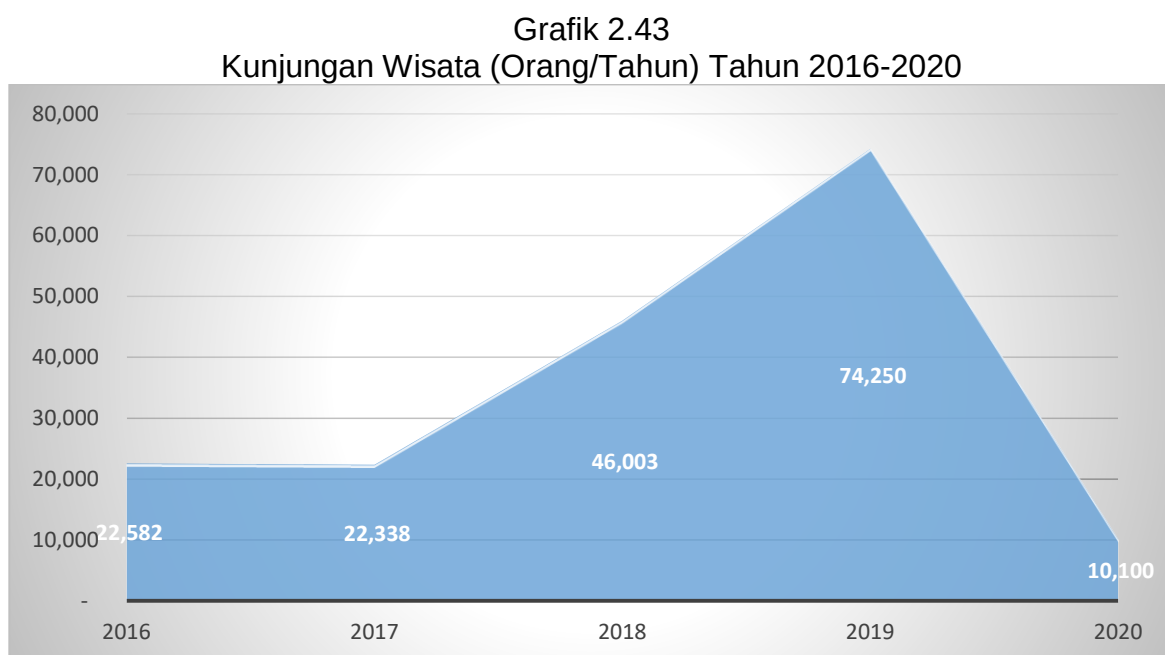


Sumber: Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Untuk konsumsi ikan pada tahun 2020 RPJMD Kabupaten Musi Rawas itu menargetkan sebesar 38,9 kg/kapita/tahun. Dari target yang di ditetapkan, Kabupaten Musi Rawas hanya mencapai 36,49 kg/kapita/tahun atau 93,80% pencapaiannya.

2. Pariwisata

Kabupaten Musi Rawas mempunyai banyak potensi wisata diantaranya wisata alam. Wisata alam yang ada di Kabupaten Musi Rawas kini mulai dilirik oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi tetangga, dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan pembatasan aktivitas dan penutupan objek wisata menyebabkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Musi Rawas sebesar 10.100 orang dapat dilihat pada Grafik.



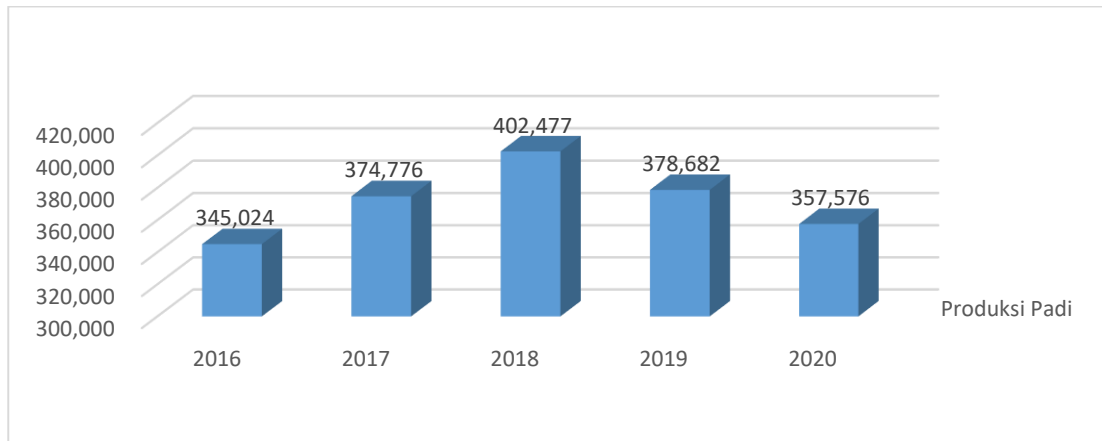
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas Tahun 2020

3. Pertanian

Capaian urusan pertanian di Kabupaten Musi Rawas diantaranya difokuskan pada produksi padi, jagung dan kedelai. Berikut grafik capaian produksi padi, jagung dan kedelai.

- Padi

Grafik 2.44
Produksi Padi Tahun 2016 – 2020

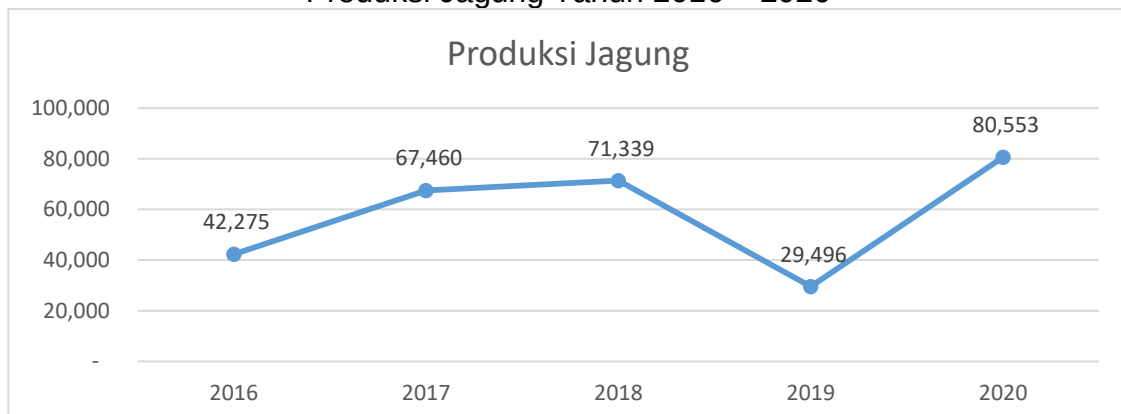


Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Dari grafik diatas menunjukkan produksi padi ditahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif. Pada tahun 2020 produksi padi sebesar 357.576 ton.

- Jagung

Grafik 2.45
Produksi Jagung Tahun 2016 – 2020



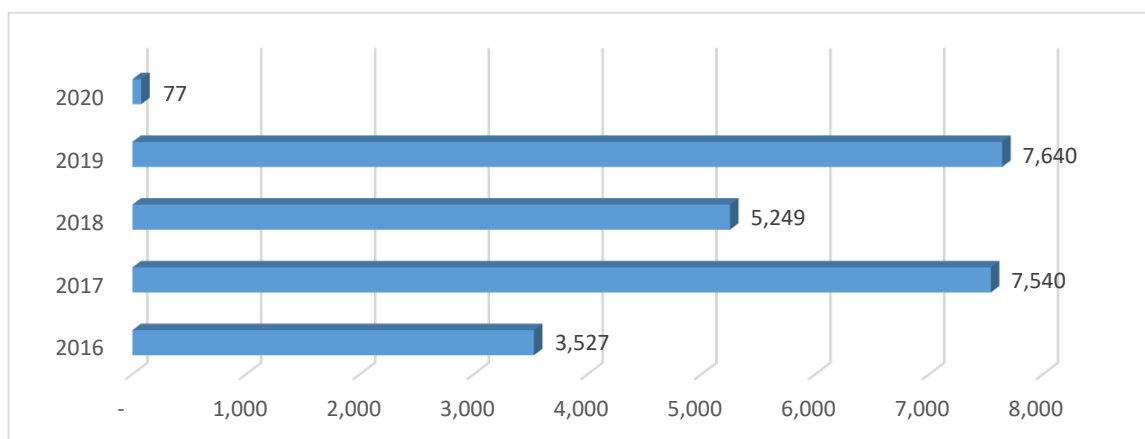
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Urusan Pertanian pada sektor produksi jagung di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sebesar 42.275 ton meningkat menjadi 67.460 ton di tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat drastis sebesar 71.339 ton. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 29.496 ton dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 80.553 ton.

- Kedelai

Produksi Kedelai di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 sebesar 3.527 ton dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 7.621 ton, akan tetapi pada tahun 2018 menjadi 5.249 ton meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 7.640 ton. Pada tahun 2020 produksi kedelai mengalami penurunan dengan capaian sebesar 77 ton. Penurunan produksi kedelai disebabkan karena adanya disesuaikan dengan intruksi Menteri Pertanian untuk peningkatan produksi jagung.

Grafik 2.46
Produksi Kedelai Tahun 2016-2020

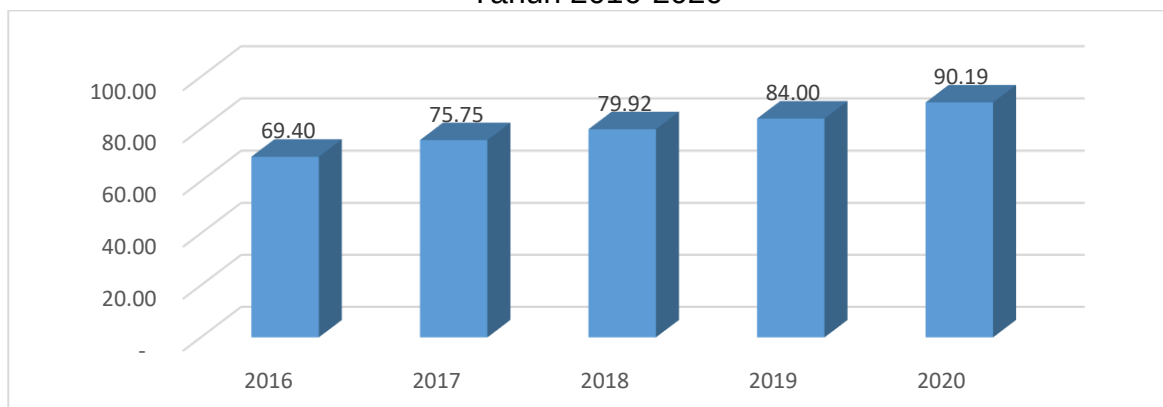


Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 20,79. Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.47
Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Tahun 2016-2020

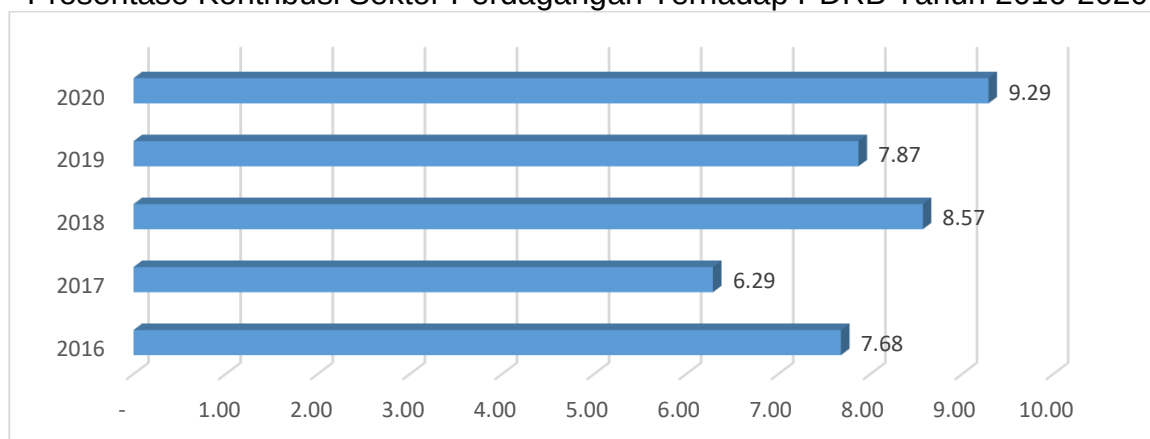


Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

5. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Musi Rawas dilihat dari prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2016 sebesar 7,68 % mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,29%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 8,57%, tahun 2019 sebesar 7,87% dan pada tahun 2020 sebesar 9,29%.

Grafik 2.48
Prosentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

6. Perindustrian

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Musi Rawas, pemerintah melaksanakan banyak – banyak terobosan dan inovasi, diantaranya yaitu di bidang perindustrian baik itu dari yang kecil, menengah dan besar. Untuk

itu laju pertumbuhan industri di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sebesar 7,68 % meningkat di tahun 2020 yaitu sebesar 9,29 % atau meningkat 1,61%.

7. Transmigrasi

Pada tahun 2017, Kabupaten Musi Rawas tidak menempatkan transmigran di lokasi transmigrasi. Sejak tahun 2013 jumlah transmigrasi yang di tempatkan adalah 15 KK dengan pendapatan perkapita pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,4, capaian ini belum memenuhi target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 1,6.

C. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Diberlakukannya penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan keberhasilan perencanaan Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut dari tahun 2013, 2014, 2015 dan khususnya pada tahun 2016 Kabupaten Musi Rawas mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan atau Anugerah Pangripta Sriwijaya. Ditahun 2017 pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali mendapatkan Anugerah Pangrita Sriwijaya sebagai juara II ditingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan termasuk dalam 10 besar PPD tingkat Nasional. Pada tahun 2020, Kabupaten Musi Rawas meraih peringkat pertama dalam lomba Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi.

2. Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian Kabupaten Musi Rawas telah memperoleh predikat WTP di tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Penghargaan WTP merupakan penghargaan tertinggi akuntabilitas keuangan dari kementerian keuangan Republik Indonesia

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Musi Rawas, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus melaksanakan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2020 Persentase penyelesaian administrasi kepangkatan mencapai 101,90% dari target RPJMD 79,00%.

4. Urusan Pengawasan

Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ini diukur dengan indikator Persentase OPD dengan nilai Akuntabilitas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kategori B, 60,08 ditahun 2017, mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 64,34 terus meningkat menjadi 65,15 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 67,51.

Selain itu hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang di lakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020, Kabupaten Mendapat prestasi **Sangat Tinggi**.

5. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan riset dalam pengentasan daerah tertinggal. Capaian ini merupakan 1 dari target capaian yang ditergetkan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 sebanyak 2 riset. Adapun indikator kinerja lain yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan adalah Jumlah UKM/KWT yang dibina menggunakan Teknologi Tepat Guna dan Jumlah Inovasi daerah.

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2020

No	Indikator	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Jumlah UKM/KWT yang dibina menggunakan teknologi tepat guna	2	2	100
2	Jumlah Inovasi Daerah	1	1	100

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

6. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan berfungsi sebagai pemberi layanan administratif dalam hal ini memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum baik itu perda dan keputusan DPRD yang diputuskan. Pada tahun 2019 produk hukum DPRD yang dihasilkan sebanyak 13 perda dan 13 keputusan, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22

Capin Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2020

No	Indikator	Terget RPJMD (Tahun 2020)	Ralisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Jumlah Perda yang di tetapkan	11	9	118,18
2	Keputusan DPRD yang diputuskan	11	12	118,18

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 yang paling tinggi didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat sebesar 32,37 persen. Secara nominal terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai 29,28 persen. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2016-2019 ditunjukkan oleh :1) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan.

Tabel 2.23

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	75	77	79	81	81

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20120

c. Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: Nilai Investasi,.

Tabel 2.24

Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi RawasTahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Nilai Investasi	4,62	5,44	6,52	8,30	8,62

Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 2020

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan Indikator Rasio terpenuhinya formasi pegawai, dan Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan. Pada tahun 2016, indikator Terpenuhinya Formasi Pegawai sebear 109,56 setiap tahunnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 mencapai 77,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya formasi kebutuhan pegawai tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pada beberapa tahun mengalami pengurangan formasi (moratorium pegawai). Sedangkan Indikator Persentase ASN

yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan pada tahun 2016 sebesar 133,33 mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2020 mencapai 133,49.

Tabel 2.25

Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio terpenuhinya formasi pegawai	109,56	97,95	93,91	77,34	77,34
2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan	133,33	107,60	64,94	133,49	133,49

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Rawas

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.

2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Musi Rawas

Secara detail capaian indikator makro RPJMD Musi Rawas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Indikator Makro Daerah RPJMD Musi Rawas Dari Tahun 2016-2020

INDIKATOR MAKRO	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020	
	2015	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indikator Makro											
1) PDRB (berdasarkan harga berlaku) dengan Migas (Miliar Rupiah)	9.117.610	9.991.934	14.758,4	10.866.259	15.880,3	11.740.583	17.499,9	12.614.908	19.076,9	13.489.232	19.303,45
2) PDRB (berdasarkan harga berlaku) Non Migas (Miliar Rupiah)	7.298.202	8.091.764	11.646,7	8.885.327	12.592,0	9.678.889	13.695,7	10.472.452	14.729,7	11.266.014	14.729,7
3) Indek Pembangunan Manusia	68,7	68,88	64,75	69	65,31	66	66,18	66,5	66,97	67,00	66,79
4) Inflasi (Produsen)	5,16	4,86	1,25	4,59	1,54	4,43	2,42	4,3	2,10	4,16	1,97
5) Pendapatan Perkapita (berdasarkan harga berlaku) dengan Migas	22.865.334	24.683.212	36.689.365,07	26.949.146	40.386.754,28	29.215.080	43.851.754,28	31.481.014	47.241.000	33.746.948	48.800.000
6) Laju Pertumbuhan Ekonomi	5	5	5,25	5	5,03	5,10	5,79	5,20	5,88	5,6	0,24
7) Indek Gini	0,287	0,274	0,287	0,26	0,28	0,241	0,27	0,224	0,240	0,217	0,26
8) Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	84,94	85,47	85,7	86,11	85,76	86,76	86,24	87,33	86,63	87,88	86,50
9) Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10) Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11) Status Daerah	Agak Tertinggal	Agak Tertinggal	Tertinggal	Potensi Maju	Tertinggal	Potensi Maju	Tertinggal	Maju	Maju*	Maju	Maju*

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020 dan Realisasinya

Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas itu sebesar Rp. **984.169.652.532,-** dengan realisasi sebesar **96,48%** atau Rp. **929.866.353.287,-** untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27

Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD Tahun 2020

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	115,520,708,315	100.00	112,254,840,063	97.17
2	Dinas Kesehatan	153,049,578,002	89.00	132,856,739,242	86.81
3	Rs. Dr. Sobirin	69,781,278,830	91.60	63,921,556,880	91.60
	BLUD	44,060,554,430	91.55	40,335,621,390	91.55
	APBD	25,720,724,400	91.70	23,585,935,490	91.70
4	Dinas PU Bina Marga	210,629,674,785	99.19	208,919,126,041	99.19
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	109,421,718,400	99.85	108,856,843,630	99.48
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36,222,363,700	99.59	36,018,313,864	99.44
7	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	5,309,980,400	99.04	5,172,057,216	97.40
8	Dinas Sosial	17,306,479,900	99.46	13,221,204,971	76.39
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,244,740,600	96.64	2,169,292,836	96.64
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,349,529,800	97.46	1,302,627,856	96.52
11	Dinas Ketahanan Pangan	6,687,986,000	100.00	6,460,305,489	96.60
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	3,948,227,700	100.00	3,891,535,633	98.56
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,894,649,500	100.00	2,819,119,606	97.39

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,841,168,300	93.90	3,508,681,124	91.34
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,982,515,900	91.41	6,382,615,213	91.41
16	Dinas Perhubungan	2,466,421,800	94.00	2,052,330,467	83.21
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6,291,686,800	100.00	6,012,132,038	95.56
18	Dinas Koperasi dan UKM	5,135,639,400	99.98	5,058,608,515	98.50
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,664,609,800	99.37	1,637,707,574	98.38
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6,055,290,800	98.92	5,990,130,006	98.92
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8,218,370,000	100.00	7,966,690,065	96.94
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,229,822,200	100.00	1,224,952,824	99.60
23	Dinas Perikanan	9,198,551,400	97.15	6,579,468,880	71.53
24	Dinas Pertanian dan Peternakan	13,355,051,300	97.69	13,047,139,936	97.69
25	Dinas Perkebunan	2,924,470,600	98.23	2,772,736,913	94.81
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15,797,672,100	99.63	13,189,137,063	83.49
27	Bagian Perekonomian dan SDA	993,013,380	86.99	863,773,836	86.99
28	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerjasama	1,881,369,650	94.19	1,772,005,500	94.19
29	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5,704,070,176	93.18	5,314,799,499	93.18
30	Bagian Organisasi	679,317,400	98.18	666,942,000	98.18
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5,308,331,800	94.87	5,036,098,650	94.87
32	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1,795,553,586	98.17	1,762,669,434	98.17
33	Bagian Hukum	1,381,484,300	92.26	1,274,620,300	92.26

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
34	Bagian Administrasi Pembangunan	272,920,000	90.96	248,259,800	90.96
35	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1,649,594,548	78.78	1,299,578,000	78.78
36	Bagian Umum	20,554,414,260	94.45	19,412,625,401	94.45
37	Sekretariat DPRD	68,560,904,200	98.96	67,266,927,084	98.11
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,995,186,800	96.78	3,866,657,234	96.78
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,899,112,400	92.28	1,752,458,446	92.28
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	7,149,407,600	97.18	6,610,111,506	92.46
41	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3,096,749,700	100.00	3,016,090,882	97.40
42	Inspektorat	8,356,251,200	94.40	6,830,046,851	81.74
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2,978,545,600	98.02	2,755,595,015	92.51
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,519,002,100	97.83	2,464,361,577	97.83
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,670,304,000	82.43	3,849,548,995	82.43
46	Kecamatan STL Ulu Terawas	1,689,425,200	99.38	1,678,917,200	99.38
47	Kecamatan Selangit	1,707,963,000	93.12	1,590,371,286	93.12
48	Kecamatan Sumber Harta	1,550,201,000	87.86	1,361,963,105	87.86
49	Kecamatan Tugumulyo	1,817,634,500	83.12	1,510,897,170	83.12
50	Kecamatan Purwodadi	2,328,990,300	91.18	2,123,663,494	91.18
51	Kecamatan Muara Beliti	1,653,928,000	89.87	1,486,449,250	89.87
52	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	788,148,000	90.72	714,995,144	90.72
53	Kecamatan Jayaloka	1,784,635,000	92.56	1,651,926,111	92.56

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
54	Kecamatan Suka Karya	732,214,000	99.30	727,106,596	99.30
55	Kecamatan Muara Kelingi	1,743,963,000	73.90	1,288,816,102	73.90
56	Kecamatan Tuah Negeri	934,719,000	80.06	748,325,794	80.06
57	Kecamatan Muara Lakitan	1,919,470,000	83.34	1,599,682,600	83.34
58	Kecamatan Megang Sakti	2,675,520,000	88.71	2,373,532,236	88.71
59	Kecamatan BTS Ulu	1,869,122,500	88.85	1,660,643,245	88.85
JUMLAH		984,169,652,532	96.48	929,866,353,287	94.48

Secara umum, pelaksanaan program RKPD tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas sangat baik dengan nilai realisasi capaian fisik dan keuangan diatas 90 persen.

2.2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan, walaupun dari sasaran yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa sasaran yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dilakukan terhadap 16 sasaran didukung oleh program pada tahun 2016-2018 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016–2021. Adapun analisa atas pencapaian Sasaran Strategis tahun 2020 sebagai berikut:

TUJUAN 1 DARI MISI PERTAMA	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Menuju Musi Rawas Sempurna Sehat Dan Cerdas
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 2 sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pendidikan	59,90	68,95	115,11

Indeks Pendidikan merupakan hasil dari Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah dibagi dua. Dari tabel tersebut capaian kinerja pada Indeks Pendidikan tahun 2019 sebesar 117,30% atau dikategorikan **sangat tinggi**.

1.1.2	Meningkatnya Kondisi Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kesehatan	67,75	66,37	97,96

Indeks Kesehatan merupakan Angka Harapan Hidup yang dikurangi dengan Angka Harapan Hidup Minimum kemudian di bagi dengan Angka Harapan Hidup Tertinggi dikurang Angka Harapan Hidup Terendah. Dari tabel tersebut maka capaian indikator Indeks Kesehatan pada sasaran ini sebesar 97,96% atau dikategorikan **Sangat Tinggi**

TUJUAN 2 DARI MISI PERTAMA	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Baik
---------------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi pertama telah ditetapkan 2 sasaran dengan tingkat pencapaian di bawah ini.

1.2.1	Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	85,50	91,35	102,62

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Salah satu indikator dari pembangunan infrastruktur adalah Konektivitas Antar Wilayah yang dapat memberikan dampak bagi Pertumbuhan dan produktivitas di bidang ekonomi tetapi juga memberikan dapat membantu dalam menurunkan kemiskinan dan peningkatan status pada daerah tertinggal. Dari tabel diatas capaian indikator Persentase Konektivitas Antar Wilayah pada sasaran ini sebesar 102,62 % atau dikategorikan **Sangat Tinggi**.

1.2.2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Keciptakarya dan Pengairan
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Infrastruktur Dasar	82,50	94,92	111,05
2.	Indeks Sumber Daya Air	60,00	58,02	89,26

Selain indikator Konektivitas Antar Wilayah, Pembangunan Infrastruktur juga terdiri dari Indikator Indeks Infrastruktur Dasar dan Indeks Sumber Daya Air. Kedua Indikator tersebut juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status pada daerah tertinggal. Dari tabel diatas, capaian indikator pada Indeks Infrastruktur Dasar sebesar 111,05% atau dikategorikan **sangat tinggi** dan capaian indikator Indeks Sumber Daya Air sebesar 89,26 % dan keduanya termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

TUJUAN 1 DARI MISI KEDUA	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Pertanian Melalui Agroindustri Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani
---------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kedua telah ditetapkan 2 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

2.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap Perekonomian
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	6,00	4,20	70,00

Pembangunan pertanian terbukti telah ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan Pertanian berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan akan memberikan dampak positif terhadap penurunan inflasi, peningkatan kesejahteraan petani dan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Dari tabel diatas capaian indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian pada sasaran ini sebesar 70,00 % atau dikategorikan **Sedang** penyebab lambatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian adalah berkurangnya luas lahan yang digunakan dalam aktivitas pertanian dan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan diperlukan program/kegiatan yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.

2.1.2	Meningkatnya Kemandirian Pangan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Keamanan Pangan (%)	96,88	80,00	82,58

Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis, hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat. Keamanan Pangan tergambarkan dari inflasi bahan pangan terkendali, jumlah penduduk miskin di perdesaan semakin menurun dan kesejahteraan petani semakin membaik. Dari tabel diatas capaian indikator Persentase Kaeamanan Pangan pada sasaran ini sebesar 82,58 % atau dikategorikan **Tinggi** dan perlu dilakukan peningkatan kinerja dari berbagai OPD yang terlibat dengan melakukan *crosscutting* program/kegiatan agar Persentase Keamanan Pangan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

TUJUAN 1 DARI MISI KETIGA	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Perindustrian Dan Perdagangan
----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi ketiga telah ditetapkan 2 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

3.1.1	Total PDRB Sektor Industri Dan Perdagangan
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	13,55	14,01*	103,39

Salah satu menyumbang dalam PDRB adalah sektor industri. Laju pertumbuhan sektor industri yang positif dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB di Kabupaten Musi Rawas. Adanya Pandemi Covid 19 tidak memberikan pengaruh yang besar untuk PDRB Sektor Industri di Kabupaten Musi Rawas. Dari tabel diatas capaian indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB pada sasaran ini sebesar 103,39% atau dikategorikan **Sangat Tinggi**.

3.1.2	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Perekonomian
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9,40	9,29*	98,83

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meliputi kegiatan Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta kegiatan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang antara diatas 5 persen. Dari tabel diatas capaian indikator Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB pada sasaran ini sebesar 98,83 % atau dikategorikan **Sangat Tinggi**.

TUJUAN 2 DARI MISI KETIGA	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Koperasi Dan UMKM
----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi ketiga telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Koperasi, UMKM, Serta Lembaga Ekonomi Non Pertanian
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Peningkatan Produksi UMKM (%)	7,82	7,00	89,51

Dilihat dari manfaat dan peranannya, keberadaan UMKM perlu diperhatikan agar dapat menjadi wadah bekerja yang baik dan mampu bersaing dengan perkembangan jaman yang pesat serta dapat meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak baik pada perekonomian. Adanya Pandemi Covid 19 berakibat pada menurunnya capaian kinerja Peningkatan Produksi UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai

upaya dengan memberikan program/kegiatan agar capaian kinerja UMKM di Kabupaten Musi Rawas maksimal. Dari tabel diatas capaian indikator Persentase Peningkatan Produksi UMKM pada sasaran ini sebesar 89,51 % atau dikategorikan **Tinggi**.

TUJUAN 1 DARI MISI KEEMPAT	Mengentaskan Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi keempat telah ditetapkan 2 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.1.1	Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	0	6	57,14

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa dengan skala 0-100. Adapun, skala kurang dari sama dengan 50 menggambarkan desa tertinggal, 50-75 merupakan desa berkembang dan lebih dari 75 termasuk kategori desa mandiri. Dari tabel diatas capaian indikator Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal pada sasaran ini sebesar 57,14 % atau dikategorikan **Sedang**. Untuk meningkatkan capaian kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, salah satu upaya yang harus ditempuh adalah dengan melakukan peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Tematik Wisata serta memperkuat kapasitas perangkat desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan dana desa lebih yang lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

4.1.2	Menurunnya Angka Kemiskinan
--------------	------------------------------------

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Angka Kemiskinan (%)	12,94	13,50	95,67
2.	Indeks Gini	0,217	0,260	99,95

Pada Tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 13,50% mengalami Peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,13% jika dibandingkan angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 13,37%. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Pembatasan aktivitas pada beberapa sektor ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah, peningkatan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Rawas, tetapi terjadi hampir diseluruh daerah di wilayah Indonesia. Dari tabel diatas capaian kinerja pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan sasaran ini sebesar 95,67 % atau dikategorikan **Sangat Tinggi**. Sedangkan pada Indeks Gini, capaian kinerja adalah sebesar 99,95. Secara umum menunjukan tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun.

TUJUAN 2 DARI MISI KEEMPAT	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi keempat telah ditetapkan 1 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	63,86	62,2	97,43

Ruang lingkup IKLH meliputi analisis indeks kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan kualitas tutupan lahan IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari tabel capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada sasaran ini sebesar 97,43 % atau dikategorikan **Sangat Tinggi**.

TUJUAN 1 DARI MISI KELIMA	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
--------------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kelima telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

5.1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	65	51,12	78,64
2.	Indeks Capaian Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	>100
3.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100
4.	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Musi Rawas	BB	B	<100
5.	Hasil Evaluasi Implementasi Maturitas SPIP Pemkab Musi Rawas	Level 2	Level 3	>100

Pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2020 mencapai 51,12 atau capaian kinerja sebesar 78,64 %. Sedangkan pada indikator Indeks Capaian Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi** diatas **(100%)**, Indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah **WTP (100%)**, Indikator Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Musi Rawas adalah **B** kurang dari **(100%)** sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Sedangkan Indikator Hasil Evaluasi Implementasi Maturitas SPIP Pemkab Musi Rawas adalah **Level 3** atau diatas **(100%)** atau **melebihi target**.

TUJUAN 1 DARI MISI KEENAM	Mewujudkan Masyarakat Musi Rawas yang Religius
----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi enam telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

6.1.1	Meningkatnya Masyarakat Yang Khatam dan Hafidz Alquran
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Anak Usia SD Yang Bisa Baca Tulis Al-Quran (%)	14,29	7,18	50,24
2.	Persentase Anak Usia SD Yang Hafidz Al-Quran Juz 30 (%)	2,38	0,71	29,83

Dari tabel diatas capaian indikator Persentase Anak Usia SD Yang Bisa Baca Tulis Al Quran pada sasaran ini adalah 50,24% dengan kategori **Sangat Rendah**. Sedangkan Indikator Persentase Anak Usia SD Yang Hafidz Al-Quran Jus 30 mencapai 29,83 % atau dikategorikan **Sangat Rendah**. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan kegiatan penilaian dan aktivitas anak yang baca tulis al qur'an dan hafidz al-qur'an jus 30 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target sehingga capaian kinerja pada kedua indicator tersebut menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

TUJUAN 1 DARI MISI KETUJUH	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Dalam Berinvestasi Di Kabupaten Musi Rawas
-----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi ketujuh telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

7.1.1	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Di Kabupaten Musi Rawas
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Realisasi Nilai Investasi	5,8	8,6	148,28

Melambatnya perekonomian akibat neraca perdagangan, menjadikan Investasi sebagai komponen penting untuk mendukung perekonomian. Dari tabel diatas capaian indikator Realisasi Nilai Investasi pada sasaran ini sebesar 148,28 % atau dikategorikan **Sangat Tinggi**.

TUJUAN 2 DARI MISI KETUJUH	Meningkatkan Kualitas Layanan Kebudayaan dan Pariwisata
-----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi ketujuh telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

7.2.1	Meningkatnya Kunjungan Wisata
--------------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata (%)	7,40	-79,12	(1.069,19)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata. Adanya Pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata di Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pada masa Pandemi adanya pembatasan terhadap kunjungan wisata sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan pada objek wisata. Dari tabel diatas capaian indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata pada sasaran ini sebesar (1.069,19) atau dikategorikan **Sangat Rendah**.

2.2.4 ANALISIS INDIKATOR MAKRO KABUPATEN MUSI RAWAS

Pembangunan Manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia (Findi dan Ezkiriando, 2013). Pada tahun 2020, pembangunan manusia masuk pada level sedang dengan nilai IPM 67,01. Capaian ini diperoleh karena meningkatnya komponen kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas mencapai 0,24 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,29%. Perbandingan Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori yg baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan tingginya kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Selain itu permasalahan yang tidak kalah penting adalah mengenai kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesenjangan pendapatan di suatu wilayah menjadi rendah (Pangkiro, 2016). Dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori sedang.

Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki capaian yang cukup bervariasi. Untuk melihat perbandingan capaian antar kabupaten/kota digunakan analisis kuadran dengan nilai rata-rata kabupaten/kota sebagai dasar pengelompokan wilayah kabupaten/kota. Adapun

data yang digunakan adalah tahun 2020 dengan variabel yang akan dianalisis adalah :

Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan

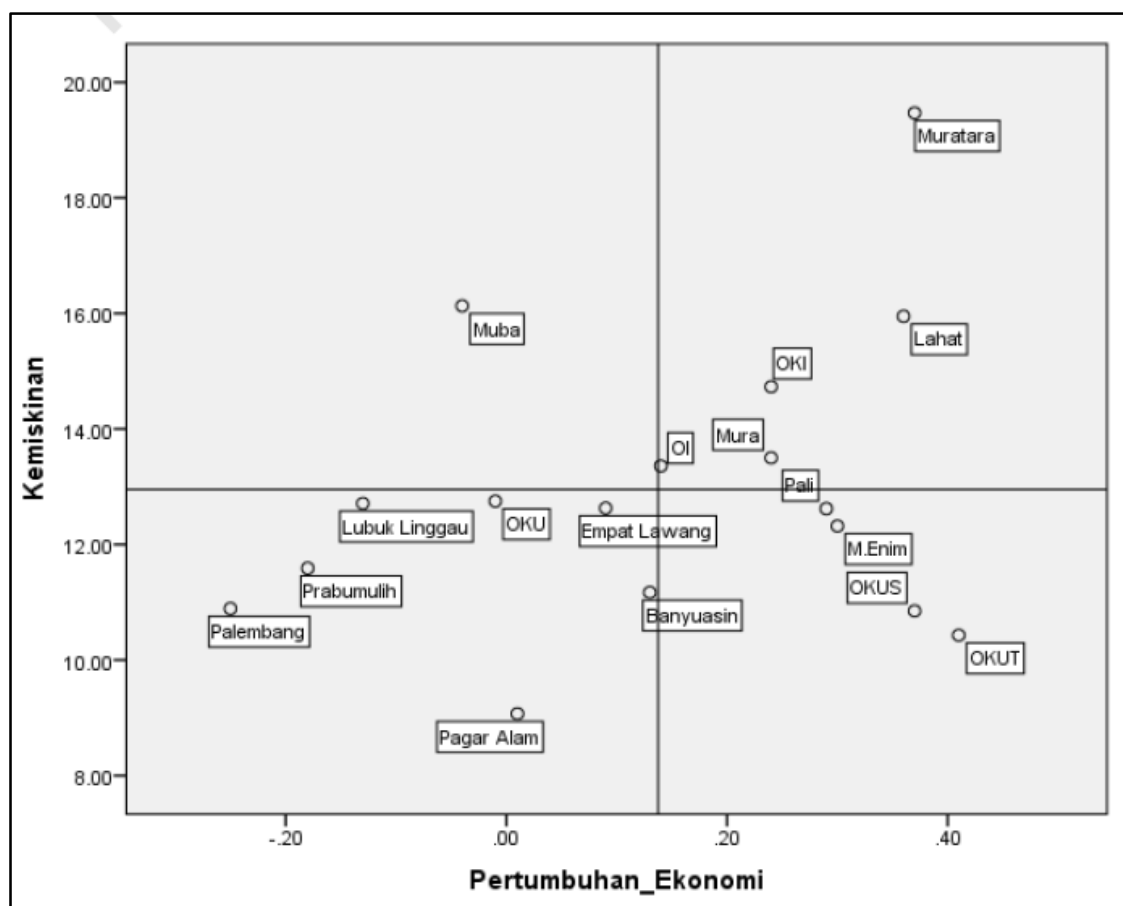
Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Gambar 2.6

Analisis kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Kab/Kota di Sumsel, 2020



Sumber: BPS Musi Rawas, 2021

Berdasarkan angka Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan digunakan diagram kartesius yang membedakan wilayah kabupaten/kota dalam empat kuadran. Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam Kuadran II yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun kemiskinannya juga tinggi.

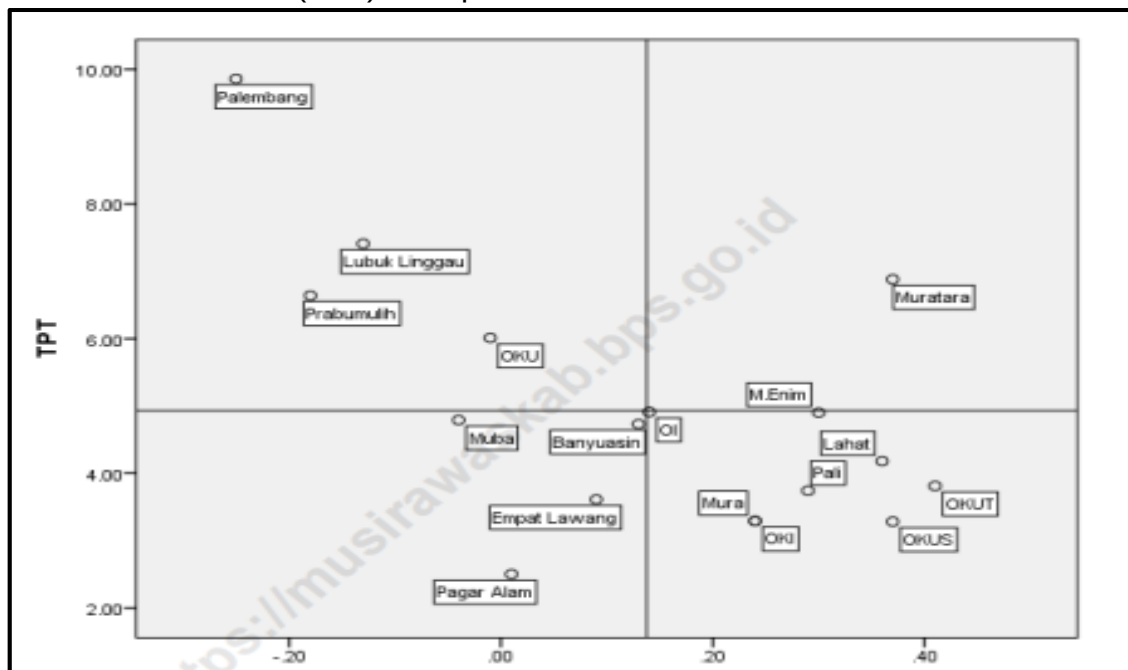
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk bisa memperluas pasar domestik. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penawaran tenaga kerja yang cepat dan dapat memberi efek terhadap perkembangan ekonomi yang tergantung pada kemampuan sistem perekonomian maka perlu diadakan penambahan tenaga kerja secara produktif.

Dari segi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam Kuadran 1 yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai pertumbuhan ekonomi tinggi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rendah.

Gambar 2.7

Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020



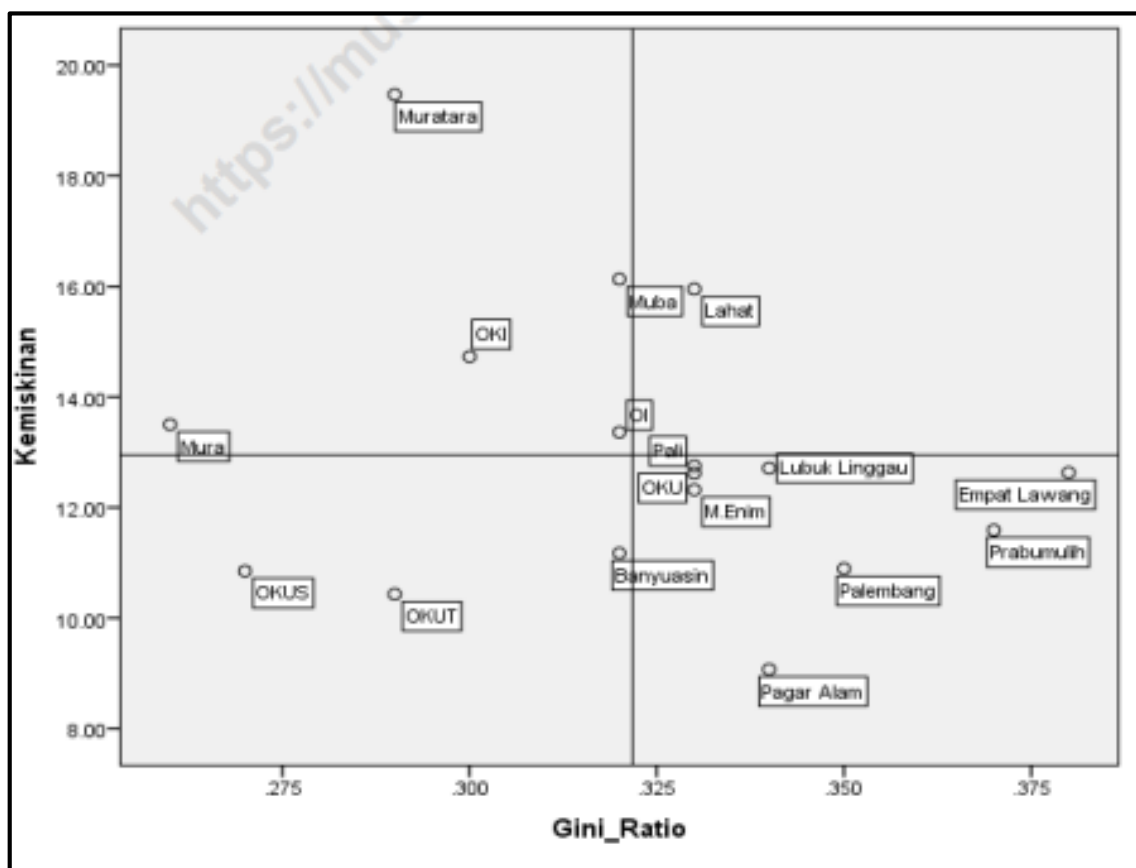
Sumber: BPS Musi Rawas, 2021

3. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Untuk melihat pengelompokan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan digunakan diagram kartesius yang membedakan wilayah kabupaten/kota dalam empat kuadran.

Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam Kuadran 1 yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai kemiskinan tinggi dan ketimpangan rendah.

Gambar 2.8
Analisis Kuadran Tingkat Kemiskinan dan
Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020



Sumber: BPS Musi Rawas, 2021

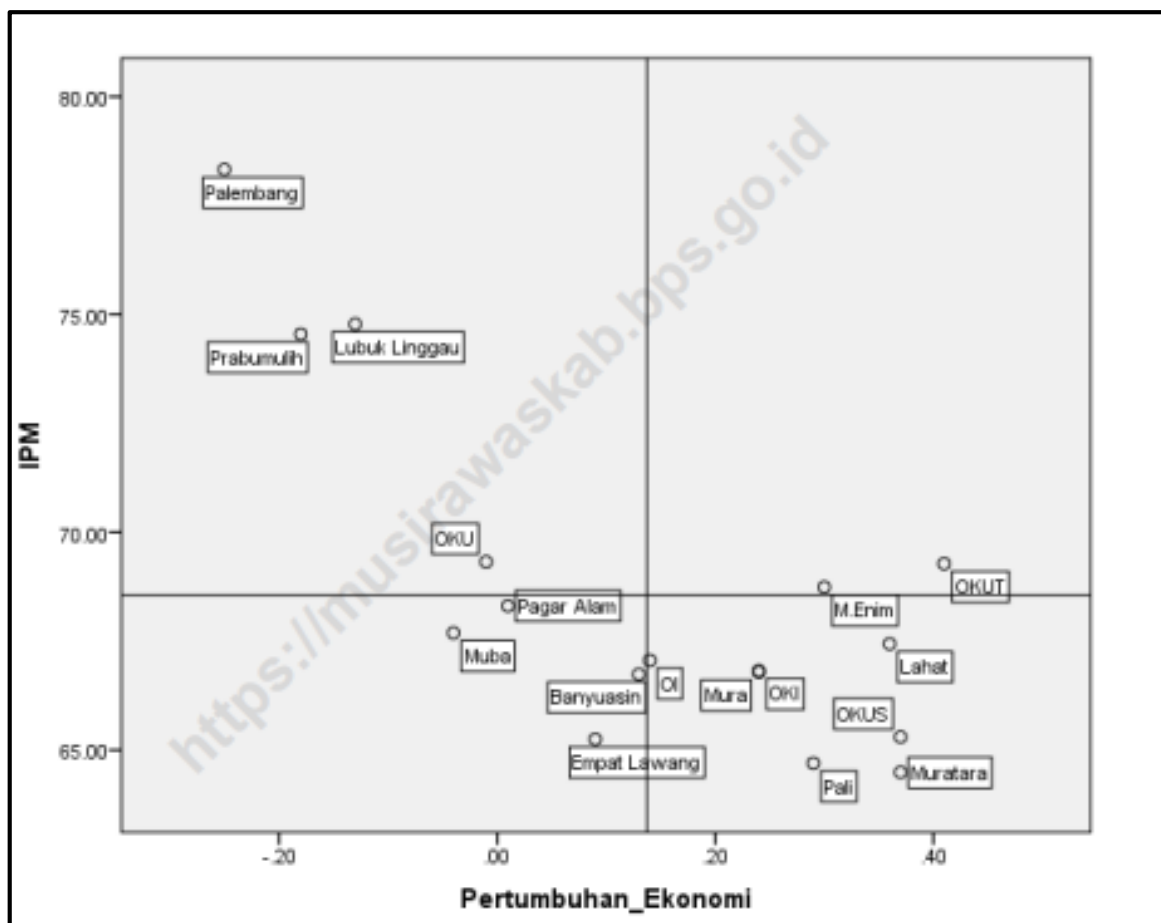
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. SDM yang berkualitas akan menghasilkan produktifitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan

secara agregat dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi (Tjiptoherijanto, 1996).

Untuk melihat pengelompokan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM digunakan diagram kartesius yang membedakan wilayah kabupaten/kota dalam empat kuadran. Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kuadran 1 yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai PE tinggi dan IPM rendah

Gambar 2.9
Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan
IPM Kabupaten/Kota di Sumsel, 2020



Sumber: BPS Musi Rawas, 2021

2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas

Tabel 2. 28
Permasalahan Pembangunan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1.	Urusan wajib pelayanan dasar:			
a.	Pendidikan.			
	Angka melek huruf	Angka Melek Huruf telah mencapai 99,75% pada tahun 2020	Penduduk buta aksara kebanyakan berusia di atas 45 tahun.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah mulai meningkat.
	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun baru mencapai 7,52 tahun pada Tahun 2020.	Angka rata-rata lama sekolah penduduk >15 tahun baru mencapai 7,52 tahun pada tahun 2020.	Banyak penduduk Musi Rawas yang berpendidikan tinggi tinggal di luar Kabupaten Musi Rawas.	- Ketersediaan pendidikan non formal (PKBM) di setiap kecamatan yang mudah diakses oleh warga.
	Angka partisipasi kasar:	- SD/MI: 110,56% - SLTP/MTS: 101,74% - SMA/SMK/MA : 78,28*		- Regulasi dan deregulasi bidang pendidikan yang semakin baik dan jelas dalam menuntun pengambil kebijakan; - Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang terus bertambah; - Pendanaan pendidikan yang terus meningkat terutama dana BOS, PSG dan DAK; - Adanya Program Indonesia Pintar (PIP); - Adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) - Perencanaan bidang pendidikan yang semakin baik terutama dari ketersediaan data melalui Dapodik online; - Pengelolaan BOS yang semakin akuntabel.
	Angka pendidikan yang ditamatkan:	- Tidak punya ijazah SD: - SD sederajat: - - - SMP sederajat: - - - SMA sederajat: - - - Perguruan tinggi: - -		
	Angka partisipasi murni:	- SD/MI: 99,36% - SMP/MTs: 97,38% - SMA/SMK/MA : 61,70*		
	Angka partisipasi sekolah: *tahun 2019	- 7–12: 99,48% - 13–15:96,54% - 16–18: 71,31%		
	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI	75,18		
	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs	16,71		
	Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA	8,11	Banyak sekolah terutama MA/Swasta bukan kewenangan Kabupaten	Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik.
	Rasio guru/murid PendidikanDasar SD/MI	1 : 15	- Penataan dan pemerataan guru yang belum efektif; - Guru tidak mau dipindahkan ke daerah pelosok;	Komitmen Pemerintah Baik
	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP/MTs	1 : 16		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Rasio guru/murid pendidikan menengah SMA/SMK/MA	1: 17	- Kekurangan guru kelas dan mata pelajaran terutama guru kesenian dan penjaskes.	
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar SD/MI	1,87		
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikandasar SMP/MTs	2,33		
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan menengah	2,22	Keterbatasan jumlah guru	Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik.
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	87,92%	- Daerah terpencil; - Infrastruktur pendukung belum maksimal seperti listrik dan internet.	Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik.
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	89,00%		
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	91,96%	- Belum semua desa memiliki lembaga PAUD	Adanya dana desa untuk PAUD
	Angka putus sekolah:	- Angka putus sekolah (APS) SD/MI: 0,30%	- Pernikahan pada anak usia Sekolah SMA/SMK/MA; - Membantu orang tua/pekerja anak	Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik.
		- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs: 0,61%		
		- Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA: 0,37%*		
Angka kelulusan (AL):	- Angka kelulusan (AL) SD/MI: 100%*	- Kriteria kelulusan yang terus meningkat;		
	- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs: 98,67%*	- Tata kelola manajemen sekolah yang masih lemah.		
	- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/ MA: 99,59%*			
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	- 93,19%	- Kesejahteraan guru yang semakin baik dengan adanya tunjangan profesi, tunjangan kualifikasi, tunjangan fungsional bagi guru non PNS dan tunjangan daerah terpencil; - Sertifikasi guru yang dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel	
	Persentase guru yang telah bersertifikasi	- SD: 41,12%		- Masih ada 26,05% guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV sehingga tidak dapat disertifikasi karena syarat disertifikasi harus lulus S1/D-IV; - Guru honorer di sekolah negeri tidak dapat disertifikasi.
		- SMP: 32,60 % - SMA: 27,06%		
b.	Kesehatan			
	Persentase balita gizi buruk	0,45%	Sebagian besar kasus gizi buruk disertai dengan penyakit tertentu	Kerja sama lintas program dan lintas sektor.
	Rasio posyandu persatuan balita	7,63 Bh/10.000 Pdd	Masih lemahnya peran serta masyarakat baik sebagai penyelenggaraan maupun sebagai peserta posyandu, pemahaman masyarakat masih kurang.	Peran serta masyarakat dan kerja sama lintas sektor.
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,53%	Setiap 0,28% penduduk terdapat satu unit pelayanan kesehatan	Terpenuhinya jumlah UPK di setiap kecamatan dan desa yang mudah dijangkau penduduk

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,54 /100.000 Pdd	Masih kurang dari target yang ditetapkan karena 1 rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya	Terpenuhinya jumlah UPK di setiap kecamatan dan desa yang mudah dijangkau penduduk
	Rasio dokter per satuan penduduk	1,40/100.000 Pdd	Masih kurangnya jumlah tenaga dokter di puskesmas terutama di wilayah terpencil	Kerja sama antara lembaga pendidikan kedokteran dengan Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	2,42/100.000 Pdd	Masih kurangnya jumlah tenaga medis di puskesmas terutama di wilayah terpencil	Terpenuhinya fasilitas utama dan penunjang unit layanan kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,79%	Masih ada desa yang belum mempunyai tenaga bidan dan masih relatif rendahnya kualitas tenaga bidan desa	Tersedianya sarana prasarana kesehatan dan program peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan
	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal ChildImmunization</i> (UCI)	100%	Masih tingginya angka <i>drop out</i>	Daya minat masyarakat terhadap program posyandu
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Masih adanya kasus gizi buruk yang terlambat diketahui	Peran serta masyarakat dan pemerintahan desa untuk melaporkan kasus
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB (BTA+)	82,53%	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan (UPK); - Belum berfungsinya secara maksimal laboratorium UPK	- Peningkatan laboratorium puskesmas; - Peningkatan kesadaran peran serta masyarakat; - Peningkatan Skill petugas kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) - Penetapan diagnosis DBD masih kurang akurat	- Peningkatan program pengorganisasi dan pergerakan masyarakat - Peningkatan kesadaran peran serta masyarakat - Peningkatan Skill petugas kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,42%	Data masyarakat miskin belum akurat/valid sehingga intervensinya belum maksimal	Terselenggaranya sistem rujukan yang baik di bantu dengan sapras kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi	99,97%	Belum maksimalnya antara program promosi kesehatan dengan kesadaran masyarakat mengunjungi UPK	- Peningkatan pengetahuan dan priaku masyarakat tentang kesehatan
	Cakupan puskesmas per 30000 penduduk	1,48%	Setiap kecamatan sudah mempunyai Puskesmas namun masih ada wilayah kerja yang cukup jauh dari UPK sehingga sulit akses masyarakat ke UPK	Infrastruktur yang baik
	Cakupan puskesmas pembantu	0,24%	Dalam aturan yang ada setaf puskesmas pembantu membawahi 3 sampai 4 desa terdekat, namun sekarang setiap desa ada pustu	-
c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang			

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik mantap	80,00%	Tersedianya anggaran untuk menjaga dan meningkatkan proporsi jaringan jalan dalam kondisi mantap.	- Ketersediaan anggaran
	Rasio jaringan irigasi	10,21%	Kurangnya anggaran untuk pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	- Ketersediaan anggaran
	Persentase rumah tangga bersanitasi	94,06%	- Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan, dan masih banyaknya rumah tangga yang tidak menggunakan WC kondisi baik; - Masih kurangnya cakupan layanan sanitasi rumah tangga serta minimnya penyuluhan masalah PHBS kepada masyarakat	- Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang baik; - Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan.
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,04%	- Masih kurangnya sarana persampahan berupa TPS; - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola 3R (<i>Reuse, reduce, dan recycle</i>); - Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengolah sampah dan membuang sampah di sembarang tempat.	- Penambahan jumlah TPS; - Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan pola 3R bagi masyarakat melalui pembangunan.
	Rasio rumah layak huni	66,57 %	Masih adanya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat keterbatasan pembiayaan perumahan dan terbatasnya alokasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitas pembiayaan penyediaan rumah sederhana.
	% Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTAHUN)	8,44 %	Pedoman pelaksanaan bidang tata ruang telah tersedia dalam dokumen RTRW tetapi kesadaran terhadap pemanfaatan tata ruang masih rendah, untuk peraturan masalah RTH belum ada.	- Mempercepat penyusunan peraturan-peraturan yang merupakan turunan Perda RTRW mengenai RTH serta pembangunan sistem informasi penataan ruang daerah; - Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan dan permukiman.
	Rasio bangunan ber-IMB	0,042 %	Rendahnya kualitas bangunan di kawasan perkantoran pusat pemerintah kabupaten Musi rawas berbasis tata ruang.	
	Ketaatan terhadap RTRW	35 %	Belum sepenuhnya berpedoman pada RTRW untuk kesesuaian tata ruang, karena masih banyak yang alih fungsi lahan.	- Optimalisasi BKPRD; - Review RTRW Segera

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Luas wilayah banjir	1.165 Ha	- Sudah tersedianya data daerah luas daerah banjir, kekeringan, tetapi wilayah tersebut masih bergabung dengan Kab. Muratara. - Belum adanya sarana prasarana penanggulangan banjir yang memadai	- luas daerah banjir dan kekeringan; - Review RTRW segera. - Tersedia sarana prasarana penanggulangan banjir yang memadai
	Luas wilayah perkotaan	30.000,38 Ha	Penataan kota belum sempurna	Komitmen pemerintah cukup baik
d.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman			
	Rumah tangga pengguna listrik	85,00 %	- Luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas; - Masih kurangnya jangkauan jaringan listrik ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas; - Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan jaringan listrik perdesaan; - Kurangnya pasokan energi listrik yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas; - Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT. PLN (Persero) selaku perusahaan penyedia pasokan energi listrik.	- Alokasi dana yang memadai untuk melakukan pembangunan jaringan listrik perdesaan; - Komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT. PLN (Persero) selaku perusahaan penyedia pasokan energi listrik; - Kecukupan pasokan energi listrik untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas.
	Rumah tangga pengguna air bersih (dari jumlah rumah tangga)	94,11 %	- Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dan masih rendahnya jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih; - Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun.	Peningkatan cakupan penggunaan air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.
e.	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat			
	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan)	6	- Tersebar luasnya LSM, OKP di seluruh wilayah Kab. Mura; - Kurangnya anggaran yang tersedia	- Komunikasi yang baik antara <i>stakeholder</i> yang ada; - Kerjasama dengan dinas terkait

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kegiatan)	3	- Jumlah partai politik daerah yang berkembang pesat; - Kurangnya sosialisasi partai politik yang baru/lama; - Kurangnya transparansi mengenai visi dan misi partai politik di daerah; - Koordinasi dan komunikasi yang kurang aktif antara pemerintah dan pihak terkait; - Keterlambatan di dalam penyelesaian LPJ Banpol.	- Perampangan partai politik yang dinilai mempunyai visi dan misi yang sama; - Sosialisasi yang aktif partai politik dan masyarakat; - Visi dan misi partai politik yang jelas dan representatif; - Membangun komunikasi aktif antara Pemerinah, Partai Politik dan Masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang partai politik; - Meningkatkan pengetahuan pengurus partai politik di bidang keuangan.
	Penurunan titik api	50,00%	Anomali iklim	- Penegakan hukum
	Penegakan Perda	20 %	- Masih tingginya tingkat pelanggaran Perda; - Terbatasnya dana anggaran untuk pelaksanaan penegakan perda.	- Patroli-patroli ditingkatkan terutama pad lokasi-lokasi yang sering terjadi pelanggaran Perda; - Sosialisasi masalah produk hukum ke masyarakat.
	Angka kriminalitas yang tertangani (kali)	81,35	Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat sehingga menyebabkan angka kriminalitas meningkat karena masyarakat mencari jalan pintas lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.	- pelaku kriminalitas harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; - kerjasama dengan kepolisian dalam penanganan kriminalitas karena kriminalitas merupakan kewenangan kepolisian.
	Jumlah Pol PP per 10.000 Penduduk	6,00	- Kurangnya jumlah Pol PP berdasarkan rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk; - Terdapatnya keterbatasan anggaran.	Perlunya penambahan personil Pol PP untuk jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk.
	Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	58,00	- Kurangnya jumlah Linmas berdaarkan rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk; - Terbatasnya peran masyarakat dalam perlindungan masyarakat; - Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Siskamling dalam perlindungan masyarakat; - Terdapat Keterbatasan anggaran.	- Perlunya penambahan personil Pol PP untuk jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk; - Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya linmas di Masyarakat; - Peningkatan jumlah Siskamling.
f.	Sosial			

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	3	Pengelolaan panti asuhan belum optimal	Dukungan yang kuat dari Pemerintah akan terwujudnya sarana dan prasarana panti sosial di Kabupaten Musi Rawas
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	15,97 %	- Data yang kurang akurat tentang jumlah PMKS yang ada di wilayah Kab. Musi Rawas; - Keterbatasan anggaran bagi urusan sosial untuk memberikan bantuan sosial terhadap PMKS	- Penyusunan Data Base By Name By Adres Penduduk dan PMKS
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	30,45 %	- Data yang kurang akurat tentang jumlah penyandang cacat serta lansia di Wilayah Kab. Musi Rawas - Keterbatasan anggaran bagi urusan sosial untuk memberikan jaminan sosial terhadap penyandang cacat dan lanjut usia	- Penyusunan Data Base By Name By Adres Penyandang Masalah Sosial
2.	Urusan wajib non pelayanan dasar:			
a.	Tenaga kerja			
	Angka partisipasi angkatan kerja	74,59%	- Pertumbuhan ekonomi belum optimal, investasi masih kecil dan pada akhirnya peluang kerja, kesempatan kerja, kesempatan kerja sangat terbatas; - Rendahnya kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan formal maupun keterampilan.	Peningkatan kualitas tenaga kerja secara merata dan berkesinambungan baik melalui pelatihan intitusional maupun non intitusional.
	Jumlah Penduduk yang bekerja	202.740 orang	- Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang; - Kualitas penduduk masih rendah.	Pemahaman terhadap keseimbangan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kependudukan.
b.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	70%	- Belum semua kebijakan berpihak pada perempuan; - Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian perempuan dalam pembangunan; - Masih terjadinya diskriminasi terhadap perempuan	Dukungan yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan
	Rasio KDRT	0,0005 %	- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum; - Kurangnya Ekonomi dalam rumah tangga	Dukungan pemerintah dalam penyebaran informasi masalah sadar hukum dalam kekerasan
c.	Pangan			
	Regulasi ketahanan pangan (buah)	2	Masih kurangnya regulasi ketahanan pangan	Penyusunan Regulasi Ketahanan Pangan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Ketersediaan pangan utama (beras) per 1000 penduduk	171,928 ton/penduduk	Pola mengkonsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)	- Diversifikasi Pangan - Pemanfaatan pangan lokal selain terigu dan beras
d.	Pertanahan			
	Persentase luas lahan bersertifikat	75 %	- Komitmen masyarakat kurang - Alokasi anggaran terbatas	Komitmen pemerintah memperbaiki kinerja pertanahan (prona dan proda)
	Penyelesaian izin lokasi	100 %	Tumpang tindih antar perangkat daerah	Adanya program perizinan terpadu
e.	Lingkungan hidup			
	1. Persentase penanganan sampah	24,08 %	1. Regulator dan operator masih tergabung dalam satu wadah Dinas PU CKTR, belum terbentuk UPTD/Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang menangani persampahan; 2. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 3. Luasnya Kabupaten Musi Rawas belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sehingga tidak efisien bila dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif; 4. Pengelolaan sampah masih berorientasi pada penanganan di tingkat akhir (setelah terdapat timbulan sampah); 5. Paradigma pengelolaan sampah masih berorientasi bahwa tanggungjawab pengelolaan sampah adalah pemerintah; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal; 7. Konektivitas program dan kegiatan antar Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan penanganan sampah masih rendah; 8. Minimnya pengetahuan dan kesadaran <i>stakeholder</i> tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan.	1. Kolaborasi program dan kegiatan antar sektor terkait; 2. Pelibatan masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan sampah; 3. Perubahan-perubahan paradigma penanganan sampah dari sumbernya; 4. Penyediaan peralatan persampahan melalui teknologi <i>waste to energy</i> secara <i>clustering</i> / desentralisasi; 5. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku stake holder tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan; 6. Peningkatan sarana dan prasaran persampahan, terutama pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 7. Ketersediaan anggaran.
	2. Pengelolaan Kualitas Air (kali Penetapan Air)	0 %	Belum dilaksanakan	1. Ketersediaan anggaran 2. Penyediaan kendaraan operasional pemantauan 3. Dukungan legislatif dalam pembahasan Perda penetapan kelas air

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	3. Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal	95%	1. Lokasi usaha / kegiatan yang diawasi tidak tersentral sementara kondisi yang diawasi sangat besar; 2. Tidak tersedianya sarana transportasi untuk kegiatan pengawasan; 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia.	1. Ketersediaan anggaran 2. Penyediaan kendaraan pendukung operasional pengawasan 3. Penambahan jumlah personil pengawas
	4. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,45%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama sarana TPS; 2. Jarak antar lokasi TPS dengan timbulan sampah belum komprehensif; 3. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan.	1. Ketersediaan anggaran; 2. Optimalisasi jejaring kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i>; 3. Peningkatan pengetahuan kesadaran dan perilaku masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan.
	5. Penegakkan Hukum Lingkungan	100 %	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang lingkungan.	1. Semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik; 2. Kerjasama dengan aparat penegak hukum (POLRI dan Kejaksaan); 3. Membuat regulasi terkait dengan lingkungan; 4. Peningkatan kapasitas aparaturnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
f.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk.	99,44%	- Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-EI); - Masih adanya penduduk yang memiliki data/ dokumen kependudukan ganda.	- Rutin melaksanakan pelayanan KTP-el dan KK secara berpindah ke Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
	Rasio pasangan berakta nikah/ Perkawinan	1,35	- Masih banyak penduduk non Muslim yang belum memiliki Akta perkawinan; - Kurangnya kesadaran masyarakat non muslim akan pentingnya akta perkawinan.	- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat non muslim akan pentingnya akta perkawinan. - Melaksanakan secara rutin rapat dengan FKUB.
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	392,19	-	- Pelayanan keliling, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, PKK Kabupaten, IDI serta mengadakan pelayanan terpadu sidang keliling antara Pengadilan Agama dalam

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
				rangka Itsbat Nikah Penerbitan Buku Nikah dan Penerbitan Akta Kelahiran
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	-	- Melakukan pengecekan/ verifikasi dan perbaikan data dan penghapusan data ganda.
	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	100	-	- Melakukan pengecekan/ verifikasi dan perbaikan data dan penghapusan data ganda.
g.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa			
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	199	- Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi Desa; - Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal; - Pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat belum optimal.	- Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat; - Meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing-masing LPM pada setiap Desa.
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	214	Kurang aktifnya kelompok binaan PKK	Pengoptimalan Fungsi dan tanggung jawab penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
h.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
	Total Fertility Rate/TFR (%)	2,45	Masih adanya pendapatan per kapita seseorang atau PUS yang RENDAH sehingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran hidup) yang dimiliki seorang perempuan ditambah lagi dengan rendahnya tingkat pendidikan serta adanya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga	Melibatkan Toma dan Toga dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam menanamkan nilai "2 anak cukup", dan pencegahan "4 terlalu" dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi melalui dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB Gratis yang merata dan berkualitas dengan menjangkau seluruh PUS termasuk PUS yang berpendapatan rendah (Keluarga Miskin)
	Laju Pertumbuhan Penduduk /LPP (%)	1,38	Masih terjadinya LPP meningkat sehingga mengakibatkan belum seimbang antara ketersediaan kebutuhan dasar manusia (Basic Need) dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan disebabkan beberapa faktor antara lain kelahiran, kematian, migrasi dan penyebab utamanya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kemajuan dibidang kesehatan.	Ketersediaan Sumber Daya Alam yang cukup memadai untuk pengolahan dan pemanfaatan kebutuhan dasar manusia (basic need) sehingga semakin meningkatkan derajat kesehatan manusia.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Prevalensi Peserta KB Aktif/CPR (%)	77,51	Masih adanya peserta KB yang tidak menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga kurang efektif.	Dukungan sarana alat dan obat kontrasepsi yang cukup untuk melayani kebutuhan akan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta KB Aktif.
	Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	33,00	Masih adanya remaja yang menikah pada usia dini <21 Tahun (Pr), <25 Tahun (Lk). Batas usia itu belum ideal, dan belum matang baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun psikologi Angka ASFR yang mayoritas tinggi pada umur wanita yang potensial untuk reproduksi, akan membahayakan bagi program KB karena pengaruhnya terhadap fertilitas.	Dukungan sarana mobilitas pelayanan KIE PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) disetiap sekolah menengah pertama dan atas.
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmeet Need (%)	12,11	Masih terdapatnya PUS yang ingin anak ditunda (IAT), tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sehingga rawan kehamilan.	Penurunan <i>unmet need</i> melalui peningkatan akses, konseling dan penguatan KB pasca persalinan serta penurunan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi melalui peningkatan penggunaan MKJP dan pembinaan KB dengan dukungan sarana mobilitas pelayanan KB Gratis kepada PUS/Masyarakat Miskin.
	Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD (%)	10,2	KDT terjadi pada seorang wanita dimana sebenarnya belum atau tidak ingin mempunyai anak lagi. Hal ini bisa dialami mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Pada ibu dengan kehamilan tidak diinginkan yang mencoba menerima kehamilan namun tidak ikhlas menjadi tidak terlalu peduli dengan janin yang dikandung. Akibatnya bisa mengakibatkan malnutrisi pada janin dan juga memicu kelahiran bayi sangat prematur (usia kehamilan kurang dari	Menurunnya kejadian efek samping melalui pelaksanaan Pelayanan KB yang bermutu dan memastikan ditanggulangnya kejadian efek samping secara cepat dan tepat serta meningkatkan jangkauan dan kualitas Pelayanan KIE dan Konseling bagi remaja untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku berkaitan dengan Kespro dan perencanaan berkeluarga melalui Leaflet, Brosur, Banner, Radio Spot serta MUPEN.
			32 minggu). Keguguran dan preeklampsia atau kenaikan tekanan darah ibu disertai proteinuria selama kehamilan juga menjadi penemuan umum dari kasus kelahiran yang tidak diinginkan. Hal tersebut diatas disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena gagal kontrasepsi, anaknya sudah banyak, atau anaknya yang	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
			paling kecil dirasa masih sangat kecil untuk punya adik.	
i.	Perhubungan			
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.500 Org	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Adanya komitmen atasan dan tersedianya pendanaan yang cukup
	Rasio Ijin trayek (bh)	72		
	Jumlah uji kir angkutan umum	5.351 Unit		
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis:	1 Bandara		
	Kepemilikan kir angkutan umum	100%		
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (kir)	15 Menit		
j.	Komunikasi dan informatika			
	Jumlah fasilitasi pelayanan kantor pos dan jasa pelayanan	1 buah	Kurangnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan	Adanya komitmen atasan dan tersedianya pendanaan yang cukup
	Jumlah <i>blank spot</i>	45%		
	Website milik pemerintah daerah	1 Buah		
	Pameran/expo	4 kali		
k.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah			
	Persentase koperasi aktif	62,69	- Kurangnya modal usaha; - Kurangnya Sarana dan prasarana penunjang; - Wilayah kerja yang luas.	- Perlunya memfasilitasi antara pihak perbankan dan koperasi; - Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan koperasi; - Pengadaan kendaraan operasional kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat); - Dilakukannya Pembinaan dan pengawasan koperasi di Kabupaten Musi Rawas.
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	921 unit	- Tidak ada	Dilakukannya Pendataan UKM non BPR / LKM UKM di Kabupaten Musi Rawas
	Jumlah BPR/LKM	45%	Belum adanya BPR	1. Perlu dibentuk BPR 2. Perlu dibentuk BLUD KUKM
	Usaha mikro dan kecil	90 %	- Permodalan; - Sarana pengolahan; - Lebel Produk; - Pemasaran;	1. Meningkatkan kelembagaan, Usaha dan permodalan koperasi yang mandiri; 2. Memfasilitasi jaringan pemasaran hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Perencanaan Pembangunan.
l.	Penanaman modal			
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	31 Investor skala Nasional sektor perkebunan pada tahun 2019	- Belum ada Perda yang mengatur tentang kemajuan penanaman modal dan investasi serta kemudahan investasi; - Kurang koordinasi antar Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat	- Kebijakan dan Perda; - Koordinasi antar Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 8.303.453.632.674,67 pada tahun 2019	- Belum optimalnya memanfaatkan potensi daerah	- Kajian Potensi Daerah
m.	Kepemudaan dan olahraga			
	Jumlah organisasi pemuda	18	- Masih terbatasnya anggaran; - Kualitas SDM masih kurang; - Kurangnya sarana dan Prasarana olahraga.	- Terpenuhinya anggaran; - Meningkatnya kualitas SDM; - Terpenuhinya sarana dan Prasarana olahraga.
	Jumlah organisasi olahraga	22		
	Jumlah kegiatan kepemudaan	6		
	Jumlah kegiatan olahraga	18		
	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1		
	Lapangan olahraga	725		
n.	Statistik			
	Buku kabupaten dalam angka (Dok)	1 Dok	-	Peluang kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
	Buku PDRB kabupaten (Dok)	1 Dok	-	Peluang kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
o.	Persandian			
	Dokumen persandian	1 Dok	Minimnya tenaga persandian	- Minat aparatur dalam mengikuti pelatihan persandian - Sarana dan prasarana persandian
p.	Kebudayaan			
	Jumlah Pelaksanaan festival seni dan budaya (kali)	5 Kali	- Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya; - Masih rendahnya promosi budaya lokal Kabupaten Musi Rawas.	- Dukungan semua pihak; - Mengoptimalkan promosi budaya lokal melalui berbagai media.
	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	7 Buah	- Kurangnya perhatian terhadap pelestarian seni budaya, situs, benda purbakala dan kawasan cagar budaya sehingga terdapat beberapa kawasan yang belum mendapat perhatian Pemerintah; - Belum tersedianya museum daerah;	- Perhatian Pemerintah terhadap pelestarian Benda, situs dan kawasan cagar budaya; - Usulan pendirian museum daerah.
q.	Perpustakaan			
	Jumlah perpustakaan	494 perpustakaan	-	- Peran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	42,57%	-	- Koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait
r.	Kearsipan			
	Pengelolaan arsip secara baku	60%	- Kualitas SDM bidang kearsipan masih sangat rendah	-
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	- Belum adanya arsiparis	-
	Urusan pilihan:			
a.	Kelautan dan perikanan			
	Produksi perikanan	76.747,84 ton		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Konsumsi ikan Produksi perikanan kelompok nelayan	36,49Kg / Kap/thn 76.321,95 ton	- Berkurangnya kemampuan sumber daya air untuk pengembangan perikanan disebabkan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; - Masih tinggi dan fluktuatifnya harga pangan; - Masih rendahnya praktek cara pembenihan ikan yang baik dan cara pemeliharaan ikan yang baik	- Faktor sumber daya alam (air); - Faktor produksi (pakan); - Faktor sumber daya manusia (SDM).
b.	Pariwisata			
	Kunjungan wisata (Orang/Tahun)	72.250%	- Persaingan dengan objek wisata lain di kota terdekat; - Obyek wisata masih dalam pengembangan; - Masih ada persoalan seputar hak pengelolaan; - Promosi belum optimal; - Belum ada SDM yang profesional di bidang pariwisata.	- Akses menuju lokasi secara bertahap mulai gampang dijangkau; - Ada kenaikan jumlah pengunjung pada hari-hari tertentu, seperti hari raya atau tahun baru; - Adanya acara-acara tertentu yang melibatkan peran elemen masyarakat yang diselenggarakan di kawasan wisata; - Sarana dan prasarana penunjang pariwisata mulai dibenahi dan dipercantik.
c.	Pertanian			
	Produktivitas padi per hektar (TPH)	5,770 ton/ha/115,86%	- Adanya alih fungsi lahan; - Adanya serangan Organisme; pengganggu tanaman, banjir dan kekeringan.	- Adanya program upaya khusus (upsus) padi, jagung dan kedelai; - Penerapan teknologi.
	Cakupan bina kelompok petani	315 P	- Masih rendah kemampuan SDM petani dalam mengelola organisasi kelompok tani; - Belum adanya kepastian aturan tentang pemberian reward kepada petani yang mengembangkan produk pertanian berkelanjutan sehingga petani sering beralih ke tanaman perkembunan; - Masih rendahnya hasil produk pertanian yang dijual petani yang diakibatkan dari belum tertatanya sistem perdagangan hilirisasi yang baik.	- Memberikan pelatihan/magang kepada petani untuk meningkatkan kemampuannya; - Memberikan <i>reward</i> kepada petani yang menanam tanaman pangan berkelanjutan; - Merencanakan serta membuat system yang berkelanjutan sehingga produk hasil pertanian dapat menjadi nilai jual yang tinggi melalui pengolahan lebih lanjut produk pertanian dan perkebunan melalui hilirisasi produk.
	Nilai tukar petani	100,4	- Rendahnya nilai NTP Petani akibat besarnya biaya produksi	Potensi produk unggulan dan kondisi wilayah yang memadai
d.	Kehutanan			
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	41,48%	- Status kawasan hutan yang belum mantap; - Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;	- Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan;

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
			- SDM aparatur kehutanan yang masih kurang; - Belum adanya RDTR kawasan hutan; - Belum maksimalnya konservasi hutan dan lahan; - Masih banyaknya masyarakat berkebun di kawasan hutan;	- Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan monitoring kegiatan konservasi hutan dan lahan; - Peningkatan SDM aparatur kehutanan. - Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan Hutan Desa (HD); Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kemitraan kehutanan.
	Kerusakan kawasan hutan	0,48%	Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan serta <i>illegal logging</i>	Penegakan Hukum
e.	Energi dan sumber daya mineral			
	Pertambangan tanpa izin	42,22%	- Bukan merupakan kewenangan Kabupaten sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan penindakan; - Sarana dan Prasarana yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; - Cakupan wilayah Kabupaten Musi Rawas yang luas dan lokasi sasaran kegiatan yang jauh dan terpencil; - Kondisi perekonomian masyarakat; - Ketidapahaman pelaku pertambangan tanpa izin terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku; - Biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku pertambangan tanpa izin untuk mengurus izin yang diperlukan; - Kurangnya komunikasi antara pelaku pertambangan tanpa izin dengan pihak-pihak yang terkait.	- Koordinasi dengan Provinsi yang memiliki kewenangan dalam urusan pertambangan; - Sarana dan Prasarana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; - Komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait; - Kesadaran pelaku pertambangan tanpa izin untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.
f.	Perdagangan			
	Ekspor bersih perdagangan	-	-	-
	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	7,87	Belum optimalnya hilirisasi sektor perdagangan	Besarnya PDRB dari sektor perdagangan
g.	Perindustrian			
	Pertumbuhan industri	2,96%	- Persaingan di era globalisasi pasar bebas semakin meningkat; - Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai; - Penguasaan teknologi masih kurang.	- Peningkatan daya saing daerah di era pasar global melalui peningkatan kapasitas pelaku industri kecil, menengah dan rumah tangga; - Upaya optimalisasi sarana dan prasarana industri
h.	Transmigrasi			

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Pertumbuhan pusat ekonomi baru	1 Lokasi PTB	Tingginya okupasi lahan usaha peruntukan bagi warga transmigrans oleh penduduk setempat	Harus diupayakan penyelesaian bagi lahan peruntukan warga transmigrasi
	Pembangunan kawasan perkotaan baru (KPB/KTM)	1 SKP (Satuan Kawasan Permukiman Kelingi IV.D)	Pemerintah Pusat belum yakin akan kelangsungan penyelenggaraan program dikarenakan belum diterbitkannya PERDA KTM.	Diintensifkan kordinasi untuk mendorong disepakatinya penerbitan PERDA penyelenggaraan program KTM Simpang Rimau Muara Kelingi.
	Penunjang urusan pemerintahan:			
a.	Perencanaan			
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda	1 Dokumen	-	Perda telah selesai dan berlaku selama 25 Tahun
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada	1 Dokumen	-	Partisipasi masyarakat dan stakeholder cukup baik.
	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada	5 Dokumen	-	Partisipasi masyarakat dan stakeholder cukup baik.
	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	- Adanya program yang belum berbasis kinerja dan belum mendukung langsung capaian kinerja Perangkat Daerah - Keterbatasan keuangan daerah	- Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang baik menghasilkan kinerja yang maksimal - Penyusunan Program berbasis kinerja - Adanya program yang bersifat crosscutting dengan Perangkat Daerah lainnya
b.	Keuangan			
	Masih rendahnya pendapatan daerah	Angka PAD baru mencapai Rp. 128.563.715.132,68 atau 91,37%	- belum maksimalnya penggalan potensi PAD - belum maksimalnya kinerja bidang Pendapatan dalam penetapan target yang tinggi sesuai dengan potensi daerah	- Tercapainya target penerimaan PAD
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal.	PBB : Rp. 5.857.342.750 atau 101,62 % BPHTB : Rp.8.548.495.914,00 atau 38,33%	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah dan/ atau bangunan serta pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan bangunan - Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih rendah sedangkan dasar pengenaan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan adalah nilai jual objek pajak dan nilai transaksi	- Tercapainya target penerimaan PAD
	SILPA yang berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	Rp. 206.354.943.217,13	- Masih banyak PAD yang belum tercapai target dikarenakan potensi PAD yang belum tergali secara optimal; - Belum memaksimalkan penghematan belanja	- Tercapainya target penerimaan PAD - Belanja tidak melebihi pagu anggaran

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Persentase Proporsi belanja untuk pemenuhan Kebutuhan Aparatur	98,47%	- Penganggaran Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan PMK, ternyata laporan dari Disdik kepada Pusat untuk guru yang menerima tunjangan tersebut lebih besar dari anggaran sehingga menyebabkan pembayaran tunjangan tidak dapat optimal;; - Penyediaan Akres 2,5%.	Antara anggaran tunjangan profesi guru dengan laporan Disdik kepada Pusat harus sesuai
	Aset Daerah	Rp. 430.926.194.698,00	- Belum tertibnya setiap SKPD tentang kepemilikan sertifikat tanah, - Belum tertibnya sistem aset daerah.	Tertibnya setiap SKPD tentang kepemilikan sertifikat tanah dan membuat sistem aset daerah yang dapat diakses.
c.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
	- Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya	120 Orang	Keterbatasan kesempatan diklat	Minat untuk mengikuti diklat cukup besar
	- Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP kepegawaian	95%	-	Kerjasama Perangkat Daerah baik
d.	Penelitian dan pengembangan			
	Ada/Tidak Adanya Perda Kelembagaan Litbang	0	Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya, padahal Kabupaten Musi Rawas memiliki produk unggulan sebagai modal pengembangan inovasi daerah.	Membuat Perda Kelembagaan Litbang dan UPTB Litbang.
e.	Sekretariat DPRD			
	Jumlah Peraturan Perda yang dibuat	83 %	Perda yang sudah dibahas sebanyak 16 Perda namun yang sudah melakukan penomoran hanya 14 perda, tersisa 2 perda akan dinomori pada Tahun 2016	Penyelesaian 2 Perda yang dibahas dan akan diberi penomoran pada tahun 2016.
f.	Sekretariat Daerah			
	Survey IKM di pemda	45	1. Belum dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah; 2. Belum disusun regulasi di daerah.	Dukungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Survey IKM.
	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	90%	Keterbatasan dana	Komitmen aparatur
	Persentase Santri yang Khatam Al'Quran	75,42		
	Persentase Santri yang Hafidz Al'Quran	59,66		
g.	Inspektorat			
	1. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	WTP	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2015 yang disusun Bidang Aset belum sesuai dengan Bidang Akuntansi	Rekonsiliasi Data Bidang Aset dengan Data Bidang Akuntansi DPPKAD dan koordinasi antar SKPD Pengguna Barang
	2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP	75	Kompetensi SDM Pengelola Akuntansi yang belum memadai	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPD Berbasis Akrua

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target RKPD Sebelumnya	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	3. Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kategori B	97,95	Keandalan data pengukuran kinerja SKPD belum memadai	- SOP Pengelolaan Data Kinerja - Implementasi Teknologi Informasi pengelola data kinerja
h	Kecamatan			
	Persentase Muslim yang Khatam Al-Quran	28,35	-	Meningkatnya minat generasi muda mengikuti pengajian
	Persentase Masyarakat Muslim yang menjadi anggota aktif mejelis ta'lim	20,00	-	Banyaknya tumbuh kembang kelompok kelompok pengajian

2.4. Permasalahan Pembangunan dan Strategi Penanganan Masalah pada Tahun Berjalan

Setiap daerah memiliki permasalahan-permasalahan yang unik sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi setiap permasalahan yang ada. Penuntasan permasalahan merupakan esensi tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah mengingat permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks dan multi dimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tepat dan relevan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan.

Identifikasi permasalahan dapat diverifikasi dari informasi dan kinerja yang telah dicapai sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada bab gambaran umum kondisi daerah. Segala perbandingan perihal apa yang telah dicapai terhadap standar dan rencana atau dengan melakukan *benchmarking* dapat diketahui berbagai kinerja pembangunan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, pemahaman berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan akan terdeteksi melalui kajian dan analisis indikator kinerja pemerintah.

Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

Tabel 2.29
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Bertambahnya jumlah penduduk miskin dan banyaknya sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi covid19	Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
Belum optimalnya investasi dan daya saing daerah	Peningkatan investasi dan daya saing daerah serta pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian, perikanan hulu sampai hilir, destinasi wisata dan UMKM
Masih rendahnya hasil produksi dan rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penciptaan dan pengembangan destinasi pariwisata	
Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM masih terbatas	
Infrastruktur yang belum merata dan konektivitas antar wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan
Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan aparatur pemerintah yang bersih dan pelayanan prima

2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tabel 2.30

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	%	100	98,76	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100,00	100	98,76
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	92,25	100	100,00

Urusan Pendidikan selama tahun 2019 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 449.814.719.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 380.615.132.105 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.31

Alokasi Anggaran Tahun 2019

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	449.814.719.800	380.615.132.105	84,62 %

Urusan Pendidikan selama tahun 2020 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 389.704.373.073,- dengan realisasi sebesar Rp. 377.909.115.273,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32
Alokasi Anggaran Tahun 2020

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	389.704.373.073,00	377.909.115.273,00	96,97 %

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tabel 2.33
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	100	97	100	92,4
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	%	100	94	100	95
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	99	100	99,2
4	Pelayanan kesehatan balita	%	100	99	100	90
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	97,3
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	91	100	83
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	83	100	93,1
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	86	100	86
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100	85	100	85
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	91	100	99
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	34

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus-HIV</i>)	%	100	98	100	54,4

Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Musi Rawas melaksanakan program yang terdiri dari 19 (sembilan belas) program dan 85 (delapan puluh lima) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 163.986.989.300 (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 67.019.185.000 (enam puluh tujuh milyar sembilan belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 96.949.804.300 (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah).

Tabel 2.34
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja tidak langsung	67.019.185.000	59.957.839.485	89, 46 %
Belanja langsung	96.949.804.300	83.047.299.374	85,66 %
Total	163.968.989.300	141.005.138.859	85,99 %

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan dana sebesar Rp. 211.996.747.036 (dua ratus sebelas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah). Alokasi anggaran

dan realisasi perjenis belanja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.35
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja operasi :			
	- Belanja Pegawai	69.312.327.807	65.797.315.022	94,93
	- Belanja Barang dan Jasa	74.956.226.655	61.684.118.940	82,29
2	Belanja Modal	67.728.192.574	62.352.842.094	92,06
	Total	211.996.747.036	189.834.276.056	89,55

Pada Tahun 2020, terdapat 18 Program dan 82 Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program dan Kegiatan tersebut hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

c) Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum					
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	95,89	100	98,04
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dosmetik					
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dosmetik	%	100	94,06	100	98,32

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 141.046.547.855,00. Anggaran tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA– PD) 1.03.02.01 tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Nomor 1.03.02.01 tanggal 5 September 2019.

Tabel 2.36

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	4.639.193.205,00
2	Belanja Tidak Langsung	17.308.903.000,00
3	Belanja Langsung	123.737.644.855,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(136.407.354.650,00)

Dari dana tersebut, anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum adalah sebesar Rp. 24.248.495.205,-. Selain dana APBD, DPU CKTRP juga mendapat kucuran dana dari APBN dan dana dari APBD Provinsi, DAK Reguler dan DAK Afirmatif. Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM ini dapat dilihat di Bab III Program dan Kegiatan.

Anggaran Pendapatan DPU CKTRP berasal dari hasil penerimaan Pendapatan Lain-Lain Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Lain-lain BLUD SPAM Kabupaten Musi Rawas yang terealisasi sebesar Rp. 4.360.507.056,00 dari target sebesar Rp. 4.639.193.205,00. Operasional BLUD SPAM juga mendukung penerapan SPM untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh pagu Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 4.655.406.080,- dan pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 123.397.914.649.-

Anggaran tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA–PD) 1.03.02.01 tanggal 18 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Nomor 1.03.02.01 tanggal 19 September 2020.

Tabel 2.37

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	4.655.406.080
2	Belanja Tidak Langsung	13.067.494.987
3	Belanja Langsung	110.330.419.662
SURPLUS / (DEFISIT)		(118.742.508.569)

Dari dana tersebut, anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum adalah sebesar Rp..30.387.444.342,-. Selain dana APBD, DPU CKTRP juga mendapat kucuran dana dari APBN dan dana dari APBD Provinsi, DAK Reguler dan DAK Afirmatif. Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM ini dapat dilihat di Bab III Program dan Kegiatan.

Anggaran Pendapatan DPU CKTRP berasal dari hasil penerimaan Pendapatan Lain-Lain Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Lain-lain BLUD SPAM Kabupaten Musi Rawas yang terealisasi sebesar Rp. 4.782.052.042,- dari target sebesar Rp. 4.665.406.080,- Operasional BLUD SPAM juga mendukung penerapan SPM untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

d) Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota	%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota	%	100%	100%	100%	100%

Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2019 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.240.000.000.000,- dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.38
Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan
Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu	3.240.000.000.000,-	APBD

Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2020 telah mengalokasikan dana dengan realisasi sebagai berikut

Tabel 2.39
Rincian Anggaran, Program Dan Kegiatan
Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Perumahan - Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (APBD) - Peningkatan kualitas perumahan swadaya (DAK)	Rp. 6.946.540.913,- APBD = Rp.3.301.989.913,- DAK = Rp.3.644.551.000,-	APBD / APBN (DAK)

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan	Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2019		2020	
	Perlindungan Masyarakat	daerah di Kab/Kota				
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	58,07%	100%	100%
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	58,07%	100%	100%
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%

Alokasi anggaran tahun 2019 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal berjumlah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.40

Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
I	PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	- Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/ Kota	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	33.396.000,-
			2. Penegak Peraturan Perundang-undangan	148.540.000,-
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindakan Kriminal	1. Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat keamanan dalam Teknis pencegahan kejahatan	101.460.000,-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
			1. Pengamanan Kegiatan Kegiatan/Hari Hari Penting 2. Peningkatan Pelayanan Pengamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	120.184.000,- 620.800.000,-
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pencegahan Bencana Kebakaran 2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	34.430.000 59.500.000

Tabel 2.41

Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam	Rp.75.900.000,-
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Rapat Koordinasi Darurat Bencana	Rp.36.700.000,-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Pasca Bencana	Rp.30.350.000,-

Alokasi anggaran tahun 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal berjumlah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.42

Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
I	PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	- Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	347.985.000,-
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	2. Penegak Peraturan Perundang-undangan 1. Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat keamanan dalam Teknis	22.810.000,- 18.087.000,-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
			pencegahan Kejahatan	
			1. Pengamanan Kegiatan/Hari Hari Penting	57.481.900,-
			2. Peningkatan Pelayanan Pengamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	846.108.900,-
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Program Peningkatan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1. Peningkatan Pelayanan Penanggulanga n Bahaya Kebakaran	130.434.000,-

Tabel 2.43

Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam	Rp.75.900.000,-
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	Program Pencegahan dini dan	Rapat Koordinasi	Rp.29.388.500,-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	pengecegan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan Korban Bencana	Darurat Bencana	
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Pasca Bencana	Rp.34.550.000,-

e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Bidang Rehabilitasi Sosial					
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	%	100	95,7	100	74,88
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	%	100	92	100	93,29
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	%	100	92,1	100	85,34
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	%	100	100	100	100
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial					
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100

Tabel 2.44

Alokasi Anggaran Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	1. Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	310.700.000	APBD dan APBN
	b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	2. Prosentase (%) Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	7.142.800.000	APBD dan APBN
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;	3. Prosentase (%) Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.863.400.000	APBD dan APBN
	d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	4. Prosentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	APBD
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	a. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.	5. Prosentase (%) korban bencana daerah dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana	39.800.000	APBD dan APBN

Tabel 2.45
Alokasi Anggaran Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	113.160.300	APBD
	b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.392.400	APBD
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	31.103.928	APBD
	d. Rehabilitasi Sosial dasar khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.	7.308.300	APBD
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tangap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	321.077.700	APBD

2.6 Evaluasi Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020 telah terjadi penyebaran Pandemi Covid -19 yang terjadi di lebih dari 213 Negara di dunia termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum dapat diperkirakan, penyebaran Pandemi Covid-19 akan berakhir bahkan Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan manusia terutama sektor kesehatan yang ditandai dengan banyaknya korban jiwa, kemudian sektor strategis perekonomian juga terkena dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri manufaktur dan pertanian.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka Percepatan Penangan Dampak Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempedomani Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah dalam APBD.
2. Tahapan Refocusing Kabupaten Musi Rawas :
 - Refocusing tahap I
 - Melakukan realokasi Belanja Daerah sebesar Rp. 4.500.000.000,- dialihkan ke Belanja Tidak Terduga pada 18 OPD yang menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan
 2. RS. Sobirin
 3. Dinas Sosial
 4. 14 Kecamatan

Laporan Kinerja Pencegahan Covid Bulan April 2020 Kabupaten Musi Rawas

a. Bidang Kesehatan

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Tidak Terduga	2.020.000.000	931.734.158	46,14 %
	TOTAL	2.020.000.000		46,14 %

b. Penanganan Dampak Ekonomi

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Tidak Terduga	480.000.000	434.330.000	90,49 %
	TOTAL	480.000.000		90,49 %

c. Penangan Jaringan Pengamanan Sosial

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.999.950.000	100 %
	TOTAL	2.000.000.000		100

- Refocusing tahap II

Melakukan Realokasi Belanja Daerah sebesar Rp. 87.174.508.880,- dialihkan penganggarnya dalam rangka penanganan Covid-19 melalui DPA Kegiatan 30 OPD dengan rincian :

1. Penangan Kesehatan	Rp. 36.582.989.880,-
2. Penanganan Dampak Ekonomi	Rp. 33.171.276.800,-
3. Penanganan Jaringan Pengamanan Sosial	<u>Rp. 17.420.242.200,-</u>
JUMLAH	Rp. 87.174.508.880,-

- Refocusing Tahap III

Melakukan Realokasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja modal sebesar Rp. 41.700.000.000,- untuk memenuhi kekurangan 5 % dari batas toleransi Rasionalisasi Belanja sekurang-kurangnya 35 % sesuai siaran Pers Nomor SP 30/KLI/2020 dengan memperhatikan keuangan daerah yang dialihkan penganggarnya pada Belanja Tidak Terduga.

1. Penangan Kesehatan	
2. Penanganan Dampak Ekonomi	
3. Penanganan Jaringan Pengamanan Sosial	<u>Rp. 41.700.000.000,-</u>

Refocusing Tahap I	Rp. 4.500.000.000,-
Refocusing Tahap II	Rp. 87.174.508.880,-
Refocusing Tahap III	<u>Rp. 41.700.000.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 133.374.508.880,-

3. Rekap Bansos Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Rawas ;

- Bansos dalam bentuk uang	Rp. 1.100.000.000,-
- Bansos barang yang akan diserahkan	<u>Rp. 38.606.952.100,-</u>
JUMLAH	Rp. 39.706.952.100,-

Tabel 2.46
Rekapitulasi Anggaran Perjenis Belanja Dan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL DANA COVID
1	Dinas Kesehatan		6.814.458.010,-	22.983.142.142.870,-	29.797.600.880,-
2	RSUD Sobirin		3.602.200.000,-	2.997.800.000,-	6.600.000.000,-
3	Dinas PU BM		360.000.000,-		360.000.000,-
4	Dinas PU CK TR	92.700.000,-	7.617.410.000,-		7.710.110.000,-
5	Dinas Perkim		456.000.000,-		456.000.000,-
6	Dinas Pol PP dan PK		185.389.000,-		185.389.000,-
7	BPBD		1.711.380.000,-		1.711.380.000,-
8	Dinas Sosial		14.425.902.200,-		14.435.602.200,-
9	Dinas Nakertrans		82.200.000,-		82.200.000,-
10	Dinas KP		4.596.000.000,-		4.596.000.000,-
11	Dinas Perhubungan		392.385.000,-	67.500.000,-	459.885.000,-
12	Dinas Kominfo dan Statistik	11.850.000,-	77.625.000,-	221.700.000,-	311.175.000,-
13	Dinas Perindag	4.460.000,-	8.038.854.800,-		8.043.314.800,-
14	Dinas Koperasi dan UKM	20.900.000,-	3.079.100.000,-		3.100.000.000,-
15	Dinas Perikanan	0,-	5.115.852.000,-		5.115.852.000,-
16	Distanak	14.000.000,-	3.776.000.000,-		3.790.000.000,-

NO	URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL DANA COVID
17	Kec. BTS Ulu	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
18	Kec. Muara Kelingi	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
19	Kec. Muara Lakitan	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
20	Kec. Jayaloka	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
21	Kec. Megang Sakti	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
22	Kec. Sukakarya	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
23	Kec. Tuah Negeri	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
24	Kec. Tugumulyo	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
25	Kec. Purwodadi	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
26	Kec. STL Ulu Terawas	7.200.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
27	Kec. Sumber Harta	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
28	Kec. Muara Beliti	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
29	Kec. TPK	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
30	Kec. Selangit	6.300.000,-	17.450.000,-	6.250.000,-	30.000.000,-
	JUMLAH	242.710.000,-	60.576.406.010,-	26.355.392.870,-	87.174.508.880,-

Tahap IV. Realokasi Selisih Lebih

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAINNYA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7=(2+3+4+5+6)
Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid - 19		10.602.047.010,-	25.980.942.870,-	-	2.020.000.000,-	38.602.989.880,-
Penyediaan jaringan Pengamanan Sosial	110.650.000,-	16.935.142.200,-	289.200.000,-	-	43.700.000.000,-	61.034.992.200,-
Penanganan Dampak Ekonomi	132.060.000,-	33.039.216.800,-	85.250.000,-	-	480.000.000,-	33.736.526.800,-
Total	242.710.000,-	60.576.406.010,-	26.355.392.870,-	-	46.200.000.000,-	133.374.508.880,-

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Musi Rawas.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2022 diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat Musi Rawas pasca pandemi *Corona Virus Disease 19* dengan mengedepankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan

penanaman modal. Pada Tahun 2022 ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021 dengan tetap menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global dan sangat tergantung pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab itu asumsi perekonomian Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2022 memperhitungkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan nasional pada Tahun 2020 dan 2021.

3.1.1. Analisis Perekonomian Global

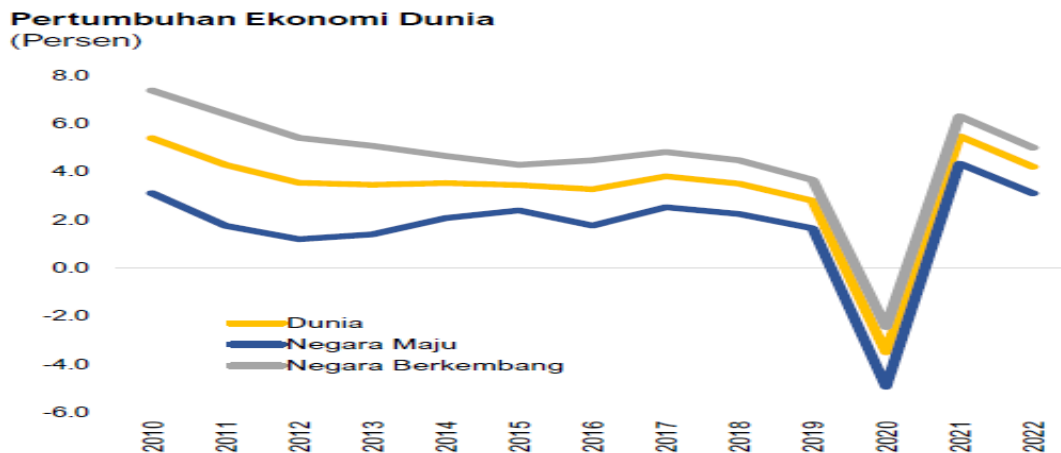
Proyeksi perekonomian Musi Rawas tahun mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global, nasional dan provinsi. Di tengah dampak wabah virus corona (Covid-19) yang semakin meluas di berbagai negara, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 4,4 persen. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi, jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan ini semakin terlihat. Berkat kepintaran para ilmuwan, ratusan juta orang sedang divaksinasi dan ini akan memberikan energi bagi pemulihan ekonomi di banyak negara tahun 2022.

IMF mengatakan prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian, mutasi baru dan jumlah korban jiwa yang terus naik menghantui program vaksinasi yang terus berjalan. Pemulihan ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara.

IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global berkat kebijakan fiskal yang diambil beberapa perekonomian besar, program vaksinasi, dan adaptasi aktivitas ekonomi di tengah pembatasan sosial. Namun, masih banyak ketidakpastian terkait pandemi, efektivitas kebijakan, dan evolusi kondisi keuangan.

Grafik 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Dunia



Sumber : WEO IMF, Januari 2021

Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih menguat diprediksi terjadi seiring mulai pulihnya permintaan global, efektivitas proses vaksinasi dunia, serta perbaikan harga komoditas global. Selain itu, menurunnya tingkat pengangguran dunia yang ditandai dengan perbaikan *employment rate* juga mendorong laju pertumbuhan lebih lanjut. Tentu proyeksi ini didasarkan pada beberapa asumsi, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah efektif dalam mencegah kebangkrutan bagi perusahaan, angka kehilangan pekerjaan bisa diminimalkan, serta ketegangan sistem finansial bisa dikendalikan.

Disamping itu, volume perdagangan dunia (*World Trade Volume*) baik di negara maju maupun berkembang diperkirakan masih tumbuh positif masing-masing sebesar 6,4 persen (yoy) dan 6,0 persen (yoy) pada tahun 2022 yang didukung oleh perbaikan harga komoditas global serta meningkatnya aktivitas industri. Hal ini ditandai pula dengan PMI Manufaktur negara mitra dagang yang berada pada tren ekspansi.

Perdagangan global akan didorong oleh pemulihan ekonomi dan ekspor China. Peningkatan ekspor China didorong oleh tingginya permintaan pasar global terhadap *medical equipment dan supplies* (masker, obat-obatan, alat kesehatan, dll) dan peralatan elektronik untuk bekerja dan belajar jarak jauh.

3.1.2. Analisis Perekonomian Nasional

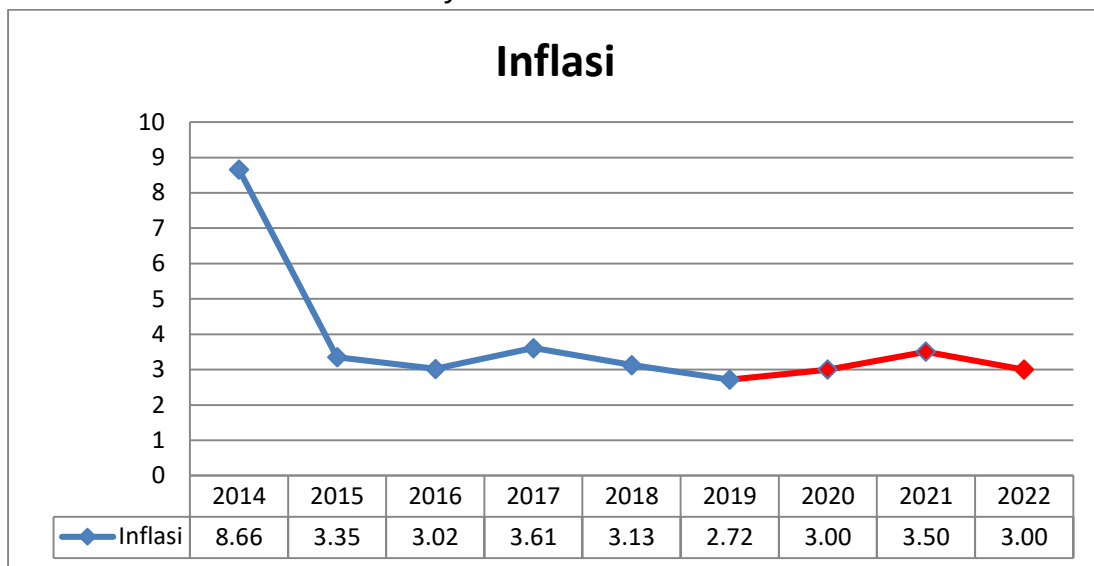
Di sisi domestik, meskipun Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat, wabah covid-19 mengubah arah perekonomian nasional, penurunan sejumlah harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, berimplikasi buruk bagi perekonomian global dan nasional pada tahun 2020. Terlebih sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia juga menghadapi situasi ekonomi yang sulit, maka mendorong terjadinya penurunan daya beli masyarakat seiring sentimen negatif pada bisnis dan konsumen.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh menguat dalam rentang 5,4-6,0 persen (yoy). Pemerintah menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan nasional pada 2022 akan lebih tinggi dari target 2021. Proyeksi pertumbuhan ini didasarkan atas asumsi bahwa pandemi Covid-19 akan mereda sejalan dengan terbentuknya *herd immunity* pasca selesainya proses vaksinasi. Selain itu, asumsi tidak adanya perkembangan mutase virus Covid-19 jenis baru juga mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2022 juga ditopang oleh percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan diselesaikan oleh pemerintah.

Peningkatan perekonomian domestik juga ditandai dengan tren peningkatan mobilitas masyarakat di hampir seluruh daerah dengan mobilitas *grocery* dan *pharmacy* yang telah kembali ke kondisi sebelum Covid-19. Tingkat pengangguran Indonesia juga diproyeksi akan menurun dari 6,5 persen (yoy) menjadi 5,8 persen (yoy). Selain itu optimisme terhadap pemulihan ekonomi Indonesia juga terlihat dari peningkatan penjualan online.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022 didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin telah meluas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

Grafik 3.2
Inflasi Nasional Tahun 2014-2019
Dan Proyeksi Inflasi Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Tahun 2019 (data diolah), Rancangan Outlook 2021 Kementerian Keuangan

Stabilitas makro ekonomi tetap terjaga karena inflasi yang terkendali pada level 3 persen dan nilai tukar rupiah yang kompetitif untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia pada rentang Rp 13.900-15.000 per dolar AS. Cadangan devisa masih berada pada kisaran 8,0-8,1 bulan impor atau setara dengan 138,2 miliar dolar AS sampai 141,4 miliar dolar AS yang berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sementara itu defisit transaksi berjalan di rentang aman yakni 1,6 hingga 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dorongan berupa stimulus fiskal juga tetap dilakukan oleh pemerintah dengan tetap menjaga ruang defisit yang longgar.

Ditinjau dari sisi PDB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 5,4–6,0 persen pada tahun 2022, melalui penerapan Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi pada tahun 2022 antara lain yaitu :

1. penyelesaian RUU terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan;
2. Pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan;

3. Pemberian fasilitasi investasi (seperti percepatan perizinan berusaha di K/L/D melalui Online Single Submission/OSS yang sudah terintegrasi dengan K/L/D;
4. Pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor;
5. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor, selain itu kebijakan investasi juga akan diperkuat dengan pengawalan realisasi proyek- proyek besar di infrastruktur, industri dan pariwisata, yang didukung upaya debottlenecking permasalahan operasional dan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain. Selain dari pihak swasta, peningkatan investasi juga harus dilakukan pemerintah termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.

Selain investasi, ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat, tumbuh 6,5–7,1 persen pada tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Dalam mendorong ekspor, kebijakan perdagangan luar negeri pada tahun 2022 akan diarahkan pada berbagai upaya untuk percepatan pemulihan kinerja ekspor pascapandemi, diantaranya melalui :

1. fasilitasi perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi yang efektif;
2. perluasan akses pendanaan ekspor;
3. perbaikan kebijakan dan prosedur ekspor-impor;
4. peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri;
5. optimalisasi pemanfaatan PTA/FTA/CEPA.

Selain itu upaya pembangunan pariwisata diharapkan dapat menarik kembali wisatawan mancanegara, meski belum sepenuhnya normal karena kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan penyebaran kembali Covid-19 dapat menyebabkan sektor ini pulih lebih lamban dibandingkan sektor yang lain.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami peningkatan 5,8–6,3 persen, didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, perluasan bantuan sosial, dan alokasi kartu prakerja. Sementara itu, konsumsi pemerintah diharapkan tetap

memberikan dorongan terhadap ekonomi, tumbuh 0,8–2,8 persen, didorong oleh relaksasi aturan batas defisit anggaran yang masih berlaku pada tahun 2022. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan meningkat, tumbuh 7,8–8,9 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat.

Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor industri, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan.

Beberapa faktor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri pengolahan, yaitu (1) pemulihan daya beli masyarakat dan pemerintah pascapandemi Covid-19, (2) pemulihan ekonomi global yang menunjang ekspor produk industri, dan (3) realisasi investasi di beberapa subsektor yang sudah terjadwalkan seperti pada sektor kimia dan logam dasar. Arah kebijakan dan strategi sektor industri pengolahan di masa pemulihan Covid-19 pada tahun 2022, akan berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu (1) membantu industri dalam memulihkan proses produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, (2) membantu proses re-hiring/re-training tenaga kerja, dan (3) membuka dan mempermudah akses atas impor bahan baku dan pasar ekspor.

Pemulihan sektor perdagangan akan didorong melalui (1) peningkatan permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya adalah peningkatan standar produk, penguatan daya beli masyarakat, peningkatan fasilitas ekspor, dan akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi, peningkatan fasilitas ekspor; (2) peningkatan efisiensi logistik; serta (3) penguatan kapasitas pelaku usaha perdagangan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan utamanya ke daerah tujuan wisata.

Percepatan pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dapat dicapai dengan akselerasi sektor pariwisata melalui (1) pengembangan destinasi pariwisata melalui peningkatan infrastruktur amenities,

aksesibilitas, dan atraksi di destinasi pariwisata serta pengawalan investasi pariwisata skala besar; (2) peningkatan SDM pariwisata melalui pemberian insentif rekrutmen, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dan kerja sama pelatihan/magang bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) pengaturan cuti dan libur bersama yang mendukung peningkatan wisatawan domestik; (4) pemasaran melalui promosi di originasi yang dekat dan yang sudah lebih dahulu pulih, penyelenggaraan event internasional: seni, MICE, dan olahraga, termasuk peningkatan bidding penyelenggaraan MICE internasional di Indonesia, pemberian insentif bagi trip pengenalan/famtrip yang dilaksanakan di Indonesia, promosi melalui influencer; (5) peningkatan kapasitas usaha pariwisata melalui peningkatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi, peningkatan kerja sama dengan maskapai untuk pemulihan dan penambahan jadwal penerbangan; dan (6) peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku kreatif baik ke perbankan maupun ke nonperbankan.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dan akan dilakukan, diharapkan dapat mendorong **pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4–6,0 persen pada tahun 2022.**

3.1.3. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2022

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2022 berkontraksi pada level yang tidak terlalu dalam. Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -0,11% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif 5,69% (yoy). Terkontraksinya ekonomi disebabkan oleh merebaknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun yang menyebabkan penurunan pada hampir seluruh komponen pengeluaran dan beberapa Lapangan Usaha (LU) utama Sumatera Selatan seperti LU Pertambangan dan Penggalian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih ditopang oleh LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU informasi dan komunikasi, serta LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masih tumbuh positif.

Memasuki triwulan I 2021, perekonomian Sumatera Selatan diperkirakan membaik seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dunia dan domestik pasca dimulainya proses vaksinasi di awal tahun 2021. Selain itu, pengesahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diyakini mampu menjadi *game changer* yang dapat mengembalikan kepercayaan sektor dunia usaha. Peningkatan dari sisi pengeluaran pada triwulan I 2021 diperkirakan bersumber dari perbaikan konsumsi rumah tangga, kinerja investasi, serta masih berlanjutnya perbaikan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik yang terlihat dari pergerakan masyarakat yang sudah terus menunjukkan tren peningkatan serta meningkatnya *confidence* masyarakat pasca dimulainya proses vaksinasi.

Dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan menjadi lapangan usaha utama dengan adanya pertumbuhan yang agresif terutama dari sub sektor industri kertas dan barang kertas serta industri kayu dan barang dari kayu. Selain itu, industri kimia juga diperkirakan turut mendorong pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan masih diberlakukannya kebijakan B30 dan rencana B100 yang dapat mendorong harga kelapa sawit. Kondusifnya cuaca juga ikut mendorong peningkatan produksi dari tanaman perkebunan tahunan, tanaman hortikultura, dan tanaman pangan lainnya. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh positif meskipun melambat di tahun 2020 karena terbatasnya permintaan. Disamping lapangan usaha utama tersebut, lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan motor juga diperkirakan juga akan kembali tumbuh seiring dengan mulai kembalinya aktifitas masyarakat dengan penerapan skema new normal. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan masih tumbuh melambat yang disebabkan masih belum berlanjutnya pembangunan infrastruktur baik yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional maupun pekerjaan umum lainnya, sejalan dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi. Selain itu beberapa lapangan usaha diperkirakan akan tertekan dan tumbuh negative antara lain lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan

makan minum seiring menurunnya jumlah perjalanan orang pada masa pandemi ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB Sisi Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan 2022 (%)

Sektor	2020	Proyeksi	
		2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,74	2,1-2,5	2,3-2,6
Pertambangan dan Penggalian	-4,04	4,5-5,5	5,7-6,5
Industri Pengolahan	0,69	2,5-3,0	3,0-3,5
Pengadaan Listrik dan Gas	14,67	13,0-13,5	13,0-13,6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,83	5,0-5,5	5,3-5,8
Konstruksi	-0,01	0,5-1,0	1,0-1,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,32	3,5-4,5	4,0-4,6
Transportasi dan Pergudangan	-5,91	-1,5-1,0	2,5-3,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,21	-2,5-0,0	1,5-2,0
Informasi dan Komunikasi	12,79	12,5-13,5	12,5-13,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,5-2,0	1,5-2,0
Real Estate	2,24	2,6-3,4	3,5-4,5
Jasa Perusahaan	-2,08	3,0-4,0	3,0-4,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,5-5,0	4,5-5,1
Jasa Pendidikan	-1,50	2,0-2,5	2,0-2,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,14	7,0-7,5	7,0-7,5
Jasa lainnya	5,23	5,0-6,0	5,2-6,2

Sumber RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2018-2023

Dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor pendorong ekonomi Sumatera Selatan tersebut di atas, **pada tahun 2021 perekonomian Sumatera Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5 – 5,3 persen dari 4,7-5,3 persen pada tahun 2022.**

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan triwulan II 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021. Hasil evaluasi dari implementasi vaksin untuk penyakit COVID-19 menunjukkan angka keberhasilan yang cukup tinggi, mendorong keyakinan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitasnya kembali di luar rumah. Konsumsi secara keseluruhan diperkirakan membaik sejalan dengan adanya momen puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dibandingkan dengan triwulan I 2021. Sementara itu, kinerja investasi dan ekspor diperkirakan juga akan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2021 diperkirakan terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU industri pengolahan serta LU Konstruksi yang tumbuh meningkat sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi di tengah tahun. Sementara itu, untuk LU pertanian, kehutanan, dan perikanan serta LU Industri pengolahan diperkirakan juga kembali meningkat di triwulan II-2021 sejalan dengan mulai masuknya musim panen beberapa komoditas pertanian.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian domestik dan global. Membaiknya aktivitas perekonomian global yang didorong oleh implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara dan berlanjutnya kebijakan fiskal dan moneter mendorong peningkatan kinerja dari sisi permintaan dan Lapangan Usaha. Tren pemulihan sudah mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sektor utama dari pertengahan tahun 2020, mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan tumbuh lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan permintaan global di beberapa negara yang sebaran virusnya mulai turun, mendorong kembalinya aktivitas manufaktur sehingga memberikan dampak positif kepada kinerja ekspor. Kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat dan menopang ekonomi tumbuh lebih tinggi. , terutama ekspor komoditi unggulan daerah seperti karet dan kelapa sawit.

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2021 dihadapkan pada faktor risiko yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari proyeksi. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti kepastian implementasi vaksin yang belum terealisasi ke seluruh masyarakat, adanya risiko politik global yang

berpengaruh kepada aktivitas perdagangan dan harga komoditas global, fenomena La Nina yang lebih buruk dari perkiraan, serta realisasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan dengan rencana.

Di tengah masih terjadinya pandemi COVID-19, stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan tetap terjaga. Pada triwulan II-2021, permintaan dari rumah tangga untuk makanan dan minuman dari sektor penyedia makanan dan minuman diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang puasa Ramadhan dan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Sementara itu, tekanan inflasi Sumatera Selatan di tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional. Meningkatnya tekanan inflasi tersebut diperkirakan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi. Selain itu, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga diperkirakan masih meningkat.

3.1.4 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2022 Akibat Pandemi Covid-19

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu membawa dampak baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sebaliknya dengan adanya wabah Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk juga Indonesia, akan memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi baik secara global, nasional, maupun regional. Adanya pembatasan aktivitas sementara untuk menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 memberikan dampak terhadap menurunnya volume perdagangan dunia. Terbatasnya pertumbuhan perdagangan dunia memberikan dampak langsung terhadap kinerja ekspor-impor dan juga berdampak tidak langsung

kepada kinerja konsumsi dan investasi di suatu negara. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kabupaten Musi Rawas diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan akan mengalami kenaikan / pertumbuhan PDRB dari sisi Lapangan Usaha pada beberapa sektor berikut ini :

1. **Sektor Industri Pengolahan** diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan adanya permintaan ekspor negara-negara yang mengalami perbaikan ekonomi pasca covid 19.
2. **Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, khusus pada tahun 2022 sebagian besar penduduk Indonesia merayakan dua hari besar agamanya.
3. **Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**, diproyeksikan naik pada tahun 2022 dan akan terus mengalami pertumbuhan jika wabah Pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini berkaitan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia/global khususnya Negara-negara pengimpor karet, yang berdampak langsung terhadap pendapatan per kapita sebagian besar petani karet di kabupaten Musi Rawas.
4. **Sektor Lapangan usaha konstruksi** diproyeksikan akan tumbuh dengan lambat yang disebabkan mulai berlanjutnya pembangunan infrastruktur baik yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional maupun pekerjaan umum lainnya, sejalan dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan Pandemic Covid.
5. **Sektor Real Estate**, dengan melemahnya perekonomian daerah khususnya pendapatan per kapita masyarakat maka permintaan pembangunan perumahan akan menurun.
6. **Sektor Jasa Perusahaan**, khususnya industri manufaktur akan mengalami penurunan produksi karena permintaan konsumen menurun walaupun tidak sampai berakibat mem PHK kan karyawan perusahaan.

7. **Sektor Jasa Pendidikan**, diproyeksikan perlahan-lahan akan pulih kembali seiring dengan harapan akan menurunnya kasus Covid 19 sehingga para siswa dapat mengikuti proses belajar di sekolah.

Tabel 3.2.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 – 2020 serta proyeksi pada Tahun 2021 dan 2022

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,24	3,46	3,72	0,99	2.3	3.1
Pertambangan dan Penggalian	4,40	7,54	7,87	-0,92	4	6.2
Industri Pengolahan	7,80	5,80	6,06	0,75	2.75	3.5
Pengadaan Listrik dan Gas	6,42	6,05	6,51	13,10	10.25	10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,16	5,39	5,05	5,46	5.25	5.5
Konstruksi	9,08	8,38	6,41	-1,44	0.75	5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,18	6,84	6,94	-0,02	4	4.3
Transportasi dan Pergudangan	2,95	6,81	8,75	-4,57	1	2.75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,14	7,45	8,74	-0,56	1.5	2
Informasi dan Komunikasi	7,32	7,67	8,09	15,10	12.6	13
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,74	3,00	1,85	1,46	1.75	2.5
Real Estate	4,88	7,4	7,47	1,05	3	3.1
Jasa Perusahaan	6,90	7,58	7,63	7,91	3.5	3.6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,87	5,51	2,22	2,99	4.75	4.8
Jasa Pendidikan	5,35	7,81	7,95	0,35	2.25	2.5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,26	5,95	6,09	6,48	7.25	7.3
Jasa lainnya	7,53	4,44	4,81	1,37	5.5	5.6
PDRB dengan Migas	5,03	5,79	5,88	0,24	4.26	5,0

Sumber :Data diolah

Mengacu pada proyeksi Tahun 2020 Nasional dan Provinsi serta mempertimbangkan perkembangan sektor-sektor PDRB tersebut di atas, maka

pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Musi Rawas diperkirakan tumbuh sekitar 4,26 persen dan 5 persen pada tahun 2022.

b. PDRB

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari capaian PDRB baik dari sisi Lapangan Usaha maupun dari sisi Pengeluaran. Melalui pemberian stimulus dengan berbagai program maupun pembangunan fisik yang ikut membawa dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas serta peran serta Investasi Swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu fungsi lembaga perbankan sebagai intermediasi juga menunjukkan peningkatan kinerja sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Musi Rawas bisa berjalan dengan baik. Berikut ini, realisasi dan target PDRB Kabupaten Musi Rawas menurut sisi Lapangan Usaha :

Tabel 3.3.

PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.717,87	4.985,20	5.289,73	5.586,00	5.821,98	5.870,00	5.920,00
Pertambangan dan Penggalian	4.576,04	4.826,24	5.520,96	6.206,80	5.944,77	5.990,00	6.030,00
Industri Pengolahan	1.874,15	2.120,01	2.365,01	2.571,30	2.705,27	2.770,00	2.840,00
Pengadaan Listrik dan Gas	4,32	4,55	4,81	5,00	5,74	6,10	6,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,09	1,24	1,37	1,50	1,58	2,50	3,00
Konstruksi	898,33	965,59	1.061,48	1.138,90	1.109,63	1.130,00	1.160,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.155,90	1.365,06	1.528,12	1.700,90	1.793,01	1.880,00	1.960,00
Transportasi dan Pergudangan	70,26	74,55	82,10	91,10	88,13	88,04	88,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49,52	51,56	57,84	65,90	66,71	67,08	67,15
Informasi dan Komunikasi	44,41	50,06	56,26	62,10	72,69	73,14	73,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	101,48	108,35	119,30	126,10	123,80	124,02	124,04
Real Estate	202,91	217,08	240,44	268,40	279,17	279,00	279,36

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Perusahaan	2,39	2,77	3,14	3,60	3,95	4,17	4,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370,56	381,05	382,06	391,00	407,30	407,03	407,06
asa Pendidikan	443,33	449,18	487,35	531,06	527,47	527,04	527,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,27	115,13	122,73	131,60	146,79	147,09	147,19
Jasa lainnya	145,51	162,69	177,23	195,20	205,45	205,08	205,15
PDRB Dengan Migas	14.758,34	15.880,31	17.499,94	19.076,90	19.303,45	20.125,78	21.232,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas (2017-2020)
Proyeksi 2021-2022 (data diolah)

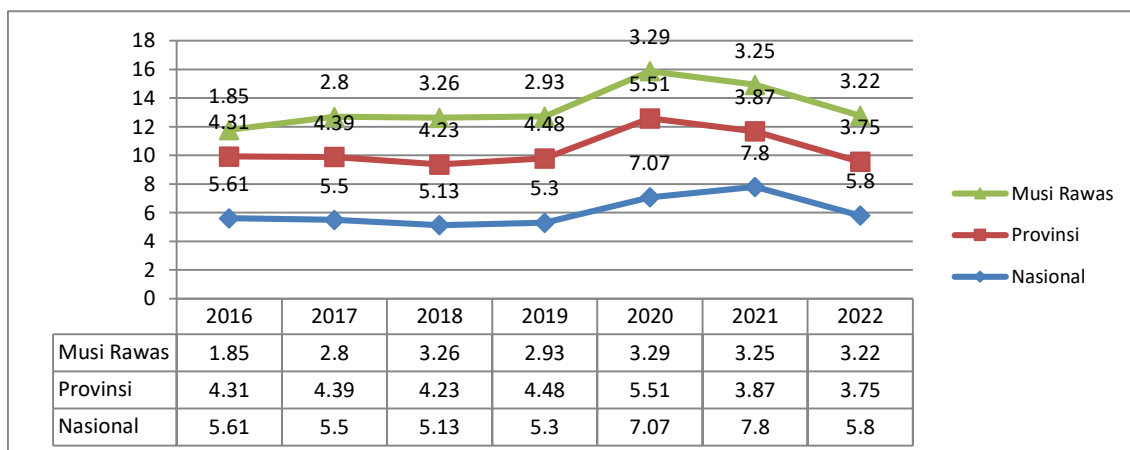
c. Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 diperkirakan akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (confidence) dan membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

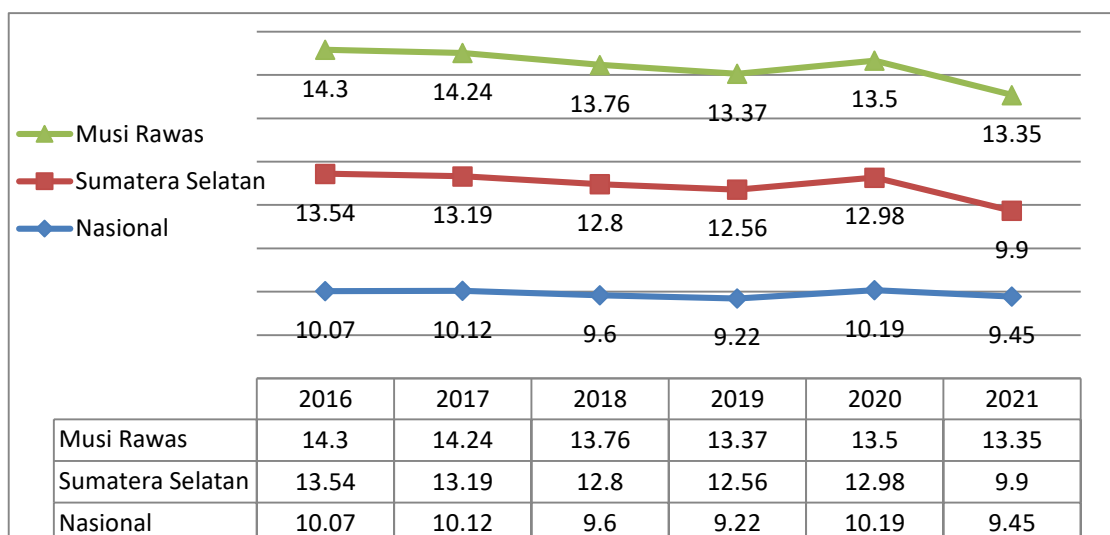
Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022



d. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, pencapaian pada tahun 2020 sebesar 13, 5 % hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas bertambah 0,13 % dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 13,37 % dan diproyeksikan akan turun menjadi 13,35 % pada tahun 2021.

Grafik 3.4
Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 201-2020 dan Target Tahun 2021



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021, RPJMD Sumatera Selatan 2018-2023, RPJMN Tahun 2019-2024 (tahun 2021 data diolah)

Setelah terjadinya wabah Pandemi Covid, tentu akan berdampak pada angka kemiskinan secara nasional, regional (provinsi maupun kabupaten) khususnya Kabupaten Musi Rawas.

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

No	Uraian	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi		
	a. Range	4,26 %-5,0 %	4,5 %-5,5 %
	b. Moderat	4,26 %	5,0 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas		
	* PDRB (ADHB menurut LU/ Milyar Rupiah)	20.125,78	21.232,69
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67	67,5
4	Kemiskinan	13,35	13,2
5	Tingkat Pengangguran	3,25 %	3,21 %

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 4,5 -5,5 persen untuk Tahun 2022. PDRB akan dipacu di Tahun 2022 hingga mencapai 21.232,69 (milyar rupiah). Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada Tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas

ditargetkan menurun sampai pada angka **13,2** persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada Tahun 2022, TPT akan berada pada angka **3,21** persen. Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier diperkirakan juga masih akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Musi Rawas. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif diperkirakan menjadi komponen-komponen yang akan membantu mempertahankan kinerja perekonomian Kabupaten Musi Rawas tetap stabil dan investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil.

Untuk mencapai target ekonomi makro yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang ada di daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Melalui
Penguatan Sektor-sektor Strategis

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	• Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah; • Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; • Penataan kelembagaan tani; • Percepatan pembentukan food estate;
2.	Pengembangan Industri Pengolahan	• Fasilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi; • Penerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produk • Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian; • Melakukan labelisasi pada produk unggulan UMKM daerah.
3.	Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur dikawasan ekonomi	• Pembangunan dan peningkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produk; • Pembangunan Infrastruktur TIK.

No	Strategi	Arah Kebijakan
4.	Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	• Optimalisasi kawasan agropolitan center; • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan.

Tabel 3.6.
Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi
(Sisi pengeluaran)

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan konsumsi rumah tangga	Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi : • Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat; • Memperkuat sistem kesehatan masyarakat; • Updating data masyarakat penerima bantuan, khususnya warga kurang mampu. Seperti bantuan BLT, PKH
2	Peningkatan konsumsi pemerintah	• Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industri pengolahan; • Efektivitas penyaluran dan KUR;
3	Peningkatan investasi	• Efisiensi belanja daerah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan strategis;
4	Ekspor	• Peningkatan daya saing produk unggulan.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan, peluang dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas maka Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Pengentasan Desa Tertinggal
3. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa
4. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa
5. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa

6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah
8. Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan Peningkatan Persentase Belanja Modal
9. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 2021-2026)
10. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2022 juga akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang prima maka kebijakan ekonomi pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung **Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Sektor-sektor Strategis menuju Musi Rawas yang Mandiri, Maju dan Bermartabat.**

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas

pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyerderhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*. Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.

3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.7
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022

No	Uraian	APBD TA. 2021	PROYEKSI APBD TA. 2022
1	2		4
	PENDAPATAN DAERAH	1,768,123,357,201.00	1,690,386,316,763.00
1.	Pendapatan Asli Daerah	199,070,974,521.00	227,038.035,454.00
1.1.	Pajak Daerah	86,173,894,375.00	114,638,732,187.00
1.2.	Retribusi Daerah	4,315,733,125.00	4,328,326,875.00
1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	102,581,347,021.00	100,070,976,392.00
2.	Pendapatan Transfer	1,503,612,785,930.00	1,463,348,281,309.00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,434,813,691,000.00	1,394,043,220,000.00
2.2	Transfer Antar Daerah	68,799,094,930.00	69,305,061,309.00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65,439,596,750.00	0

No	Uraian	APBD TA. 2021	PROYEKSI APBD TA. 2022
1	2		4
3.1	Pendapatan Hibah	12,186,054,350.00	0
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53,253,542,400.00	0

Sumber : BPKAD Kab. Musi Rawas 2021

Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah Tahun 2022 diproyeksikan meningkat dari pendapatan di Tahun 2021. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dana perimbangan, dan PAD.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berikut ini pelaksanaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas belanja daerah :

1. Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi.
2. Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja
3. Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
4. Pengurangan persentase belanja operasional dan peningkatan persentase belanja langsung

b. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2022 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yaitu **Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor-Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)**. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh wabah Pandemi Covid-19, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid 19. Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid 19 demi mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026.

c. Pengoptimalan belanja modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku.

d. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

Tabel 3.8

Rencana Struktur Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dan
Proyeksi Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Belanja	
		APBD TA. 2021	Proyeksi APBD TA. 2022
	BELANJA DAERAH	1,832,421,446,761	1,690,386,316,763.00
1.	Belanja Operasi	1,121,562,251,863	1,116,809,874,797.00
a.	Belanja Pegawai	558,981,425,376	647,210,895,853.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	551,844,051,987	455,483,197,900.00
c.	Belanja Bunga	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-
e.	Belanja Hibah	10,736,774,500	14,115,781,044.00
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.	Belanja Modal	462,772,131,548	240,230,558,560.00
3.	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	53,858,565,300.00
4.	Belanja Transfer	238,087,063,350	279,487,318,106.00
a.	Belanja Bagi Hasil	0	11,896,705,906.00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	238,087,063,350	267,590,612,200.00

Berikut uraian dari Struktur Belanja dan Pengeluaran Wajib Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022.

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan penganggaran gaji ke-13 dan ke-14.
- 2) Penganggaran Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kinerja Daerah atau Tunjangan Beban Kerja PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penentuan kriterianya ditentukan dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana di atur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Nasional (BPJS) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial.
- 5) Tunjangan Beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-3/PB/2015 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang, bahwa pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS ditetapkan sebesar Rp. 8.047,00 per kilogram;

- 6) Penganggaran untuk Tunjangan Jabatan Fungsional dirinci secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 7). Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- 8 Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.

Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Sehingga terhadap penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa dimaksud.
2. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa barang persediaan tahun sebelumnya.

3. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
4. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Permenkeu No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*). Standar satuan harga perjalanan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan SDM yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
6. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
7. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014.

8. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

- a. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.
- b. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

4. Belanja Transfer

Penetapan belanja transfer dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan proyeksi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022, belanja transfer direncanakan terdiri dari :

- Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa dan bantuan partai politik.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dalam Struktur APBD selain komponen Pendapatan dan Belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan Pembiayaan daerah serta kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat dan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Transfer dari dana cadangan daerah, pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari

rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

4. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti : Piutang terhadap Provinsi terkait dana bagi hasil Provinsi.
5. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan.

Tabel 3.9

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah	
		APBD TA. 2021	Proyeksi TA. 2022
	PEMBIAYAAN DAERAH	64,298,089,560	0
1	Penerimaan pembiayaan	74,298,089,560	10.000.000.000
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran(SiLPA) tahun sebelumnya	74,298,089,560	10,000,000,000.00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan	-	-
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman	-	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-
2	Pengeluaran pembiayaan	10,000,000,000	10.000.000.000
2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	10,000,000,000	10,000,000,000
2.3	Pembayaran pokok utang	-	-
2.4	Pemberian pinjaman daerah		

Dari rencana pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1,690,386,316,763.00 dan rencana pembiayaan sebesar Rp. 0.00 karena penerimaan pembiayaan berimbang dengan pengeluaran pembiayaan, direncanakan akan di alokasikan untuk belanja sebesar Rp. 1,690,386,316,763.00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat keutamaan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2022 ini merupakan merupakan pelaksanaan periode ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Perencanaan tahun 2022 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja RPJMD, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2022, RKPD Kabupaten Musi Rawas mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	2	3
1	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemenuhan pelayanan publik
2	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkualitas 2. Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal
3	Pemerataan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur 2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan 2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 3. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2022. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas birokrasi	1. Indeks RB	55,62
		2. Nilai SAKIP	BB (70,01)
		3. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,51
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks SPBE	2.95
		2. Indeks Profesionalitas ASN	62,92
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,44
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,20
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.45
		2. Indeks Pembangunan Pemuda	0,178
		3. Status Kabupaten Layak Anak	650 Pratama
7	Terwujudnya Ketertiban, Keamananan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	100%
8	Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks kerukunan umat beragama	73
9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal	1. Persentase lembaga adat yang aktif	72

No.	Sasaran	Indikator	Target
		2. Indeks Budaya Literasi Daerah	30,00
10	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	92,19
11	Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infastruktur Dasar	96,5
		Indeks Sumber Daya Air	52
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,90
13	Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96
14	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	50%
15	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	6.057,19 (milyar)
16	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	1682,29
		PDRB sektor perdagangan	982,5
17	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	8
18	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,2
19	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3.21
20	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94
21	Persentase peningkatan desa maju	Persentase peningkatan Desa Maju	89,57

4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2022

RKPD Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Tema pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah " Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah "Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-

2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020, RKPD Sumatera Selatan Tahun 2022, maka permasalahan di Kabupaten Musi Rawas, serta kerangka RKPD Kab. Musi Rawas Tahun 2022 dirumuskan didalam tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yaitu :

**“Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis
Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat
(MANTAB)”**

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia membawa implikasi terhadap terganggunya pertumbuhan ekonomi global. Data yang dilansir International Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi secara global diproyeksikan menjadi di angka 4,4 persen pada tahun 2022. Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman baru bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang terkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 akan terfokus pada 3 keyword/kata kunci tema yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Keyword tema pembangunan tahun 2022 adalah:

a. Pemulihan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk keluar dari keterpurukan akibat Pandemi Covid 2019. Seiring dengan usaha pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam upaya menghentikan penyebaran Pandemi Covid 19 termasuk proses vaksinasi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meluncurkan bantuan dunia usaha dan rumah tangga untuk mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi agar bangkit dari keterpurukan. Kabupaten Musi Rawas yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dikembangkan akan tetapi belum dikelola secara maksimal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus

kesempatan bagi pemerintah untuk mengolah potensi yang tersedia menjadi ekonomi riil yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen untuk menghilangkan kendala serta hambatan teknis yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan dampak ekonomi yaitu :

- Penurunan angka pengangguran;
- Peningkatan daya beli masyarakat.
- Peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

Seperti kita ketahui bersama bahwa terjadinya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan hampir terhadap seluruh sektor kehidupan, antara lain ;

- Pertumbuhan ekonomi melambat;
- Peningkatan pengangguran;
- Peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas;
- Angka kemiskinan naik;
- Rawan pangan;
- Kesenjangan sosial ekonomi meningkat;
- Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi;
- Inflasi meningkat;
- Pembangunan infrastruktur terhambat.

Dengan demikian penanganan dampak ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan merupakan persoalan di Kabupaten Musi Rawas sehingga perlu upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, beberapa kebijakan langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan subsidi silang, skema bantuan langsung masyarakat (BLM), pemberian modal usaha untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan

kesehatan dan pendidikan, serta program jaring pengaman lainnya. Namun, upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin memang bukan perkara mudah, butuh waktu dan konsistensi serta upaya yang luar biasa dengan menciptakan berbagai terobosan dan kebijakan yang tepat dan efektif.

Terlebih lagi, dengan adanya wabah Covid 19 maka bisa dipastikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas akan meningkat. Sehingga sangat diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mampu memberikan solusi dan efek percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas.

b. Penguatan Sektor Strategis

- Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas yaitu tersedianya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan beberapa hal :

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)

- Pembangunan Sumber Daya Manusia (Penanganan Kesehatan dan Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial)

Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kapasitas dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dimaksud bertujuan untuk :

- Melakukan penanganan kesehatan, pendidikan dan penyediaan jaringan pengaman sosial untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Musi Rawas;
- Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, energi dan air bersih.

C. Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia (religius).

- Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkesinambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Tabel 4.3**Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022**

TEMA	
“Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)”	
TEMATIK	
PENGUATAN SEKTOR STRATEGIS	PEMULIHAN EKONOMI
Prioritas: - Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing - Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas: - Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan - Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi
KONDISI PERLU	
Prioritas : - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa berbasis teknologi informasi untuk pelayanan prima	

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan tematik yang sesuai dengan mempertimbangkan 2 (dua) dimensi pembangunan. Dimensi penguatan sektor strategis mengangkat tematik optimalisasi pengelolaan sektor unggulan dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas, sedangkan dimensi pemulihan ekonomi mengangkat tematik pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Kedua tematik tersebut didukung dengan kondisi perlu yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa berbasis teknologi informasi untuk pelayanan prima.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2022 dan Tema
Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Tema
Pembangunan Musi Rawas Tahun 2022

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)	Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Keselarasn tema pembangunan antara RKPD Musi Rawas dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah memiliki kata kunci “**Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi**”. *Pemulihan Ekonomi* adalah keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, penambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit. Adanya rencana “Pemulihan Ekonomi” dilatarbelakangi oleh dampak terjadinya penyebaran wabah Covid 19 yang menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian, menurunnya pendapatan perkapita, menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia termasuk juga di provinsi Sumatera Selatan bahkan di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, *Pembangunan ekonomi* inklusif mempunyai makna sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

4.3 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun sebelumnya, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Musi Rawas pada Tahun 2022, maka terdapat beberapa telaah yang harus dilakukan, yaitu:

4.3.1. Telaah Terhadap RKP 2022

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah skala nasional mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perencanaan nasional Tahun 2022 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”, maka tujuan RPJMN Tahap ke-4 Tahun 2020-2024 diarahkan kepada **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut: Kelembagaan politik dan hukum.

1. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

2. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif.
3. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan pada RPJPN maka tema pada RPJMN 2020-2024 adalah **"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"** yang didukung dengan :

1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Karakter Bangsa
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Selanjutnya berdasarkan RPJPN dan RPJMN 2020-2024 maka telah ditetapkan tema RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

"PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL"

Tema RKP Tahun 2022 tersebut didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.3.2. Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

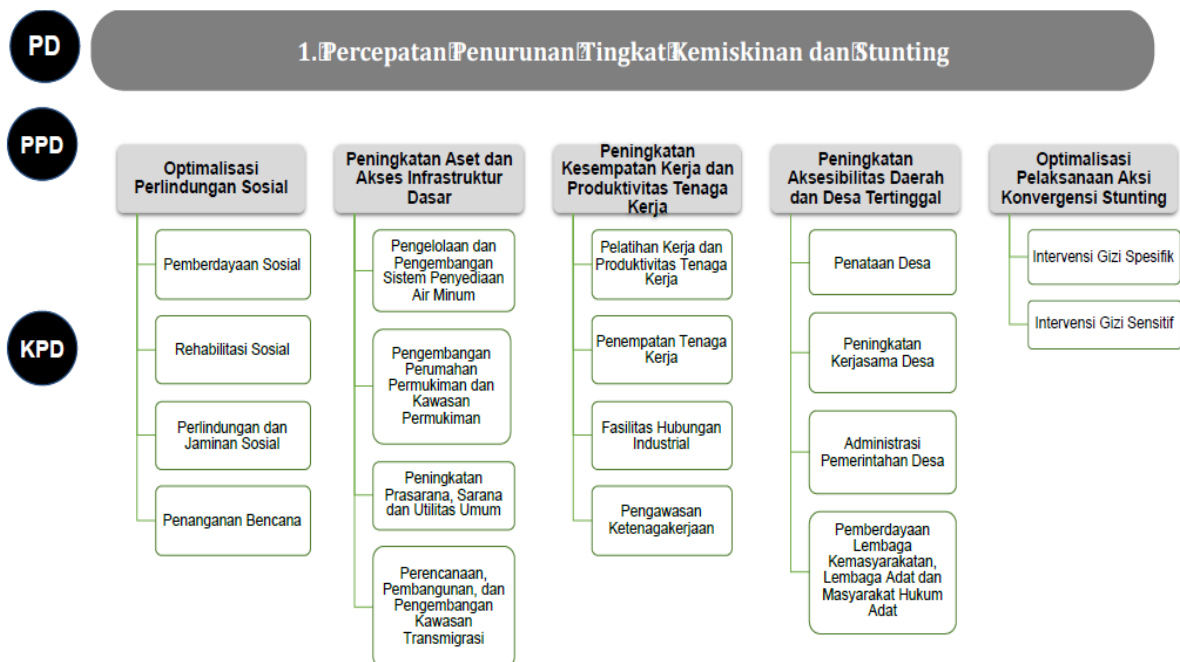
Pada tahun 2021 tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai Berikut:

“Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 terdiri dari:

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Stunting
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana;
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan.

PRIORITAS DAERAH 1



Keterangan:
 PD : Prioritas Daerah
 PPD : Program Prioritas Daerah (Mempedomani Sasaran RPJMD)
 KPD : Kegiatan Prioritas Daerah (Mempedomani Program/Kegiatan pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

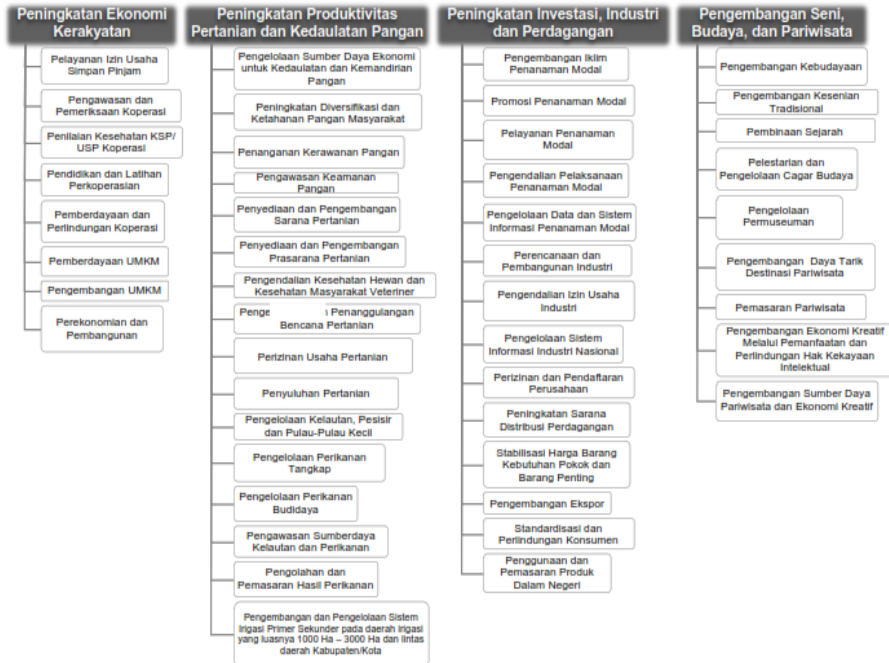
PRIORITAS DAERAH 2

PD

2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata

PPD

KPD



Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah (Mempedomani Sasaran RPJMD)
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah (Mempedomani Program/Kegiatan pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

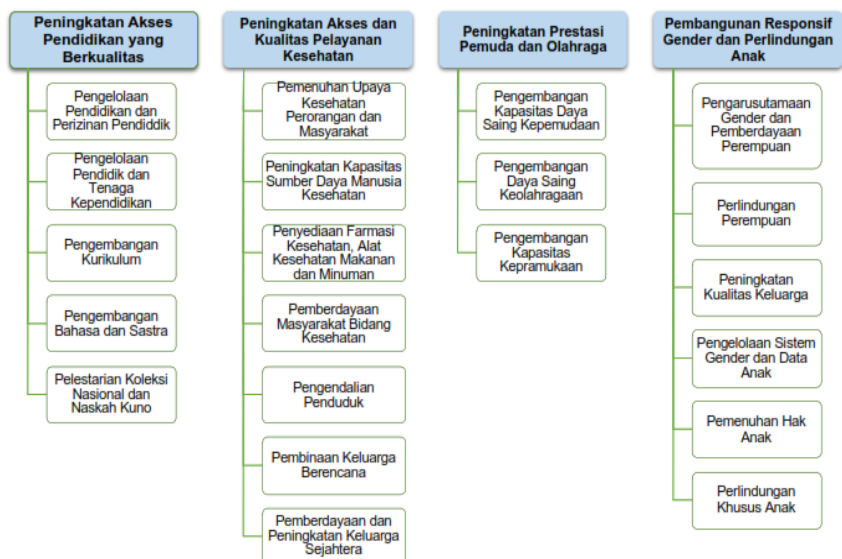
PRIORITAS DAERAH 3

PD

3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi

PPD

KPD



Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah (Mempedomani Sasaran RPJMD)
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah (Mempedomani Program/Kegiatan pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

PRIORITAS DAERAH 4

PD

4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

PPD

KPD

Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Pengembangan Permukiman
- Penataan Bangunan Gedung
- Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Penyelenggaraan Jalan
- Pengembangan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Pengelolaan Pelayaran
- Pengelolaan Perkerataapian
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Pengelolaan Aplikasi Informatika

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (1)

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Penanggulangan Bencana
- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
- Pengelolaan Perbatasan
- Perencanaan Lingkungan Hidup
- Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (2)

- Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Persampahan
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Pengelolaan Izin Lokasi
- Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Pengelolaan Hutan
- Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peningkatan Akses Energi

- Pengelolaan Aspek Geologi
- Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Pengelolaan Energi Terbarukan
- Pengelolaan Ketenagalistrikan

Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah (Mempedomani Sasaran RPJMD)
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah (Mempedomani Program/Kegiatan pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

PRIORITAS DAERAH 5

PD

5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

PPD

KPD

Pemeliharaan Stabilitas Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kehidupan Beragama

- Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Peningkatan Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan
- Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Koordinasi Program Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pengelolaan Profil Kependudukan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel

- Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Perizinan Penggunaan Arsip
- Pemerintah dan Otonomi Daerah

Peningkatan Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berintegritas

- Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN
- Pengelolaan Kepegawaian Daerah
- Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi
- Penataan Organisasi

Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah (Mempedomani Sasaran RPJMD)
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah (Mempedomani Program/Kegiatan pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

4.3.3. Telaah Terhadap pemenuhan janji Kepala Daerah pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021– 2026

Sesuai dengan janji kampanye Ratna Machmud dan Suwarti pada kampanye Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang telah lalu, telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 melalui visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 -2026 adalah:

“MURA MANTAB 2026”

“Maju, Mandiri dan Bermartabat”

Makna visi “*Mura Mantab 2026*” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maju dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat bermartabat”. Adapun pengertian dari akronim “*Musi Rawas Mantab*” adalah sebagai berikut:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religius).

- Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkesinambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Tabel 4.5

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Indeks RB	55,62
					Nilai SAKIP	BB (70,01)
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,51
				Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2,95
					Indeks Profesionalitas ASN	62,92
				Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,44
2.	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,20
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45
					Indeks Pembangunan Pemuda	0,178
					Status Kabupaten Layak Anak	650 Pratama
		Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius	Indeks Demokrasi	Terwujudnya Ketertiban,	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	100%

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2022)
1	2	3	4	5	6	7
		dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal		keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat		
				Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73
				Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan dan kebudayaan lokal	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	72
					Indeks Literasi Budaya membaca	30,00
3.	Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	92,19
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	96,5
					Indeks Sumber Daya Air	52
		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,90
				Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96
				Meningkatnya kesiapsiagaan dan	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	50%

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2022)
1	2	3	4	5	6	7
				penanganan penanggulangan bencana		
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	PDRB Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	6.057,19 (milyar)
				Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	1682,29
					PDRB sektor perdagangan	982,5
				Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	8
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,2
				Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3.21
				Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94
		Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	89,57

4.3.4. Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas

Sesuai dengan pasal Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu perumusan rancangan awal RKPD adalah penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten.

Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan daerah, sehingga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif dalam menyempurnakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang. Penyusunan ini sekaligus merupakan penyaluran dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses maupun komunikasi dengan masyarakat pada berbagai event kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini sebagai bagian dari strategi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas sehingga diupayakan memiliki keselarasan dan kesinambungan dengan RKPD 2022 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas yang disampaikan untuk penyusunan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah

Kondisi Infrastruktur jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Musi Rawas yang mengalami kerusakan sehingga perlu segera mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat kelancaran transportasi bagi masyarakat. Kegiatan rehabilitasi pada poros jalan maupun jaringan irigasi di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan harus segera dilakukan, selain itu konstruksi pengaman jalan juga perlu di bangun secara bersamaan untuk tujuan meningkatkan umur teknis bangunan utamanya melalui penguatan tebing jalan dan saluran drainase jalan.

Perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di

sejumlah tempat di Kabupaten Musi Rawas, di pandang perlu untuk meningkatkan penyediaan prasarana dasar air bersih serta penataan jalan lingkungan, guna mewujudkan kualitas pemukiman yang lebih layak. Sementara melihat kondisi sejumlah besar keluarga miskin yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), maka penanganan persoalan RTLH harus menjadi komitmen bersama baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.

B. Bidang Ekonomi

Pertanian dan perkebunan masih merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas dengan serapan tenaga kerja terbesar di bandingkan sektor-sektor lain mendorong kembali pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan mengingat masyarakat miskin mayoritas berada di sektor pertanian dan perkebunan.

Upaya merevitalisasi kondisi usaha tani perlu di sokong dengan peningkatan kondisi infrastuktur pertanian berupa pembangunan jalan pertanian dan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Pada aspek budidaya pertanian di perlukan modernisasi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Demikian pula dalam pengembangan peternakan di perlukan upaya peningkatan populasi di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Potensi sektor Perikanan air tawar yang di miliki oleh Kabupaten Musi Rawas harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Pengembangan perikanan air tawar di upayakan secara arif sehingga penggunaan air irigasi tidak terganggu.

Pemberdayaan usaha atau industri mikro, kecil dan menengah di harapkan tetap menjadi fokus Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Berbagai stimulus di butuhkan untuk membantu para pelaku usaha dalam pengembangan usahanya agar bisa menjadi mandiri dan berkembang, dari sisi penyediaan barang baku, proses produksi sampai dengan pemasaran bisa menjadi pintu masuk Pemerintahan Daerah untuk melakukan intervensi.

C. Bidang Keuangan Daerah

Dalam Bidang Keuangan Daerah, diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Hal yang perlu dipikirkan adalah sistem digitalisasi sistem retribusi dan perpajakan, semakin hari sudah seharusnya masyarakat semakin diberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran berbagai jenis pajak dan retribusi tersebut. Penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah seharusnya berbasis studi potensi terhadap semua sektor jenis pendapatan bukan dengan metode prediksi atau perkiraan tambahan persentase saja.

PeNgelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Predikat WTP yang pernah diraih bisa didapatkan kembali.

D. Bidang Sosial Daerah

Meningkatkan layanan pendidikan dasar harus tetap menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai memerlukan penanganan yang terus menerus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar terutama di tingkat SD, TK dan PAUD. Disamping itu kelengkapan sarana dan prasarana belajar juga tidak boleh terabaikan terutama untuk menunjang kegiatan pembelajaran di tingkat smp. Kegiatan pembelajaran juga perlu di dorong melalui keberadaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai prakarsa masyarakat untuk meningkatkan kesempatan warga masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari sektor kesehatan perlu mendapatkan perhatian khususnya guna meningkatkan pelayanan Puskesmas, peningkatan kualitas kesehatan di RS dr.Sobirin dan RS Muara Beliti dengan peningkatan sarana dan prasana, sosialisasi dan program hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas pola hidup sehat masyarakat serta mencegah meningkatnya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan Narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan, bahkan narkoba ini perkembanganya

sudah merambah kesegala tempat termasuk lembaga-lembaga pendidikan baik SD, SLTP, SLTA dan juga Perguruan Tinggi, Jika kondisi ini terus berlanjut akibatnya adalah menurunkan kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi aset bangsa, untuk itu Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas diharapkan bisa berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh Wilayah Musi Rawas. Selain itu di Kabupaten Musi Rawas terdapat 6 desa tertinggal, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas untuk mengentaskan 6 desa tertinggal tersebut, untuk itu penempatan kegiatan pada tahun 2022 harus tepat lokasi dan tepat sasaran.

4.3.5. Telaah Terhadap Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Evaluasi terhadap RKPD tahun sebelumnya dilakukan terhadap tiga aspek yaitu :

- a. Evaluasi terhadap capaian indikator makro RKPD tahun sebelumnya:
 1. Secara umum, hampir seluruh indikator memiliki capaian kinerja diatas 75%.
 2. Ada beberapa indikator makro yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu “**Angka Kemiskinan**”. Meskipun angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan, bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid 19, namun angka kemiskinan belum dapat mencapai target “**Satu digit**” sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi yaitu Angka Kemiskinan satu digit sehingga diperlukan upaya yang maksimal dari OPD dan pihak-pihak terkait agar capaian kinerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Indikator Sasaran RKPD tahun sebelumnya

Beberapa indikator yang capaian kinerjanya kurang dari 75% yaitu :

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian yang capaian kinerjanya 70 %.
2. Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal yang capaian kinerjanya 57, 14%.
3. Persentase Anak Usia SD yang bisa baca tulis Al Quran yang capaian kinerjanya 50, 24 %.
4. Persentase Anak Usia SD yang Hafidz Al-Quran Jus 30 yang capaian kinerjanya 29, 83%.

c. Evaluasi Pelaksanaan terhadap Program RKPD Tahun 2020 dan Realisasi Fisik mencapai 96,48 % dan Realisasi Keuangan mencapai 94,48 % atau termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Secara umum Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) OPD perlu memperhatikan capaian indikator program yang masih rendah. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah target indikator terlalu tinggi, apakah indikator kurang tepat dalam menggambarkan hasil keluaran dari program, atau apakah program tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian dapat dilakukan perubahan target/ mengganti indikator dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menentukan target-target indikator harus berdasarkan data-data kondisi eksisting atau data-data realisasi periode lalu yang akurat sebagai asumsi. Sehingga target indikator tidak melebihi batas kemampuan sumberdaya OPD (*man, money, method, material, machine*).
- b) Menyusun perencanaan anggaran tidak dapat dipisahkan dari penyusunan perencanaan kebijakan (analisa terhadap persoalan eksternal/internal yang perlu diberikan solusi). Dengan kata lain menyusun rencana anggaran harus melalui analisa kebutuhan (bukan keinginan), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan/program bertitik tolak dari persoalan atau kewajiban yang perlu dilaksanakan (amanah Kepala Daerah/amanah RPJMN), dengan demikian program dan kegiatan dapat dibiayai lebih realistis (efisien). Terhadap OPD yang memiliki anggaran besar dan serapan kecil maka perlu melakukan perubahan perencanaan anggarandan kebijakan.

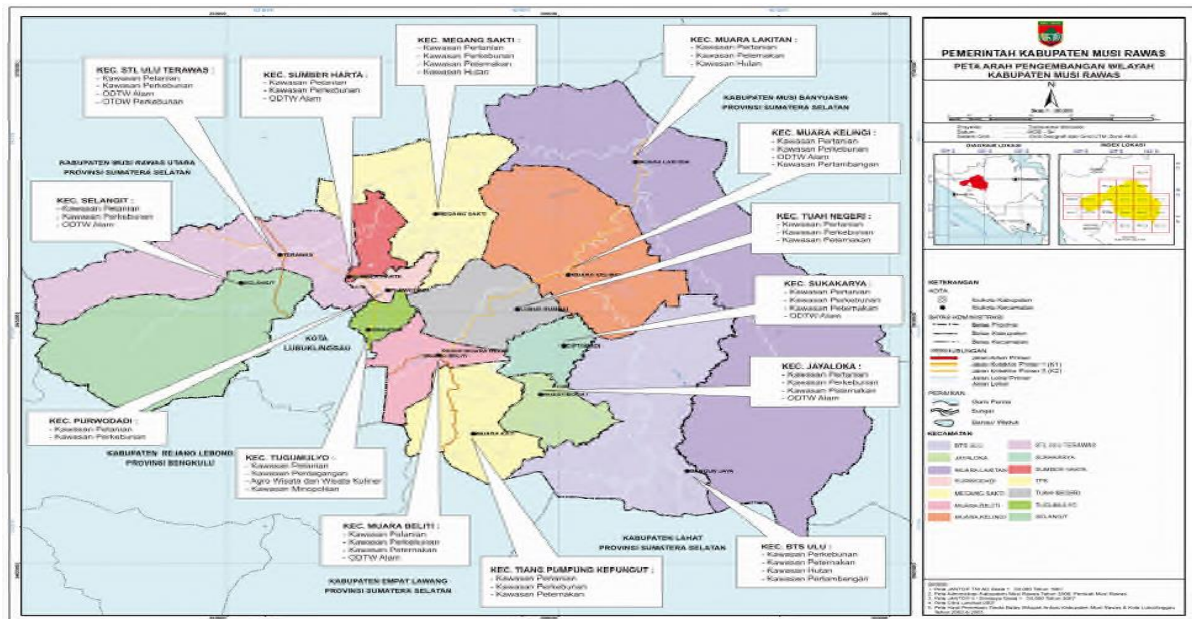
c) Untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan menjalankan program/kegiatan/indikator antara OPD satu dengan yang lain, seharusnya pada saat menentukan program/kegiatan/indikator hal yang pertama perlu diperhatikan adalah tupoksi dari OPD tersebut. Setelah tupoksi diketahui, langkah kedua adalah menganalisis data-data indikator yang relevan dengan tupoksi tersebut. Jika data indikator menunjukkan kondisi yang belum baik, maka dapat dibuat program/kegiatan, namun jika dirasa sudah tidak ada persoalan, maka dapat melihat apakah terdapat persoalan lain yang relevan dengan tupoksi dan perlu diberikan solusi. Jika ya, maka dari persoalan tersebut dapat dibuat analisis *Logical Frame Work*, sehingga munculnya program/kegiatan/indikator berangkat dari kebutuhan akan penyelesaian terhadap persoalan eksisting (bukan dari keinginan) yang relevan dengan Tupoksi-nya. OPD yang memiliki persoalan tumpang tindih kewenangan perlu melakukan perbaikan program-kegiatan-indikatornya.

4.3.6. Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas

Strategi dan prioritas pembangunan disusun agar mencapai tujuan dan hasil yang terukur dalam hal melaksanakan kegiatan di daerah agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan prioritas pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan pembangunan wilayah diupayakan untuk melakukan percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong pembangunan wilayah di setiap kecamatan sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Dalam hal mewujudkan visi dan pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas



Dalam konstelasi RTRW, Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD, Muara Beliti berperan sebagai pusat agropolitan (*agropolitan centre*). Berdasarkan rencana struktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas terdiridari Muara Beliti sebagai PKL dan pada jenjang berikutnya terdapat pusat pelayanan yang sekaligus menjadi sub pusat agropolitan(*agropolitan district*) yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Simpang Semambang dan Muara Lakitan. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya diarahkan sebagai sub pusat pelayanan bagi wilayah kecamatan masing-masing. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu struktur ruang yang efektif dan efisien dimana Kota Muara Beliti menjadi pusat agropolitan yang akan melayani 4 sub pusat agropolitan dan masing-masing sub pusat akan menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah *hinterland*. Agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase,

- air minum dan telekomunikasi.
- b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung kegiatan agropolitan.
 - c. Pembangunan pemukiman perkotaan, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya, serta RTH untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
 - d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai *Agropolitan Center* (AC) didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
- 2). Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 4(empat) lokasi yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa :
- a. Sub Terminal Agropolitan.
 - b. Kawasan pertokoan/ruko.
 - c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
 - d. Sub Terminal Penumpang.
 - e. Permukiman perkotaan.
 - f. Industri agro.
 - g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
- 3). Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu :
- a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Belitidengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
 - b. Pembangunan sistem pengairan berupa Bendung Daerah Irigasi (DI) Lakitan, DI Kelingi, DI Megang Tikip, dan DI lainnya, dengan sistem jaringan irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-sawah seperti Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, dan Megang Sakti.
 - c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan Kereta Api (KA) yang akan menghubungkan Lubuklinggau, rencana Terminal Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti), Palembang dan peningkatan Bandara Silampari.

- 4). Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu:
 - a. Pasar Kecamatan
 - b. Puskesmas
 - c. Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Fasilitas umum; Tempat Ibadah, RTH dan lainnya

4.3.7. Telaah Terhadap Isu Strategis

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di Bab 2 didepan, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
Bertambahnya jumlah penduduk miskin dan banyaknya sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi covid19	Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
Belum optimalnya investasi dan daya saing daerah	Peningkatan investasi dan daya saing daerah serta pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian, perikanan hulu sampai hilir, destinasi wisata dan UMKM
Masih rendahnya hasil produksi dan rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penciptaan dan pengembangan destinasi pariwisata	
Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM masih terbatas	
Infrastruktur yang belum merata dan konektivitas antar wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata dan

Permasalahan	Isu Strategis
	berwawasan lingkungan
Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public dengan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan aparatur pemerintah yang bersih dan pelayanan prima

4.4 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2022

Dengan memperhatikan telaah tersebut diatas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah:

Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2022
1	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	55,62
2	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	PDRB sektor pertanian	Rp.6.057,19 milyar
		Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94
		Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	PDRB sektor Industri	Rp 1682,29 milyar
			PDRB sektor perdagangan	Rp 982,5 milyar
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	Persentase Koperasi Aktif (%)	70
			Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,27
		Meningkatnya	Angka Kemiskinan	13,2

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2022
		pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS		
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	76,05
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,21
3	Pemerataan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase Konektivitas antar wilayah	92,19%
		Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan dan pengairan	Indeks Infrastruktur Dasar	96,5
			Indeks Sumber Daya Air	52
		Meningkatnya pembangunan Infrastruktur TIK	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah (%)	80
4	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,90
		Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	50 %
5	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	79,2
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74

Selain memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.7 diatas serta RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dalam penentuan prioritas daerah tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam

RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022, serta RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Berdasarkan arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi, selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yaitu untuk mendukung pencapaian fokus dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas maka penjabaran tema dan prioritas pembangunan dituangkan ke dalam arah kebijakan, program prioritas dan program nomenklatur pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan SDM aparat melalui pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dan memiliki literasi teknologi informasi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip <i>the right man on the right place</i>	- Peningkatan kapasitas kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional dalam rangka penyederhanaan eselonisasi dan peralihan ke jabatan fungsional) - Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai	Peningkatan kapasitas kinerja aparatur	- Program pengembangan sumber daya manusia - Program kepegawaian daerah	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu	Pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Program aplikasi informatika	Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik
			Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik	- Sistem pengawasan internal - Peningkatan akuntabilitas kinerja ASN	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik
		2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka peningkatan	Pemasyarakatan kamtibmas	Pemeliharaan kamtibmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			kemanan dan kenyamanan masyarakat				
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	1. meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta	Menerapkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mempertahankan catchment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu				
			Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumberdaya lokal yang mendorong			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan produktivitas sektor pertanian

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Musi Rawas				
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya			Program pengelolaan perikanan budidaya	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan
			Meningkatkan produksi peternakan			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak
		2. Meningkatnya kemandirian pangan	Memantapkan ketersediaan distribusi pangan dan	Hilirisasi produk - produk unggulan	Peningkatan derajat kemandirian pangan	Pogram pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk	Penanganan daerah rawan pangan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			keamanan pangan			kedaulatan dan kemandirian pangan	
			Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal menuju kedaulatan pangan			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pengembangan diversifikasi pangan
		3. Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	Menyediakan dan memfasilitasi sarana prasarana perdagangan	Revitalisasi pasar	Pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan sarana dan prasarana pasar
			Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan IKM	Meningkatkan promosi produk-produk unggulan daerah	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan kualitas dan kuantitas IKM

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			Meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi industri bagi IKM	Melakukan pelatihan dan magang untuk pelaku industri kecil dan menengah			
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif dan kreatif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing UKM non pertanian	Pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM non pertanian		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan UKM dan koperasi

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			Membangun kemitraan strategis antara koperasi, UMK dan UMKM	Membangun kemitraan Tripartit (masyarakat, pemerintah, dunia usaha)		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pengembangan kerjasama koperasi, UMK dan UMKM
			Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi	Pemberdayaan Koperasi dan Bumdes		Program pengembangan lembaga ekonomi desa	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	Meningkatkan kualitas data sasaran program untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran	Penanggulangan PMKS secara terpadu	Penurunan angka kemiskinan	Program rehabilitasi sosial	Pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin
			Meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran program perlindungan sosial				Penyaluran bantuan untuk PMKS
			Meningkatkan Kualitas SDM (PMKS)			Program pemberdayaan sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
							Sosial (PMKS) lainnya
		6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Penciptaan dan pengembangan destinasi wisata	- Penciptaan destinasi wisata baru - Pengembangan destinasi wisata - Pemasaran destinasi wisata	Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	Program peningkatan pemasaran pariwisata	- Pengembangan destinasi wisata - Pengembangan pemasaran pariwisata
3.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata	Membangun/ meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan jembatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas	Program penyelenggaraa n jalan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
				• Memprioritaskan pembangunan didesa tertinggal			
		2. Meningkatnya infrasturkur keciptakaryaan dan pengairan	• meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan sumber pengairan lainnya.	• mendayagunakan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat	• peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	• Program pengelolaan sumber daya air	• Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi
			• Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	• Meningkatkan pembangunan instalasi penyediaan air minum dan air bersih	• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan air limbah	• Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk
							• Pembangunan /pembuatan sumber air bersama di

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
							kawasan pemukiman
				Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi			Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
			Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dan perbatasan meliputi bantuan stimulasi penanganan kumuh guna menuju permukiman yang sehat dan layak	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Peningkatan penanganan pemukiman kumuh	Program Peningkatan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rehabilitasi rumah tidak layak huni
			Melaksanakan penataan tata				

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			kelola penanganan pemukiman kumuh di pedesaan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan				
		3. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur TIK	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Tekonlogi Informasi Komunikasi (TIK)	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Program Informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TIK yang berkualitas dan merata
4.	Pembangunan Sumber Daya	1. Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kemudahan	Meningkatkan kualitas dan	Peningkatan kualitas dan	Program pemenuhan	Peningkatan akses dan mutu

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
	Manusia (SDM) yang berdaya saing	kesehatan masyarakat	akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan SDM bidang kesehatan serta masyarakat berpola hidup sehat	kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan	upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kesehatan		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
				Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan
			Meningkatnya kesehatan ibu, anak,	meningkatkan akses layanan	Peningkatan kualitas kesehatan ibu,	Program pemenuhan upaya	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
							Pengelolaan pelayanan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			kesehatan reproduksi serta pelaksanaan KB guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	kesehatan bagi ibu dan anak	anak, KB dan kesehatan Reproduksi	kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	kesehatan ibu dan anak
					Percepatan penurunan stunting		Pengelolaan gizi masyarakat
			Meningkatnya pengendalian penyakit	meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan melalui deteksi dini penyakit	Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		2. Meningkatnya kualitas	Meningkatkan aksesibilitas	Meningkatkan kualitas dan	Peningkatan kualitas		Peningkatan akses dan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		pendidikan	masyarakat terhadap pendidikan dasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan	kuantitas SDM melalui Program Wajib Belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.	pendidikan formal	Program pengelolaan pendidikan	pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel
							Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun
							Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas SDM/Tenaga Pendidik, serta beasiswa kepada	- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik - Peningkatan akses terhadap	- Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik - Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan
			Meningkatkan partisipasi lembaga				penyelenggaraan pendidikan nonformal

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan masyarakat	penduduk kurang mampu	layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal	Nonformal/Kese- taraan	
						• Manajemen pelayanan pendidikan	• Pengelolaan manajemen dan evaluasi terhadap kinerja bidang pendidikan
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	• Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan agama untuk menciptakan kehidupan yang agamis	• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama baik formal maupun nonformal	• Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan	• Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyara- katan	• Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan
				• Mengoptimisasikan penyelenggaraan pendidikan agama serta aktivitas keagamaan	• Pengembangan wawasan keagamaan	• Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan	• Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
						Kemasyarakan	
5.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh, terpadu adil dan berkelanjutan.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup
		2. Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Meningkatnya penanganan bencana	peningkatan kapasitas lembaga	peningkatan sarana dan	Program penanganan bencana	Penanganan dan pemulihan pasca bencana

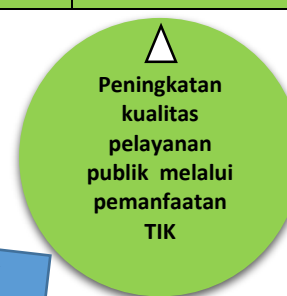
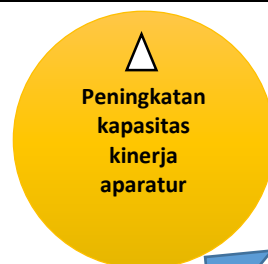
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
				penaggulangan bencana daerah	prasarana kebencanaan		
			Mengurangi risiko bencana	pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana			Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 didukung dengan Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah. Program Prioritas dan Kegiatan Daerah harus memiliki indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Masing-masing Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah akan dijabarkan sebagai berikut :

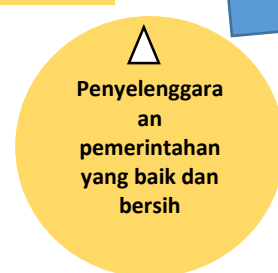
PRIORITAS DAERAH
Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Bermartabat, Berbasis Teknologi Untuk Pelayanan Prima

Peningkatan Kapasitas kinerja Aparatur			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	62,92	BKPSDM

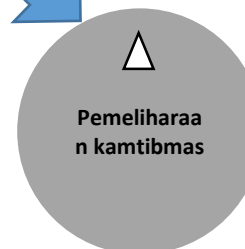
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,04	Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah Bagian Kesra)
	Indeks SPBE	2.95	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik



Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks RB	55,62	Inspektorat
	Nilai SAKIP	BB (70,01)	Inspektorat, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), BAPPEDA
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,51	BPKAD



Pemeliharaan Kamtibmas			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	96%	Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :
 : Prioritas RKPD
 : Program Prioritas Daerah

Tabel 4.9
Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima
Program Prioritas : Peningkatan kapasitas kinerja aparatur

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	Meningkatnya Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	- Persentase ASN yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi sesuai dengan jabatan - Persentase pemenuhan kebutuhan formasi jabatan ASN	56 %	BKPSDM
			59 %	BKPSDM

Tabel 4.10
Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima
Program Prioritas : Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik	Meningkatnya Pelayanan publik berbasis elektronik	- Indeks SPBE - Persentase pemanfaatan dan pengembangan aplikasi	2,95 50 %	Diskominfo Diskominfo

Tabel 4.11
Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima
Program Prioritas : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik	- IKM - Nilai SAKIP - Level Maturitas SPIP - Indeks RB - IPKD	89,57 - BB - Level 3 55,62 81,51	- Dinkes, RS. Sobirin, Disdukcapil, Diknas, Dishub - Bag Organisasi Setda - Inspektorat - Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bag. Organisasi Setda, BKPSDM - BPKAD

Tabel 4.12

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

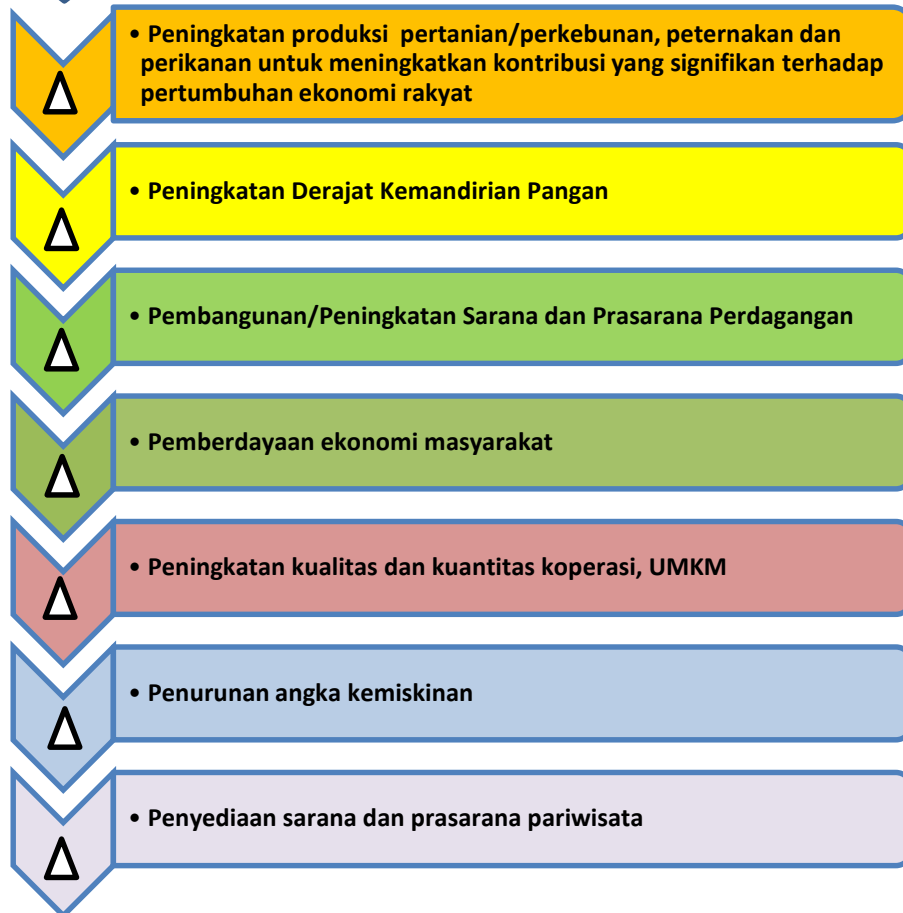
Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima

Program Prioritas : Pemeliharaan kamtibmas

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	- Indeks ketertiban dan ketentraman masyarakat - Angka penanganan sosial	100 % 86	- Satpol PP Damkar - Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Bag. Tata Pemerintahan Setda

Prioritas Daerah Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Rakyat Untuk Pengentasan Kemiskinan



Keterangan :

: Prioritas RKPD

: Program Prioritas Daerah

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp.6.057,19 milyar	Dinas Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Derajat Kemandirian Pangan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Rp 982,5 milyar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	43,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif (%)	70	Dinas Koperasi dan UMKM
	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,27	

Penurunan Angka Kemiskinan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.2	Dinas Sosial, Dinas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Distanak

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	Persentase peningkatan kunjungan wisata	67,8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 4.13

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas produk pertanian	PDRB Sektor Pertanian	5, 035 T	Distanak, Diskan, Disbun, DKP
Peningkatan produktivitas sektor pertanian	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	- Persentase capaian peningkatan produksi tanaman pangan - Persentase capaian peningkatan produksi tanaman hortikultura - Persentase capaian peningkatan produksi tanaman perkebunan	3 % 3 % 1 %	- Distanak - Distanak - Dinas Perkebunan
Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) * Jumlah Produksi perikanan tangkapi (Ton)	42.103,86 426,05	- Dinas Perikanan - Dinas Perikanan
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak	Persentase capaian peningkatan produksi peternakan	3 %	Distanak

Tabel 4.14

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan
 Program Prioritas : Peningkatan derajat kemandirian pangan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya Penanganan daerah rawan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94	Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan diversifikasi pangan	Meningkatnya Pengembangan diversifikasi pangan			

Tabel 4.15

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan
 Program Prioritas : Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana pasar	Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Yang Ditingkatkan	4 pasar	Dinas Perindustri dan Perdagangan

Tabel 4.16

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan
 Program Prioritas : Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan kualitas dan kuantitas IKM	Meningkatnya kualitas dan kuantitas IKM	Persentase Usaha mikro dan Kecil	0,27 %	Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 4.17
Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pemberdayaan UKM dan koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan UKM dan koperasi	Persentase koperasi aktif	70 %	Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 4.18

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Penurunan angka kemiskinan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin	Meningkatnya Pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin	Angka Kemiskinan	13,2	- Dinas Sosial - DPMD
Penyaluran bantuan untuk PMKS	Meningkatnya Penyaluran bantuan untuk PMKS			
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			

Tabel 4.19

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengembangan destinasi wisata	Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	76,05 %	Disbudpar
Pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya Pengembangan pemasaran pariwisata			

Prioritas Daerah

Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi



Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	92,19	Dinas PUBM, DINAS PUCKTRP, Dinas Perhubungan

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur Dasar	96,5	Dinas PUCKTRP

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sanitasi			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	98,75	Dinas PUCKTRP, Dinas Perkim

Peningkatan Penanganan Pemukiman Kumuh			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Tersedianya rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97%	Dinas Perkim

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Tuntasnya Blank Spot Area di Kabupaten Musi Rawas	Persentase penuntasan Blank Spot Area	85	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik
Tersampainya informasi Pembangunan Daerah secara merata	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	80	

Keterangan :



: Prioritas RKPD



: Program Prioritas Daerah

Tabel 4.20

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi
 Program Prioritas : Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Meningkatnya Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	- Persentase pembangunan Jalan - Persentase peningkatan jalan - Persentase rehab/pemeliharaan jalan - Persentase pembangunan jembatan - Persentase peningkatan jembatan - Persentase rehab/pemeliharaan jembatan	19,7 % 16,57 % 17,89 % 10,00 % 16,67 % 15,79 %	Dinas PU BinaMarga

Tabel 4.21

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi
 Program Prioritas : Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Meningkatnya Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	65	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan

Tabel 4.22

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi
 Program Prioritas : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	Meningkatnya Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak	98,66	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
	penduduk			
Pembangunan /pembuatan sumber air bersama di kawasan pemukiman	Meningkatnya Pembangunan /pembuatan sumber air bersama di kawasan pemukiman			
Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Persentase rumah tanggabersanitasi	98,75	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan

Tabel 4.23

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Peningkatan penanganan pemukiman kumuh

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Meningkatnya Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Rasio rumah layak huni	32	Dinas Perkim

Tabel 4.24

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

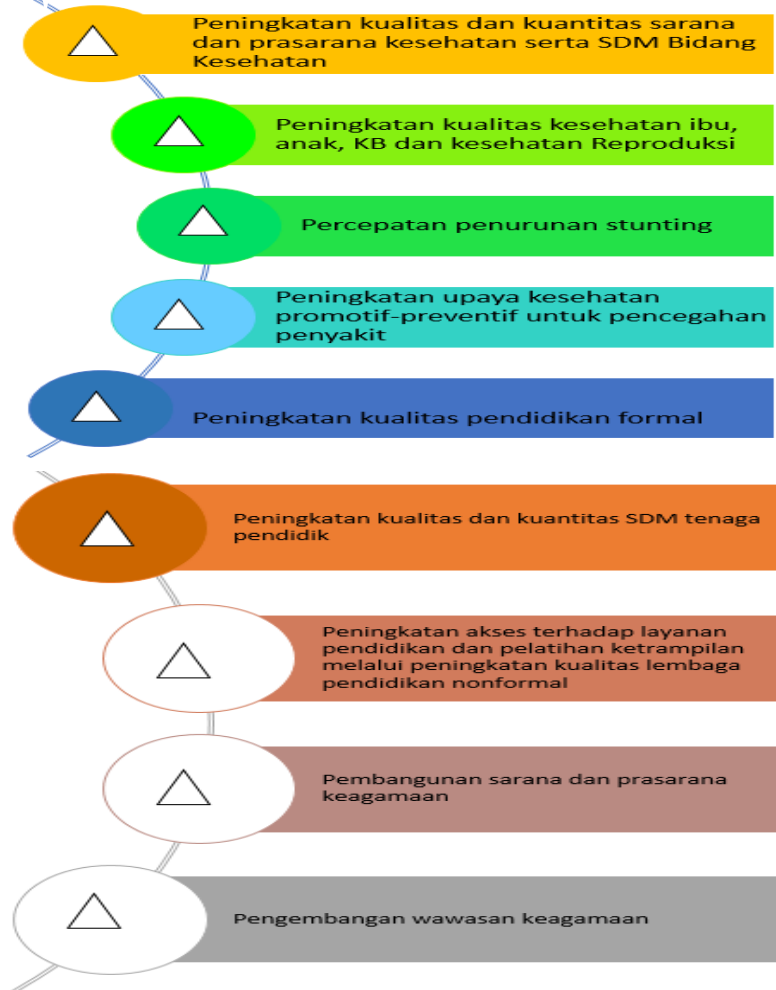
Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TIK yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TIK yang berkualitas dan merata	Persentase penuntasan blank spot area	85	Diskominfo

Prioritas Daerah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berdaya Saing



Keterangan :



: Prioritas RKP



: Program Prioritas Daerah

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,2	Dinas Kesehatan, Rs. Sobirin

Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya layanan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya layanan Ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	

Percepatan Penurunan stunting			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Menurunkan angka Stunting	Prevalensi Stunting	8%	Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas Ketahanan Pangan

Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,2	Dinas Kesehatan, Rs. Sobirin

Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39	Dinas Pendidikan

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas SDM Tenaga Pendidik			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39	Dinas Pendidikan

Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73%	Kesbangpol, Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Pengembangan wawasan keagamaan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73%	Kesbangpol, Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Tabel 4.25

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu Pelayanan kesehatan	Persentase manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai Standar	100%	Dinkes
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar dan obat covid-19	100%	Dinkes
Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas SDM bidang kesehatan	Persentase ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang kesehatan	100%	Dinkes
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase meningkatnya kemitraan dibidang pelayanan kesehatan	100%	Dinkes

Tabel 4.26

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatnya Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	- Angka kelahiran kasar - Angka prevalensi kontrasepsi modern	19 77,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 4.27

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
 Program Prioritas : Percepatan penurunan stunting

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan gizi masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan gizi masyarakat	Indeks Kesehatan	73,4	Dinas Kesehatan, RS. Sobirin, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 4.28

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
 Program Prioritas : Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular - Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	73,4	Dinas Kesehatan, RS Sobirin

Tabel 4.29

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
 Program Prioritas : Peningkatan kualitas pendidikan formal

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel	- APK PAUD/TK - APM PAUD/TK - APK SD/MI - APM SD/MI - APK SMP/MTS - APM SMP/MTS	68,5 % 58 % 113 % 98,3 % 123 % 97,5 %	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun	- Rata rata lama sekolah - Angka melek huruf - Angka melanjutkan jenjang SD/MI	8,5 Th 99,72 % 98,75	Dinas Pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
		Angka melanjutkan jenjang SMP/MTs	% 97,75 %	
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	- Capaian standar - Persentase SD/SMP yang terakreditasi A	85 % 30 %	Dinas Pendidikan

Tabel 4.30

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan	Meningkatnya Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan	Capaian standar SPM	85 %	Dinas Pendidikan

Tabel 4.31

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
penyelenggaraan pendidikan nonformal	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan nonformal	Persentase lembaga kursus terakreditasi	40 %	Dinas Pendidikan
Pengelolaan manajemen dan evaluasi terhadap kinerja bidang pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan manajemen dan evaluasi terhadap kinerja bidang pendidikan	Capaian standar SPM	85 %	Dinas Pendidikan

Tabel 4.32

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	- Jumlah bantuan rumah tahfidz - Jumlah bantuan pondok pesantren	70 28	Bagian Kesra Setda

Tabel 4.33

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Pengembangan wawasan keagamaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	Indeks kerukunan umat beragama	74	- Bag. Kesra Setda - Badan Kesbangpol

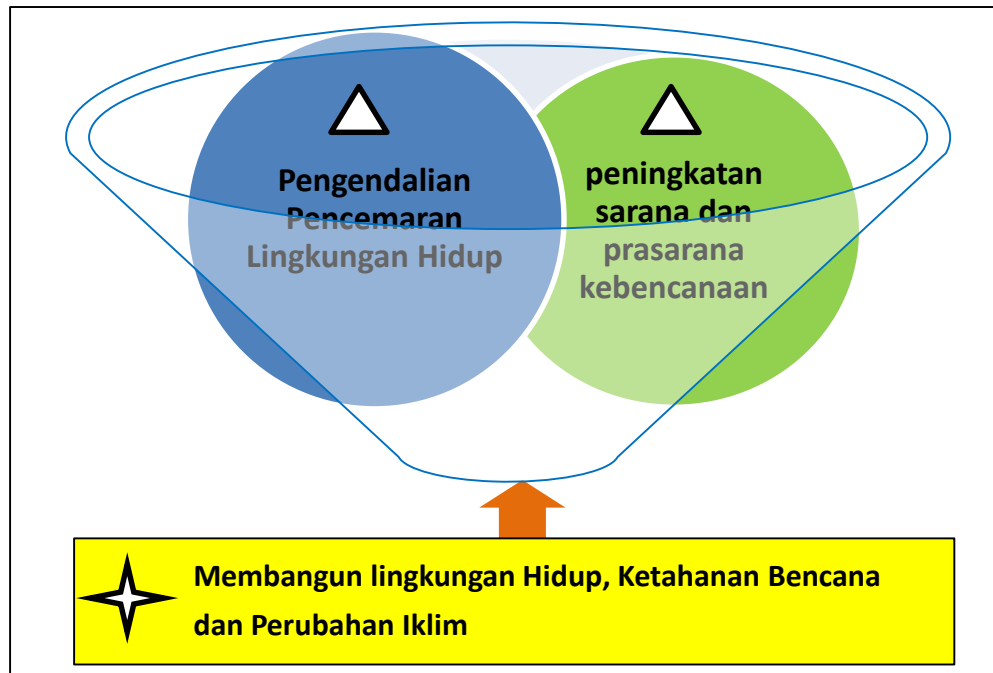
Tabel 4.34

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatnya Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	IKLH	62,816	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Daerah
Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,90	DLH

Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan			
Sasaran	Indikator	Target 2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	50	BPBD

Keterangan :



: Prioritas RKPD



: Program Prioritas Daerah

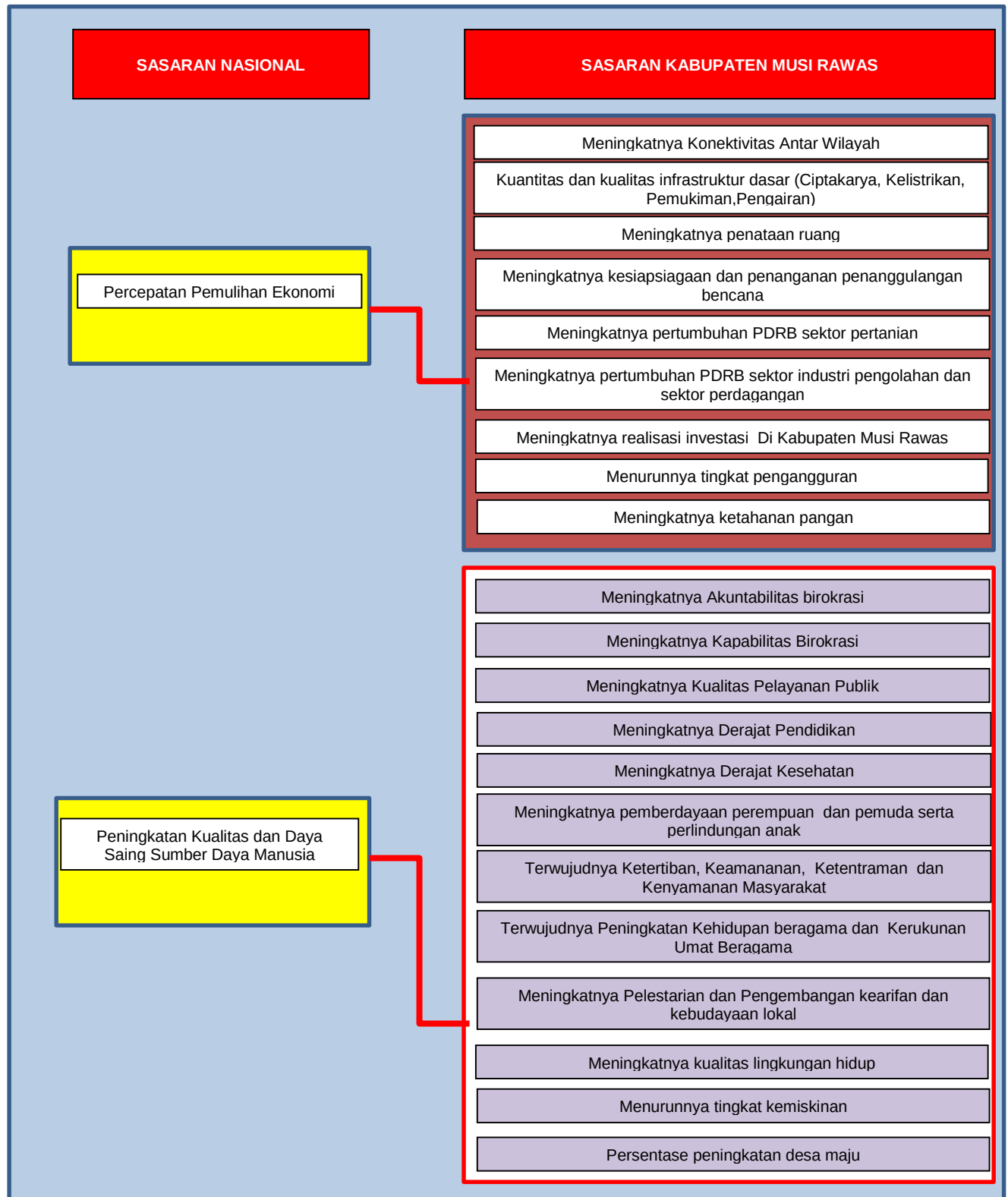
Tabel 4.35

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
 Prioritas Daerah : Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 Program Prioritas : Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penanganan dan pemulihan pasca bencana	Meningkatnya Penanganan dan pemulihan pasca bencana	Indeks penurunan dampak resiko bencana	53,57 %	BPBD
Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	1	BPBD

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2022

Gambar 4.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2022



Tabel 4.36
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
PN 1						
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan						
1	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan kawasan berfungsilindung (kumulatif)	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan hutan berkelanjutan	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Penyediaan air untuk pertanian	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengelolaan sumber daya air
		Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan	peningkatan pembangunan dan pemeliharaan	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program pengelolaan sumber daya air

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	n infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya		
		Pemeliharaan, Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk revitalisasi Danau dan Infrastruktur	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
						Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Pengembangan Waduk Multiguna	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Peningkatan ketersediaan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk	Peningkatan derajat	Penanganan daerah rawan	Program pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	pengentasan kemiskinan	kemandirian pangan	pangan	untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Pengembangan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian
		Peningkatan tata kelola system pangan nasional	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan derajat kemandirian pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Pogram pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Pengembangan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutudan nilai tambahproduk kelautan dan perikanan Peningkatan fasilitasi usaha pembiayaan dan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan NilaiTambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan	Peningkatan Produksi, dan NilaiTambah	Peningkatan Produksi dan	Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	kemiskinan	hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Produktivitas Perikanan	
		Peningkatan SDMDan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta database kelautan dan perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan NilaiTambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
						Program Pengembangan Perikanan Tangkap
						Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
4.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikrokecil dan usaha menengah dan besar	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pengembangan kerjasama koperasi, UMK dan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
		Peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes	Program pengembangan lembaga ekonomi desa
5.	Peningkatan nilai tambah,	Peningkatan industri	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk	Peningkatan Produksi, dan	Peningkatan Produksi	Program Peningkatan Penerapan Teknologi

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
	lapangan kerja, dan Investasi di sektor riil dan industrialisasi	pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	pengentasan kemiskinan	Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	dan produktivitas pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Pertanian/Perkebunan
		Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Objek Wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
		Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		ketenagakerjaan				
		Pengembangan industri halal	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
6.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pelayanan Pengadaan
		Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding dan produk kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan Pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Sentra-industri Potensial
7.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan Industri 4.0	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan system logistic dan stabilitas harga	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian masyarakat	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		perkembangan ekonomi terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan data informasi statistik daerah
PN 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
-	Pengembangan Wilayah Sumatera	Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah hingga 83,16 persen (khususnya bidang perumahan, ralat, sosial, dan Transbumihma), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	Program Pendayagunaan Iptek
				Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pengembangan Inovasi Daerah
				Peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.				
		Percepatan Pembangunan dengan fokus intervensi pada lima kabupaten di tahun 2022, dan enam kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
				Peningkatan derajat kemandirian pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Pogram pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
				Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang	Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
				Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
						Kondusif
				Pengembangan pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana pemukiman	Program pengembangan perumahan
					Pembangun ansarana keciptakaryaan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan
					Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan
				Program peningkatan jalan dan jembatan		
				Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
					Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	
Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika				
PN 3						
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraa n pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan Administrasi Kependudukan.
		Integrasi Sistem	Tata kelola birokrasi	Penyelenggaraa	Peningkatan	Program Penataan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Administrasi Kependudukan	yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	n pemerintahan yang baik dan dan bersih	akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Administrasi Kependudukan
		Pendampingan dan layanan terpadu	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Sistem jaminan sosial nasional	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatterpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
						Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Kesejahteraan sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Perbaikan Gizi Masyarakat
		Peningkatan pengendalian penyakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pengawasan Obat dan Makanan
4.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Pemerataan akses	Pembangunan Sumber	Peningkatan	Peningkatan	Program Pendidikan Usia

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		dan wajib belajar 12 tahun	Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Kualitas Pendidikan	aksesdan pemerataan layanan pendidikan	Dini
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga pendidik	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan aksesdan pemerataan layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penjaminan mutu pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan tata kelola kependidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib pendidikan dasar sembilan tahun
5.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan Kelembagaan Pengarasutamaan Gender dan Anak
		Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		Kualitas Pemuda	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Pemberdayaan Pemuda	Peningkatan kualitas pemuda	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
6.	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial
						Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
		Keperantaraan	Tata kelola birokrasi	Penyelenggaraa	Peningkatan	Program Perlindungan dan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		usaha dan dampak sosial	yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	n pemerintahan yang baik dan bersih	akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Konservasi Sumber Daya Alam
		Reforma Agraria	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
		Perhutanan Sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
8.	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasamaindustri	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Program Pendidikan Non Formal
				Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pengembangan Inovasi Daerah
		Prestasi Olahraga	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Pendayagunaan Iptek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			pelayanan prima		pemerintah	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Revolusional dan pembinaan ideology pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkualitas	Revolusi mental dalam system pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pengembangan dan pengelolaan keragaman dan nilai budaya	Program pengembangan wawasan kebangsaan
		Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Revolusi mental dalam system Sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan perankeluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
						Program peningkatan perlindungan anak
		Penguatan pusat-pusat	Tata kelola birokrasi yang bersih,	Penyelenggara n pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas	Program kemitraan pengembangan wawasan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		perubahan gerakan revolusi mental	bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	y ang baik dan bersih	kinerja dan keuangan instansi pemerintah	kebangsaan
		Pembangunan dan pembudayaan system ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
						Program peningkatan kualitas koperasi
		Pembinaan ideology Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela Negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan bangsa	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budayabangsa untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraa n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Perlindungan hakkebudayaan danekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembang an kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya
		Pengembanga ndiplomasi kebudayaan untuk memperkuat Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraa n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan kebudayaan
3.	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraa n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		dan kebersamaan di kalangan umat beragama				
		Penyelarasan Relasi agama dan budaya	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggara n pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pengembangan wawasan keagamaan	Penyelenggara n musi rawas bertilawah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatterpencil, dan penyandangan	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4.	Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan budayaliterasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksaradaerah serta sastra	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun
		Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas dan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun Program penelitian dan pengembangan daerah

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		daya cipta				
		Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan budayaliterasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Program pembinaan perpustakaan

PN 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Layanan Dasar

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana pemukiman	Program pengembangan perumahan
					Pembangun ansarana keciptakaryaan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan
					Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan
						Program peningkatan jalan dan jembatan
		Sanitasi layak dan aman	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangun ansarana sanitasi	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			Pembangunan Sumber	Peningkatan	Pencegahan dan	Program pengembangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	layanan kesehatan yang berkualitas	penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	lingkungan sehat
		Pengelolaan air tanah dan air baku merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangunan sarana penyediaan air minum dan air bersih	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan
		Keselamatan dan keamanan transportasi	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
						Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pemeliharaan/ rehabilitasi bangunan pengendalian banjir/ pengamanan sungai	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
						Program pengendalian banjir dan pengamanan sungai
						Program pembangunan turap/talud/bronjong
		Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
						Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
3.	Infrastruktur Perkotaan	Transportasi Perkotaan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
4.	Energi dan Ketenagalistrikan	Keberlanjutan penyediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif
		Akses dan keterjangkauan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif
		Kecukupan penyediaan energy dan tenaga listrik	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			ekonomi			
5.	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
		Pemanfaatan infrastruktur TIK	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangun ansarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
		Fasilitas Pendukung transformasi digital	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangun ansarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
PN 6						
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Penguatan kelembagaan dan pecegahan hukum di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Penanggulanga nbencana	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan	Pelayanan Kebencanaan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
						Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
						Program Pembinaan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Peningkatan ketahanan iklim	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
						Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3.	Pembangunan rendah karbon	Pembangunan energi berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Berkelanjutan
		Pemulihan Lahan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan dan perikanan	Program Peningkatan produksi (pertanian/Perkebunan)
		Pengembangan industri hijau	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi	Peningkatan penanaman modal	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		Penyelenggaraan pemerintahan	Tata kelola birokrasi yang bersih,	Peningkatan akuntabilitas	Program Pengembangan	Program Pengembangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Inovasi Daerah Program Pendayagunaan Iptek	Sentra-sentra industry potensial
PN 7 Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pendidikan politik masyarakat
		Peningkatan kualitas komunikasi publik	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
						Program Pengelolaan aplikasi informatika
2.	Optimalisasi kebijakan luar negeri	Penguatan integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	-	-	-	-
		Penguatan kerjasama pembangunan internasional	-	-	-	-

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Peningkatan citra positif di Dunia Internasional	-	-	-	-
		Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global	-	-	-	-
3.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan implementasi manajemen ASN	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Transformasi pelayanan public	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan peraturan perundang-undangan
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan keamanan dalam negeri	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Pemasyarakatan Kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtibmas	Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak criminal
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM	-	-	-	-
		Penguatan keamanan laut	-	-	-	-
		Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Pemasyarakatan kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtibmas	Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak criminal
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Penguatan Ketahanan dan Keamanan siber	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah

Tabel 4. 37

**Persentase Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	475.890.485.928	28,16
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	70.402.293.569	4,16
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	727.165.692.097	43,02
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Layanan Dasar	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	252.240.024.007	14,92
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	12.226.348.042	0,72
7	Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	152.461.473.120	9,02
JUMLAH			1.690.386.316.763	100,00

4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Kabupaten Musi Rawas secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yang direncanakan pada sub bab didepan juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Sumatera Selatan Tahun 2022. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas provinsi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.38
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan
Prioritas Provinsi Tahun 2022

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
1.	Percepatan penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Stunting		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
			Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Percepatan penurunan stunting
2.	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	• Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat • Peningkatan derajat kemandirian pangan • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan • Pemberdayaan ekonomi masyarakat • Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM • Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
3.	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;		Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan • Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi • Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit • Peningkatan kualitas pendidikan formal • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal • Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan • Pengembangan wawasan keagamaan

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
4.	Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana;		Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	• Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas • peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
			Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	• Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup • peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
5.	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan		Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	• Peningkatan kapasitas kinerja aparatur • Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih • Pemeliharaan kamtibmas

Tabel 4.39
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan
RPJMD 2021-2026

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
1.	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan SDM aparat melalui pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dan memiliki literasi teknologi informasi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip <i>the right man on the right place</i>	Peningkatan kapasitas kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional dalam rangka penyederhanaan eselonisasi dan peralihan ke jabatan fungsional)	M1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi
				Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai	
			Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu	Pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat	
			Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik	Sistem pengawasan internal	
				Peningkatan akuntabilitas kinerja ASN	
		2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Pemasyarakatan kamtibmas	
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	1. meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan	Menerapkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi	M5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mempertahankan catchment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu		
			Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumberdaya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Musi Rawas		
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya		
			Meningkatkan produksi peternakan		
		2. Meningkatnya kemandirian pangan	Memantapkan ketersediaan distribusi pangan dan keamanan pangan	Hilirisasi produk - produk unggulan	
			Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal menuju kedaulatan pangan		
		3. Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	Menyediakan dan memfasilitasi sarana prasarana perdagangan	Revitalisasi pasar	
			Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan IKM	Meningkatkan promosi produk-produk unggulan daerah	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			Meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi industri bagi IKM	Melakukan pelatihan dan magang untuk pelaku industri kecil dan menengah	
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif dan kreatif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing UKM non pertanian	Pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM non pertanian	
			Membangun kemitraan strategis antara koperasi, UMK dan UMKM	Membangun kemitraan Tripartit (masyarakat, pemerintah, dunia usaha)	
			Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi	Pemberdayaan Koperasi dan Bumdes	
		5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	- Meningkatkan kualitas data sasaran program untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran - Meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran program perlindungan sosial - Meningkatkan Kualitas SDM (PMKS)	Penanggulangan PMKS secara terpadu	
		6. Meningkatnya jumlah	Penciptaan dan pengembangan destinasi wisata	Penciptaan destinasi wisata baru	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
		kunjungan wisata		- Pengembangan destinasi wisata - Pemasaran destinasi wisata	
3.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 2. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan dan pengairan	- Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata - meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan sumber pengairan lainnya. - Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi - Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dan perbatasan meliputi bantuan stimulasi penanganan kumuh guna menuju permukiman yang sehat dan layak - Melaksanakan penataan tata kelola penanganan pemukiman kumuh di pedesaan untuk menyelaraskan pembangunan	- Membangun/ meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan jembatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan - Memprioritaskan pembangunan didesa tertinggal - mendayagunakan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat - Meningkatkan pembangunan instalasi penyediaan air minum dan air bersih - Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi - Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	M3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			yang berkelanjutan		
		3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur TIK	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Tekonologi Informasi Komunikasi (TIK)	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	
4.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pendidikan	- Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan SDM bidang kesehatan serta mayarakat berpola hidup sehat - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi serta pelaksanaan KB guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk - Meningkatnya pengendalian penyakit - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan - Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kesehatan - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat - meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak - meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan melalui deteksi dini penyakit - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melauai Program Wajib Belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	M2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan masyarakat	pendidikan termasuk kualitas SDM/Tenaga Pendidik, serta beasiswa kepada penduduk kurang mampu	
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan agama untuk menciptakan kehidupan yang agamis	- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama baik formal maupun nonformal - Mengoptimisasikan penyelenggaraan pendidikan agama serta aktivitas keagamaan	
5.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh, terpadu adil dan berkelanjutan.	M3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan
		2. Meningkatnya pelayanan kebencanaan	- Meningkatnya penanganan bencana - Mengurangi risiko bencana	- peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah - pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana	

4.7 Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan

4.7.1 Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Penyebaran kasus Corona virus Disease 2019 (covid-19) sudah mulai terdapat di Kabupaten Musi Rawas sejak bulan April 2020. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 yaitu:

1. Strategi Tata Kelola

Tata kelola pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas dipayungi dengan diterbitkannya SK Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Kabupaten Musi Rawas. Satuan tugas ini bertugas untuk pengendalian dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) di Kabupaten Musi Rawas. Secara kelembagaan, untuk setiap desa dan kecamatan telah dibentuk Posko Siaga Penanggulangan Covid-19 di 199 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan.

2. Strategi Penanganan Kesehatan

Penanganan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor hilir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan kebijakan-kebijakan pendukung untuk diterapkan di Musi Rawas seperti mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat termasuk perilaku rajin cuci tangan, serta sosialisasi physical distancing dan mengurangi kerumunan dan keramaian. Selain itu, sesuai dengan program pemerintah pusat telah diadakan program pemberian vaksin kepada masyarakat yang dilakukan secara bertahap.

Di sektor hulu dilakukan penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracking yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri, dan isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang

membutuhkan layanan definitif di rumah sakit.

3. Strategi Penyediaan Jaminan Sosial

Penyediaan jaminan sosial dilaksanakan berupa pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi covid 19. Bentuk bantuan sosial yang diberikan berupa paket sembako. Barang yang diberikan kepada masyarakat dibeli dari masyarakat petani di Kabupaten Musi Rawas, sehingga selain penyediaan jaminan sosial juga secara tidak langsung berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi masyarakat. Adapun kriteria masyarakat penerima bantuan terdiri dari :

- Masyarakat yang sudah terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Masyarakat miskin baru akibat pandemi covid-
- Masyarakat terdampak karena profesi (pekerja seni dan pelaku wisata)
- Masyarakat lain yg dipandang perlu untuk dibantu sesuai usulan pemerintah desa/kelurahan

4. Strategi Pemulihan Ekonomi

Melalui stimulus yang diberikan kepada masyarakat, berupa bantuan modal usaha dan prasarana sebagai upaya penguatan dan optimalisasi produktivitas sektor-sektor strategis di Kabupaten Musi Rawas yaitu sektor pertanian dalam arti luas, meliputi tanaman padi sawah irigasi, perkebunan karet, kopi, sawit dan lain-lain, budidaya ikan tawar dan peternakan. Selain itu, stimulus yang dimaksud, diberikan juga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Kriteria penerima bantuan ini berdasarkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan.

4.7.2 Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisirkan, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.

2. Tanpa adanya kelaparan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.

4. Pendidikan berkualitas.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.

5. Kesetaraan gender.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus

mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.

6. Air bersih dan sanitasi layak.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7. Energi bersih dan terjangkau.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomiberkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10.. Berkurangnya kesenjangan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

11. Kota dan komunitas berkelanjutan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan perubahan iklim.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,

14. Ekosistem laut.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem daratan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 4.21 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs

Tabel 4.40
Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
2	Tanpa adanya kelaparan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan	Percepatan penurunan stunting

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
		kemiskinan	
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	• Peningkatan kualitas pendidikan formal • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal
5	Kesetaraan gender.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi
6	Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
7	Energi bersih dan terjangkau	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan penanganan pemukiman kumuh
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat • Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM
10	Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	• Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
13	Penanganan perubahan iklim	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.7.3 Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh OPD dengan didukung Tim Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain :

- Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG)
- Pencanaan Musi Rawas sebagai Kabupaten layak anak,
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/ meminimalisasir kematianIbu dan bayi.
- Kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu

pemberdayaan masyarakat berbasis gender, serta

- Koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan diMusi Rawas meliputi PKK, DWP, dan GOW.

Tabel 4.41
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarustamaan Gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	• Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		• Program Perlindungan Perempuan	1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.7.4 Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
- 3) Pemanfaatan teknologi bagi aparatur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- 4) Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan

- 1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

4.8 Arah Pengembangan Kecamatan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah seperti kandungan sumber daya alam, perbedaan demografis, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

4.8.1 Kecamatan BTS Ulu

Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu merupakan salah satu kecamatan di bagian selatan wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas. Kecamatan ini merupakan pecahan dari wilayah Kecamatan Muara Kelingi. Luas Total Kecamatan ini adalah 751,53 Km² dengan jumlah penduduk 30.453 (Jiwa). Untuk mencapai ibu kota kecamatan ini dapat ditempuh dengan jalur darat.

Tabel 4.42
Rencana Pembangunan di Kecamatan BTS Ulu
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Optimalisasi Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK BTS Ulu-Desa Bangun Jaya, Desa Trijaya	Dinas PUCKTRP
2	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu	Dinas PUCKTRP
3	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Multifungsi Sungai Musi (TMMD)	Dinas PU Bina Marga
4	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kembang Tanjung - Batas Lahat (DAK Reguler)	Dinas PU Bina Marga
5	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Spg Pelawe - Pelawe (DAK Reguler)	Dinas PU Bina Marga
6	Peningkatan Jalan SP. 9 Bangun Jaya - SP. 3 Tri Mukti-Batas Lahat (K.105)	Dinas PU Bina Marga
7	Peningkatan Jalan Desa SP.8 Trijaya	Dinas PU Bina Marga
8	Peningkatan Jalan Kelurahan SP.9 Bangun Jaya	Dinas PU Bina Marga

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
9	Pembangunan Jembatan Gantung Multifungsi Sungai Musi Desa Pelawe (Tahap V)	Dinas PU Bina Marga
10	Pembangunan Box Culvert Desa Sungai Naik - Pangkalan Tarum	Dinas PU Bina Marga
11	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona I	Dinas PU Bina Marga
12	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
30	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan Masjid Al Mutaqqin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Pembangunan Masjid Ar Bain	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Pembangunan Masjid Miftahul Jannah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Pembangunan Masjid Nurul Huda	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
36	Rehab Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Pembangunan Tangga Beton ke Sungai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Penambahan Ruang Kelas Baru (APBD)	Dinas Pendidikan
39	Pembangunna Ruang UKS (DAK)	Dinas Pendidikan
40	Pembangunan ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan
41	Pembanguna ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
43	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
44	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Penggadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
45	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
46	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya)	Dinas Pendidikan
47	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Pembangunan Ruang UKS (DAK)	Dinas Pendidikan
48	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Pembangunan Ruang UKS (DAK)	Dinas Pendidikan
49	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
50	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
51	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
52	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Pembangunan rumah dinas guru (DAK)	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
53	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Pembangunan rumah dinas guru (DAK))	Dinas Pendidikan
54	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Pembangunan rumah dinas guru (DAK))	Dinas Pendidikan
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Rehabilitasi Ruang kelas SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
56	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Rehabilitasi Ruang Guru SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (Rehabilitasi laboratorium IPA SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat rumah ibadah (DAK))	Dinas Pendidikan
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
62	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
63	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
65	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
66	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
68	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (Rehabilitasi ruang kepala sekolah)	Dinas Pendidikan
69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (Rehabilitasi ruang kepala sekolah)	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
70	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
71	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
72	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
73	Perahu / Kapal Penangkapan Ikan untuk Perairan darat	Perikanan
74	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Perikanan

4.8.2 Kecamatan Muara Kelingi

Kecamatan Muara Kelingi adalah merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada pada jalan lintas Sumatera dengan luas wilayah 645,81 Km² dan jumlah penduduk 43.336 Jiwa. Kecamatan ini beriklim tropis dengan ketinggian tanah lebih kurang 120 diatas permukaan laut.

Tabel 4.43
Rencana Pembangunan di Kecamatan Muara Kelingi
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Pengembangan Jaringan Pipa distribusi SPAM IKK Karya Sakti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Karya Sakti-Desa Mambang, Desa Karya Sakti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Pembangunan Talud Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Pembangunan Pagar Pura Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Kecamatan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
6	Pembangunan Jalan Desa Beliti Jaya	Dinas PU Bina Marga
7	Peningkatan Jalan Muara Kelingi - Sp. Temuan Jaya (K.131)	Dinas PU Bina Marga
8	Peningkatan Jalan Desa Lubuk Tua	Dinas PU Bina Marga
9	Peningkatan Jalan Desa Karya Teladan	Dinas PU Bina Marga
10	Peningkatan Jalan Desa Karya Mukti	Dinas PU Bina Marga

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
11	Peningkatan Jalan Desa Tanjung	Dinas PU Bina Marga
12	Peningkatan Jalan Desa Petrans Jaya	Dinas PU Bina Marga
13	Peningkatan Jalan Desa Lubuk Muda	Dinas PU Bina Marga
14	Peningkatan Jalan Desa Beliti Jaya	Dinas PU Bina Marga
15	Peningkatan Jalan Desa Pulau Panggung	Dinas PU Bina Marga
16	Peningkatan Jalan Desa Temuan Sari	Dinas PU Bina Marga
17	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pulau Panggung	Dinas PU Bina Marga
18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona III	Dinas PU Bina Marga
19	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	- Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	- Pembangunan Sarana Air Bersih (Menara Air 8M)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	- Pembangunan Sarana Air Bersih (Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan pemakaman)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan pemakaman)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan Masjid Al Amin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
33	Pembangunan Tangga Beton ke Sungai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Pembangunan ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan
35	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
36	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
39	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
40	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
41	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
42	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
43	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
44	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
45	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan Toilet SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Gedung Tempat Pendidikan)	Dinas Pendidikan
47	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Rehabilitasi Ruang Guru SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
49	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (Rehabilitasi ruang kepala sekolah)	Dinas Pendidikan
50	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
51	Rehabilitasi Puskesmas	Dinas Kesehatan
52	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
53	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
54	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
55	Perahu / Kapal Penangkapan Ikan untuk Perairan darat	Perikanan
56	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Perikanan
57	Jalan Usaha Tani	Pertanian
58	Bibit Sapi	Pertanian

4.8.3 Kecamatan Muara Lakitan

Kecamatan Muara Lakitan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Kecamatan Muara Lakitan mempunyai luas wilayah 1.963,53 Km2 dengan jumlah penduduk 41.647 Jiwa. Wilayah desa yang paling luas adalah Semangus.

Tabel 4.44
Rencana Pembangunan di Kecamatan Muara Lakitan
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Pembangunan Bronjong Kelurahan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Pengadaan Pompa Intake dan Distribusi SPAM IKK Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Lanjutan Pembangunan Gapura Perbatasan Kabupaten Musi Rawas-Musi Banyuasin di Kecamatan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Pembangunan Masjid Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
6	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Pendingan Kecamatan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
7	Rehabilitasi Kantor Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
8	Lanjutan Pembangunan Cor Beton Alun-alun Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
9	Peningkatan Jalan Semangus Baru	Dinas PU Bina Marga
10	Peningkatan Jalan Desa Prabumulih I	Dinas PU Bina Marga
11	Peningkatan Jalan Desa Pelita Jaya	Dinas PU Bina Marga
12	Peningkatan Jalan Desa Sidomulyo	Dinas PU Bina Marga
13	Peningkatan Jalan Desa Marga Baru	Dinas PU Bina Marga
14	Peningkatan Jalan Desa Semeteh	Dinas PU Bina Marga
15	Peningkatan Jalan Desa Semangus Baru (SAD)	Dinas PU Bina Marga
16	Peningkatan Jalan Desa Sungai Pinang (Dusun I)	Dinas PU Bina Marga
17	Peningkatan Jalan Desa Muara Rengas	Dinas PU Bina Marga
18	Peningkatan Jalan Desa Pendingan	Dinas PU Bina Marga
19	Pembangunan Jembatan Besi Desa Semangus Lama	Dinas PU Bina Marga
20	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona III	Dinas PU Bina Marga
21	- Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	- Pembangunan Sarana Air Bersih (Menara Air 8M)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	- Pembangunan Sarana Air Bersih (Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
30	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Pembangunan Musholah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Pembangunan Tangga Beton ke Sungai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Pembangunan ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan
36	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
37	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
38	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
39	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
41	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
43	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
44	Pembangunan Pagar Polindes	Dinas Kesehatan
45	Pembangunan Pagar Pustu	Dinas Kesehatan
46	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
47	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
48	Perahu / Kapal Penangkapan Ikan untuk Perairan darat	Dinas Perikanan
49	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Dinas Perikanan

4.8.4 Kecamatan Jaya Loka

Kecamatan Jayaloka merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Musi Rawas, Luas Total wilayah kecamatan Jayaloka adalah 160,45 km² dengan total penduduk 16.624 Jiwa. Kecamatan Jayaloka merupakan daerah aliran sungai kecuali satu desa yaitu Bumi Rejo.

Tabel 4.45
Rencana Pembangunan di Kecamatan Jaya Loka
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Margoyoso	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Rehabilitasi Kantor Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Rehabilitasi Balai Desa Bumi Rejo Kecamatan Jayaloka	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Spg Jayaloka - Marga Tani (DAK Reguler)	Dinas PU Bina Marga
6	Peningkatan Jalan Ngestiboga II - Tambangan (K.085)	Dinas PU Bina Marga
7	Peningkatan Jalan Desa Giriyo	Dinas PU Bina Marga
8	Peningkatan Jalan Desa Kertosono	Dinas PU Bina Marga
9	Peningkatan Jalan Desa Donorejo	Dinas PU Bina Marga
10	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Margoyoso	Dinas PU Bina Marga
11	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona I	Dinas PU Bina Marga
12	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
18	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pembangunan Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan
34	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
35	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (Rehabilitasi laboratorium IPA SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Rehabilitasi rumah dinas Guru SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU SMP (DAK))	Dinas Pendidikan
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (Rehabilitasi ruang kepala sekolah)	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
41	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
42	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pembangunan PAUD Swasta (APBD)	Dinas Pendidikan
43	Rehabilitasi Puskesmas	Dinas Kesehatan
44	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
45	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Disbun
46	Bibit Sapi	Pertanian
47	Bibit Sapi	Pertanian
48	Bibit Sapi	Pertanian

4.8.5 Kecamatan Megang Sakti

Kecamatan Megang Sakti merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Musi Rawas. Luas total wilayah kecamatan Megang Sakti adalah 399,77 Km² dan jumlah penduduk 56.120 Jiwa. Wilayah kecamatan ini merupakan daerah bukan pantai dan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 120 meter diatas permukaan laut.

Tabel 4.46

Rencana Pembangunan di Kecamatan Megang Sakti Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Normalisasi Sungai Senaro	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jajaran Baru (DAK)	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Tegal Sari Kecamatan Megang Sakti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Peningkatan Jalan Desa Muara Megang (Lubuk Gulah)	Dinas PU Bina Marga
5	Pembangunan Box Culvert Desa Muara Megang	Dinas PU Bina Marga
6	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona III	Dinas PU Bina Marga
7	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
9	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
29	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
36	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
43	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
44	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46	Pembangunan Masjid Fatahul Huddah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47	Pembangunan Pagar Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48	Pembangunan Pagar Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
49	Pembangunan Ruang kelas baru (DAK)	Dinas Pendidikan
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
54	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
55	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
56	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
57	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Rehabilitasi Ruang kelas SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (Rehabilitasi laboratorium IPA SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Rehabilitasi rumah dinas Guru SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
62	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat rumah ibadah (DAK)	Dinas Pendidikan
63	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat rumah ibadah (DAK)	Dinas Pendidikan
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
65	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
66	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (Rehabilitasi ruang kepala sekolah)	Dinas Pendidikan
68	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
69	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan
70	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
71	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
72	Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Dinas Perikanan

4.8.6 Kecamatan Sukakarya

Kecamatan Sukakarya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas dengan jarak <35 Km dari Ibu kota Kabupaten Musi Rawas. Luas total wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar 121,53 Km² dan jumlah penduduk sebesar 15.452 Jiwa.

Tabel 4.47
Rencana Pembangunan di Kecamatan Sukakarya
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Rehabilitasi Kantor Desa Sugih Waras Kecamatan Sukakarya	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Peningkatan Jalan Sukakarya - Spg Marga Tani (DAK Penugasan)	Dinas PU Bina Marga
3	Peningkatan Jalan Spg. Rantau Alih - Rantau Alih - Spg Binjai (DAK Penugasan)	Dinas PU Bina Marga
4	Peningkatan Jalan Desa Bangun Rejo	Dinas PU Bina Marga
5	Peningkatan Jalan Desa Ciptodadi (Dusun Widarma)	Dinas PU Bina Marga
6	Peningkatan Jalan Rantau Alih - Marga Tani (K.089)	Dinas PU Bina Marga
7	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona I	Dinas PU Bina Marga
8	- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
12	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
22	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat toilet SMP (DAK)	Dinas Pendidikan
25	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan

4.8.7 Kecamatan Tuah Negeri

Kecamatan Tuah Negeri terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Musi Rawas. Dengan luas wilayah 263,45 Km 2 dan Jumlah Penduduk 27.521 Jiwa. Kecamatan Tuah Negeri merupakan daerah bukan pantai dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut, serta merupakan daerah hamparan karena tidak terdapat satu pun bukit wilayah ini.

Tabel 4.48
Rencana Pembangunan di Kecamatan Sukakarya
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Pengadaan Pompa Distribusi SPAM IKK Simpang Semambang	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Remyu Kecamatan Tuah Negeri	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Pembangunan Talud Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Pembangunan Talud Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Rehabilitasi Kantor Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
6	Pembangunan Balai Kampung Dusun 5 Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
7	Peningkatan Jalan dalam kecamatan tuah negeri (Dharma Sakti - Banpres, Desa Lubuk Rumbai Dusun Kerambil)	Dinas PU Bina Marga
8	Peningkatan Jalan Desa Dharma Sakti	Dinas PU Bina Marga
9	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona III	Dinas PU Bina Marga
10	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
19	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Pembangunan Talud	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan pemakaman)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Rehabiliatsi Sedang Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Ruang kelas baru (DAK)	Dinas Pendidikan
28	Pembangunna Ruang UKS (DAK)	Dinas Pendidikan
29	Pembangunna Ruang UKS (DAK)	Dinas Pendidikan
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
31	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
34	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
35	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pmgadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
36	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
37	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
38	Pembangunan area bermain TK NEGERI PEMBINA TUAH NEGERI	Dinas Pendidikan
39	Pembangunan ruang UKS TK NEGERI PEMBINA TUAH NEGERI	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
40	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
41	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan

4.8.8 Kecamatan Tugu Mulyo

Kecamatan Tugumulyo merupakan termasuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas dengan jarak tempuh lebih kurang 21 kilo meter dari ibu kota kabupaten. Luas wilayah Kecamatan Tugumulyo sebesar 67,70 Km² dengan jumlah penduduk 48.013 Jiwa.

Tabel 4.49

Rencana Pembangunan di Kecamatan Tugumulyo

Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Rehabilitasi Kantor UPT Pengairan Kecamatan Tugumulyo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Q2 Wonorejo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan B Sriaton	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Rehabilitasi Balai Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Normalisasi Sungai Desa F Trikoyo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
6	Normalisasi Sungai Desa G2 Dwijaya	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
7	Normalisasi Sungai Desa Tegalrejo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
8	Pembangunan Talud Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
9	Pembangunan Jalan ke Makam Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
10	Rehabilitasi Balai Desa V Surodadi Kecamatan Tugumulyo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
11	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Tugumulyo-Desa M Siti Harjo, Desa Sukorejo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
12	Peningkatan Kapasitas Jalan B.Sriaton - C. Nawangsasi - M.Siitiharjo (K.012) (ASPAL)	Dinas PU Bina Marga

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
13	Peningkatan Kapasitas Jalan G1 Mataram - L Sidoharjo (K.016)	Dinas PU Bina Marga
14	Peningkatan Jalan Surodadi - Tegal Rejo (DAK Penugasan)	Dinas PU Bina Marga
15	Peningkatan Jalan Kelurahan B.Srikaton	Dinas PU Bina Marga
16	Peningkatan Jalan Desa G.1 Mataram	Dinas PU Bina Marga
17	Peningkatan Jalan Desa L. Sidoharjo (Dusun I)	Dinas PU Bina Marga
18	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Tugumulyo	Dinas PU Bina Marga
19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona II	Dinas PU Bina Marga
20	Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Pembangunan ruang perpustakaan SDN 6 B SRIKATON	Dinas Pendidikan
33	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
36	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
38	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
39	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan Toilet SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
40	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
41	Pembangunan Baru Polindes	Dinas Kesehatan
42	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
43	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
44	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan
45	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan
46	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan
47	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
48	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
49	Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Dinas Perikanan
50	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
51	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
52	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
53	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
54	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
55	Jitut	Dinas Pertanian dan Peternakan
56	Bibit Kambing	Dinas Pertanian dan Peternakan
57	Bibit Kambing	Dinas Pertanian dan Peternakan
58	Bibit Sapi	Dinas Pertanian dan Peternakan
59	Pembangunan Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal	Dinas Pertanian dan Peternakan

4.8.9 Kecamatan Purwodadi

Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas dan merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Tugumulyo. Luas Kecamatan 63,25 Km² dan Jumlah penduduk sebesar 14.981 Jiwa.

Tabel 4.50
Rencana Pembangunan di Kecamatan Purwodadi
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Normalisasi Anak Sungai Lesing Besar	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa U1 Pagar Sari Kecamatan Purwodadi	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa O Mangun Harjo Kecamatan Purwodadi	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Peningkatan Jalan Purwodadi - Trikarya - Megang Sakti II (K.032)	Dinas PU Bina Marga
5	Peningkatan Jalan Desa T.2 Purwakarya	Dinas PU Bina Marga
6	Peningkatan Jalan Desa R. Rejosari	Dinas PU Bina Marga
7	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona II	Dinas PU Bina Marga
8	- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi /roncaptering	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
14	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
15	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
16	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
17	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
18	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
19	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
20	Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Dinas Perikanan
21	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
22	Jitut	Dinas Pertanian dan Peternakan
23	Alat Pertanian Jonder	Dinas Pertanian dan Peternakan
24	Bibit Sapi	Dinas Pertanian dan Peternakan
25	Pengembangan Bank Pakan Ternak Silase	Dinas Pertanian dan Peternakan
26	Pembangunan Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal	Dinas Pertanian dan Peternakan

4.8.10 Kecamatan STL Ulu Terasawas

Kecamatan STL Ulu Terawas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Secara geografis wilayah kecamatan STL Ulu berada pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. STL Ulu merupakan daerah bukan pantai dan daerah aliran sungai dan merupakan daerah bergelombang karena memiliki bukit-bukit di wilayahnya. Luas wilayah STL Ulu sebesar 596,92 Km² dan jumlah penduduk sebesar 32.987 jiwa.

Tabel 4.51

Rencana Pembangunan di Kecamatan STL Ulu Terawas Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Normalisasi Sungai Benai	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sukamana (DAK)	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK STL Ulu Terawas-Desa Babat	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Pembangunan Drainase RT.07 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Pembangunan Pagar SD 1 Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
6	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Terawas	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
7	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Tugumulyo-Desa M Siti Harjo, Desa Sukorejo	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
8	Peningkatan Jalan Desa STD	Dinas PU Bina Marga
9	Peningkatan Jalan Desa Sukarejo	Dinas PU Bina Marga
10	Peningkatan Jalan Desa Babat	Dinas PU Bina Marga
11	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona II	Dinas PU Bina Marga
12	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Pembangunan Pagar Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan Pagar Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Pembangunan ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan
22	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
23	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
24	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
27	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan
29	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
30	Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Dinas Perikanan
31	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
32	Bibit Sapi	Dinas Pertanian dan Peternakan
33	Pembangunan Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam	Dinas Pertanian dan Peternakan
34	Pembangunan Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal	Dinas Pertanian dan Peternakan
35	Pembangunan Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal	Dinas Pertanian dan Peternakan
36	Pembangunan Sumur Bor Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal	Dinas Pertanian dan Peternakan

4.8.11 Kecamatan Sumber Harta

Tabel 4.52

Rencana Pembangunan di Kecamatan Sumber Harta
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Deras II (DAK)	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Peningkatan Jalan Desa Madang	Dinas PU Bina Marga
3	Pembangunan Jembatan Sungai Malus Desa Sukarami	Dinas PU Bina Marga
4	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona II	Dinas PU Bina Marga
5	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAKReguler)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Rehab Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Rehab Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Pembangunan Ruang kelas baru (DAK)	Dinas Pendidikan
9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
16	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
18	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
19	Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Dinas Perikanan
20	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan

4.8.12 Kecamatan Muara Beliti

Kecamatan Muara Beliti adalah salah satu kecamatan yang terletak di selatan Kabupaten Musi Rawas dan merupakan Ibukota Kabupaten. Secara geografis wilayah kecamatan ini bukan pantai dengan ketinggian <200 Meter di atas permukaan laut dan menjadi daerah yang dilalui aliran sungai. Luas total wilayah kecamatan Muara Beliti 175,62 Km² dengan jumlah penduduk 27.070 Jiwa.

Tabel 4.53
Rencana Pembangunan di Kecamatan Muara Beliti
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Pembangunan Landscape Kantor Dinas PU CKTRP	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Pembangunan Gedung Kejaksaan	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor ATR/ BPN Kabupaten Musi Rawas	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
4	Pengadaan Stabilizer 150 KVA, 3 Phase SPAM IKK Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
6	Pembangunan Gedung Nahdhatul Ulama Kabupaten Musi Rawas (Tahap II)	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
7	Rehabilitasi Rumah Imam/ Marbot Masjid Darussalam Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
8	Pembangunan Talud TPU Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
9	Pembangunan Pagar TPU Kelurahan Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
10	Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
11	Pembangunan Pagar TPU Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Beliti	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
12	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Muara Beliti-Desa Bumi Agung, Desa Wonorejo, Desa Tambah Asri	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
13	Peningkatan Jalan Muara Beliti - Durian Remuk - Muara Kati Lama (K.009/K.010)	Dinas PU Bina Marga
14	Peningkatan Jalan dalam Kecamatan Muara Beliti (Komplek Perkantoran,Perumahan)	Dinas PU Bina Marga
15	Peningkatan Jalan Desa Air Lesing	Dinas PU Bina Marga
16	Pembangunan Box Culvert Desa Mana Resmi	Dinas PU Bina Marga
17	Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Muara Beliti Baru	Dinas PU Bina Marga
18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona I	Dinas PU Bina Marga
19	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
24	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Pembangunan Masjid	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Rehab masjid As-Sasunajah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Pembangunan Ruang kelas baru (DAK)	Dinas Pendidikan
31	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
32	Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	Dinas Pendidikan
33	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
35	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
39	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
40	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
41	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
42	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
43	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
44	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
45	Pembangunan Polindes	Dinas Kesehatan
46	Pembangunan Gedung Farmasi RSUD	Dinas Kesehatan
47	Rehabilitasi Puskesmas	Dinas Kesehatan
48	Rehabilitasi Polindes	Dinas Kesehatan
49	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
50	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan
51	Bibit Kambing	Dinas Pertanian dan Peternakan
52	Bibit Sapi	Dinas Pertanian dan Peternakan

4.8.13 Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Kecamatan TPK merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas dan merupakan kecamatan dengan jarak tempuh 26 Km dari Ibu Kota Kabupaten melalui transportasi darat. Luas Wilayah Kecamatan TPK sebesar 326,42 Km² dan Jumlah penduduk 12.616 Jiwa.

Tabel 4.54

Rencana Pembangunan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Pengadaan Pompa Intake SPAM IKK Tiang Pumpung Kepungut	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Pengadaan Stabilizer 100 KVA, 3 Phase SPAM IKK Tiang Pumpung Kepungut	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Pembangunan Taman Olahraga Desa Muara Kati Kecamatan TPK	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
4	Pembangunan Pagar Kantor Camat Tiang Pumpung Kepungut	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
5	Peningkatan Jalan Simpang Gegas - Sugih Waras (K.076)	Dinas PU Bina Marga
6	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona I	Dinas PU Bina Marga
7	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Pembangunan Talud	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
10	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
14	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
15	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Penggadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
16	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Pembangunan ruang laboratorium komputer)	Dinas Pendidikan
18	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya)	Dinas Pendidikan
19	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotannya SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan Toilet SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
21	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan

4.8.14 Kecamatan Selangit

Kecamatan Selangit merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yang sangat strategis karena dilalui jalur lintas Sumatera, yaitu jalu darat yang menghubungkan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dengan Jambi sampai dengan Banda Aceh. Luas wilayah Kecamatan adalah 717,33 Km 2 dan umlah penduduk sebesar 19.553 Jiwa.

Tabel 4.55
Rencana Pembangunan di Kecamatan Selangit
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Sub Kegiatan	OPD
1	Lanjutan Pembangunan Kantor Koramil Selangit	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
2	Lanjutan Pembangunan Polsubsektor Selangit	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
3	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona II	Dinas PU Bina Marga
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket Pengadaan Paralatan TIK untuk 116 Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan
5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan media pendidikan untuk 114 sekolah)	Dinas Pendidikan
6	Pembangunan ruang kelas baru SMPN (DAK)	Dinas Pendidikan
7	Pengadaan Perlengkapan Siswa Baju Seragam SMP (7758 Stel)	Dinas Pendidikan
8	Pembangunan Pagar Polindes	Dinas Kesehatan
9	Rehabilitasi Puskesmas	Dinas Kesehatan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dari hasil Musrenbang Tahun 2021, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2022 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2022. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada Tahun 2022 adalah pencapaian target prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut tertuang dalam daftar program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, karena bersifat indikatif maka implementasinya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, berikut rencana pembiayaan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	FOKUS	Program Prioritas	PAGU INDIKATIF (Rp)	Perangkat Daerah				
1.	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur 2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	• Peningkatan kapasitas kinerja aparatur	55.223.770.422	Seluruh Perangkat Daerah				
			• Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	85.325.311.267					
			• Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	40.647.336.000					
			• Pemeliharaan kamtibmas	39.698.664.000					
Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 1				220.895.081.689					
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian 2. Meningkatnya kemandirian pangan 3. Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian 5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS 6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	• Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	45.431.599.826	1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi UKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. DPMPTSP 8. BPPRD 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 10. Dinas Sosial 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
			• Peningkatan derajat kemandirian pangan	8.765.437.540					
			• Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	4.982.396.723					
			• Pemberdayaan ekonomi masyarakat	13.234.450.701					
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	3.230.602.246					
			• Penurunan angka kemiskinan	395.280.942.041					
			• Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	4.965.056.851					
			Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 2				475.890.485.928		

NO	PRIORITAS	FOKUS	Program Prioritas	PAGU INDIKATIF (Rp)	Perangkat Daerah
3.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 2. Meningkatnya infrasturkur keciptakarya dan pengairan 3. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur TIK	• Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas	117.346.881.546	1. Dinas PU BM 2. Dinas PUCKTRP dan Pengairan 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 6. Dinas Lingkungan Hidup
			• peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	50.842.826.737	
			• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	17.747.806.000	
			• Peningkatan penanganan pemukiman kumuh	63.773.434.551	
			• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	4.497.760.173	
Junlah Pagu Indikatif Prioritas 3				254.208.709.007	
4.	Pembangun an Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan	249.883.281.342	1. Dinas Kesehatan 2. RS. Dr. Sobirin 3. Dinas Pendidikan 4. Setda (Bagian Kesra) 5. Badan Kesatuan Bangsa Politik 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
			• Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi	7.354.340.915	
			• Percepatan penurunan stunting	4.152.748.600	
			• Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit	252.507.000	
			• Peningkatan kualitas pendidikan formal	444.293.379.090	
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik	470.874.000	

NO	PRIORITAS	FOKUS	Program Prioritas	PAGU INDIKATIF (Rp)	Perangkat Daerah
			• Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal	1.051.811.000	
			• Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan	15.263.456.578	
			• Pengembangan wawasan keagamaan	4.443.293.572	
Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 4				727.165.692.097	
5.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya pelayanan kebencanaan	• Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Program Penanggulangan Bencana	10.233.300.336 1.993.047.706	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas PUCKTRP 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4. Dinas Pertanian dan Peternakan 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 5				12.226.348.042	
Jumlah				1.690.386.316.763	

Selanjutnya pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tetap mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 yaitu: 1) Urusan Kesehatan, 2) Urusan Pemulihan Ekonomi, dan 3) Urusan Perlindungan Sosial . Strategi – strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam RKPD 2022 dialokasikan sebesar 6,64% dari Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas atau Rp. 112.288.099.389 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Rencana Alokasi Pendanaan untuk penanganan Covid-19
Tahun 2022

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
Pemulihan Ekonomi				16.885.695.550	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29.045.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Ko ta	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.999.950	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengendalia n Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	74.997.000	
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggar aan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan	Pameran Dagang Nasional	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta			
	Program Standardisasi Dan Erlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	110.409.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal	65.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/Ko ta	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	35.000.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	75.000.050	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Kabupaten/ Kota			
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	64.999.500	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai	42.087.750	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi		
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	77.325.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	99.930.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	129.349.850	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	190.263.400	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	300.358.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	209.051.400	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.471.162.950	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.447.685.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	950.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	828.987.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	159.620.700	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	715.327.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.544.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	71.689.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	99.400.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.561.243.900	Dinas Pertanian dan Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana man	440.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembang an Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	115.332.000	Dinas Perkebunan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/Ko ta	Pencegahan. Penanganan Kebakaran Lahan. dan Gangguan Usaha Tanaman pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	52.667.500	Dinas Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	85.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	25.000.000	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	527.155.000	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidaya an Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya. Lokasi. dan/atau Manfaat atau	15.000.000	Dinas Perikanan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Kabupaten/Kota	Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana. Semi Intensif. dan Intensif. serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	855.000.000	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.900	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.486.900	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.200	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha	Penyediaan Data dan Informasi Usaha	15.001.900	Dinas Perikanan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Pemasaran Hasil Perikanan	Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	Dinas Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	84.747.600	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	227.177.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	60.345.400	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pembinaan Lembaga Adat yang	Pembinaan Sumber Daya Manusia.	1.018.007.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga. dan Pranata Adat		
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	60.327.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.044.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.090.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	45.629.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	63.267.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	55.936.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29.045.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Ko ta	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.999.950	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengendalia n Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bidang Kesehatan				89.269.885.382	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.420.000.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	139.260.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.060.740.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.550.000.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	264.746.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.236.645.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat. Vaksin	2.833.500.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.496.562.000	Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85.000.000	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	164.062.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199.032.700	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	630.713.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	129.242.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	108.811.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.725.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	122,975,000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.158.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	266.781.600	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	820.015.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	115.989.200	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	171.413.600	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	247.400.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	35.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.000.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	203.357.820	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	634.905.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.438.127.262	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.000.000	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	430.000.000	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	500.000.000	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	350.000.000	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	150.000.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000	Dinas Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.020.000.000	Dinas Kesehatan
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.000.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30.000.000	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	137.152.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh ustri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk akanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	146.390.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	215.207.000	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	37.300.000	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	Rs. dr. Sobirin
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	908.800.200	Rs. dr. Sobirin
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.239.850.000	Rs. dr. Sobirin
Bidang Perlindungan Sosial				6.132.518.457	
	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	65.789.500	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Terpencil (KAT)			
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	33.600.000	Dinas Sosial
		Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64.033.600	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.260.600	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	524.971.200	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Ko ta untuk dipulangkan ke Desa/Kelurah an Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.999.900	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	79.153.400	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	38.449.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	133.678.700	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	53.757.200	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	59.400.000	Dinas Sosial
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	453.851.600	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	60.124800	Dinas Sosial
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	285.801.000	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.675.161.900	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	107,107,000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Ko ta	Penyediaan Makanan	102.900.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	63.262.600	Dinas Sosial
		Penyelenggar aan Pemberdayaa n Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Ko ta	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	205.499.000	Dinas Sosial
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	26.716.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	52.000.150	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	18,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah					

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam hal pembiayaan pembangunan daerah juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Program dan Kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) pada tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan
Dengan Pembiayaan Bersumber Dari Corporate Social Responsibility (CSR)
Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan	Volume	Lokasi	Perusahaan
1	Rehab Masjid Al-Barokah	1 Unit	Desa Megang Sakti	Bank Sumsel Babel, PT SM
2	Rehab Masjid Baitul Mukmin	1 Unit	Desa Megang Sakti	Bank BRI
3	Rehab Masjid Ar-Rahman	1 Unit	Desa Petunang	PT. WAS dan PT Tropik
4	Pembuatan WC	4 Pintu	Desa Petunang	PT. SAS
5	Rahab Masjid	1 Unit	Desa Ciptodadi	Bank Mandiri
6	Rahab Masjid Nurul Falaq	1 Unit	Desa Sukowarno	PT. PHML
7	Rehab Masjid Molek	1 Unit	Desa Muara Lakitan	PT. SMS
8	Pengerasan Jalan Usaha Tani	1.500 M	Desa Babat	PT. Evan Lestari
9	Pembangunan Ruang Guru dan Toilet	2 Unit	Desa Sri Pengantin	PT. Charoen Pokphand Indonesia
10	Rehab Masjid Kebur Jaya	1 Unit	Desa Kebur Jaya	PT AKL
11	Pembangunan Jalan Cor Semen	400 M	Desa Anyar Kec. Muara Lakitan	PT. Bina Sain

Dari usulan rencana kerja dan pendanaan daerah melalui perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.4
Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah
Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Rencana Pendanaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	445.816.064.090,00
2	Dinas Kesehatan	163.773.963.629,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	87.121.315.713,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan	68.590.632.737,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	117.346.881.546,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	63.773.434.551,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.815.294.523,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.993.047.706,00
9	Dinas Sosial	9.728.920.266,00
10	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.043.151.731,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.201.513.311,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	8.765.437.540,00
13	Dinas Lingkungan hidup	10.233.300.336,00
14	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.543.718.638,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.938.529.613,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.747.598.515,00
17	Dinas Perhubungan	4.497.760.173,00
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	6.071.843.942,00
19	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	3.230.602.246,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.107.606.270,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.884.771.323,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.965.056.851,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.177.171.944,00
24	Dinas Perikanan	7.076.069.873,00
25	Dinas Pertanian dan Peternakan	30.330.435.958,00
26	Dinas Perkebunan	8.025.093.995,00

No	Perangkat Daerah	Rencana Pendanaan (Rp)
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.982.396.723,00
28	Sekretariat Daerah	54.086.365.796,00
29	Sekretariat DPRD	84.625.869.016,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.336.057.725,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	370.462.734.161,00
32	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	9.765.700.958,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.560.911.992,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.468.749.743,00
35	Inspektorat	17.073.978.167,00
36	Kecamatan BTS ULU	2.617.105.140,00
37	Kecamatan Muara Kelingi	2.670.424.819,00
38	Kecamatan Muara Lakitan	2.489.260.766,00
39	Kecamatan Jayaloka	2.515.364.142,00
40	Kecamatan Megang Sakti	3.535.381.034,00
41	Kecamatan Sukakarya	1.331.704.532,00
42	Kecamatan Tuah Negeri	1.387.420.418,00
43	Kecamatan Tugumulyo	2.853.824.283,00
44	Kecamatan Purwodadi	3.343.239.209,00
45	Kecamatan STL ULU Terawas	2.168.849.162,00
46	Kecamatan Sumber Harta	1.805.742.037,00
47	Kecamatan Muara Beliti	2.292.512.000,00
48	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.516.527.175,00
49	Kecamatan Selangit	2.253.687.173,00
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.443.293.572,00
JUMLAH		1.690.386.316.763,00

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 beserta pergeseran/alokasi anggaran sesuai urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah diuraikan secara rinci pada tabel berikut:

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja berfungsi untuk:

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan daerah/perangkat daerah;
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja;
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
1	Indeks RB	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB Ket : -AA : nilai >90-100, Predikat istimewa -A : Nilai > 80-90, predikat Sangat Baik -BB : Nilai .70-80, predikat Baik -B : Nilai >60-70, predikat Cukup Baik -CC : Nilai >50-60, predikat Cukup -C : Nilai >30-50, predikat Buruk -D : Nilai 0-30, predikat Sangat Buruk	55,62 (CC)
2	Nilai SAKIP	Ukuran untuk		BB

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
		mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB	(70,01)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	$= (15\%n1) + (20\%n2) + (15\%n3) + (20\%n4) + (15\%n5) + (15\%n6)$ n1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran n2 = pengelolaan anggaran belanja dalam APBD n3 = transparansi pengelolaan keuangan daerah n4 = penyerapan anggaran n5 = kondisi keuangan daerah n6 = opini BPK atas LKPD	81,51
4	Indeks SPBE	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	4,2-5,0 = memuaskan 3,5-<4,2 = sangat baik 2,6-<3,5 = baik 1,8-<2,6 = cukup <1,8 = kurang	2.95
5	Indeks Profesionalitas ASN	Indek profesionalitas aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara kompetensi pejabat, kinerja pejabat, kompensasi dan kedisiplinan	IP = IP1 +IP2+IP3+IP4 Keterangan : IP= Indeks Profesionalisme -IP 1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi -IP2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi -IP3=Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja -IP4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	62,92
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	=nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah	83,44 (A)
7	Indeks Pendidikan	Gambaran secara umum untuk mengetahui perkembangan pendidikan	$= \left(\frac{I\ RLS - I\ HLS\ (min)}{2} \right)$ I RLS = Indeks rata-rata lama sekolah I HLS(min)= Indeks harapan lama sekolah minimal	69,39
8	Indeks kesehatan	Sebagai indikator untuk menilai kondisi	$I\ Kesehatan = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmaks - AHHmin}$	79,2

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
		kesehatan masyarakat.		
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara membandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	IPG = Nilai IPM perempuan/nilai IPM laki-laki Ket: Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.	87.45
10	Kabupaten Layak Pemuda	Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem layanan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda	Hasil penelitian dan penilaian Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pratama
11	Status Kabupaten Layak Anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,	Hasil penilaian dari Kementerian PPPA	650 Pratama

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
		masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak		
12	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Indeks komposit dari persentase jumlah penegakan perda dan persentase penanganan unjuk rasa dalam satu tahun	$= \% \text{jumlah penegakan perda} + \% \text{penanganan unjuk rasa}$	100%
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%	73
14	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya (Benda atau tak berbenda) yang merupakan jati diri suatu masyarakat, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang	Adapun cara pengukuran Persentase warisan budaya dilestarikan adalah $\frac{\text{jumlah warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ter data}} \times 100\%$	70
15	Indeks Budaya Literasi Daerah	Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkatan budaya membaca dan keilmuan serta keberadaan dan kondisi perpustakaan	$= (\text{UPLM}/\text{AM}) \times 100\%$ UPLM = Unsur pembangunan literasi masyarakat yang terdiri dari Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tingkat kunjungan ke perpustakaan, perpustakaan berSNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. AM= Aspek masyarakat	30
16	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	Hubungan antar ruas jalan dengan ruas jalan lainnya, yang menghubungkan satu	$\frac{\text{Jumlah jalan kondisi baik} + \text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Total Jumlah Jalan} + \text{Jumlah Jembatan}} \times 100\%$	80,27

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
		wilayah dengan wilayah yang lainnya dengan tingkat kemantapan dan sebagai salah satu indikatornya		
17	Indeks Infrastruktur dasar	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik	Persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, rasio elektrifikasi	92,19
18	Indeks Sumber Daya Air	Penilaian kinerja sistem irigasi suatu wilayah yang meliputi prasarana fisik, prasarana penunjang, personil, dokumentasi, dan kelembagaan P3A. Semakin tinggi indeks yang dicapai maka dapat dikatakan kinerja semakin baik	Persentase indeks prasarana fisik, indeks prasarana penunjang, indeks dokumentasi, indeks produktivitas tanam, indeks P3A dan indeks organisasi personalia	52
19	IKLH	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	69,90
20	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW adalah penilaian kesesuaian realisasi penataan ruang terhadap rencana peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW. Semakin tinggi persentase yang	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	96

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
		dicapai maka tingkat ketaatan dinilai semakin baik.		
21	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	Angka yang menunjukkan bahwa semakin tinggi bencana yang tertangani maka semakin tinggi juga persentase dampak penurunan resiko bencana	Bencana yang tertangani x Jumlah Bencana tiap tahun	50
22	PDRB sektor pertanian	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang} - \text{PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp.6.057,19 milyar
23	PDRB sektor Industri	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sekarang} - \text{PDRB ADHK lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}} \times 100$	1682,29
24	PDRB sektor perdagangan	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang} - \text{PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}} \times 100$	982,5
25	Persentase peningkatan investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25 tahun 2007	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang} - \text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}} \times 100$	8

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2022
26	Angka kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$(Pa) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ $a = 0,1,2$ z =garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan ($i=1,2,...q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	13.2
27	Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	Tingkat Pengangguran Terbuka = (Jumlah pengangguran/Angkatan Kerja) x 100%	3.21
28	Indeks Ketahanan Pangan	Capaian ketahanan Pangan dan Gizi Kab/Kota/provinsi dan peringkat (rangking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain	Hasil hitungan food security and Vulnerability (FSVA) yaitu analisis ketahanan dan kerentanan Pangan	77,94
29	Persentase peningkatan Desa Maju	Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.	Jumlah desa maju/Total desa dalam Kabupaten Musi Rawas x 100	89,57

Tabel 6.2

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
I	Urusan Wajib	
1	Terkait Pelayanan Dasar	
	Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/ TK (%)	68,50
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	113,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	103,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	98,30
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	97,50
	Persentase Sekolah SD dan SMP terakreditasi A (%)	30,00
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP- SD/MI/Sederajat	21,00
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP- SMP/MTs/Sederajat	26,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (%)	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100,00
	Kesehatan	
	Angka harapan hidup	69,01
	Angka kematian Ibu	88,09
	Angka Kematian Bayi	3,2
	Prevalensi Stunting	8%
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mnedapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
	Rs. dr. Sobirin	
	Indeks Kesehatan (%)	73.4
	Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	84%
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PU Bina Marga	
	Persentase Pembangunan Jalan	19,70
	Persentase Peningkatan Jalan	16,57
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	17,89
	Persentase Pembangunan Jembatan	10,00
	Persentase Peningkatan Jembatan	16,67
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	15,79
	PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak (%)	98,66
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	98,75
	Rasio Elektrifikasi (%)	93
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	65
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	pokok air minum sehari-hari (%)	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100
	Indeks Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan Yang Terlindungi (%)	62
	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	96
	Persentase gedung negara beserta sarana penunjang yang berfungsi baik (%)	93,75
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	97
	Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)	22.5%
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	20%
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	60
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota (SPM)	100%
	Persentase Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota (SPM)	100%
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	91
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	91
	Persentase pendampingan Pelayanan pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	89
	cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	90
	Dinas Sosial	
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	91
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	94,5

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	91
	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100
	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100
	Urusan Wajib	
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,23
	Angka Angkatan Kerja (Orang)	216482
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,21
	Cakupan Tenaga Kerja Terlatih (%)	288
	Cakupan Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	75
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
	Angka partisipasi angkatan kerja perempuan	77,57
	Persentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah	9,24
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,000476
	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	0,000552
	Pangan	
	Dinas Ketahanan Pangan	
	Skor PPH Ketersediaan Pangan	90,10 %
	Skor PPH Konsumsi Pangan	90,74 %
	Pertanahan	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase luas lahan bersertifikat	70
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah negara	100
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	lingkungan hidup	
	Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Air	63.46
	Indeks Kualitas Udara	90.48
	Indek Tutupan Hutan dan Lahan	1.65
	Persentase Sampah yang dikelola (%)	42.91
	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	31.00
	Persentase penurunan Emisi GRK (%)	64
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	66.33%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92%
	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	10%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Permerintah Desa	
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	76%
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	76%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	52
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) (%)	19
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) (%)	77,54
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52,3

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Perhubungan	
	Dinas Perhubungan	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	87
	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	47
	Komunikasi dan informatika	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Persentase penuntasan blank spot area (%)	85
	Persentase pengembangan dan pemanfaatan aplikasi (%)	79
	Persentase layanan penyebaran informasi pembangunan daerah (%)	80
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Persentase Koperasi Aktif (%)	70
	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,27
	Penanaman Nodal	
	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
	Realisasi Nilai Investasi	9,1 T
	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
	Persentase Prestasi Pemuda	77%
	Persentase Prestasi Olahraga	82%
	Persentase Prestasi Keparamukaan	72%
	Statistik	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Jumlah Ketersediaan data/informasi/statistik daerah	4
	Persandian	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	45

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Kebudayaan	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Pelestarian budaya Musi Rawas	67,8
	Perpustakaan	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	47,17
	Jumlah Koleksi naskah kuno yang terlestarikan	1,00
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terlestarikan	9,00
	Arsip	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Rata- rata nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	70,00
II	Urusan Pilihan	
	Kelautan dan Perikanan	
	Dinas Perikanan	
	Persentase peningkatan produksi perikanan per tahun	0,5%
	Persentase luas lahan dilakukan intensifikasi	0,005%
	Persentase luas lahan dilakukan ekstensifikasi	0,0005%
	Pariwisata	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	72,8
	Pertanian	
	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Peternakan (%)	3

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Dinas Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Perkebunan (%)	
	Persentase peningkatan produksi karet	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1
	Perdagangan	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	
	PDRB Sektor Perdagangan (Rp x M)	982,50
	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan (%)	4
	Tingkat Inflasi (%)	1,5
	Perindustrian	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	
	PDRB Sektor Perindustrian (Rp x M)	1.682,29
	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	3
	Transmigrasi	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Cakupan Tingkat Kesejahteraan Eks Transmigrasi (Juta/orang/bulan)	4,25
III	Urusan Penunjang	
	Perencanaan Pembangunan	
	Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP	24
	Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP	16
	Nilai Capaian Kinerja Pada Komponen SAKIP	13
	Keuangan	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,51

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Persentase Peningkatan PAD (Pajak Daerah) terhadap Kontribusi Pendapatan Daerah (%)	100
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	45
	Indeks Profesionalitas Aparatur	62,92
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	88,04
	Penelitian dan Pengembangan	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud	80%
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75%
	Persentase Meningkatnya Reward Hasil Riset dan Inovasi	85%
	Pengawasan	
	Inspektorat	
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP	3
	Persentase rekomendasi pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti	94,32
	Persentase PD yang memperoleh nilai Evaluasi SAKIP minimal kategori BB	56
	Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi	30
	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	95,47

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	97,46
	Level kapabilitas APIP	3
	Sekretariat Dewan	
	Persentase Propemperda yang di sahkan	82
	Indeks Kepuasan layanan Anggota DPRD	82
	Pemerintahan Umum	
	Sekretariat Daerah	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	60
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Tingkat Konflik Sara	88
	Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan	91
	Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	77
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Indeks Penurunan dampak resiko bencana	50
	Persentase Penanggulangan bencana (%)	51,27
	Kecamatan	
	Kecamatan Tugumulyo	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	87,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	92,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	87,00%
	Kecamatan Sumber Harta	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	87,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	92,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	87,00%
	Kecamatan Jayaloka	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	77,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	86,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	81,00%
	Kecamatan Megang Sakti	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	85,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan STL Ulu Terawas	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	87%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	92%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	91%
	Kecamatan Muara Beliti	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa	85,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	dan Kelurahan dalam pembangunan	
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan Selangit	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	92%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	86%
	Kecamatan Sukakarya	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	75%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	90%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82%
	Kecamatan Muara Lakitan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	77,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%
	Kecamatan Muara Kelingi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	70,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	85,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	85%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	83,00%
	Kecamatan BTS Ulu	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	77,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	86,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	81,00%
	Kecamatan Purwodadi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	82,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	91,00%
	Kecamatan Tuah Negeri	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	70,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	75%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	70,00%
	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	77,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2022
1	2	5
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	86,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	81,00%

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan perbaikan layanan kepada masyarakat partisipasi masyarakat akan meningkat dalam pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan tahapan yang sangat strategis yang merupakan tahun kedua dari RPJMD periode 2021-2026. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD 2022 dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan daerah atau Musrenbang secara berjenjang yang dimulai dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2022 baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan wajib dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2022 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;

2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya;
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD, oleh karena itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Rawas;
5. Dalam upaya sinkronisasi / sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap PD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik, lancar, transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya diharapkan tujuan utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud.

Demikian RKPD Tahun 2022 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022.

Musi Rawas, 30 Juni 2021

 **BUPATI MUSI RAWAS,**

RATNA MACHMUD